

# SEJARAH DAERAH JAWA TENGAH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1994

**Milik Depdikbud  
Tidak Diperdagangkan**

# **SEJARAH DAERAH JAWA TENGAH**

Tim Penulis

**Moh Oemar**

**Sudarjo**

**Abu Suud**

**Hartono Kasmadi**

**Soewardi**

**Hargiono**

**Bedjoanggoro**

**Wiyono**

**Annito**

**Wariyun Noto Widagdo**

**A.T. Sugito**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1994**

PERPUSTAKAAN  
DIREKTORAT PERMUSEUMAN



**PERPUSTAKAAN**

**DIREKTORAT PERMUSEUMAN**

**No. INDUK** : 142/972

**KLASIFIKASI:**

**ASAL** : H

7/895

## **SEJARAH DAERAH JAWA TENGAH**

**Tim Peneliti/Penulis :** Moh Oemar  
Sudaryo  
Abu Suud  
Hartono Kamadi  
Soewardi  
Hargiono  
Bedjoanggoro  
Wiyono  
Annito  
Wariyun Noto Widagdo  
AT. Sugito

**Penyunting :** Sri Sutjiatiningsih

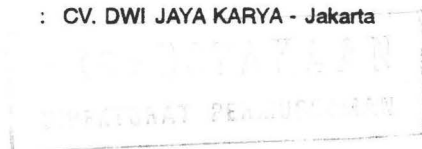
**Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang**

**Diterbitkan Oleh :** Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

**Jakarta 1994**

**Edisi 1994**

**Dicetak oleh :** CV. DWI JAYA KARYA - Jakarta







## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSNI ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

**Direktur Jenderal Kebudayaan**



---

**Prof. Dr. Edi Sedyawati**

NIP. 130 202 962

## PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baru dimulai dalam tahun 1976/1977 yang meliputi 10 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku.

Proyek ini bertujuan, “Mengadakan penggalian penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional.”

Adapun sasaran proyek ini ialah untuk menghasilkan lima buah naskah dari masing-masing daerah yakni Sejarah Daerah, Cerita Rakyat Daerah, Adat Istiadat Daerah, Ensiklopedi Musik/Tari Daerah dan Geografi Budaya Daerah. Kegiatan proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan di pusat dan daerah.

Kegiatan di pusat meliputi koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah, sedangkan kegiatan di daerah meliputi survai lapangan sampai penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1976/1977, proyek ini dapat menghasilkan 50 buah naskah dari 10 provinsi tersebut di atas.



Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari perguruan tinggi, Kanwil Dep. P dan K di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah ini.

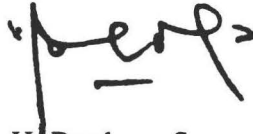
Oleh karena itu dengan selesainya naskah *Sejarah Daerah Jawa Tengah* ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Departemen P dan K Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Perguruan Tinggi di Semarang, Pemerintah Daerah Jawa Tengah, pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan, Kebudayaan Daerah Jawa Tengah, Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas: Drs. Moh. Oemar, Drs. Sudaryo, Drs. Abu Su'ud, Drs. Hartono Kasmadi, Drs. Soewardi, Drs. Hargiono, Drs. Bedjoanggoro, Drs. Widoyo MA, Drs. Annito, Drs. Wariyun Noto Widagdo dan Drs. A.t. Sugito.

Tim penyempurnaan naskah di pusat terdiri atas :

Konsultan	:	Prof Dr. I.B. Mantra Dr. Astrid S. Susanto Abdurachman Suryomihardjo
Ketua	:	Sutrisno Kutoyo
Sekretaris	:	Soenjata Kartadarmadja
Anggota	:	Mardanas S. Masjkuri Surachman Muchtaruddin Ibrahim Sri Sutjiatiningsih
Penyunting	:	Sutrisno Kutoyo Sri Sutjiatiningsih.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini, juga disampaikan terima kasih. Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan  
Pencatatan Kebudayaan Daerah,



Drs. H. Bambang Suwondo  
Nip. 130 117 589





## PENGANTAR

Kebudayaan merupakan wujud identitas bangsa. Pengembangan identitas bangsa adalah unsur utama di dalam rangka pengembangan ketahanan nasional untuk mencapai kesatuan bangsa. Meskipun rakyat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan mempunyai adat istiadat yang berlainan, hal itu tidak mengurangi rasa kesatuan, bahkan keanekaragaman itu menambah khasanah kebudayaan nasional.

Oleh sebab itu, segala warisan lama berupa sejarah daerah, cerita rakyat, adat istiadat, dan lain-lain perlu dikembangkan dan disebarluaskan, sehingga dapat dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia, agar dapat tercipta iklim dan lingkungan hidup yang lebih baik dan serasi.

Buku mengenai sejarah dan kebudayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan baru sedikit sekali, sehingga tidak memadai untuk menjadi bahan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaktahuan itu menyebabkan orang kurang menghargai kebudayaan daerah, dan tidak suka menggali dari warisan lama itu.

Orang-orang tua yang mengetahui tentang seluk-beluk kebudayaan daerahnya masing-masing banyak yang sudah meninggal. Sadar akan kerugian yang akan kita derita kalau sampai kebudayaan daerah itu tidak kita bukukan, maka Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan penelitian ke daerah-daerah dan menyusun naskah yang siap untuk diterbitkan.

Selanjutnya yang menerbitkan naskah tersebut menjadi buku ialah Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PN Balai Pustaka.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya kebudayaan nasional.

Jakarta, 1978

Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra  
Indonesia dan Daerah

## PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku *Sejarah Daerah Jawa Tengah* merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978. Proyek tersebut kemudian menerbitkannya pada tahun 1981 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian peristiwa yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Dimulai dari zaman prasejarah yang meliputi asal-usul penghuni yang pertama, teknologi, organisasi masyarakat, kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya serta kepercayaan mereka. Kemudian dilanjutkan ke periode-periode selanjutnya yaitu zaman kuna, zaman baru, abad ke-19, zaman Kebangkitan Nasional, zaman pendudukan Jepang dan zaman kemerdekaan. Masing-masing periode diuraikan tentang kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, penyelenggaraan hidup dalam masyarakat, kehidupan seni budaya, alam pikiran dan kepercayaan serta hubungan luar negeri.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama masyarakat "butuh baca" sangat berminat untuk memilikinya. Sementara itu persediaan buku cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional memberikan kepercayaan kepada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional ( Proyek IDSN )




untuk melakukan penyempurnaan,perbanyak, dan penyebaran buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Januari 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi  
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**



**Gamar Azayni Ohorella**  
NIP : 130.370.094.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan .....</b>	v
<b>Pengantar .....</b>	vii
<b>Pengantar .....</b>	xi
<b>Pengantar Cetakan Kedua .....</b>	xii
<b>Daftar Isi .....</b>	xv
<b>Pendahuluan .....</b>	1
<b>Tujuan Penelitian .....</b>	1
<b>Masalah .....</b>	2
<b>Ruang Lingkup .....</b>	3
<b>Pertanggungjawaban Ilmiah/Prosedur Penelitian .....</b>	3
<b>Hasil Akhir .....</b>	4
<b>Bab I Masa Prasejarah .....</b>	6
1.1 Asal-usul Penghuni Jawa Tengah yang Pertama .....	8
1.2 Pola Kehidupan Masyarakat Prasejarah di Jawa Tengah .....	16
1.3 Penyelenggaraan Hidup .....	22
1.4 Organisasi Masyarakat .....	24
1.5 Kehidupan Seni Budaya .....	28
1.6 Alam Pikiran dan Kepercayaan .....	30
<b>Bab II Masa Kuna (Abad Ke-1--1500) .....</b>	32
2.1 Kahidupan Pemerintah dan Kenegaraan .....	32
2.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat .....	38
2.3 Kehidupan Seni Budaya .....	45

2.4	Alam Pikiran dan Kepercayaan .....	53
2.5	Hubungan ke Luar .....	60
<b>Bab III</b>	<b>Masa Baru (1500--1800) .....</b>	<b>63</b>
3.1	Pendahuluan .....	63
3.2	Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan .....	65
3.3	Penyelenggara Hidup dalam Masyarakat .....	75
3.4	Alam Pikiran dan Kepercayaan .....	80
3.5	Hubungan Antarbangsa .....	83
<b>Bab IV</b>	<b>Masa Abad Ke-19 (1800--1900) .....</b>	<b>87</b>
4.1	Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan .....	87
4.2	Daerah-daerah Jawa Tengah dalam Abad Ke-19 .....	91
4.3	Keadaan Masyarakat dalam Abad Ke-19 .....	117
4.4	Seni Budaya .....	118
4.5	Alam Pikiran dan Kepercayaan .....	123
<b>Bab V</b>	<b>Masa Kebangkitan Nasional (<math>\pm</math> 1900--1940) .....</b>	<b>131</b>
5.1	Keadaan Pemerintah dan Kenegaraan .....	131
5.2	Kaum Pergerakan di Daerah .....	140
5.3	Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat .....	157
5.4	Kehidupan Seni Budaya .....	167
5.5	Perkembangan Agama di Jawa Tengah (1900--1942) .....	173
<b>Bab VI</b>	<b>Masa Pendudukan Jepang .....</b>	<b>198</b>
6.1	Pemerintahan dan Kenegaraan .....	198
6.2	Gerakan Perlawanan .....	202
6.3	Organisasi Sosial dan Budaya .....	202
<b>Bab VII</b>	<b>Masa Kemerdekaan .....</b>	<b>205</b>
7.1	Keadaan Pemerintah dan Kenegaraan .....	205
7.2	Penyelenggaraan Kehidupan .....	245
7.3	Kehidupan Pendidikan dan Seni Budaya .....	247
7.3.1	Kehidupan Pendidikan .....	247
7.3.2	Perkembangan Seni Budaya .....	250
7.3.3	Perkembangan Pendidikan dan Seni Budaya Setelah 1965 .....	151
7.4	Alam Pikiran dan Kepercayaan .....	252
<b>Daftar Pustaka</b> .....		<b>258</b>

## PENDAHULUAN

### *Tujuan Penelitian*

Pada masa yang lalu penulisan sejarah biasanya mengemukakan segi sejarah kenegaraan atau sejarah politik, di dalamnya dibicarakan banyak tentang sejarah raja, dinasti, peperangan, perjanjian. Walaupun sejarah politik merupakan suatu hal yang penting, tetapi penulisan sejarah pada masa lampau tersebut, hanya terlihat dari satu segi. Dalam laporan ini tim peneliti/penulis, mencoba untuk menulis sejarah daerah dalam ruang pandangan yang lebih luas, yang tidak saja membicarakan segi sejarah politik, tetapi juga membicarakan segi-segi lain dalam kehidupan masyarakat daerah.

Untuk sementara tim masih menggunakan pembabakan sejarah yang sudah lazim, tetapi di setiap pembabakan dicoba untuk menguraikan berbagai segi kehidupan masyarakat pada masanya. Pembabakan dimaksud adalah Masa Pra-Sejarah, Masa Kuno (Abad I -- tahun 1500 Masehi), Masa Baru (1500 M -- 1800 Masehi), Masa Abad Ke-19 (1800 M--1900 Masehi), Masa Kebangkitan Nasional (+ 1900 -- 1942), Masa Pendudukan Jepang (1942 -- 1945), dan Masa Kemerdekaan (1945 -- 1976 ?).

Secara garis besar, segi-segi yang akan dicoba dibicarakan adalah sebagai berikut. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan yang lazim diuraikan dalam sejarah politik. Di dalamnya berisi hal-hal, antara lain

pertumbuhan negara dan perkembangannya sehingga menjadi negara besar; susunan pemerintahan : status dari pimpinan atau pemerintahan; pengaturan di dalam negara dan hubungannya dengan negara lain, baik yang termasuk wilayah Indonesia sekarang maupun dengan dunia luar.

Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat; dalam hal ini didasarkan oleh anggapan bahwa manusia Indonesia pada umumnya sudah sejak zaman dahulu hidup bermasyarakat. Akan dicoba menguraikan, antara lain pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, organisasi masyarakat, nilai-nilai sosial dan pola kehidupan.

Kehidupan seni budaya; salah satu aspek kebudayaan adalah kegiatan kesenian yang timbul dari impul rasa indah yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam kehidupan seni budaya ini pun akan dibicarakan masalah pendidikan, yang merupakan anggapan bahwa masyarakat sudah mempunyai tradisi untuk mewariskan atau mentransfer budaya pada generasi berikutnya.

Alam pikiran dan kepercayaan sudah sejak masa kuna, masyarakat mengalami sikap kehidupan yang religius. Dicoba dibicarakan dalam laporan ini adalah latar belakang sejarahnya, sistem kepercayaan termasuk pemuka agama/kepercayaan dan kegiatan-kegiatannya.

Hubungan dengan dunia luar, akan dicoba membicarakan kaitannya dengan kehidupan masyarakat secara kompleks dengan pengaruh-pengaruh yang masuk, seperti sistem komunikasi, ilmu pengetahuan, perdagangan, kepercayaan, politik/diplomasi, dan lain-lain.

### ***Masalah***

Masalah yang dihadapi dalam pencatatan dan penelitian ini, seperti yang diuraikan di atas sebagai tujuan penelitian, terdapat juga masalah-masalah yang langsung dirasakan oleh tim.

- (1) Sulitnya sumber-sumber yang dijumpai dalam pencatatan sejarah daerah; daerah-daerah belum siap untuk menyajikan data atau bahan yang "akurat".
- (2) Pada umumnya beberapa peristiwa secara analog sama seperti sejarah/peristiwa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dan

wilayah Indonesia, sehingga mendaerahkan peristiwa tersebut terasa tidak jujur dan kurang signifikan; dalam beberapa peristiwa tidak mungkin dihindari.

- (3) Uraian cerita sejarah daerah tidak mungkin melepaskan “konteks” dan “isi” sejarahnya dengan sejarah yang beruang lingkup nasional.
- (4) Secara definisi/pembatasan sejarah itu sendiri, pada pem”babak”-an zaman kemerdekaan telah dibicarakan secara singkat peristiwa-peristiwa 1965 -- 1972, sehingga pengertian “sejarah” untuk masa ini masih “semu”

### ***Ruang Lingkup***

Kegiatan pencatatan dan penelitian ini beruang lingkup Jawa Tengah, tetapi karena keterbatasan halaman yang telah ditentukan dan jadwal yang diberikan, maka penelitian dan pencatatan ini masih membatasi pada wilayah “sampel” yang dapat diraih data yang cukup dan akurat, tanpa mengubah fakta sejarah yang telah ada dan lazim. Sampel dimaksud bukanlah batasan pada pemilihan daerah, tetapi membatasi pada data dan peristiwa yang mampu dicatat dan diteliti dalam waktu yang relatif tidak panjang.

Peristiwa kesejarahan di Jawa Tengah akan meliputi masa pra sejarah sampai masa kemerdekaan seperti telah diuraikan terdahulu. Analisis yang digunakan adalah “deskriptifhistoris” sehingga akan lebih bebas dalam mencoba menyusun dan membicarakannya.

### ***Pertanggungjawaban Ilmiah/Prosedur Penelitian***

- (1) Dalam proses penelitian dan pencatatan ini ditempuh dua cara/langkah kegiatan yakni (a) studi literatur yang merupakan kegiatan pencatatan fakta dan data daerah serta penelitian fakta dan data tersebut yang dapat digunakan dan (b) studi lapangan terbatas pada wilayah kabupaten, sebagai kegiatan tambahan/pelengkap dalam rangka pengekan fakta dan data yang telah ada, di samping mencoba akurat, lengkap dan signifikan.
- (2) Kegiatan pencatatan dan penelitian dilakukan oleh satu tim kelompok pengajar sejarah IKIP Semarang dibantu oleh beberapa orang mahasiswa.

- (3) Metode yang digunakan adalah diskriptif eksplorasi literatur dan inuiun untuk tugas penelitian lapangan.
- (4) Analisis yang digunakan adalah diskriptif-sejarah
- (5) Waktu/Jadwal Kegiatan: (a) persiapan 1 bulan,(b) menyusun draft konsep operasional 1 bulan, (c) tugas eksplorasi fakta dan data 1 bulan, (d) tugas menyusun /tertulis draft data/naskah 1 bulan, (e) penelitian draft 3 minggu, (f) editing data/naskah 2 minggu, dan (g) penyusunan laporan .... minggu

### ***Hasil Akhir***

Naskah ini merupakan hasil akhir dari rangkaian kerja yang bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Dalam bentuknya yang asli naskah ini merupakan hasil karya Tim di daerah. Kemudian oleh Tim Pusat bersama Tim Daerah diadakan penelitian dalam suatu lokakarya. Langkah berikutnya meliputi : penyempurnaan dan editing.

Pokok-pokok persoalan dalam menilai, menyempurnakan dan mengedit naskah ini, ialah sampai berapa jauh kesesuaiannya dengan cakupan tugas ataupun *terms of reference* yang meliputi dua sektor : pola penelitian dan kerangka laporan. Kemudian diperhatikan pula segi-segi : bahasa, cara penyajian, pendekatan dan materi. Dalam menilai bahasa, telah dilakukan cukup banyak perbaikan, antara lain tentang ejaan, susunan kalimat, dan istilah sehingga bahasanya menjadi lugas namun tetap menarik. Demikian pula cara penyajian telah mengalami perbaikan, sehingga sesudah diadakan perbaikan seperlunya menjadi lancar dan terbaca, suatu hal yang sungguh diperlukan untuk menjamin tetap adanya komunikasi antara penyusun naskah dengan para pembaca.

Sesuai dengan objek yang dibahas, yaitu sejarah daerah Jawa Tengah, maka sudah sewajarnya apabila digunakan pendekatan regiosentris. Tanpa cara pendekatan demikian, niscaya tidak akan tercapai sasaran yang dituju. Naskah ini sudah cukup menunjukkan cara pendekatan regiosentris ini sebagaimana terlihat di berbagai bab dan bagian-bagiannya yang memang diusahakan untuk mengungkapkan



kehidupan masyarakat, khusus di daerah Jawa Tengah pada masa lampau.

Adapun mengenai materi itu sendiri kiranya sudah dicoba untuk menggalinya dari berbagai buku kepustakaan atau bahan tertulis. Selanjutnya diadakan wawancara dengan manusia sumber yang dianggap dapat memberi bahan tentang sejarah daerah Jawa Tengah.

Secara keseluruhan naskah ini mengalami penggarapan lebih intensif terutama pada proses editing. Kemudian pada akhirnya dapat dikemukakan, bahwa naskah ini seyogyanya dianggap sebagai usaha rintisan untuk penulisan sejarah daerah Jawa Tengah yang lebih sempurna di hari kemudian.

## **BAB I**

### **MASA PRASEJARAH**

Salah satu bagian yang paling gelap dan kabur dari sejarah Indonesia ialah babakan Prasejarah, demikian pula halnya yang kita hadapi dengan zaman prasejarah di Jawa Tengah, yang berlangsung sejak adanya manusia yang menghuni daerah itu sampai kira-kira awal abad ke-8 Masehi. Rentangan jarak waktu yang sangat panjang, yang meliputi lebih-kurang 600.000 tahun di belakang kita, tanpa warisan tulisan dan langkanya peninggalan-peninggalan hasil karya manusia, menyebabkan praktis kita tidak mengetahui apapun tentang kisah manusia di daerah Jawa Tengah. Namun demikian kita yakin bahwa sebelum abad ke-8 Masehi Jawa Tengah sudah didiami oleh manusia yang dengan segala kemampuan akal budinya berjuang menghadapi segala hidupnya. Keyakinan ini timbul meskipun tidak ada warisan tulisan yang mereka tinggalkan, dengan jalan memperhatikan dan meneliti warisan visual yang merupakan sumber prasejarah itu, sebagian kecil berupa monumen di atas permukaan tanah, dan sebagian besar berbentuk barang-barang dalam tanah yang dikeluarkan setelah digali. Sudah barang tentu jumlahnya sangat langka dan tersebar secara sporadik, tidak teratur di beberapa bagian dari Jawa Tengah.

Umumnya peninggalan-peninggalan yang menjadi sumber prasejarah berupa (a) tanda-tanda kuburan, kadang-kadang berbentuk bukit, kadang-kadang disusun dari batu-batu besar atau bentuk-bentuk

lain, (b) gambar-gambar dalam gua atau bukit batu-bukit batu, (c) batu-batu berupa bangunan, (d) bekas-bekas tempat tinggal atau perumahan, (e) alat-alat kerja dan senjata, dan (f) alat-alat rumah tangga dan barang-barang lain untuk keperluan sehari-hari.

Tidak semua jenis peninggalan tersebut di atas ditemukan di Jawa Tengah, hanya beberapa jenis saja, sedangkan jumlah dan keadaannya pun kadang-kadang tidak memadai untuk dapat membantu menerangi kegelapan sejarah manusia pada waktu itu. Dalam hal ini ilmu purbakala atau arkeologi sangat besar jasanya, terutama pada waktu-waktu akhir ini kegiatan penelitian arkeologis atas daerah Jawa Tengah tampak makin meningkat. Kegiatan penelitian arkeologis itu antara lain berupa survei eksploratif, ekskavasi-eksavasi, penelitian laboratoris dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan masalah kepurbakalaan dan oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Dalam hal ini secara kebetulan daerah Jawa Tengah merupakan kancah yang menarik bagi para ahli, karena ternyata banyak menyimpan peninggalan-peninggalan dari zaman prasejarah yang sangat berharga. Penelitian arkeologis di Jawa Tengah akhir-akhir ini antara lain berupa ekskavasi-eksavasi di Gunung Wingko sebelah selatan Yogyakarta (1972, 1973, 1974), ekskavasi di Sangiran (1928 Juli 1976), ekskavasi di Ngandong (5-14 Agustus 1976), ekskavasi di Ratu Baka. Prambanan (1973), ekskavasi Waru, Rembang (1975). Semua penelitian itu meskipun belum menghasilkan kesimpulan yang pasti mengenai manusia dari perikehidupannya di Jawa Tengah dalam masa prasejarah yang jauh di belakang kita, tetapi jelas memberikan kepada kita untuk lebih banyak tahu tentang masa yang paling gelap dalam rangkaian sejarah Indonesia. Tujuan dari semua kegiatan penelitian tidak lain ialah berusaha untuk menggambarkan kembali suatu masa kehidupan manusia melalui bekas-bekas materi yang dahulu pernah memainkan peranan dalam kehidupannya. Materi peninggalan manusia yang berhasil ditemukan, diteliti, dianalisis dan ditafsirkan itu merupakan satu-satunya sumber guna menyusun suatu sejarah kehidupan manusia prasejarah yang multikompleks di mana harus dipantulkan pula kondisi rokhaniah serta sistem sosial yang melatarbelakangi ciptaan-ciptaan manusia yang diijelmakan dalam berbagai bentuk materi itu. Dengan demikian maka

peningkatan kegiatan penelitian arkeologi di Jawa Tengah itu, dan juga di daerah-daerah lain diharapkan dapat digambarkan kembali dengan jelas mengenai asal-usul penghuni yang pertama di Jawa Tengah, penghidupannya, organisasi bentuk-bentuk pernyataan kebudayaannya, organisasi bentuk-bentuk pernyataan kebudayaan yang lain serta turun-naik nasib mereka sepanjang waktu tersebut.

Namun demikian bagaimana pun harus disadari bahwa sulit sekali untuk dapat menyusun kembali gambaran mengenai sejarah kehidupan manusia prasejarah dalam segala aspeknya secara kontinyu dan agak jelas. Lebih-lebih gambaran mengenai penghidupan dalam zaman prasejarah di Jawa Tengah sangat kabur sifatnya, meloncat-meloncat tidak kontinyu secara kronologis serta banyak kekosongan yang dijumpai. Hal ini sudah barang tentu merupakan tantangan bagi para ahli arkeologi dan prasejarah untuk selalu meningkatkan penelitian dengan mempergunakan konsepsi-konsepsi baru. Agar dapat menjangkau gambaran yang lebih luas dan dalam mengenai masyarakat manusia prasejarah dalam kondisi totalnya.

### *1.1 Asal-usul Penghuni Jawa Tengah yang Pertama*

Siapa atau bangsa apa yang pertama menjadi penghuni Jawa Tengah belum diketahui secara pasti. Dalam hal ini ilmu paleoantropologi memegang peranan penting dalam membantu kita untuk mengetahui asal-usul manusia yang pertama kali penghuni Jawa Tengah, meskipun sangat terbatas kejelasannya dan masih bersifat hipotetis.

Secara kebetulan daerah Sangiran Kabupaten Sragen yang terletak di Jawa Tengah merupakan deposit fosil-fosil manusia dan binatang purba yang paling besar dan lengkap di dunia. Dengan demikian memungkinkan para ahli paleoantropologi mengadakan penelitian yang lebih luas dan lebih mendalam mengenai proses pertumbuhan evolusi manusia dibandingkan dengan penelitian yang dapat dilakukan di daerah lain di dunia ini.

Berdasarkan penelitian para ahli, bekas-bekas dari manusia dan kebudayaannya barulah terlihat pada lapisan bumi pleistocene yang berlangsung kira-kira 600.000 tahun. Selama zaman ini pulalah yang

berlangsungnya palaeolitikum atau zaman (kebudayaan) batu tua. Bekas-bekas manusia yang ditemukan dari lapisan bumi *pleistocene* terdapat di berbagai tempat di dunia. Di Indonesia sampai kini ditemukannya baru di Pulau Jawa. Dalam hal ini negeri kita, khususnya daerah lembah Bengawan Solo yang mengalir melalui daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, menduduki tempat yang luar biasa pentingnya, juga dari sudut internasional, karena fosil-fosil manusia yang ditemukan di sini ternyata berasal dari segala zaman pleistocene, sehingga nampak dengan jelas perkembangan manusia sejak dari bentuk keorangan mula-mulanya (*homonide*). Dari bagian-bagian lain di dunia temuan-temuan itu tidak memberi gambaran yang demikian lengkapnya. Temuan pertama di Indonesia yang boleh dikatakan menjadi pangkal penyelidikan-penyelidikan selanjutnya adalah temuan *pithecanthropus erectus* dalam tahun 1890 oleh E. Dubois di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, tidak jauh dari Ngawi (Madiun). Berdasarkan volume otak, beberapa bagian dari tubuhnya serta kerangka posture tubuhnya Dubois menempatkan mahluk ini di antara manusia dan kera, sedangkan berjalannya sudah tegak (*Erectus*). *Pithecanthropus erectus* itulah contoh "manusia" pertama di Pulau Jawa. Besar kemungkinan bahwa jenis manusia ini tidak terdapat di suatu daerah saja, tetapi tersebar luas di seluruh Pulau Jawa. Daerah Jawa Tengah pun juga diduga pertama kali dihuni oleh mahluk manusia jenis ini. Hanya sayang bahwa sulit sekali untuk mengetahui kehidupan mereka karena tidak adanya benda-benda peninggalan mereka yang dapat membantu menggambarkan kegiatan hidupnya. Meskipun demikian berkat ketekunan para ahli dapatlah diduga bahwa *pithecanthropus erectus* ini telah berkebudayaan palaeolitikum dengan *chopper* atau alat penetak dari batu yang kasar sebagai *leitfossielnya*. Palaeolitikum ini merupakan bentuk kebudayaan yang tertua di Indonesia. Sungguhpun pada mulanya bekas-bekas kebudayaan palaeolitikum itu hanya ditemukan di Pacitan dan Ngandong (Jawa Timur) saja, tetapi akhirnya berkat ketekunan dan ketabahan hati para sarjana, ditemukan juga sisa-sisa kebudayaan itu di Parigi dan Gombong (Jawa Tengah), Sukabumi (Jawa Barat), Lahat (Sumatera Selatan), Cabenge (Sulawesi Selatan), dan juga di Sangiran (Jawa Tengah). Temuan bekas-bekas kebudayaan palaeolitikum di beberapa tempat di Jawa Tengah

memperkuat dugaan bahwa makhluk jenis *pithecanthropus erectus* itulah yang merupakan penghuni tertua di daerah Jawa Tengah.

Banyak persamaan yang kelihatan dalam hasil kebudayaan itu, tetapi para ahli masih dapat memisahkan dan membaginya dalam dua golongan, yang didasarkan pada *leitfossiel* yang ditemukan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong.

*Leitfossiel* atau alat petunjuk kebudayaan Pacitan menurut pendapat Dr. Van Koeningswald adalah *chopper*, yaitu kapak genggam tidak bertangkai dan dipergunakan sebagai penetak. Karena *leitfossiel* itu ditemukan di permukaan bumi, tidaklah mungkin bagi para ahli menetapkan umurnya, tetapi penyelidikan yang dilakukan terus-menerus dalam waktu yang panjang akhirnya memberi juga petunjuk bahwa alat-alat itu berasal dari lapisan Trinil, yaitu lapisan tengah dari zaman *pleistoseen*. Di lapisan itu pulalah Dr. Eugene Dubois menemukan *pithecanthropus erectus*, sehingga timbullah dugaan bahwa *chooper* itu merupakan hasil daya cipta *pithecanthropus erectus*, dan merupakan alat penting bagi keperluan hidup mereka. Dugaan itu menjadi lebih mantap setelah di daerah lain yaitu di dataran Cina ditemukan pula sejumlah *chopper* yang serupa benar dengan *chopper* dari kebudayaan Pacitan di sampingnya terdapat fosil-fosil manusia yang sejenis *pithecanthropus erectus*, yaitu manusia *sinanthropus* atau *homo pekinensis*. Ditemukannya fosil manusia dan artefak berupa *chopper* atau kapak genggam di tempat yang sama itu memperkuat dugaan para ahli bahwa kebudayaan Pacitan adalah kebudayaan *pithecanthropus erectus* dalam bentuk *chopper*. Ternyata kemudian kebudayaan Pacitan itu ditemukan tanda-tandanya di beberapa bagian/daerah di Indonesia, termasuk di Daerah Jawa Tengah, seperti telah dikemukakan di atas.

Juga di Ngandong ditemukan *leitfossiel* yang serupa, yaitu *chopper* seperti yang kita lihat di Pacitan, tetapi selain itu ditemukan juga artefak-artefak yang dibuat dari tulang dan berbentuk pisau atau alat penusuk hewan. Ada juga yang dibuat dari tanduk rusa duri ikan pari. Alat-alat itu diduga dipergunakan oleh *pithecanthropus erectus* untuk (a) penusuk binatang yang akan dimakannya, (b) pengorek barang sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah dan (c) pelempar ikan yang jauh berenang di laut (sebagai harpun). Keistimewaan yang lebih utama

bagi kebudayaan Ngandong ialah ditemukannya alat-alat kecil dari batu yang indah yang dinamakan *flakes*.

Sebagaimana halnya dengan di Pacitan, juga di Ngandong segala artefak itu ditemukan di permukaan bumi, sehingga para ahli mengalami kesulitan yang serupa dalam menetapkan umur benda-benda yang mereka temukan itu, tetapi penyelidikan yang seksama akhirnya membuktikan bahwa barang-barang tersebut berasal dari zaman batu muda sehingga dapat pula dikatakan bahwa "kebudayaan Ngandong adalah kebudayaan *homo soloensis* dan *homo wajakensis* yang berbentuk *chopper* dan *flakes*.

Rupanya setelah *pithecanthropus erectus*, daerah Jawa Timur dihuni oleh *homo soloensis* dan *homo wajakensis* yang berkebudayaan batu muda. Kedua jenis manusia ini ternyata hidup dalam zaman *pleistoseen* atas dan penyelidikan yang dilakukan terutama oleh van Koeningswald dan Weidenreich menunjukkan bahwa keduanya lebih tinggi tingkat "kemanusiaannya" dari pada *pithecanthropus erectus*, bahkan mungkin sudah dapat dikatakan kedua jenis makhluk ini adalah manusia; terutama yang terakhir yaitu *homo wajakensis* hampir dapat dipastikan bahwa ia adalah *homo sapiens*. Perlu dicatat bahwa berdasar penelitian yang lebih seksama ternyata bahwa tengkorak *homo wajakensis* ini sangat berlainan dengan tengkorak bangsa Indonesia, dan bahkan banyak kesamaannya dengan tengkorak penduduk asli benua Australia sekarang. Menurut Dubois, *homo wajakensis* itu termasuk golongan bangsa Australoide, bernenek moyang *homo soloensis* dan nantinya menurunkan langsung bangsa-bangsa asli di Australia itu.

Sebelum mengungkapkan penghidupan mereka yang multikompleks itu, baiklah kita tinjau selintas mengenai sejarah pertumbuhan dan keadaan alamiah daerah Sangiran yang terkenal sebagai deposit fosil manusia dan binatang purba, pada masa yang lampau. Daerah Sangiran yang terletak di bagian timur Jawa Tengah itu perlu kiranya mendapat perhatian kita mengingat daerah itu pada zaman prasejarah Jawa Tengah telah dihuni oleh manusia meskipun dalam tingkatannya yang paling primitif. Uraian selintas mengenai keadaan alam dan perubahan-perubahannya akan memberikan gambaran latar belakang mengenai aktivitas kehidupan dan penghidupan mahluk manusia di atas daerah tersebut pada zaman yang sangat jauh di belakang kita itu.

Sangiran dengan tanahnya yang gersang itu memancarkan suatu daya tarik yang khusus. Di kalangan para ahli tempat ini terkenal dengan sebutan *Sangiran Dome* yaitu sebuah “bukit” yang karena suatu proses alam tertentu yang jarang terjadi telah mengungkapkan sebagian tabir zaman purba ribuan tahun yang telah silam.

Sisa-sisa masa kepurbaan tersebut telah diwariskan dalam kehidupan masa kini dalam bentuk fosil manusia, binatang, flora dan mineral lain. Fosil-fosil tersebut muncul dan bersebaran di bumi Sangiran, seakan-akan di sini suatu halaman dari “kitab-alam” yang tidak terobek oleh waktu dan sebagian “huruf-hurufnya” masih jelas terbaca oleh generasi masa kini. Apa yang terjadi di Sangiran ini memang merupakan suatu keistimewaan yaitu terjadinya konservasi atau penyimpanan fosil yang bertahan lama sekali. Tidak semua kehidupan di atas bumi ini mampu bertahan untuk meninggalkan bekas-bekasnya (fosil) terhadap proses penghancuran alam yang berjalan secara terus menerus sepanjang zaman.

Para ahli dalam menyelidikannya sependapat bahwa proses pemfosilan di atas bumi ini hanya terdapat pada seperlima permukaan bumi. Ini pun masih harus diperhitungkan dengan mutu manusia hewan dan fauna terhadap proses kimiawi masing-masing. Perlu diperhitungkan pula gerakan-gerakan dari dalam kulit bumi seperti erosi, gempa, ledakan dan lain-lain yang menimbulkan tekanan-tekanan raksasa yang maha dahsyat menekan hancur batu-batuan yang mengandung fosil peninggalan kehidupan masa yang lampau itu. Magma yang keluar dari perut bumi dan yang luar biasa tinggi derajatnya pun mengubah bentuk-bentuk fosil-fosil tadi. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa banyak terdapat kekosongan pada sejarah bumi kita ini.

Merenungkan peristiwa tersebut di atas, kita menjadi sadar betapa menonjolnya arti dan peristiwa yang terjadi di daerah Sangiran bagi penyelidikan arkeologi, palaeoantropologi maupun pengungkapan sejarah bumi dan rona kehidupan yang pernah terjadi di atasnya dalam era ribuan bahkan jutaan tahun yang telah silam.

Setelah *homo soloensis* dan kemungkinan juga *homo wajakensis* yang secara hipotetik diduga menjadi penghuni-penghuni tertua Jawa



Tengah pada masa *pleistoseen* atas maka terentang jarak puluhan ribu tahun yang gelap kembali mengenai siapa yang kemudian menjadi penghuni Jawa Tengah sampai masa awal *holoseen* sangatlah gelapnya. Tidak ada sumber prasejarah sedikit pun yang dapat kita pakai untuk menduga mengenai jenis manusia/bangsa yang mengisi waktu yang sangat panjang itu di Jawa Tengah. Adalah suatu hal yang layak diperkirakan dan menimbulkan teka-teki jenis-jenis manusia purba yang pernah menjadi penghuni Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur khususnya pada masa *pleistoseen* atas itu. Mengapa tidak menampakkan tanda-tanda adanya kesinambungan keturunan mereka, dan mengapa menjadi lenyap sama sekali dari panggung kehidupan di atas bumi Jawa yang subur ini? Hal ini masih merupakan teka-teki besar dalam dunia prasejarah Indonesia.

Ada suatu anggapan umum bahwa mahluk-mahluk jenis pramanusia atau sedikit-tidaknya manusia primitif yang telah kita bicarakan di atas bukanlah nenek moyang sebagian besar penduduk Nusantara masa sejarah. Sebaliknya berdasarkan teori migrasi yang dikembangkan lewat penelitian antropologi budaya maupun ilmu perbandingan bahasa, diterima pendapat bahwa konon nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang ini berasal dari daratan Asia bagian selatan. Mengapa manusia yang memulai penghidupan dengan baik dalam sorga alami ini, tidak berkembang biak didalamnya dan dengan Nusantara atau bahkan memberi kelebihan penduduk kepada daerah-daerah lain tetapi harus mengalami hal sebaliknya?

Problema mengenai siapa atau bangsa apa yang kemudian mendiami Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, baru sedikit sekali mendapat sinar terang yaitu pada tiga atau dua ribu tahun menjelang abad Masehi. Kita harus bersabar menunggu puluhan ribu tahun untuk kemudian baru secara samar-samar melihat tanda-tanda adanya penghuni baru, yaitu sekelompok suku bangsa Deutro Melayu Baru yang datang secara bergelombang dari tanah daratan Asia bagian selatan ke beberapa bagian Nusantara ini, termasuk Pulau Jawa.

Perlu dicatat bahwa sesungguhnya jauh sebelum kedatangan suku bangsa Deutro Melayu, berdasar penelitian para ahli Kepulauan Nusantara ini telah didiami oleh orang-orang Negrito. Dengan memisahkan segala macam jenis dan corak manusia yang hidup pada

zaman palaeolitikum seperti *pithecanthropus erectus*, *homo soloensis* dan *homo wajakensis* boleh dikatakan bahwa Negrito adalah bangsa yang tertua mendiami Kepulauan Indonesia. Di mana tanah asal bangsa itu dan kapan mereka sampai ke Indonesia tidak dapat dikatakan secara jelas. Bangsa Negrito berbadan kecil, berkulit hitam dan berambut keriting. Pada waktu sekarang bekas-bekas mereka di Indonesia tidak terlihat lagi. Mereka telah terdesak dan disingkirkan seluruhnya oleh bangsa yang datang kemudian.

Bangsa yang datang kemudian dan mendesak bangsa Negrito sampai jauh ke bagian timur Kepulauan Indonesia hingga bekas-bekas sekarang tidak ditemukan lagi, ialah bangsa Wedha, yang mungkin berasal dari bagian selatan Dekhan, India, dan Pulau Sialan. Mereka berbadan tegap, berukuran lebih tinggi dari pada bangsa Negrito. Warna kulitnya cokelat dan rambutnya berombak. Di Indonesia contoh bangsa Wedha itu sekarang masih dapat ditemukan yaitu orang-orang Tokea, Toala dan Tomina di Sulawesi dan orang Kubu di Sumatra Selatan. Kedua jenis bangsa ini tidak pernah menjadi penghuni Jawa Tengah.

Beberapa abad mendahului suku bangsa Deutro Melayu, telah datang dan menghuni Nusantara ini kelompok suku bangsa Proto Melayu atau Melayu Purba, tetapi sampai sekarang para ahli belum menemukan bukti bahwa mereka juga datang menetap dan menghuni daerah Jawa Tengah. Mereka diduga datang dari tanah Dataran Tinggi Yunani, di daerah Cina bagian selatan, dan perpindahan mereka dalam jumlah yang besar secara nisbi dianggap terjadi sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Rute perjalanan yang mereka tempuh ditandai oleh temuan-temuan perkakas mereka yang paling karakteristik yakni kapak persegi panjang (*rectangularaxe*) di sepanjang Malaya, Sumatra, Jawa, dan seluruh Nusa Tenggara, serta di jurusan lain, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Filipina. Mereka mendiami daerah-daerah pedalaman yang terpencil sehingga kurang dipengaruhi kebudayaan asing, dan hidup dari pemeliharaan ternak dan pengolahan tanah secara primitif dalam bentuk huma dan ladang atau penanaman padi kering. Oleh para ahli mereka diduga menjadi nenek moyang suku-suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, dan penduduk Nusa Tenggara. Suku bangsa Proto Melayu ternyata juga pernah menjadi penghuni Jawa Tengah.

Suku bangsa Deutro Melayu, menurut para ahli, muncul di

Nusantara ini sekitar tahun 1500 sebelum masehi. Suku bangsa inilah yang dianggap menjadi nenek moyang suku bangsa Melayu, Bugis, Makasar, Bali, Sunda, dan Jawa. Persebarannya di Indonesia cukup luas dan sangat besar kemungkinan sejak beberapa abad sebelum tariah Masehi telah mulai menetap dan menjadi penghuni daerah Jawa Tengah. Dalam perjalanan waktu dan perkembangan sejarahnya boleh dikatakan suku bangsa inilah yang dapat dikatakan menjadi penghuni Jawa Tengah yang paling besar pada zaman prasejarah. Berbeda dengan suku bangsa Proto Melayu, suku bangsa Deutro Melayu lebih terbuka sifatnya, banyak tinggal di daerah pantai dan tanah-tanah landai dan dalam perkembangan sejarahnya banyak menerima pengaruh kebudayaan dari luar. Sifatnya yang demikian itu memang pembawaan dari tanah asalnya yaitu daerah Vietnam. Mereka semula juga berasal dari Yunan, tetapi telah menetap dan mengembangkan perikehidupan mereka di tanah dataran Vietnam. Sebelum datang ke Nusantara ini, mereka telah memperoleh kepandaian mengerjakan dan menggunakan logam, terutama perunggu, dan dengan alat-alat dari logam yang lebih sempurna itu melakukan langkah maju yang besar dan penting dalam tatakahidup-an mereka. Di dataran rendah yang subur itu mereka membuka hutan dan mengembangkan teknik yang lebih tinggi dalam pengolahan tanah, yaitu menanam padi di ladang-ladang yang diairi yaitu sawah. Itulah sebabnya ketika didesak terus ke selatan oleh bangsa lain atau oleh sebab lain yang belum kita ketahui secara pasti, mereka menyerbu Nusantara ini dalam mencari daratan rendah, membuka hutan-hutan dataran rendah dan mulai yang kemudian tumbuh menjadi suatu peradaban besar. Dalam hal ini daerah Jawa Tengah pastilah mempunyai daya tarik yang kuat bagi mereka jadikan *lebensraum* baru karena alamnya sangat ideal untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam teknik mengolah tanah dan meningkatkan kehidupan mereka. Ternyata kemudian di daerah Jawa Tengah inilah suku bangsa Deutro Melayu yang telah melebur dan mengembangkan diri sebagai bangsa Nusantara itu berhasil menegakkan suatu masyarakat dengan sistem sosial dan sistem ekonomi yang teratur dan dikendalikan oleh tatanan pemerintah yang berwibawa.

Tidaklah berlebihan kiranya untuk dikatakan bahwa di Jawa Tengah inilah fajar zaman sejarah bangsa Indonesia mulai merekah.

Munculnya batu-batu bersurat dan berangka tahun yang pasti dan Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi mengakhiri masa gelap(prasejarah) bangsa Indonesia dan dinamika hidup kesejarahan bangsa mulai lebih jelas tergambar di atas kanvas sejarah.

### ***1.2 Pola Kehidupan Masyarakat Prasejarah di Jawa Tengah***

Di muka telah dikatakan bahwa tujuan kegiatan penelitian arkeologi dan prasejarah tidak lain berusaha menggambarkan kembali suatu masa kehidupan manusia mulai bekas-bekas materi yang dahulu pernah memainkan peranan dalam kehidupannya. Melalui penelitian, analisa dan pentafsiran, materi-materi peninggalan itu diharapkan dapat memantulkan gambaran mengenai kehidupan masyarakat prasejarah dalam pelbagai aspeknya.

Untuk mencapai maksud tersebut, sesungguhnya terdapat beberapa macam konsep dan model yang dikembangkan para ahli. Sesuai dengan kemajuan-kemajuan dalam pemikiran bidang-bidang ilmu pengetahuan lain terhadap arkeologi, terutama geologi, biologi dan antropologi. Di samping itu penjurusan perhatian terhadap aspek-aspek kehidupan manusia mengalami pergeseran-pergeseran karena terasa kurang lengkapnya hasil-hasil rekonstruksi melalui aspek-aspek tertentu saja. Lagi pula timbulnya banyak perhatian terhadap perhatian arkeologi dan prasejarah mengakibatkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencapai hasil optimum dalam rekontruksi penghidupan prasejarah. Beberapa konsepsi atau model teknologi, konsep unit kebudayaan, model sosial ekonomis, dan konsepsi ekologis.

Konsepsi menurut model teknologi terutama memperhatikan perkembangan teknik pembuatan alat-alat kerja (*artefak*) manusia. Kebudayaan manusia berevolusi, seperti hal menurut konsepsi biologis, dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks dan setiap tingkat perkembangan ditandai oleh terciptanya alat-alat dengan bentuk-bentuk dan bahan-bahan pembuatan tertentu. Jadi artefak-artefak itu secara terlepas dipakai sebagai alat untuk menentukan perkembangan tingkat-tingkat kebudayaan manusia prasejarah. Konsepsi ini yang dikemukakan oleh C.J. Thomsen (Denmark) agaknya sampai sekarang masih terpakai disamping konsepsi-konsepsi yang lain. Dasar kronologi prasejarah Indonesia sejak pembentukan konsepsi, yang diambil oleh

P.V. van Stein Callenfells, R. von Hein Gelder, A.N.J. Th a Th van der Hoop, dan H.R. van Heekeren adalah konsepsi perkembangan teknologis. Perlu disadari bahwa sebenarnya konsepsi teknologis ini mengandung beberapa kelemahan antara lain dalam bidang kronologi, situasi arkeologis, di Indonesia telah menunjukkan bahwa istilah-istilah perkembangan teknologis sukar dapat diperhatikan sebagai bermakna "waktu" atau untuk dijadikan dasar periodisasi. Artefak-artefak palaeolitik dihasilkan pula pada masa yang teoritis bukan lagi pelaeolitik, yang neolitik berlangsung terus hingga pada masa sekarang dan seterusnya. Mengingat kenyataan ini maka model/sistem sosial ekonomi dapat digunakan lebih mantap, dimana tradisi-tradisi teknologis ditempatkan sebagai salah satu gejala penting dalam kehidupan sosial.

### 1.2.1 Pemenuhan Keperluan Hidup Primer

Warna kehidupan sosial-ekonomis suatu masyarakat banyak ditentukan oleh aktivitas masyarakat itu dalam menjawab tantangan lingkungan hidupnya. Jadi ada beberapa faktor penting yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggambarkan keadaan sosial ekonomis suatu masyarakat, antara lain ialah faktor alam, manusia, dan kemampuannya. Sayang bahwa pengetahuan kita mengenai ketiga faktor penting tersebut untuk Jawa Tengah pada masa *pleistoseen* sangat gelap sehingga sulit sekali untuk dapat menggambarkan kembali bagaimana warna kehidupan sosial-ekonomis masyarakat penghuni Jawa Tengah pada saat itu. Di muka telah diterangkan bahwa pada zaman *pleistoseen* diduga di daerah Jawa Tengah telah hidup jenis manusia *pithecanthropus erectus*, *homo soloensis* dan *homo wajakensis*, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Berdasarkan artefak yang sejauh ini ditemukan, para ahli berpendapat bahwa sampai dengan awal *holoseen* mereka itu berada dalam tingkat kehidupan *palaeolitikum*. *Leitfossiel* untuk dapat menentukan tingkat kehidupan ini ialah *chopper* (kapak genggam dari batu untuk menetak/merimbas), *flakes* (alat-alat serpih dari batu), dan artefak-artefak dari tulang. Berdasarkan alat-alat tersebut dapatlah diduga bahwa mereka masih hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Alam Jawa Tengah pada saat itu masih penuh dengan hutan lebat diseling dataran-dataran yang subur

cukup memberi kemungkinan untuk melangsungkan hidup dengan cara tersebut di atas. Mereka belum dapat mengusahakan ladang atau huma, karena alam masih “pemurah” sifatnya. Dari waktu ke waktu mereka berpindah tempat, belum bertempat tinggal menetap.

Berkelompok-kelompok dalam jumlah kecil mereka bergerak mencari daerah yang ada makanannya secara alami; kalau dirasa makanan mulai berkurang ditinggalkannya tempat itu dan berangkatlah mereka mencari daerah lain. Demikian berlangsung terus-menerus sepanjang waktu hidupnya. Jelaslah bahwa mereka belum dapat dikatakan hidup dalam tata masyarakat yang teratur. Hidup dan penghidupan mereka sangat kompleks sukar untuk digambarkan secara jelas terinci. Meskipun demikian harus diakui bahwa ada juga tata aturan yang mengikat mereka dalam kelompok itu tetapi agaknya lebih merupakan ikatan yang timbul oleh gerak naluriah. Derajat kemampuan berfikir mereka mungkin dalam tingkatan yang awal sekali, sehingga tidak lahir karya-karya baru yang menggambarkan kemajuan tingkat hidup mereka. Tentang alam kepercayaan mereka, diduga belum terwujud dalam suatu sistem tertentu. Besar kemungkinan hanya berupa penyembahan secara langsung terhadap gejala alam yang hebat yang menimbulkan perasaan takut pada mereka.

Demikianlah gambaran nisbi tentang kehidupan sosial ekonomis dari mahluk-mahluk manusia yang diduga menghuni Jawa Tengah pada awal sejarah kehidupan manusia yang berlangsung pada zaman *pleistoseen* sampai awal *holoseen*. Di mana tempat-tempat pemusatan pemukiman mereka, tidaklah kita peroleh data sedikit pun dari daerah Jawa Tengah. Hanya kuat dugaan kita bahwa lembah Sungai Sala pastilah sudah dihuni oleh manusia-manusia purba tersebut. Di samping itu mungkin juga beberapa daerah pantai Jawa Tengah juga dihuni oleh manusia-manusia purba tersebut. Air, tumbuh-tumbuhan, dan garam merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam mencari jejak pemusatan tempat hidup manusia, terutama untuk zaman purba. Gambaran tentang prikehidupan yang paling awal dari penghuni-penghuni Jawa Tengah secara nisbi dan sepiintas itu menjadi kabur dan lenyap kembali untuk beribu-ribu tahun lamanya, dan baru kemudian secara samar-samar terlihat adanya suatu kehidupan baru yang lain beberapa abad menjelang tarikh Masehi.

Bagaimana nasib kelanjutan jenis-jenis manusia purba yang menghuni Jawa Tengah pada zaman *pleistoseen* dan diduga berkebudayaan *palaeolitikum* itu menjadi gelap dan merupakan teka-teki besar yang agaknya sulit sekali dijawab. Agaknya alam yang hebat pada zaman *pleistoseen* yang terkenal dengan nama “zaman es” itu menimpa juga pulau Jawa sehingga menyapu bersih kehidupan manusia di atasnya. Gerakan-gerakan tektonis lapisan bumi, letusan gunung-gunung api dan air bah yang besar itu demikian hebatnya, terjadi pada masa akhir *pleistoseen* sehingga lenyaplah semua kehidupan sebelumnya, kemudian muncullah alam dan dunia kehidupan baru. Dengan demikian putuslah kesinambungan kisah kehidupan penghuni di Jawa Tengah.

Di muka telah diterangkan bahwa kita terpaksa ikut melompati jarak waktu beribu-ribu tahun, baru mendapatkan jejak adanya masyarakat manusia baru yang menghuni Jawa Tengah, yaitu masyarakat Deutro Melayu. Seperti uraian di muka, berdasar teori migrasi, bangsa Deutro Melayu itu datang dari daratan Asia selatan dalam usaha mereka mencari *lebensraum* baru. Mereka sampai di Nusantara, melebur dan mengembangkan diri sebagai bangsa Nusantara. Khususnya di Jawa Tengah mereka akhirnya berhasil menumbuhkan peradaban besar yang mengawali zaman sejarah bangsa Indonesia.

Daerah Jawa Tengah rupanya merupakan daerah yang ideal bagi mereka untuk mengembangkan kemampuannya mengolah tanah sebagai salah satu keahlian yang dibawanya dari tanah asalnya. Penghidupan bertani di atas sawah yang basah dapat diteruskan dan ditingkatkan karena keadaan alam Jawa Tengah sangat memungkinkan hal itu mengingat (a) banyaknya gunung-gunung berapi yang memberikan kesuburan pada tanah di sekitarnya, (b) formasi pegunungan yang tidak masif, sehingga terdapat banyak lembah-lembah subur karena menyimpan bahan-bahan vulkanis, dan (c) banyaknya sungai-sungai kecil, deras alirannya dengan verval yang banyak, sehingga ideal sekali untuk pengairan sawah-sawah. Semua hal itu jelas merupakan daya tarik yang kuat bagi bangsa Deuto Melayu untuk menetap dan menjadi penghuni Jawa Tengah. Dalam suasana yang demikian itu lahirlah dengan sendirinya “kebudayaan petani” yang pada suatu waktu



merupakan tumpuan yang kuat dan ideal bagi lahirnya masyarakat Jawa tengah yang bersifat kehinduan.

Kapan bangsa Deutro Melayu yang kemudian menjelma menjadi bangsa Nusantara itu mulai mendiami Jawa Tengah tidak kita ketahui secara pasti. Demikian pula halnya daerah-daerah manakah yang mula-mula menjadi tempat pemukiman mereka masih belum kita ketahui secara meyakinkan. Namun demikian penelitian arkeologis dan prasejarah yang kebetulan mengambil beberapa situs tertentu di Jawa Tengah sedikit memberi keterangan kepada kita mengenai masalah tersebut di atas.

Mengenai *settlement* atau pemukiman meskipun secara sporadis tempatnya diduga di dua wilayah. Pertama ialah pantai utara Jawa Tengah, antara lain daerah Batang-Pekalongan, daerah Jepara (Bangsri Keling-Kelet) daerah Rembang (Pantai Rembang dan sekitar gunung Lasem). Kedua ialah wilayah pedalaman, antara lain dengan dataran tinggi Dieng, daerah Kedu Utara (sekitar kaki Gunung Sumbing dan Sindoro), daerah Kedu Selatan, dan sekitar kaki Gunung Merapi-Merbabu.

Sesungguhnya dugaan mengenai settlement-settlement penduduk Jawa Tengah yang mula-mula tersebut di atas masih sangat lemah sifatnya, karena hanya berupa hipotesa yang bertumpu pada sekedar sumber kecil yang ditemukan. Pernyataan Dr. Soekmono tersebut ini dapatlah memberi gambaran mengenai betapa sulit dan rapuhnya hipotesa-hipotesa mengenai sejarah zaman kuna, lebih-lebih mengenai zaman prasejarah. Lebih-lebih lagi mengenai Indonesia, sejarah kunanya pada khususnya masih jauh dari lengkap. Dengan mengikutsertakan semua keterangan yang tidak tertulis pun, sejarah itu masih saja sangat fragmentaris dan di dalamnya masih banyak terdapat "masa kosongnya", sehingga perangkaannya menjadi satu hanya dapat dimungkinkan dengan susunan-susunan hipotesa yang kadang-kadang belum juga dapat mencukupi keterangan-keterangannya.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan ialah mengenai letak Mohosin dan Holing, yaitu nama dua tempat yang disebut-sebut oleh berita Cina (kronik dinasti Han). Kedua nama tempat itu menimbulkan banyak pertikaian pendapat di kalangan sarjana terkemuka. Prof. Dr. Purbotjaroko pernah menunjuk Desa Masin, Kecamatan Warungasem,



sebagai salah satu kemungkinan letak Mohosin. Sementara itu Dr. W.P. Groeneveldt mengajukan Dieng sebagai kemungkinan Langpiya dan Holing terletak di daerah Batang, sedangkan Orsoy de Flines berpendapat bahwa Langpiya terletak di Bukit Lasem. Masih banyak lagi hipotesa mengenai Holing yang dikemukakan oleh sementara sarjana, masing-masing dengan argumentasinya yang sama lemahnya.

Namun bagaimana pun lemahnya, usaha untuk menguatkan hipotesa melalui penelitian arkeologis dan prasejarah mengenai permukiman-permukiman penduduk pada zaman prasejarah di Jawa Tengah dijalankan terus. Salah satu kegiatan penelitian yang dapat dikemukakan ialah Penelitian Arkeologi di Rembang yang dapat dilakukan oleh tim gabungan dari Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional Direktorat Sejarah dan Purbakala dan *The University of Pennsylvania Museum* pada tahun 1975 yang antara lain bertujuan melakukan penelitian atas sejarah kuna pesisir utara Jawa Tengah bagian timur yang sebagian besar belum terungkap. Di antara beberapa kesimpulan pendapat yang diperoleh melalui penelitian tersebut memberi petunjuk adanya suatu permukiman penduduk pada zaman prasejarah Jawa Tengah dengan pola kehidupan sosial ekonominya tertentu. Dalam buku *Laporan Penelitian Rembang 1975*, dapat dibaca suatu kesimpulan khususnya mengenai kemungkinan adanya "pelabuhan dagang" di salah satu tempat di pesisir utara Jawa Tengah pada zaman prasejarah sebagai berikut.

Situs itu ialah Selolayar-Patok 129 (Kompleks Binangun), yang terletak di puncak gunung yang cukup baik untuk pertahanan pada suatu tanah datar di sisi timur dan utara dari teluk kecil sebelah barat Gunung Lasem. Teluk itu dangkal tapi merupakan pelabuhan yang terlindung, masih tetap dipakai oleh kapal-kapal layar Bugis untuk berlabuh. Koleksi permukaan bumi terdiri atas beberapa benda (kecuali manik-manik) yang mungkin merupakan contoh barang-barang impor dari negara-negara lain. Rupa-rupanya situs Binangun telah terlihat dalam perdagangan luar negeri. Wilayahnya cukup luas meliputi paling tidak lima sampai sepuluh hektar. Umurnya tua, mungkin lebih tua (dan tidak mungkin lebih kemudian) dari tahun 700 Masehi. Letaknya dalam wilayah yang tidak sesuai untuk pertanian. Dengan demikian kami percaya, bahwa situs itu merupakan pelabuhan dagang kuna

Pulau Jawa, yang dapat diperkirakan pada awal atau pertengahan Millenium I tahun Masehi mungkin pelabuhan ini hanya kecil dan tidak penting serta di luar jaringan perdagangan utama, namun yang pasti harus diselidiki lebih lanjut. Telah kita kenali artefak-artefak yang karakteristik dari situs semacam itu, kita dapat mencari lebih lanjut lagi di sisi utara dan barat Gunung Muria. Wilayah Semarang, di tempat-tempat di mana ditemukan pantai yang cukup tinggi dan terlindung.

Demikianlah beberapa hipotesa tentang adanya permukiman penduduk di Jawa Tengah pada zaman prasejarah, yang memberi petunjuk bahwa sesungguhnya beberapa abad sebelum dimulainya zaman prasejarah (732 Masehi) ternyata sudah ada pemukiman penduduk di beberapa tempat di Jawa Tengah seperti yang tersebut di atas.

Dengan mengecualikan beberapa permukiman di pesisir dengan sistem sosial ekonominya yang khusus, maka secara umum penghuni Jawa Tengah pada periode prasejarah berkebudayaan petani dengan pola kehidupan sebagai berikut.

### ***1.3 Penyelenggaraan Hidup***

Mereka sudah benar-benar hidup *sedentair*, dengan bersawah sebagai pokok penghidupan mereka. Keadaan alam Jawa Tengah cukup ideal untuk mengembangkan kehidupan bertani di sawah basah. Dengan membuka hutan di sekitar gunung-gunung berapi dan lembah-lembah yang menyimpan bahan-bahan vulkanis mereka terus mengembangkan kemampuan bersawah hingga kehidupan mereka cukup makmur dan tentram. Terutama di daerah-daerah sekitar gunung-gunung Merapi-Merbabu, dan daerah Sindoro-Sumbing di Kedu Utara pastilah banyak tempat pemukiman penduduk dalam kesatuan wanua yang kecil-kecil. Kecuali itu di sepanjang sungai-sungai yang banyak mengalir di daerah Pekalongan diduga juga sudah menjadi tempat pemukiman penduduk, pada zaman prasejarah. Kalau bukti-bukti benda peninggalan berupa kapak-kapak neolitik dapat dipakai sebagai petunjuk adanya masyarakat prasejarah, maka daerah Batang bagian selatan dapat menyajikan data bahwa pada zaman prasejarah di situ

sudah ada masyarakat prasejarah yang teratur. Dibeberapa dukuh dari Desa Selokarto, Kecamatan Blado, Batang ditemukan beberapa buah kapak neolitik yang oleh penduduk setempat disebut “gigi guntur” (untu bledeg Jw.). Berdasar penelitian Team Survai Jurusan Sejarah IKIP Semarang, penduduk setempat menyebutkan bahwa di daerah itu banyak sekali ditemukan “gigi guntur” tersebut yang kini masih disimpan oleh beberapa orang sebagai jimat, sebagian lagi sudah banyak yang hilang. Penelitian yang lebih luas dan metodis tentang benda-benda peninggalan neolitik yang sejenis itu diduga akan membantu mengungkapkan prikehidupan masyarakat prasejarah di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Pekalongan Selatan.

Daerah Pekalongan dan sekitarnya dipandang masih merupakan *terra incognita* dalam sejarah kuna dan prasejarah, tetapi berdasar banyaknya temuan benda-benda kuna dan prasejarah di daerah tersebut, lebih-lebih dalam waktu akhir-akhir ini berkat meningkatnya kegiatan survei dan penelitian sejarah dan arkeologi, maka daerah tersebut besar kemungkinannya sudah dihuni orang sejak zaman prasejarah. Bahkan terdapat dugaan kuat bahwa daerah Hutan Roban, Lembah Tersono, Bawang sampai ke Dataran Tinggi Dieng merupakan jalur-lintas utama dari pesisir ke daerah pedalaman pada zaman purba.

Melihat keadaan alam daerah Pekalongan yang tentunya penuh dengan hutan, maka di samping bersawah, mereka juga berladang berburu untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Kecuali itu sebagai akibat logis hidup menetap mereka juga memelihara ternak, kecuali untuk membantu pekerjaan di sawah juga untuk dimakan dagingnya. Kerbau lebih dahulu dipelihara dari pada sapi, tetapi bukti-bukti yang agak meyakinkan tentang usaha memenuhi keperluan hidup primer seperti itu, tidak ada sehingga apa yang dikemukakan di atas adalah suatu hipotesa atas dasar pemikiran logis belaka.

Tentang kehidupan berdagang dalam artian yang luas tidak mungkin dikemukakan karena tidak adanya data, tetapi sistem “barter” merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomis yang pasti sudah terjadi, sekalipun untuk lingkungan masyarakat yang terbatas. Misalnya barter (tukar-menukar) barang keperluan hidup yang primer antara keluarga dalam wanua.

Untuk melindungi diri terhadap panas hujan, angin dan kekuatan alam, mereka mendirikan rumah tempat tinggal. Bagi masyarakat prasejarah di Jawa Tengah rumahnya mungkin sekali tidak berbentuk rumah panggung yang tegak di atas tiang-tiang kayu, tetapi rumah yang berlantaikan tanah biasa, beratap rumbia dan berdinding bambu atau kayu. Hal ini dapat dikemukakan dengan memperhatikan keadaan alam Jawa Tengah yang rata-rata tidak berpayapaya, pohon bambu cukup banyak dan hutan pun tidak selebat di Sumatera atau Kalimantan. Rumah-rumah mereka itu bergerombol antara sepuluh sampai dua puluh buah dalam pendukuhan-pendukuhan yang jumlahnya juga tidak banyak.

Perkakas hidup sehari-hari di samping alat-alat dari batu, sudah dipergunakan alat-alat perunggu. Sejak sebelum meninggalkan daratan Asia bagian selatan, yaitu di daerah Vietnam mereka sudah mengenal perunggu menurut model kebudayaan Bacson Hoabinh. Mungkin juga sudah ada perkakas dari besi yang dipakai oleh penghuni zaman prasejarah Jawa Tengah.

Perpindahan pemukiman yang terjadi dari satu daerah ke daerah lain tidaklah bersifat nomadis, tetapi atas dasar perhitungan yang disepakati bersama untuk mencari tanah atau daerah yang lebih baik guna mengembangkan kehidupan bertani. Demikianlah agaknya yang terjadi, mengingat pada waktu pengaruh agama dan kebudayaan Hindu terlihat tanda-tandanya melalui tulisan, daerah pedalaman sekitar Merbabu-Merapi serta Sindoro-Sumbing sudah lama dijadikan wilayah tempat hidup mereka. Perlu pula dikemukakan bahwa sampai sekarang di Jawa Tengah belum ditemukan adanya kjokkenmoddinger, sehingga bentuk perumahan berpanggung di pinggir laut atau danau itu tidak ada di Jawa Tengah pada jaman prasejarah.

### *1.3 Organisasi Masyarakat*

Tentang bagaimana wujud organisasi masyarakat prasejarah di Jawa Tengah agaknya dapat kita bayangkan, dengan memperhatikan susunan masyarakat pada suku-suku bangsa Indonesia yang tinggal jauh di pedalaman, di mana mereka hidup terasing sama sekali dengan dunia luar yang antara lain dapat digambarkan sebagai berikut.

- (a) Satuan organisasi masyarakat yang terkecil ialah wanua yaitu suatu unit kehidupan yang bersifat swasembada. Wanua itu diatur menurut sistem komunal dan tradisional. Penduduk dari wanua itu disebut anak wanua, yaitu mereka yang lahir asli di dalamnya, oleh karenanya tampak adanya ikatan yang sangat erat dengan wanua. Seakan-akan ada hubungan gaib yang sukar dipahami.
- (b) Wanua itu tersusun atas beberapa keluarga. Masing-masing keluarga mempunyai penghulu yang bertanggung jawab terhadap keluarganya sebaliknya anggota keluarga sangat patuh kepadanya karena menganggap ia sakti.
- (c) Tiap-tiap wanua merupakan masyarakat tersendiri dan mempunyai peraturan-peraturan yang sangat dipatuhi oleh sekalian anggota wanua, sejak lahir sampai matinya. Wanua itu dipimpin oleh dewan tua-tua yang diketuai oleh salah seorang di antara anggota dewan itu dengan prinsip *primus inter pares*. Ia disebut rama atau tuha.
- (d) Untuk memutuskan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak agaknya sistem musyawarah dikembangkan dalam masyarakat wanua itu.
- (e) Terdapat suatu perasaan persatuan yang sangat kuat di antara anggota masyarakat wanua itu. Di dalam suasana kehidupan yang demikian itu pastilah sifat tolong-menolong dan gotong-royong dalam mengerjakan sawah, rumah, dan lain-lain berlangsung dengan baik.
- (f) Pembagian kerja baik berdasarkan jenis kelamin maupun menurut jenis pekerjaan sudah ada dalam masyarakat wanua itu. Khususnya yang terakhir ini nama-nama jabatan berdasar jenis pekerjaan yang ada dalam wanua itu dapat kita baca dalam prasasti-prasasti dari periode Jawa-Hindu yang awal. Agaknya istilah-istilah seperti tuha alas, hulu air, hulu wuatan, dan lain-lain terus dipakai dan tidak diganti dengan istilah-istilah Sanskerta, meskipun masyarakat sudah kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Jabatan-jabatan tersebut sedikit banyak memberikan kepastian pada kita bahwa pada zaman prasejarah, yaitu sebelum

kebudayaan Hindu kuat sekali berpengaruh, sudah terdapat masyarakat dengan tatanan sosial yang teratur.

Gambaran sepintas mengenai organisasi masyarakat di atas antara lain dikemukakan oleh F.H. van Naerssen melalui artikelnya, "*Some aspects of the Hindu Javanese kraton*" sebagai berikut.

The finding of the historical investigation of the earliest Hindu-Javanese period when placed in a sociological context lead to the following conclusions :

In a country like Java, which is predominantly agrarian, sovereignty was held by the individual or group who had the disposal of the produce of the land and of the labour needed to acquire this produce.

As is assumed, the smallest community (originally Javanese) in Old Java was the Wanua, a self supporting unit ruled according to its communal and traditional system by a board of elders, presided over the first among the equals, the "father" there are several variations in studies (all more or less hypothetical) about the "original" Javanese desa (this the modern name for such a community, a kind of village republic), but the main tenor is that paternalism reigns about the members of the desa. Although much of the old desa organisation is not yet fully clear, who may be able, provided we use caution, to derive from the Hindu Javanese inscriptions some features of the wanua (this is apparently the original name of what later is called desa).

We are familiar with the names of rama or tuha, "father" or "older" respectively, of a wanua The inhabitants of, or people born in, a wanua are called anak wanua that is "the children of the desa". In addition several board, etc. In any case the picturesque may construct of the Hindu-Javanese desa is that of autonomous, self sufficient and paternalistic organisation.

Uraian di atas menggambarkan satuan organisasi masyarakat yang terkecil yang sesungguhnya merupakan tumpuan dasar masyarakat yang lebih luas yang berkembang kemudian.

Dalam perkembangan waktu ternyata wanua-wanua yang merupakan komuniti atau paguyuban yang masing-masing otonom dan berdiri sendiri-sendiri itu akhirnya terdorong oleh kepentingan yang

sama dalam memanfaatkan sumber daya alam, membentuk kerjasama antarwanua dalam bentuk kerakaan.

Institusi kerakaan itu tidak dapat diragukan lagi merupakan institusi pra-Hindu. Barangkali pertumbuhannya didorong oleh faktor-faktor ekologi. Pengembangan penghidupan bersawah, khususnya dalam pengelolaan padi air, membutuhkan sistem irigasi pengairan yang teratur dan karena itu mendorong adanya kerja sama dari beberapa wanua yang sama-sama bergantung pada sungai yang sama. Dengan sendirinya bahwa sistem irigasi itu memerlukan seorang pemimpin atau ketua yang kekuasaannya menjangkau keluar meliputi beberapa wanua itu. Dari bentuk kerjasama semacam itu akhirnya lahirlah tatanan masyarakat yang lebih luas dari wanua yaitu bentuk kerakaan yang diketuai oleh seorang raka. Raka itu dipilih di antara anggota wanua yang tergabung dalam federasi itu.

Bahwa organisasi kerakaan sudah ada dan merupakan suatu organisasi masyarakat pra-Hindu yang kebetulan masih berada dalam zaman prasejarah, dapat diusut sumbernya dari beberapa prasasti tertua zaman Jawa-Hindu, terutama dari daerah Kedu Utara yang banyak menyebut tentang raka itu. Tentunya organisasi masyarakat itu tidak demikian saja berubah setelah datangnya pengaruh Hindu, tetapi tetap bertahan lama. F.H.van Naersses menulis, "*..... it can be read in one inscription that several regions are under the raka of Patapan ..... and the forest of Susundara, of the mountain of Sumwing, are also under Patapan.*" Jadi sebelum masa Jawa Hindu, di Jawa Tengah sudah ada dua jenis organisasi masyarakat, ialah wanua yang masing-masing dipimpin oleh seorang rama dan ke-rakaan yang dipimpin oleh seorang raka.

Di dalam struktur masyarakat yang asli Jawa itu muncullah kemudian suatu tatanan sosial baru pada masa awal Jawa-Hindu. Raka diubah dengan gelar asing yang kedengarannya lebih tinggi sifatnya yaitu gelar maharaja. Sedikit demi sedikit kerakaan itu tumbuh menjadi organisasi masyarakat yang bersifat kehindu-an. Raka dengan gelarnya yang baru itu juga berubah kedudukan sosialnya dan kemudian berangsur-angsur juga bertambah besar kekuasaannya. Namun demikian wanua sebagai satuan masyarakat agaknya tetap tidak

tergoyahkan oleh penetrasi kebudayaan Hindu dan tetap bersifat Jawa asli, meskipun kemudian namanya bergeser menjadi desa.

### ***1.5 Kehidupan Seni Budaya***

Mengenai kehidupan seni budaya masyarakat prasejarah di Jawa Tengah sangatlah terbatas pengetahuan kita, tetapi bagaimana pun kita dapat menduga bahwa dalam kehidupan masyarakat yang teratur itu pastilah taraf kehidupan seni dan budaya cukup baik keadaannya. Dugaan kita itu tumbuh dari penelitian atas beberapa benda peninggalan mereka yang ditemukan di Jawa Tengah meskipun jumlahnya sangat terbatas.

Masyarakat adalah kontinuitas kehidupan. Kontinuitas itu dapat berlangsung melalui penurunan kepandaian dari generasi tua kepada generasi berikutnya. Demikian pula apa yang berlangsung dalam masyarakat prasejarah di Jawa Tengah, meskipun pendidikan yang menjadi media penyusunan kepandaian itu sederhana bentuk dan sifatnya. Belum diketahui secara pasti apakah ada institusi pendidikan yang terselenggara secara luas. Pendidikan yang pasti terjadi ialah pendidikan kodrati dari pihak orang tua kepada anaknya yang berlangsung sehari-hari tanpa pola yang pasti. Kepandaian teknis baik dalam mengelola tanah, kerajinan tangan maupun pembuatan rumah tempat tinggal diajarkan secara langsung dengan mengikutsertakan anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut, sedangkan pendidikan kerohanian dan keagamaan kecuali melalui praktek penghayatan sehari-hari dalam upacara-upacara ada kemungkinan dilakukan dalam wujud terbatas oleh seorang "tua" atau "dukun". Pendidikan ini berlangsung secara rahasia dan jumlah muridnya sangat terbatas.

Untuk menyatakan apakah seorang anak muda dianggap cukup "masuk" untuk menjadi warga masyarakat agaknya juga berlaku *initiate* atau ujian dalam bentuk tertentu, sebagaimana terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia yang sisa-sisanya sampai beberapa waktu terakhir ini masih dapat kita saksikan.

Dalam segi kesenian, pengetahuan kita juga terbatas, tetapi bagaimana pun sederhananya tingkat kehidupan suatu masyarakat, rasa seni sebagai salah satu aspek kejiwaan manusia pastilah sudah tercurah lewat bermacam-macam media. Melalui beberapa benda peninggalan



mereka yang ditemukan di Jawa Tengah sedikit banyak kita dapat menarik kesimpulan mengenai kehidupan seni di kalangan mereka pada waktu itu.

Ekskavasi Gunung Wingko, di daerah Yogyakarta Selatan menghasilkan beberapa temuan kereweng tanah liat yang diduga berasal dari zaman prasejarah. Dengan memperhatikan hiasan-hiasan semacam meander, anyaman bambu bentuk-bentuk geometris dan lain-lain yang terdapat pada kereweng-kereweng temuan itu, tumbuhlah pendapat bahwa seni hias pada keramik dan kayu sudah berkembang baik di kalangan mereka. Di samping itu dapat pula ditarik kesimpulan bahwa di kalangan mereka telah berkembang kerajinan anyaman bambu, bertenun kain. Tidak mustahil pula bahwa warna-warni yang indah sudah dibubuhkan pada kain tenunan atau anyaman bambu mereka itu. Tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, warna merah, biru dan cokelat rupanya paling dominan dalam pemakaian. Bahan pewarna diperoleh dari tumbuh-tumbuhan maupun dari bahan mineral.

Beberapa tenunan benda yang terbuat dari batu seperti kapak persegi panjang yang indah dan halus buatannya, gelang tangan dari batu yang indah (batu *agaat* dan *chalcedon*) yang ditemukan di Jawa Tengah memberikan bukti kepada kita bahwa perasaan seni mereka itu dicurahkan lewat benda-benda tersebut. Teknik mengupam batu (menggosok halus) untuk memperoleh bentuk yang indah rupanya juga sudah cukup maju. Banyak temuan benda-benda batu yang dikerjakan dengan bagus di Jawa Tengah. Hal ini merupakan bukti bahwa seni pengerjaan batu sudah cukup maju. Tidak dapat dilupakan pula bahwa perasaan seni mereka juga tercurah lewat pembuatan patung-patung nenek moyang, yang tentunya didasarkan atas rasa kepercayaan keagamaan. Rasa seni kepercayaan ini tampaknya dinyatakan melalui bentuk-bentuk pahatan kasar dan bongkah-bongkah besar yang impersif.

Di samping beberapa macam kesenian tersebut di atas, agaknya masyarakat prasejarah di Jawa Tengah juga sudah mengenal seni tari dan seni suara. Kedua jenis seni itu erat hubungannya dengan upacara kepercayaan keagamaan mereka, bahkan tidak mustahil jika tarian dan nyanyian itu merupakan sebagian dari rangkaian ritus keagamaan mereka. Hal tersebut dapat dikuatkan dengan bentuk pertunjukan

wayang yang menurut para ahli merupakan salah satu bentuk kesenian asli Jawa yang erat hubungannya dengan pemujaan roh nenek moyang.

### *1.6 Alam Pikiran dan Kepercayaan*

Dasar-dasar primer dari kepercayaan dan keagamaan di Jawa Tengah pada zaman prasejarah mempunyai pangkalnya di bumi Jawa sendiri. Alam yang penuh dengan gunung-gunung dan pepohonan yang besar tidak mustahil menumbuhkan perasaan takut kagum dan hormat dalam masyarakat pada masa itu. Campuran dari perasaan-perasaan itu melahirkan penyembahan kepada benda-benda alam tersebut yang lama-kelamaan terbentuk dalam suatu sistem kepercayaan tertentu.

Hal tersebut agaknya merupakan gejala universal artinya selalu dapat dilihat pertumbuhannya dengan sifat-sifat yang sama. Sifatnya yang mendasar itu rupanya kuat berakar di dalam hati masyarakat dan kuat bertahan lama. Unsur-unsur kepercayaan (agama) dari zaman prasejarah itu sampai sekarang pun masih dapat ditemukan dalam masyarakat Jawa Tengah sekarang. Misalnya kepercayaan akan jimat, dukun, hantu dan setan, praktek-praktek magi.

Memperhatikan keadaan alamiah Jawa Tengah saat itu yang penuh dengan rimba lebat, gunung-gunung serta lingkungan hidup mereka yang masih serba asli, tidaklah berlebihan kalau diduga bahwa masyarakat prasejarah Jawa Tengah pada saat itu lebih kurang berupa pemujaan pada benda-benda alam serta pemujaan pada roh. Secara populer dan umum kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat prasejarah Jawa Tengah ialah dinamisme, animisme, fetisisme, dan sihir. Di samping itu pemujaan pada ruh leluhur itu sampai sekarang tetap kuat berkembang di dalam hati masyarakat di Jawa Tengah. Berziarah ke makam leluhur, sesaji untuk ruh leluhur, pertunjukan wayang masih terlihat dan berkembang kuat di kalangan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam suasana kepercayaan yang demikian itu masyarakat banyak melakukan pekerjaan suci, setiap pekerjaan yang harus dilakukan senantiasa dimulai dengan pekerjaan suci, misalnya sebelum pergi menebang kayu di hutan, sebelum menegakkan rumah baru, sebelum turun ke sawah untuk menanam padi, sebelum mengawinkan anak, dan lain-lain.

Mereka statis dalam cara berfikir. Betapapun beratnya pekerjaan suci yang harus dilakukan itu, misalnya duduk bertapa di bawah sebatang kayu di hutan lebat, atau di dalam gua yang gelap, betapapun banyaknya waktu habis untuk itu, tetapi mereka tetap patuh menyelenggarakannya. Demikian berlangsung berabad-abad secara tetap tanpa banyak mengalami perubahan, karena telah menjadi pustaka masyarakat. Ketika datang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Budha di Jawa Tengah, adat kepercayaan yang demikian itu kukuh bertahan dalam bentuk dan sifatnya, meskipun ada sedikit penyesuaian dengan sistem kehidupan yang kebetulan dalam beberapa hal terdapat kesamaannya.

Menurut mereka, manusia ini adalah bagian organis dari tatanan kosmos, sehingga mereka percaya bahwa sejak gerak ucapan dan laku perbuatan harus disesuaikan dan diperhitungkan secermat-cermatnya jangan sampai terlepas atau menyimpang dari tatanan kosmos yang bersifat pasti dan abadi. Karena itu ketetapan peraturan/adat dan masalah perhitungan waktu saat dalam melakukan sesuatu pekerjaan besar mereka junjung tinggi. Kedudukan dan fungsi manusia di dalam alam semesta itu sudah dipastikan oleh kodrat alamiah, sehingga mereka berpandangan bahwa statika lebih luhur dari pada dinamika dan perubahan. Di kalangan masyarakat berkembang paham klasifikasi yang dijaga dan dipatuhi secara tertib.

Untuk menjaga kelanggengan sesuatu dan untuk menjaga keseimbangan dalam alam agar tidak timbul *chaos* masyarakat meminta bantuan dan bersandar pada keahlian seorang dukun yang dipandang menguasai segala perhitungan dan "ilmu" kehidupan alamiah itu.

Segala tata cara berdasar alam pikiran dan kepercayaan semacam itu berlangsung sebagai arus bawah dalam perkembangan sejarah di Jawa Tengah sampai sekarang.

## BAB II

### MASA KUNA ( ABAD KE-I --1500 )

#### ***2.1 Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan***

##### ***2.1.1 Pendahuluan***

Indonesia terdiri atas sejumlah pulau besar dan kecil terserak di sekitar jalur garis katulistiwa, menempati posisi geografis  $85^{\circ}$ -- $141^{\circ}$ BT dan  $6^{\circ}$ -- $11^{\circ}$ LS. Diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta diapit oleh dua benua yaitu Benua Australia dan Asia, menjadikan Indonesia sangat strategis letaknya. Letak posisi geografis demikian itu secara klimatologis menimbulkan berlakunya suatu sistem angin tetap yang bertiup dari Benua Australia ke Asia dan dari Benua Asia ke Australia yang secara siklis bergantian setiap tahun.

Karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa, maka Indonesia berada di bawah pengaruh iklim tropis. Sementara siklus angin tetap menimbulkan berlakunya dua musim masing-masing musim hujan dan musim kemarau yang secara siklis pula bergantian pada setiap tahun. Faktor iklim dan musim ini menyebabkan tanah Indonesia pada umumnya subur yang memungkinkan tumbuhnya bermacam jenis tumbuh-tumbuhan dan timbulnya berjenis-jenis binatang. Di samping air sebagai faktor penyubur utama, dengan penyinaran matahari yang

cukup, faktor-faktor lain ikut pula berfungsi sebagai penunjang kesuburan tanah, misalnya produk-produk vulkanis hasil-hasil proses pelapukan, berbagai mineral tanah, dan lain-lain.

Jawa Tengah sebagai bagian Indonesia termasuk dalam kategori daerah subur. Untuk jelasnya perlu ditinjau situasi geologisnya dalam garis besar saja. Menurut Dr. Ir. R.W. van Bemmelen geologi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

- (1) Daerah rendah sebelah utara dengan kelebaran maksimum kira-kira 40 km, yaitu daerah Brebes. Makin ke timur dataran rendah itu semakin sempit sampai kelebaran kira-kira 20 km saja, yaitu daerah antara Tegal dan Pekalongan. Selanjutnya dataran rendah itu berganti dengan deretan perbukitan yang ada kalanya menjorok sampai ke laut.
- (2) Di bagian tengah adalah pegunungan yang terdiri atas rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara adalah kelanjutan rangkaian dari Bogor, yang kemudian bersambung dengan rangkaian Pegunungan Kendeng.
- (3) Tanah Pegunungan Selatan, yang membujur sepanjang pantai selatan. Pegunungan ini merupakan kelanjutan rangkaian pegunungan dari zone Bandung, yang membujur sampai ke Jawa Timur.

Tentang curah hujan di Jawa Tengah, Dr. J. Bouman membedakan adanya tiga macam type hujan sebagai berikut.

- (1) Tipe hujan di daerah dataran rendah sebelah utara Pegunungan Serayu, termasuk Kali Bodri dan Ungaran, dengan rata-rata 676 - - 758 mm/bulan. Pada bulan kering yaitu Agustus angka curah hujan hanya 116 mm.
- (2) Tipe hujan daerah pantai utara Jawa Tengah dengan curah hujan rata-rata 416 -- 413 mm pada bulan-bulan Januari -- Pebruari. Pada bulan-bulan terkering yaitu Juli -- Agustus angka curah hujan hanya 62 -- 64 mm saja.
- (3) Tipe hujan daerah Progo dengan angka curah hujan bulan Januari -- Pebruari rata-rata 351 -- 379 mm per bulan.

Dengan situasi geologis dan curah hujan seperti tersebut di atas seolah-olah telah membagi Jawa Tengah menjadi daerah pertanian basah (sawah) dan daerah pertanian kering (tegalan) yang pada umumnya terdapat di dataran tinggi atau pegunungan. Dengan demikian praktis Jawa Tengah adalah daerah agraris-khususnya bagian pedalaman, sedangkan daerah pantai khususnya bagian utara memiliki sifat-sifat agraris - maritim. Sifat-sifat agraris - maritim itu besar sekali pengaruhnya terhadap perjalanan sejarah Indonesia dalam berbagai aspeknya, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Mengingat kondisi geologis dan tingkat sederhananya teknologi perkapalan serta pengetahuan navigasi pada waktu itu, sangat sulit bagi pantai selatan Jawa untuk tampil mengambil peranan dalam sejarah. Sebaliknya pantai utara Jawa Tengah lebih banyak memiliki faktor-faktor yang memungkinkannya tampil dalam arena sejarah. Faktor-faktor itu antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Umumnya terdiri atas dataran rendah lagi subur dengan berbagai hasil buminya terutama padi.
- (2) Dataran rendah tersebut merupakan pusat-pusat permukiman manusia, dengan berbagai budi daya dan aktivitasnya.
- (3) Terletak pada jalur pelayaran Nusantara serta dekat dengan jalur pelayaran internasional, sehingga memungkinkan timbulnya bandar-bandar atau pelabuhan seperti Bergota, Jepara (Pekalongan), Ujungnegara (Batang), Warungasem.
- (4) Ikut sertanya para penguasa setempat dalam aktivitas ekonomi/ perdagangan serta dukungan hinterland sangat menunjang peranan pantai utara Jawa Tengah itu.

Karena itulah zaman sejarah permulaan diawali dari bagian utara Pulau Jawa. Bukti-buktinya dapat dilihat pada Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah dapat dilihat pada hasil inventarisasi Verbeek (1891), Dr. N.J. Krom (1914), dan terakhir pada hasil inventarisasi Proyek Inventarisasi Peninggalan Purbakala Jawa Tengah (1974 - - 1975), yang semuanya memberikan kesan meratanya persebaran bukti sejarah di sepanjang pantai utara Jawa Tengah sejak awal periode klasik. Dalam hubungan ini adalah menarik sekali untuk menampilkan hasil ekskavasi Dr. Bronson (USA) bekerja sama dengan

jurusan Arkeologi Universitas Indonesia di daerah Rembang pada tahun 1975. Dari hasil ekskavasi itu diperoleh sejumlah bukti material kesejahteraan Dr. Bronson menaruh dugaan kuat adanya masyarakat yang sudah tumbuh di daerah itu dan berkembang dengan kebudayaannya pada sekitar abad ke-4 dan ke-5 setelah Masehi serta telah mempunyai hubungan perdagangan dengan Cina.

### 2.1.2 *Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan*

Kesuburan tanah Jawa telah memberi warna tersendiri atas perjalanan sejarah periode kuna. Doktor van Naerssen di dalam sebuah artikelnya berjudul *Some aspects of the Hindu Javanese Kraton* mengatakan bahwa situasi kondisional agraris itu berpengaruh langsung terhadap pembentukan sistem kemasyarakatan dan pemerintahan di Jawa, baik pada periode pra-Hindu maupun sesudahnya. Pada periode pra-Hindu rakyat hidup dalam ikatan masyarakat yang dinamakan wanua, yang melingkupi suatu wilayah tertentu. Mereka itu pada umumnya petani, dengan sumber penghidupan dari hasil pertaniannya. Di samping itu tentu saja sebagian kecil ada yang bekerja sebagai pedagang, perajin dan lain-lain. Penduduk yang dilahirkan di wanua disebut anak wanua. Sebuah wanua dikepalai oleh seorang pejabat yang bergelar rama. Seorang rama dipilih dan diangkat oleh masyarakat wanua itu. Tradisi memilih dan mengangkat rama itu telah melembaga dalam kebudayaan pra-Hindu, sehingga jabatan rama tidak merupakan jabatan yang bersifat turun-temurun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah wanua adalah sebuah lembaga demokratis yang otonom, paternalistis. Doktor H. Th. Fischer menyebutkannya dengan istilah "republik desa". Dalam melakukan tugasnya, rama dibantu oleh beberapa pejabat bawahan, misalnya hulair (pejabat urusan pengairan), tuha wereh (pejabat urusan kepemudaan), tuha alas (pejabat urusan kehutanan), dan lain-lain.

Dalam perkembangan sejarah terjadilah penggabungan beberapa wanua dalam suatu federasi. Penggabungan itu mungkin disebabkan oleh pertimbangan faktor air atau faktor-faktor lain. Dengan penggabungan itu wilayah federasi wanua itu semakin bertambah luas. Seorang rama tampil ke muka menjadi raka, memegang tampuk pimpinan mengkoordinasi pemerintahan. Muncullah sistem baru yang

dinamakan sistem kerakaan. Di dalam struktur baru itu kekuasaan seorang raka menjadi lebih tegas bilamana dibandingkan dengan kekuasaan seorang rama. Ia berkuasa mengatur pembagian air sungai yang mengalir beberapa wana yang berada di bawah kerakaannya, dan lain-lain kekuasaan yang sifatnya mengatur. Ia memerintah dari pusatnya, yang masing-masing dipimpin oleh ramanya, dan keraton sebagai pusat kerakaan.

Dalam perkembangan sejarah rupanya kerakaan yang satu dengan yang lain ada kecenderungan ingin saling menguasai sehingga pada suatu saat terjadi suatu kerakaan berhasil memperluas wilayah kerakaannya dengan cara menaklukkan kerakaan yang lain. Dengan datangnya pengaruh India, sistem kerakaan menjelma menjadi sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang semula demokratis peternalistis berubah menjadi otokratis. Raka menjadi raja, tegaknya kerajaan dan menjamin otoritas raja sebagai penguasa muncul tradisi dinasti yang sebelumnya lembaga ini tidak dikenal sama sekali.

Raja dengan otoritasnya mempunyai hak atas sebagian hasil rakyatnya berupa materi yang harus diserahkan kepadanya. Hak rajanya lazim disebut *drwya-haji* yang secara etimologis berarti milik raja. Melalui *drwya-haji* inilah raja dapat menimbun dana untuk berbagai macam keperluan, antara lain pembangunan. Di samping *drwya-haji*, raka berhak pula memungut jasa dari rakyatnya berupa tenaga untuk pembuatan berbagai proyek kerajaan, seperti pembuatan jembatan, jalan, bangunan suci dan lain-lain. Pemungutan jasa dari rakyatnya itu lazim disebut *gawai-haji*, yang berarti bekerja untuk raja.

Dalam periode Hindu-Jawa (juga periode Sailendra/Budha) *drawya-haji* dan *gawai-haji* merupakan lembaga-lembaga yang resmi dan dipatuhi. Melalui lembaga-lembaga inilah raja dan rakyatnya berkomunikasi.

Dalam periode kuna baik periode pra-Hindu maupun periode Hindu-Jawa (Sailendra-Budha) mendasarkan tegaknya kekuasaan pemerintahan terutama pada faktor pertanian. Dapat dikatakan sifat-sifat agraris merupakan sifat yang dominan bagi kerakaan dan kerajaan, meskipun ditunjang oleh sektor perdagangan, usaha kerajinan, dan lain-lain.



Sebagai penguasa tertinggi, raja berkuasa mutlak. Ia dibantu oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan seperti patih, mapatih (atau mahapatih), atau hino, sirikan dan halu seperti yang sering nampak pada prasasti. Untuk lebih mempertegas kekuasaannya itu, raja menggunakan gelar maharaja, yang dikukuhkan dengan upacara resmi oleh pendeta keraton. Gelar maharaja yang agung itu belum tentu menjamin keluasan wilayah yang dikuasainya. Kenyataan wilayah kekuasaan para maharaja seperti yang tercantum dalam prasasti Balitung (907) tidak pernah melebihi luas Jawa Tengah sekarang, tetapi secara ekstrim dipuja sebagaimana layaknya memuja dewa, dan dari sinilah pangkal tolak timbulnya tradisi kultus dewa raja.

Kalau raja atau maharaja memerintah dari pusatnya keraton, maka di daerah-daerah tersusun pemerintahan yang dikepalai oleh semacam raja kecil hierarkis ke bawah sampai ke pemerintahan tingkat wanua. Maka tersusunlah suatu sistem pemerintahan yang piramidal, dengan maharaja menempati puncak dan wanua-wanua terletak pada dasar piramid. Roda pemerintahan diatur dan dikendalikan dari pusat keraton ke bawah, sedangkan dari bawah rakyat taat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai kawula. Di sini tampak adanya jalur ketaatan vertikal.

Dari sumber-sumber sejarah yang tersedia sampai sekarang diketahui bahwa di Jawa Tengah pernah tumbuh dan berkembang dua kerajaan. Masing-masing Kerajaan Mataram Hindu yang diperintah oleh dinasti Sanjaya dan Kerajaan Sailendra yang diperintah oleh dinasti Sailendra yang menganut agama Budha. Dari tinggalan-tinggalan kedua dinasti itu berupa candi-candi dapat diduga bahwa dinasti Sanjaya menguasai Jawa Tengah bagian utara dan dinasti Sailendra menguasai Jawa Tengah bagian selatan. Antara kedua kerajaan itu secara kultural dapat terjalin hubungan-hubungan damai berkat adanya sikap yang toleransi di kalangan penganut agama Hindu dan Budha. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan tampilnya lukisan Dewa Hindu Kuwera beserta saktinya Hariti pada dinding portal Candi Mendut. Bukti yang paling unik dan meyakinkan ialah disamakannya dewa-dewa Hindu Brahma, Wisnu dan Syiwa dengan Manjusri pada prasasti kelurak (782). Namun demikian dalam hubungan politik antara kedua dinasti itu terdapat persaingan yang

tajam, bahkan pernah memuncak dalam bentuk peperangan seperti diceritakan dalam prasasti Ratu Baka (856). Menurut prasasti Ratu Baka, Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya berhasil mengalahkan Balaputradewa dari dinasti Sailendra dalam suatu peperangan dahsyat. Balaputradewa ternyata dapat meloloskan diri ke Sumatera dan berkuasa di sana. Hal itu dapat diketahui melalui prasasti Nalanda (860) yang dikeluarkan oleh Raja Dewapaladewa dari dinasti Pala di India.

Meskipun secara politis kekuasaan dinasti Sailendra atas Jawa praktis telah lenyap, tetapi *claim* Sailendra atas Jawa rupanya tidak pernah dilepaskan, sekalipun pusat kekuasaan politik telah bergeser ke Jawa Timur. Peristiwa pralaya yang tragis menimpa Raja Dharmawangsa di Jawa Timur abad ke-11 tidak dapat dilepaskan dari alasan-alasan politik yang mendasari *claim* itu.

## 2.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat

Mengingat sifatnya sebagai daerah agraris seperti diterangkan di atas, wajar bilamana sektor pertanian menempati kedudukan utama dalam bidang perekonomian, bahkan merupakan tulang punggung bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan negara pada umumnya. Prasasti Canggal memberikan ilustrasi kepada kita bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang menghasilkan beras. Berita dari prasasti Canggal (732) itu dapat ditafsirkan, bahwa kemungkinan besar beras merupakan hasil bumi utama bagi Pulau Jawa di samping hasil bumi yang lain.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup primer, tentu saja hasil bumi itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kelebihannya dikonsumsi untuk pasaran guna memungkinkan para petani memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain yang sifatnya kurang primer. Misalnya untuk membayar pajak, membeli peralatan untuk keperluan bermacam-macam upacara, dan lain-lain.

Penemuan bermacam benda keramik asing dan mata uang asing membuktikan adanya hubungan ekonomi-perdagangan dengan bangsa lain. Dalam hubungan ini kelebihan produksi pertanian dapat diekspor, sementara dari bangsa-bangsa lain dapat diperoleh barang-barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Mengenai perdagangan kuno Indonesia dengan bangsa asing itu, Dr. J.C. van Leur menunjukkan adanya jalur

pelayaran perdagangan dari Cina ke India dari Asia Barat melalui Selat Malaka. Dalam aktivitas perdagangan kuna, Indonesia secara aktif ikut terlibat pula. Keterlibatan itu wajar, mengingat hasil-hasil bumi Indonesia banyak digemari dan dibutuhkan oleh pasaran dunia waktu itu, misalnya rempah-rempah, kapur-barus, lada, beras, dan lain-lain. Lebih jauh van Leur berpendapat, bahwa dalam perdagangan kuna itu raja dan kepala daerah ikut pula ambil peranan di samping para saudagar dan bangsawan. Tentang keputusan-keputusan dari Sumatra dan Jawa ke Cina yang membawa barang-barang berharga itu, lazimnya dianggap sebagai bentuk penyerahan upeti kepada kaisar. Namun demikian kaisar Cina juga memberikan barang-barang berharga keluaran negerinya kepada keputusan-keputusan Indonesia itu sebagai hadiah. Dalam kaitan ini, berita itu dapat ditafsirkan sebagai kunjungan misi yang mendukung usaha-usaha promosi dalam bidang usaha perdagangan. Jadi pemberian-pemberian itu bermotifkan ekonomi, bukan lagi harus ditafsirkan politik sebagai tanda takluk kepada kaisar. Melalui perdagangan internasional inilah barang-barang Indonesia dikenal di Asia Timur, Asia Tenggara, India, dan Asia Barat, bahkan dikenal di dunia Barat.

Di samping usaha pertanian menempati kedudukan utama dalam perekonomian, masih ada usaha-usaha lain di sektor ekonomi yang menunjang kemakmuran. Dari prasasti-prasasti yang tersedia sampai sekarang ini kita dapati sederetan jenis-jenis usaha misalnya pandai emas-perak-perunggu, tukang-kayu, tukang anyam, tukang kulit, tukang celup, pembuat barang pecah-belah, pembuat gula, tukang kapur, tukang sirih, dan lain-lain di samping usaha-usaha perdagangan yang telah di sebutkan di atas.

Dengan adanya kemakmuran dan lembaga dwya haji serta gawai haji, raja-raja khususnya di Jawa mampu membuat bangunan-bangunan megah kolosal seperti candi-candi, istana, dan lain-lain yang sisasisanya dapat kita saksikan sampai sekarang. Rakyat dengan lembaga gotong-royongnya dapat menyiapkan material bangunan, di pihak lain raja dengan pendeta keraton memegang pimpinan dan pimpinan spiritual, merupakan komponen-komponen bagi terciptanya suatu bangunan besar seperti tersebut di atas itu. Melalui lembaga drawya haji dan gawai haji inilah rakyat berkomunikasi dengan keraton.

Dengan berkembangnya kebudayaan India khususnya Hindu di Jawa, akan segera menimbulkan pertanyaan, apakah di Jawa juga berlaku sistem kasta seperti halnya di India ? Pertanyaan ini wajar, karena di India berlaku sistem kasta yang membagi masyarakat dalam empat kasta besar (catur warna). Dengan demikian ada empat lapisan dalam tata kehidupan kemasyarakatan, yang batas-batasnya sangat tajam. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan, bahwa orang yang dilahirkan dari kasta yudra tidak mungkin “naik” status kemasyarakatan ke kasta waisya. Hal ini disebabkan berlakunya paham, bahwa “orang dilahirkan dalam kasta”.

Mengenai ada atau tidaknya lembaga kasta dalam tata pergaulan dalam masyarakat Jawa Kuna Dr. J.G. de Casparis pernah melakukan studi khusus atas sejumlah prasasti, yang publikasinya pernah dimuat dalam majalah purbakala Amerta. Objek studinya adalah masyarakat Jawa Kuna dengan menggunakan sumber utama prasasti dibantu oleh sejumlah hasil kesusastraan Jawa sebagai sumber sekunder. Dari sumber prasasti-prasasti Jawa diperoleh kesan hampir seluruhnya berisikan penetapan daerah-daerah perdikan yaitu tanah-tanah (kebanyakan sawah) yang dibebaskan dari semua beban pembayaran pajak karena anugrah raja. Hak-hak atas pajak dan gugur gunung yang terletak pada tanah itu diserahkan kepada pembesar-pembesar keagamaan yang akan mempergunakan hasil dari hak-hak raja itu untuk pemeliharaan bangunan-bangunan raja. Pada upacara peresmian suatu daerah perdikan diucapkan sumpah-kutukan terhadap siapa saja yang berani mengubah ketetapan raja, dengan sangsi-sangsi hukuman. Dengan pengukuhan seperti itu dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai ada perubahan-perubahan ketetapan raja di kemudian hari, misalnya karena raja berikutnya menganut agama lain. Di dalam upacara pengukuhan itu hadir pula saksi-saksi, antara lain dari kalangan pejabat kerajaan. Dengan penetapan daerah perdikan, rakyat tidak lagi akan didatangi oleh pejabat-pejabat urusan pajak kerajaan seperti banyak disebut di dalam prasasti-prasasti dengan istilah mengilala drwya haji.

Dari penyelidikan atas sumber-sumber prasasti itu terlihat adanya empat golongan di dalam struktur kemasyarakatan Jawa Kuna. Golongan pertama yang terbesar jumlahnya ialah penduduk desa.

Golongan ini yang umumnya terdiri atas golongan petani merupakan anasir pasif di dalam setiap perubahan. Golongan kedua ialah agama. Golongan ini terdiri atas para pedenda candi-candi, atau mereka yang tinggal di wihara-wihara dan kalangan spiritual lainnya. Golongan ketiga ialah raja beserta keluarganya dan mereka yang secara langsung bergantung kepada keraton, misalnya pegawai dan seniman keraton. Di samping ketiga golongan tersebut, masih terdapat golongan keempat yang terdiri atas golongan pedagang dan pengusaha seperti yang sering disebut di dalam prasasti misalnya pandai besi, tukang celup, tukang belanga, pembuat gula, tukang anyam, dan lain-lain.

Sepintas lalu dengan adanya empat golongan di dalam strata sosial Jawa Kuna itu, mudah menimbulkan asosiasi adanya persamaan dengan sistem empat kasta yang berlaku di dalam strata sosial di India. Sepintas lalu memang demikian, tetapi ada perbedaan-perbedaannya, terutama di dalam segi karakteristiknya. Di India, sistem kasta berlaku dengan sangat keras, sehingga ada garis pemisah yang tajam antara kasta satu dengan yang lain. Di Jawa tidak dijumpai bukti-bukti yang menunjukkan berlakunya sistem kasta yang keras seperti di India. Itulah sebabnya Dr. Casparis di dalam akhir studinya tentang struktur masyarakat Jawa Kuna dengan menggunakan sumber-sumber prasasti berkesimpulan bahwa pembagian kasta-kasta di dalam masyarakat Jawa Kuna sebenarnya tidak ada.

Kalau kesimpulan Dr. Casparis itu benar, dapatlah dikatakan bahwa perhubungan di dalam masyarakat Jawa Kuna itu tidak sekaku seperti di India. Dengan mengendornya pengaruh kebudayaan India, dan semakin menonjolnya kebudayaan Jawa seperti diperlihatkan di dalam sejarah klasik periode Jawa Timur, terjadilah perubahan-perubahan di dalam sistem perhubungan antargolongan. Misalnya pada masa pemerintahan Airlangga dikeluarkan banyak prasasti, antara lain prasasti Kelegen (1037). Dalam prasasti Airlangga itu antara lain ditetapkan tentang (1) pembangunan tanggul pada Sungai Brantas di Kamalagyan dekat Waringin Sapta dan (2) pengakuan kepada ketiga mazhab yang resmi, yaitu Ciwa, Budha, dan kaum pertapa, seperti disebut dalam prasasti Kelegen.

Dari contoh prasasti Airlangga itu dapat diketahui, bahwa pembangunan tanggul sebenarnya merupakan usaha-usaha raja yang

mempunyai fungsi sosial, karena bangunan itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum (petani, pedagang, dan lain-lain). Pembangunan tanggul ini rupanya dimaksud sebagai balas jasa Airlangga kepada masyarakat umum, sehingga ia dapat lolos dari ancaman pralaya sampai ia tegak menjadi raja Kahuripan. Demikian juga pengakuan Airlangga kepada tiga mazhab aliran kepercayaan itu mempunyai motif balas jasa.

Bukti lain tentang perubahan di dalam struktur perhubungan antargolongan ini kiranya dapat dilihat dari hasil-hasil kesusastraan. Dari *Cerita Panji* terlihat penyamaran-penyamaran Raden Panji atau kekasihnya di tengah-tengah masyarakat desa, sedangkan dari sumber *Pararaton* disajikan kisah pengembaraan Raden Wijaya menantu Raja Kertanegara dari desa satu ke desa lain untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh.

Demikianlah dari keterbatasan sumber sejarah, dapat diketahui serba sedikit tentang golongan-golongan dalam struktur masyarakat Jawa Kuna, dan bagaimana perhubungan antargolongan-golongan itu.

Tentang kepemimpinan dan bagaimana masyarakat diatur sumber-sumber yang sampai kepada kita tidak banyak. Pada periode Jawa Tengah kuna baik pada masa kekuasaan Sanjaya dan Sailendra tidak banyak pula yang kita ketahui tentang kepemimpinan dan pengaturan masyarakat. Namun demikian dari prasasti-prasasti dapat diperoleh gambaran sedikit tentang kepemimpinan itu, yang dalam garis besarnya ada dua macam yaitu (1) kepemimpinan duniawi, yang dalam manifestasinya dipegang oleh raja beserta aparatnya, dan (2) kepemimpinan kerohanian, yang dalam manifestasinya dipegang oleh para pendeta, baik dari agama Hindhu maupun Budha (pada periode Jawa Timur unsur kepemimpinan kerohanian ini bertambah dengan diakuinya lembaga kepercayaan Nusantara, seperti yang berlaku pada masa pemerintahan Majapahit).

Bentuk pemerintahan negara pada periode Jawa Tengah kuna sampai abad ke-9 tidak banyak diketahui. Barulah pada masa pemerintahan Raja Rakai Kayuwangi dapat terungkap sedikit struktur pemerintahan yang garis besarnya adalah sebagai berikut.

- (1) Pemerintahan pusat; Raja memerintah dari pusat atau keraton, dibantu oleh suatu Dewan Penasihat merangkap staf pelaksana terdiri atas lima orang patih. Dewan ini diketuai oleh seorang ma (ha) patih.
- (2) Pemerintahan desa; pada tingkat desa ini pemerintahan dilakukan oleh suatu dewan yang lazim disebut “rama ni dusun”, yang secara etimologis berarti “orang-orang tua” dari dusun. Keanggotaan rama ni dusun ini ditetapkan melalui pemilihan. Dengan demikian lembaga rama ni dusun mempunyai sifat-sifat demokratis. Jumlah anggota ini sangat tergantung kepada besar-kecilnya desa, artinya semakin besar desa itu semakin banyak jumlah anggota rama ni dusunnya. Namun demikian, jumlahnya selalu dalam kelipatan 4, misalnya 4, 8, 12, 16, dan seterusnya.

Kemungkinan besar tipe pemerintahan seperti tersebut di atas masih dipertahankan sampai saat-saat perpindahan pusat pemerintahan ke Jawa Timur pada awal abad ke-10.

Pada periode Jawa Timur, dapat diperoleh gambaran yang relatif jelas tentang struktur pemerintahan, khususnya pada masa pemerintahan Majapahit. Dibanding dengan masa sebelumnya memang masa pemerintahan Majapahit ini dapat dikatakan paling jelas. Hal ini disebabkan sumber-sumbernya lebih lengkap dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan ditampilkan struktur pemerintahan zaman Majapahit. Dalam garis besar, struktur pemerintahan Majapahit terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 1) Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terdiri atas susunan pemerintahan sebagai berikut.
  - a) Pucak pimpinan negara  
Pucak pimpinan negara dipegang oleh raja.
  - b) Dewan Penasihat Raja  
Badan ini berfungsi memberikan nasihat atau pertimbangan kepada raja, khususnya dalam proses pemecahan masalah yang sulit. Anggota badan ini pada zaman Raja Hayam Wuruk terdiri atas Kertawardana sebagai ayahanda Raja Hayam



Wuruk bersama Bhre Kahuripan ibunda raja. Kemudian raja Wengker beserta Bhre Daha bibinda Hayam Wuruk, Raja Matahun beserta Bhre Lasem adik perempuan Hayam Wuruk, dan raja Paguhan beserta Bhre Pajang adik perempuan Hayam Wuruk.

c) Mahamentri dan mentri

Prasasti lembaga Jambangan yang dikeluarkan Raja Hayam Wuruk menyebut adanya tiga mahamentri, masing-masing mahamentri hino, mahamentri sirikan, dan mahamentri halu. Juga disebut dua macam jabatan perwira tinggi masing-masing dengan gelar sang aria senapati dan sang aria atmareja. Kemudian prasasti itu masih menyebutkan tiga jabatan tinggi, yaitu rakyen kanuruhan-rakyan rangga-rakyan tumenggung.

d) Sang panca ri Wilwatika

Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, yang terdiri atas lima orang pejabat tinggi. Kelima pejabat tinggi itu ialah : (1) Rakryan mapatih amangku bumi, yaitu pejabat yang mengetahui lembaga Panca ri Wilwatikta. Pada pemerintahan Hayam Wuruk jabatan ini dipegang oleh Gajah Mada, (2) Rakryan demung, (3) Rakryan kanuruhan, (4) Rakryan rangga, dan (5) Rakryan tumenggung.

e) Dharmadyaksa : keagamaan

Lembaga ini berfungsi mengurus soal-soal keagamaan, terdiri atas dua dharmadyaksa yang dibantu oleh tujuh upapatti. Dua dharmadyaksa itu adalah : (1) Dharmamadyaksa ring kacewan, yang mengurus soal-soal keagamaan Hindu, khususnya Siwa, dan (2) Dharmadyaksa ring kasogatan, yang mengurus soal-soal keagamaan Budha. Perlu dicatat di sini, bahwa di samping kedua agama resmi itu, berkembang juga kepercayaan nusantara.

f) Mahkamah Agung

Lembaga ini mengurus masalah hukum dan peradilan. Petugas yang berfungsi menegakkan hukum disebut "panikah



cri narendradhipa". Pada masa pemerintahan Majapahit dipakai kitab Kutaramanawa sebagai kitab undang-undang pidana sebagai pemegang pejabat hukum.

- 2) Pemerintahan Daerah; dalam wilayah Kerajaan Majapahit terdapat banyak kerajaan kecil yang diperintah oleh rajanya masing-masing yang tunduk kepada pemerintahan pusat Majapahit. Juga dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil itu terdapat struktur pemerintahan, yang dalam garis besarnya sama dengan struktur pemerintahan pusat, artinya ada jabatan patih, dharmadyaksa, tumenggung, dan lain-lain. Daerah-daerah yang tidak dikepalai oleh raja kecil diperintah oleh pejabat dengan gelar adipati (kerajaan kecil atau tingkat kedingan) dikepalai oleh raja kecil atau adipati yang selanjutnya dibantu oleh pelaksana eksekutif yang disebut pencatanda. Selanjutnya secara hierarkis ke bawah di jumpai pejabat-pejabat pemerintahan seperti juru, wedana, akuwu, dan buyut. Buyut adalah semacam kepala desa, yang bertanggung jawab atas keberhasilan pemerintahan desa, sedangkan akuwu adalah pejabat yang bertugas mengkoordinasi sejumlah desa/buyut. Di atas akuwu adalah wedana, yang merupakan bawahan langsung juru. Untuk mengatur pemerintahan desa dipakai kitab undang-undang Pratigundala, terutama untuk mengatur persoalan agraria.

Dengan adanya struktur pemerintahan yang relatif tersusun rapi dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah dan desa, maka penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan rapi pula. Kerapian penyelenggaraan pemerintahan ini berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan, terutama kesejahteraan umum dan kemakmuran.

### 2.3 *Kehidupan Seni Budaya*

Sebelum dibicarakan kehidupan seni budaya (kultur) terlebih dahulu perlu ditinjau masalah masuknya pengaruh kebudayaan India dan perkembangannya di Indonesia. Hal ini dipandang penting, mengingat kebudayaan asing ini melalui proses akulturasi, adaptasi, dan seleksi sangat besar pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan pada periode klasik. Dalam hubungan ini pengertian kebudayaan India mencakup dua kepercayaan, yaitu Hindu dan Budha, sedangkan

pengaruhnya dalam kebudayaan Indonesia yang jelas nampak pada bidang-bidang senirupa, agama, kesusastraan, politik.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pengertian “pengaruh Hindu” dapat disimpulkan sebagai berikut. Suatu perluasan kebudayaan dari India yang berdasarkan atas sistem kerajaan dan ditandai dengan agama Hindu dan Budha, mitologi dari kitab-kitab Purana, berbakti menurut dharma serta mempergunakan bahasa pengantar bahasa Sanskerta.

Tentang masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia menimbulkan permasalahan yang berkisar kepada pertanyaan, siapakah atau golongan manakah yang memasukkannya. Meskipun belum ada penyelesaian yang memuaskan, di sini patut dikemukakan beberapa teori klasik yang mencoba menerangkan masalah tersebut di atas sebagai berikut.

#### (1) Teori Waisya

Teori ini menerangkan bahwa kedatangan orang India ke Indonesia adalah karena dorongan motif ekonomi/perdagangan yang menguntungkan mereka, terutama perdagangan rempah-rempah, beras, dan sebagainya. Bilamana pedagang-pedagang India itu telah menemukan tempat yang memungkinkan mereka itu memperoleh pasaran bagi barang dagangannya serta dengan mudah dapat memperoleh barang dagangan dari Indonesia, mereka kemudian bermukim di situ untuk sementara atau menetap. Dengan demikian terbentuk koloni-koloni dagang, yang sekaligus merupakan pusat-pusat kebudayaan. Dari situlah tersiar kebudayaan asing itu di kalangan penduduk sekitarnya, atau terbawa oleh pedagang-pedagang Indonesia yang berhubungan dengan koloni-koloni itu.

#### (2) Teori Brahmana

Secara fungsional kaum Brahmana dianggap serba memahami kitab-kitab suci Hindu dan dianggap pula serba tahu akan berbagai upacara-upacara keagamaan. Di samping itu kaum Brahmana dianggap pula dapat memberi perlindungan terhadap kodrat-kodrat yang lebih tinggi. Karena kelebihan dan kepandaian mereka dalam bidang spiritual itulah maka kehadiran kaum Brahmana diharapkan dapat memberikan nasihat atau jasa-jasa pertolongan lain yang bersifat non-

spiritual. Melalui merekalah pengaruh Hindu itu masuk dan kemudian berkembang.

### (3) Teori Petualangan (avonturir).

Petualang ini terdiri atas para ksatria perampok yang bersenjata, yang dengan sejumlah anak buahnya melakukan kegiatan-kegiatan perampokan di negeri asing dengan menggunakan kapal, antara lain sampai ke Indonesia. Pada suatu saat mereka membentuk suatu pemukiman di suatu tempat. Di situ mereka hidup bermasyarakat, berdamai dengan penduduk setempat, bahkan ada di antara mereka yang menikah dengan orang Indonesia. Lambat-laun masyarakat di sekitarnya mengikuti tradisi-tradisi Hindu.

### (4) Teori Pengungsi

Kaum pengungsi ini terdiri atas warga India yang terpaksa meninggalkan tanah airnya, karena timbulnya berbagai pergolakan politik yang mengakibatkan mereka itu merasa tidak aman. Dalam pengungsianannya, antara lain mereka menemukan tempat tinggal yang aman di Indonesia. Tempat-tempat pemukiman mereka itu praktis merupakan pusat-pusat kebudayaan Hindu di luar India.

Demikianlah pokok-pokok teori klasik yang mencoba menerangkan masalah masuknya kebudayaan/pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia. Namun demikian kalau ditelaah secara mendalam keempat teori itu terlalu asing sentris, khususnya India sentris, dalam arti menempatkan bangsa Indonesia pada kedudukan sebagai obyek yang pasif.

Akhir-akhir ini muncul alternatif-alternatif baru yang mencoba menampilkan peranan bangsa Indonesia sebagai subyek aktif dalam proses masuknya kebudayaan asing itu.

Di bagian muka telah disinggung tentang jalur perdagangan laut internasional. Melalui jalur perdagangan itu pulalah masuknya berbagai kebudayaan dan pengaruh-pengaruh asing lain ke Indonesia seperti yang pernah diterangkan oleh van Leur. Prasasti Nalanda (860) yang ditemukan di bekas bangunan Universitas Nalanda (India) membuktikan banyaknya orang Indonesia yang datang ke India untuk memperdalam pengetahuan mereka, khususnya pengetahuan agama Budha. Jadi jelas orang Indonesia berfungsi sebagai subjek yang aktif.

Proses yang serupa terjadi pada kira-kira 1.000 tahun kemudian, tatkala pedagang-pedagang Indonesia membawa masuk dan menyiarkan agama Islam di Nusantara.

Sebelum pengaruh Hindu itu masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan sendiri yang relatif tinggi tingkatannya. Kebudayaan asli ini telah terbentuk melalui proses pembinaan dan pengembangan yang memakan waktu berabad-abad lamanya. Kebudayaan asli inilah yang akan bertemu dengan kebudayaan dari India yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke-2 Masehi.

Pertemuan kebudayaan asli dengan kebudayaan India berakibat timbulnya proses akulturasi, yang menimbulkan terbentuknya kebudayaan yang baru. Dalam proses akulturasi itu faktor local genius, faktor kecakapan adaptasi, dan faktor kecakapan seleksi dari bangsa Indonesia berperanan penting dalam pemberian bentuk kebudayaan yang baru itu. Dalam proses ini kebudayaan asli tidak lenyap sama sekali, melainkan sebagian unsurnya terserap masuk ke dalam kebudayaan yang baru itu (lazim disebut Hindu-Jawa) tidak sama benar dengan penerapannya di negeri asalnya. Buktinya dapatlah disaksikan pada hasil seni bangunan, seni arca, dan hasil-hasil kesusatraan. Candi-candi Hindu dan Budha di Jawa tidak sama bentuk arsitekturnya dengan bangunan serupa di India. Kita lihat stupa Borobudur tidak sama bentuknya dengan stupa Sanchi, bahkan fungsinya tidak sama pula. Candi-candi di Jawa pada prinsipnya lebih banyak menyerupai bangunan makam berundak pada zaman pra-Hindu. Bahwa kebudayaan asli itu tidak lenyap sama sekali dapat dibuktikan dengan munculnya proses *javanisatie* dalam periode sejarah kebudayaan Jawa Timur. Kecakapan adaptasi dan kecakapan selektif dalam rangka akulturasi, antara lain dapat dilihat pada bentuk seni arca, relief candi, dan kesusastraan *Ramayana*. Pengaruh kebudayaan Hindu/Budha itu mencakup berbagai aspek, antara lain kesusastraan, huruf, pengetahuan, kesenian, mitologi, bahasa Sanskerta, sistem kerajaan, dan masih banyak lagi yang lain.

Tentang masalah pendidikan pada periode klasik, tidak banyak kita ketahui karena kurangnya sumber yang sampai kepada kita, tetapi bilamana kita berpaling ke tradisi Hindu akan tampak adanya empat tahapan hidup yang harus dijalani oleh seseorang sejak lahirnya sampai meninggal. Keempat tahapan itu ialah sebagai berikut.

### 1) Brahmacarin

Pada tahap ini si anak masih dianggap belum dewasa dan merupakan masa untuk belajar pada seorang Brahmana atau pendeta. Pada hakekatnya masa ini merupakan masa persiapan bagi si anak untuk memperoleh bekal atau pegangan hidup bagi masa berikutnya, yaitu masa berumah tangga sendiri. Mengingat masa brahmacariah ini si anak berada di bawah asuhan pendeta, dapatlah diduga bahwa pendidikan diselenggarakan dalam sistem “gurukula” artinya selama waktu tertentu sampai program pendidikan itu selesai, si anak bertempat tinggal dalam satu kompleks bangunan pendidikan bersama gurunya. Sistem gurukula ini mengingatkan kita pada sistem pondok-pesantren. Kalau kita berfikir secara analogi dengan tradisi pendidikan di India itu, dengan mengingat faktor local genius kecakapan adaptasi, kecakapan selektif, maka pendidikan pada waktu itu dapat digambarkan seperti tersebut di atas. Di samping itu kesusastraan klasik India *Mahabarata* dan *Ramayana* sekali lagi telah diadaptasikan di Indonesia yang merupakan “ensiklopedi moral” mempunyai efektivitas tersendiri dalam segi pendidikan. Rama beserta pengikutnya atau Pandawa beserta pengikutnya merupakan lambang kebajikan yang patut ditiru, sementara Rahwana dan Kurawa yang merupakan lambang keangkaramurkaan dan berbagai sifat tidak baik lainnya wajib dijauhi atau tidak ditiru. Dengan asumsi demikian, mudahlah dipahami, pemahatan epos klasik itu di dinding candi Prambanan (*Ramayana*) dan dinding candi di Jawa Tengah, moral Budha (atau/relief pada dinding candi di Jawa Timur, misalnya relief Kunjarakarna, Partayana, Kresnayana, dan Arjunawiwaha pada candi Jago). Di samping melalui media hasil kesusastraan, seni juga dapat dipakai sebagai media pendidikan, misalnya seni rupa, seni tari, dan lain-lain.

### (2) Grhastha

Pada periode ini si anak telah dianggap dewasa dan sudah masanya mampu berumah tangga sendiri. Pada masa ini telah berdiri sendiri dan mempunyai tanggung jawab keluarga.

### (3) Wanaprasta

Pada periode ini orang mulai berpaling dari pandangan keduniawian, untuk merenungkan hakekatnya hidup dan sesudahnya.

#### (4) Sanyasa

Pada periode ini orang telah memandang selesai segala misi hidupnya di dunia dan telah siap untuk meninggal. Walaupun demikian dua sampai empat di Jawa Tengah tidak banyak dilakukan oleh rakyat pada umumnya. Tentang kesenian dan perkembangannya selama periode klasik tersedia agak banyak sumber-sumbernya. Pada hakekatnya kesenian merupakan suatu produk budi daya manusia langsung berhubungan dengan perasaan manusia, khususnya estetika. Karena itu kesenian selalu berkaitan dengan keindahan yang sanggup membangkitkan relasi yang nyata dalam penglihatan (visual) dan pendengaran (auditif). Seni rupa, seni tari, seni arca, dan sebangsanya berelasi dengan penglihatan karena memang dapat dilihat, sedang seni suara berelasi dengan pendengaran.

Perkembangan kesenian berupa seni rupa, seni tari dan seni suara periode klasik Jawa Tengah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

##### (1) Seni Rupa

Seni rupa di sini dibatasi pengertiannya sebagai produk seni yang berelasi dengan penglihatan, dalam hal ini khususnya berbentuk bangunan candi. Pada periode klasik Jawa Tengah pernah memerintah dua dinasti yang menganut agama yang berlainan, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dan dinasti Sailendra yang menganut agama Budha. Sehubungan dengan itu peninggalan-peninggalan candi di Jawa Tengah memperlihatkan dua corak keagamaan, yaitu candi yang bercorak Hindu dan bercorak kebudhaan. Kebanyakan candi-candi Hindu terdapat bertebaran di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan bangunan Budha kebanyakan terdapat di bagian selatan. Berdasarkan letak tinggalan-tinggalan inilah yang menimbulkan dugaan, bahwa dinasti Sanjaya berkuasa di bagian utara Jawa Tengah sedangkan Jawa Tengah bagian selatan di kuasai oleh dinasti Sailendra.

Candi-candi itu menurut anggapan klasik berfungsi sebagai makam, khususnya makam raja. Secara etimologis kata-kata candi berasal dari kata Sansakerta *chandikagrha*. *Candika* adalah nama lain untuk dewi Durga dalam fungsinya sebagai dewi kematian, sedangkan *grha* berarti rumah. Jadi *chandikagrha* berarti rumah kematian atau

tegasnya makam. Sesuai dengan pandangan hidup waktu itu, maka bangunan candi mempunyai susunan sebagai berikut.

- (1) Bhurloka, atau bagian bawah, yang secara simbolis menggambarkan dunia kehidupan bawah.
- (2) Bhuarloka, atau bagian badan candi, yang secara simbolis menggambarkan dunia kehidupan manusia.
- (3) Swarloka, atau bagian atap, yang secara simbolis menggambarkan dunia atas/surga.

Sesuai dengan fungsinya sebagai makam, maka pada bagian bhurloka terdapat sumuran candi tempat meletakkan kotak abu jenazah. Pada bagian badan candi (bhuarloka) terdapat patung yang menggambarkan tokoh yang meninggal yang abu jenazahnya dimakamkan di situ. Biasanya patung (atau lingga) ini ditegakkan di atas landasan joni. Terakhir pada bagian atap terdapat sebuah rongga kecil yang suci. Tempat persemayaman sementara bagi arwah yang telah meninggal. Sementara itu candi serta berbagai relief dan ornamentasi pada dinding candi semata-mata bersifat hiasan yang sekaligus menggambarkan Gunung Meru secara miniatur.

Dalam perkembangannya, candi-candi itu mengalami berbagai proses penyempurnaan bentuk dan proses adaptasi. Hal ini nampak dari bentuknya yang awal yaitu kecil dan sederhana, seperti tampak pada tipe Candi Dieng dan Gedongsongo, sampai kepada bentuknya yang indah dan kolosal seperti diperlihatkan oleh candi-candi Prambanan, Borobudur, dan lain-lain (dan perkembangan lanjut di Jawa Timur dengan bentuknya yang unik). Bentuknya yang unik itu tetap dengan fungsi yang tidak berubah disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain semakin mengendornya pengaruh Hindu dan tampilnya pengaruh kebudayaan Jawa yang semakin kuat. Tahap perkembangannya yang terakhir memperlihatkan tipe-tipe candi yang kerdil, seperti diperlihatkan oleh Candi Sukuh dan Ceta. Perkembangan terakhir ini sejalan dengan keruntuhan Majapahit, yang dianggap sebagai masa akhir periode klasik. Sementara itu bangunan-bangunan suci Budha peninggalan Sailendra di Jawa Tengah bagian selatan, memperlihatkan bentuk-bentuk yang tidak sama dengan candi Hindu. Hal ini wajar, mengingat perbedaan fungsi antara kedua jenis bangunan



itu. Kalau candi untuk pemakaman, maka Borobudur, Kalasan, Sewu, Plaosan. dan lain-lain berfungsi sebagai bangunan untuk pemujaan; tegasnya, bukan untuk pemakaman. Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah proses sinkretisme antara Hindu dan Budha. Sehingga manifestasinya dalam bidang seni bangunan nampak jelas. Lukisan-lukisan dewa Hindu ada yang terpahat pada dinding bangunan suci Budha, seperti Kuwera dan saktinya Hariti pada dinding portal Candi Mendut. Penyamaan Manjusri dengan Brahma-Whisnu-Siwa pada prasasti Kelurak (782) pada hakekatnya adalah gejala sinkretisme juga yang mulai nampak pada periode Jawa Tengah (proses lanjut sinkretisme tercapai pada periode Jawa Timur, seperti diperlihatkan oleh Kertanegara sebagai tokoh Siwa-Budha).

Perkembangan seni tari di Jawa Tengah tidak banyak diketahui, tetapi pada beberapa dinding candi (misalnya Sari) terdapat lukisan-lukisan penabuh gamelan/musik. Demikian pula relief Candi Prambanan terdapat lukisan-lukisan yang menggambarkan adegan gerak tari. Kesemuanya ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seni tari dan seni musik sudah dikenal pada waktu itu pada periode Jawa Timur khususnya zaman Majapahit. Raja Hayam Wuruk diberitakan oleh *Negarakertagama* sebagai "raja yang senang menari dengan topeng". Relief-relief pada beberapa dinding candi di Jawa Timur pun memperlihatkan adegan-adegan gerak tari. Kalau Raja Hayam Wuruk senang menarikan tarian topeng dapatlah diduga bahwa tarian itu telah merupakan tarian istana.

Perkembangan seni sastra di Jawa Tengah tidak kita ketahui. Dengan menunjuk pada bukti relief Ramayana pada Candi Prambanan, Prof. Dr. Purbatjaraka berkesimpulan bahwa kesusastaan *Ramayana* telah ditulis sejak pemerintahan Daksa atau Balitung. Analog dengan pendapat Purbatjaraka, maka buku-buku kesusastaan Budha (*Zalitaristara*, *Jakatamala*) mestinya sudah ada sejak zaman Borobudur. Berdasarkan bahasa yang dipakai pada prasasti Jawa Tengah dapatlah dikemukakan bahwa bahasa yang dipergunakan waktu itu ialah bahasa Sansakerta dan Jawa kuna. Pada periode Jawa Timur, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan dunia kesusastaan ini.



Hasil kesusastraan yang bermacam-macam itu, dari segi bentuknya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) kakawin, yakni hasil kesusastraan yang disusun dalam bentuk syair/puisi, (2) kidung, yang pada hakikatnya merupakan kesusastraan yang berbentuk puisi, tetapi di dalam susunan syairnya tidak terlihat oleh peraturan-peraturan syair Sanskerta, dan (3) gancaran, yakni hasil kesusastraan yang disusun dalam bentuk karangan yang bebas cara penulisannya.

#### *2.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan*

Dalam kronik dinasti T'ang yang memerintah Cina (618--906), dicatat tentang Kerajaan Ho-ling. Menurut catatan kronik itu, penduduk Ho-ling biasa makan tanpa menggunakan senduk atau cupit, melainkan dengan jari-jari tangannya dan gemar minum semacam tuak yang mereka buat dari getah bunga kelapa. Mereka telah mengenal ilmu falak, khususnya perbintangan. Ibu kota Kerajaan Ho-ling dikelilingi dengan pagar yang terbuat dari kayu. Raja mendiami istana bertingkat dua yang beratapkan daun palma. Pada tahun 674--675 rakyat Ho-ling memilih dan mengangkat seorang ratu bernama Si-mo. Konon ratu ini memerintah dengan sangat keras namun bijaksana sehingga Ho-ling menjadi negara yang aman. Dicatat pula bahwa Ho-ling mempunyai sebuah bukit yang disebut Lang-pi-ya, yang sering dikunjungi raja untuk melihat laut. Sampai tahun 813 Ho-ling masih mengirim utusan ke Negeri Cina dengan membawa "hadiah" berupa empat orang budak Sen-ki, burung kakatua, dan sejumlah jenis burung lainnya.

Dari sumber berita Cina itu, Prof. Dr. N.J. Krom berpendapat bahwa pada akhir abad ke-7 telah ada seorang ratu yang memegang tampuk pemerintahan. Tentang Ho-ling, Prof. Dr. N.J. Krom menunjuk lokasinya di Jawa Tengah. Tentunya akan segera timbul pertanyaan, di bagian Jawa Tengah mana? Kalau berita kronik dinasti T'ang menyebutkan bukti Lang-pi-ya yang sering dikunjungi raja untuk melihat laut, besar sekali kemungkinannya Ho-ling terletak di Jawa tengah bagian pesisir utara. Kemungkinan Ho-ling terletak di Jawa Tengah bagian pedalaman atau bagian pesisir selatan, amat sukar untuk diterima akal, mengingat kondisi geologisnya, tingkat teknologi navigasinya, serta terasingnya dari jalur pelayaran Nusantara dan jalur

pelayaran internasional. menarik disebutkan di sini penyelidikan Drs. R. Pitono, yang berkesimpulan bahwa Kerajaan Ho-ling kemungkinan terletak antara Pudukpayung-Salatiga.

Tentang kehidupan keagamaan sekali lagi sumber kita hanya dari catatan perjalanan I-tsing, seorang pendeta Budha dari Cina yang pernah melakukan perjalanan ziarah ke India lewat laut dan pernah lama tinggal di Sriwijaya dan kronik dinasti Sung. Dikatakan bahwa pada tahun 664--667 pendeta Budha Cina bernama Hwui-ning dengan pembantunya Yun-ki datang ke Ho-ling. Di sana kedua ulama Budha itu bersama-sama dengan pendeta Joh-na-po-t'o-lo menerjemahkan kitab suci Budha bagian *Nirwana*. Terjemahan inilah yang dibawa pulang ke Negeri Cina. Menurut I-tsing, kitab suci Budha yang diterjemahkan itu sama sekali berbeda dengan teks *Nirwana Budha Mahayana*. Menurut catatan dinasti Sung yang memerintah Cina setelah dinasti T'ang, terbukti bahwa yang diterjemahkan oleh Hwui-ning dengan Yun-ki bersama Jnanabhadra itu adalah kitab *Nirwana* bagian terakhir yang menceritakan pembakaran jenazah Sang Budha, dengan sisa tulang-tulang yang tidak habis terbakar dikumpulkan untuk dijadikan relik suci. Dengan demikian jelas, bahwa Ho-ling tidak menganut agama Budha Mahayana tetapi Budha Hinayana aliran Mulasarastiwada. Kronik dinasti Sung juga menyebutkan, bahwa yang memimpin dan mentahbiskan Yun-ki menjadi pendeta Budha adalah Jnanabhadra.

Dari berita Cina itu dapat disimpulkan, bahwa Ho-ling adalah kerajaan di Jawa Tengah yang menganut agama Budha Hinayana aliran Mulasarastiwada, dan telah menjadi pusat pengembangan agama yang termashur. Lokasinya di antara Pudukpayung-Salatiga, telah berdiri paling tidak sejak abad ke-7 sampai abad ke-9. Sayang dari Kerajaan Ho-ling itu tidak ditemukan sumber-sumbernya dari dalam negeri sendiri, dan sayang pula tidak ditemukan tinggalan-tinggalannya.

Sementara itu menarik sekali untuk menampilkan penemuan sebuah prasasti batu di Desa Sojomerto (1963), Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Tempat penemuan prasasti ini tidak jauh letaknya dari Laut Jawa, sehingga praktis termasuk kawasan pesisir Jawa Tengah bagian utara.

Menurut publikasi Drs. Buchari yang telah meneliti dan melakukan studi mendalam atas prasasti itu, prasasti itu secara palaeografis berasal dari abad ke-7. Penguasa yang mengeluarkan prasasti itu bergelar Dapunta Salendra, sedangkan bahasanya Sanskerta bercampur Melayu kuna, yang mengingatkan kita kepada bahasa prasasti Sriwijaya. Dari prasasti itu jelas diketahui, bahwa agama yang dipeluk oleh Dapunta Selendra adalah Hindu. Dari sumber-sumber tersebut dapatlah diperoleh gambaran, bahwa setidaknya-tidaknya sejak abad ke-7 di Jawa Tengah Utara telah berkembang dua macam agama yaitu Budha Hinayana aliran Mulasarastiwada dan agama Hindu, masing-masing di bagian timur dan barat.

Tanda-tanda adanya kehidupan keagamaan di Jawa Tengah bagian pedalaman nampak melalui prasasti Tukmas, yang ditemukan di Desa Dakawu, Kewedanaan Grabag pada lereng Gunung Merbabu. Prasasti itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sansakerta, sementara di dekat deretan huruf terdapat lukisan atribut kehinduan seperti trisula, kamandalu, paracu, cangka, cakra, dan lain-lain. Secara palaeografis, Prof. Dr. Poerbatjaraka menafsir prasasti Tukmas ini berasal dari tahun 500. Isi prasasti ialah mengenai pemujaan air jernih yang keluar dari sumber mata air yang mengalir seperti Sungai Gangga. Dari lukisan-lukisan atribut tersebut kiranya jelas bahwa Hinduisme yang berkembang waktu itu adalah Hindu Siwa dan Hindu aliran Wishnu (cakra-atribut Wishnu). Dengan menyamakan air yang mengalir jernih seperti Sungai Gangga, dapat diduga bahwa sumber Hinduisme yang berkembang di situ berasal dari daerah sekitar Teluk Benggala.

Selanjutnya dari prasasti Canggal (732) dapat lebih banyak diketahui kehidupan keagamaan di Jawa Tengah waktu itu. Kita ketahui prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Sanjaya, yang turun temurun memerintah Mataram selama kira-kira dua abad lamanya. Dalam prasasti Canggal itu disebut-sebut dewa Trimurti, yaitu Brahma-Wishnu-Siwa. Dengan disebutnya Siwa berulang kali lebih banyak dari pada kedua dewa lainnya, kiranya jelas bahwa Hinduisme waktu itu condong sekali kepada aliran Siwa. Hal ini dipertegas lagi oleh strophe tujuh prasasti itu yang antara lain menyebutkan "pulau (Jawa) yang penuh dengan tempat-tempat pemujaan suci, terutama pemujaan lingga." Dalam sejarah kebudayaan Hindu kita ketahui, bahwa lingga

merupakan salah satu personifikasi simbolis Dewa Siwa. Dengan demikian jelas, bahwa pada zaman Sanjaya, Mataram menganut agama Hindu aliran Siwa. Tinggalan dari zaman Sanjaya tidak banyak ditemukan, mungkin Candi Wukir yang tidak jauh letaknya dari tempat ditemukannya prasasti Canggal itu merupakan tinggalan raja ini.

Kira-kira 50 tahun kemudian, tepatnya tahun 778 ditemukan prasasti Kalasan. Berbeda dengan prasasti Canggal, prasasti Kalasan ini bersifat Buddhistis ditujukan untuk memuja Dewi Tara. Kali ini agama Budha yang dianut oleh Raja Tejapurna Panamkarana adalah Budha aliran Mahayana. Agaknya prasasti ini merupakan satu kesatuan dengan Candi Kalasan, karena di dalam teksnya disebut tentang pembebasan desa Kalaca guna pembangunan monumen suci untuk memuja Dewi Tara. Di muka tangga masuk Candi Kalasan terdapat sepotong batu yang lazim disebut *moon stone*, yang tidak terdapat pada candi-candi lain mana pun. Tradisi menempatkan *moon-stone* di depan tangga masuk candi ini terdapat di Amarawati India. Karena itu kemudian timbul dugaan bahwa Buddhisme yang berkembang waktu itu bersumber dari daerah Amarawati. Selanjutnya dari prasasti itu dapat diperoleh kesan adanya kerjasama antara kedua agama Hindu dan Budha.

Menyinggung tentang kerja sama antara kedua agama itu, adalah menarik sekali menunjuk prasasti Kelurak (782) yang ditemukan di Desa Kelurak beberapa puluh meter di sebelah utara Candi Prambanan. Prasasti ini menyebutkan tentang pemujaan (arca) Manjusri. Dengan demikian jelaslah bahwa agama yang dianut waktu itu ialah agama Budha Mahayana. Kecuali menyebut nama Raja Dharanindra, disebut pula Kumarogosha dari Gaudidwipa (Benggala-India). Kemungkinan Buddhisme yang berkembang berasal dari daerah Benggala. Penyamaran Manjusri dalam Buddhisme dengan Siwa-Wishnu-Brahma dalam Hinduisme jelas menunjukkan kerja sama yang erat antara kedua agama itu, bahkan secara ekstrim dapat ditafsirkan sebagai gejala adanya sinkretisme antara kedua agama itu. Di samping itu dapat pula ditafsirkan sebagai gejala timbulnya aliran Tantrisme di Jawa Tengah.

Terlepas dari bagian India mana sumber kedua agama yang berkembang di Jawa Tengah itu, telah kita lihat adanya dua macam agama yang berkembang sejak abad ke-8 yaitu agama Hindu dan

Budha, bahkan kemungkinan besar sejak abad ke-6 atau ke-7 seperti telah diterangkan di atas.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, antara kedua agama itu terdapat hubungan tenggang-menenggang yang harmonis, bahkan ada sementara unsur-unsur Hindu yang diserap ke dalam agama Budha, ataupun sebaliknya. Dewa Kuwera (dewa kekayaan) dari agama Hindu telah dipahatkan di dinding portal Candi Budha Mendut, sebaliknya Manjusri dari agama Budha disamakan dengan Brahma-Wishnu-Siwa dari agama Hindu. Contoh-contoh lain masih banyak, yang menunjukkan adanya bukti rasa tenggang-menenggang (toleransi) itu, misalnya Candi Hindu Prambanan berdiri megah di tengah-tengah kompleks bangunan Budha. Memang secara kultural tidak pernah terjadi peperangan antara kedua penganut agama itu.

Secara politis akan dijumpai kenyataan yang sangat berlainan. Di Jawa Tengah pernah memerintah dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu dan dinasti Sailendra yang menganut agama Budha. Pada hakikatnya antara kedua dinasti itu terdapat hubungan-hubungan konfrontatif dalam bidang politik. Kalaupun terjadi perkawinan antara Rakai Pikatan (dinasti Sanjaya) dengan Pramodawardani (Sailendra), masalahnya sama sekali bermotifkan politik (atau lazim disebut *wedding policy*). Dengan *wedding policy* itu tidak berarti hubungan konfrontatif dalam soal politik antara kedua dinasti itu selesai. Hal ini dapat dibuktikan dengan timbulnya konfrontatif dalam soal politik antara kedua dinasti itu selesai. Hal ini dapat dibuktikan dengan Balaputradewa (Sailendra) seperti dituturkan prasasti Raka Baka (856).

Kesuburan kehidupan keagamaan dan besarnya toleransi antara kedua agama itu akan tercermin dari tinggalan-tinggalan dari kedua dinasti itu, terutama berupa bangunan-bangunan suci candi.

Bangunan-bangunan suci candi itu terdapat banyak sekali di Jawa Tengah ini, terdiri atas candi-candi bercorak Hindu dan Budha. Pada umumnya candi-candi Hindu terdapat di Jawa Tengah bagian utara, hanya dengan pengecualian Candi Prambanan (dan terakhir Candi Sambisari dekat Kalasan). Bangunan-bangunan Budha hanya ditemukan di Jawa Tengah bagian selatan. Berdasarkan atas letak

bangunan-bangunan itu, Prof. Dr. J.G. de Casparis menduga bahwa dinasti Sanjaya menguasai Jawa Tengah bagian utara dan dinasti Sailendra menguasai Jawa Tengah bagian selatan.

Kalau dibandingkan candi-candi Hindu di Jawa Tengah Utara dengan candi-candi Budha di bagian selatan, akan segera tampak perbedaan-perbedaan yang sangat jelas. Candi-candi Hindu di bagian utara memperlihatkan kesederhanaan, baik dalam ukuran besarnya bangunan, seni arcanya, ornamentasinya, dan lain-lain, sedangkan candi-candi di bagian selatan memperlihatkan kesan-kesan megah, kolosal, mewah dalam seni arcanya, dan ornamentasinya.

Menurut pendapat yang klasik, candi-candi Hindu itu berfungsi sebagai makam, khususnya untuk makam raja-raja, seperti telah diterangkan di bagian muka. Candi-candi Hindu ini terdapat di Dataran Tinggi Dieng, kompleks lereng Gunung Ungaran. Candi Gedongsongo, Candi Kalitaman, dan lain-lain, Candi Dukuh (dekat Banyubiru) dan masih banyak lagi terdapat bekas-bekas reruntuhan candi di beberapa daerah pesisir utara Jawa Tengah, sedangkan bangunan-bangunan Budha tidak berfungsi sebagai makam, melainkan sebagai tempat pemujaan, seperti banyak diterangkan dalam prasasti-prasasti. Prasasti Kalasan, Kelurak, Karang Tengah, Sri Kaluhunan, semuanya menyebutkan tentang sesuatu bangunan sebagai tempat pemujaan. Bangunan-bangunan Budha itu antara lain Borobudur, Mendut, dan Pawon di dekat Magelang, Kalasan, Sari, Bumbung, Sewu, Plaosan, Sajiwan, semuanya di kawasan kecamatan Prambanan dan bangunan-bangunan Budha lainnya di kompleks Ratu Baka.

Menurut tipologinya yang serba sederhana dan bentuknya yang kecil-kecil itu, candi-candi Hindu di Jawa Tengah bagian utara itu lebih tua usianya dari pada candi atau bangunan Budha yang terdapat di Jawa Tengah bagian selatan. Meskipun tua-mudanya usia candi-candi dan bangunan-bangunan itu tidak didukung oleh angka tahun, tetapi sejumlah prasasti dan ilmu kepurbakalaan serta faktor geologi Jawa Tengah cukup logis dan mantap untuk melandasi pendapat itu. Dalam Hubungan ini menarik sekali untuk meninjau bangunan untuk Candi Plaosan. Candi ini mempunyai hiasan kala yang memakai bibir bawah. Adanya bibir bawah yang sekilas menyerupai rahang bawah

itu, segera akan menimbulkan asosiasi orang ke bentuk kala tipe Jawa Timur, yang menggunakan rahang bawah. Apakah dengan kenyataan itu Candi Plaosan dapat dikatakan sebagai “bangunan peralihan” seni bangunan candi Jawa Tengah ke bentuk seni bangunan candi Jawa Timur, masih memerlukan penelitian lanjut.

Yang jelas, sejak bergesernya pusat kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada awal abad ke-11 tidak pernah lagi ditemukan bekas-bekas bangunan keagamaan di Jawa Tengah. Jadi sejak abad ke-11 sampai tahun 1500an tidak ada bukti-bukti tinggalan bangunan keagamaan di Jawa Tengah. Namun demikian tidaklah berarti kehidupan keagamaan di Jawa Tengah pada periode itu telah lenyap. Sejak pergeseran pusat kekuasaan politik ke Jawa Timur, praktis Jawa Tengah menjadi wilayah-bagian yang secara politis tunduk kepada Jawa Timur. Tidak adanya bukti-bukti tinggalan bangunan keagamaan itu sampai sekarang, mungkin sekali bangunan-bangunan keagamaan waktu itu hanya merupakan bangunan yang kecil saja, dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah rusak (batu kwalitas rendah, kayu, atau kombinasi kedua jenis bahan itu). Dengan demikian bangunan semacam itu tentu tidak akan dapat bertahan lama.

Temuan Candi Sukuh dan Ceta di lereng Gunung Lawu (dekat Tawangmangu) menarik perhatian, karena dari bangunan keagamaan itu dapat diketahui gambaran kehidupan keagamaan waktu itu. Kedua candi itu merupakan bangunan yang kecil saja, tidak memberikan kesan-kesan kemegahan seperti candi-candi lain seperti di kompleks Prambanan, Candi Sukuh dan Ceta tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-16, jadi telah sekian lama sejak Majapahit runtuh.

Candi Sukuh pada dasarnya mengambil bentuk piramida terras. Yang aneh ialah adanya kenyataan yang melekat pada candi itu, sekalipun arcanya masih memperlihatkan seni India tetapi keseluruhan bentuk bangunan ini memperlihatkan sifat-sifat megalitik. Hal ini mudah dipahami, mengingat abad ke-16 pengaruh kebudayaan India sudah banyak surut. Lagi pula daerah pedalaman seperti lereng Lawu itu sangat sulit dipengaruhi kebudayaan India, sehingga masih memungkinkan berkembangnya kebudayaan megalitik. Bersama dengan surutnya pengaruh India itulah kebudayaan pra-Hindu itu



mengembang, yang ekspresi dalam bidang seni bangunan terlihat pada Candi Sukuh.

### ***2.5 Hubungan ke Luar***

Secara geografis Jawa Tengah menempati kedudukan strategis dalam dunia ekonomi perdagangan di kawasan Nusantara. Faktor potensi ekonominya yang berupa hasil bumi dan hasil kerajinan memaksa Jawa Tengah terlibat dalam kegiatan ekonomi perdagangan Nusantara itu.

Sementara itu jalur pelayaran perdagangan kuna yang menghubungkan Cina-India-Asia Barat lewat Selat Malaka telah terjalin dalam satu kesatuan jaringan pelayaran perdagangan, mungkin sejak sekitar abad ke-1 Masehi. Melalui jalur inilah Jawa Tengah mengadakan komunikasi dengan dunia luar, baik komunikasi kultural maupun ekonomis-komersial, ataupun aspek-aspek kehidupan lain.

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, yang berhubungan dengan Jawa Tengah paling awal dengan Cina diketahui melalui sumber-sumber Cina, khususnya sumber kronik dinasti T'ang dan Sung, serta catatan perjalanan pendeta I-tsing. Dari sumber-sumber Cina itu hubungan Ho-ling (Jawa Tengah) dengan Cina yang pertama terjalin sejak abad ke-7 dalam bentuk kunjungan perutusan-perutusan yang membawa berbagai macam barang Nusantara ke Negeri Cina. Karena itu kunjungan perutusan Ho-ling ke Cina bersifat kunjungan semacam promosi dagang, seperti halnya kunjungan bangsa-bangsa asing lain. Dengan ramainya hubungan perdagangan antara Cina dengan berbagai bangsa asing itu, pada tahun 695 kaisar Cina mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur persediaan logistik bagi pedagang-pedagang yang berkunjung ke negerinya sebagai berikut.

- (1) 6 bulan bagi mereka yang datang dari India, Persia dan, Arab
- (2) 5 bulan bagi mereka yang datang dari Sriwijaya, Kamboja, dan, Kaling.
- (3) 3 bulan bagi mereka yang datang dari Champa.

Menurut Prof. Dr. Krom Kaling, yang disebut dalam peraturan itu sama dengan Ho-ling yang terletak di Jawa Tengah. Adanya hubungan dagang dengan Cina itu, dapat ditemukan bukti-buktinya di Jawa Tengah, berupa berbagai barang keramik serta uang logam kepeng.



Sumber Cina juga menyebutkan dipakainya bahasa Kwunlun sebagai bahasa perantara di Nusantara, sebagai alat komunikasi antarsuku-suku bangsa di Nusantara dan alat komunikasi juga dengan bangsa-bangsa asing.

Dari sumber-sumber sejarah hubungan antara Jawa Tengah dengan Cina berkisar pada soal-soal ekonomi perdagangan dan agama. Hubungan ekonomi perdagangan antara Jawa Tengah agaknya berlangsung sampai abad ke-4, ditandai dengan kedatangan armada dagang Cheng Ho di Pelabuhan Semarang. Tentang hubungan keagamaan tidak diketahui lagi kelanjutannya setelah kunjungan pendeta Hwui-ning dan Yun-ki pada abad ke-7 di Ho-ling.

Akibat hubungan ekonomi perdagangan antara Jawa Tengah dengan Cina itu, ialah saling dikenalnya produksi masing-masing negara itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat dipetik melalui kegiatan perdagangan itu.

Sementara itu hubungan kultural dan ekonomi perdagangan dengan India ternyata mempunyai akibat-akibat yang luas dalam tata-kehidupan di Jawa Tengah. Hubungan dengan India berakibat masuknya pengaruh Hindu-Budha, yang kemudian berakulturasi dengan kebudayaan asli dan menghasilkan kebudayaan baru Hindu Jawa dan agama Budha.

Dari sumber-sumber yang terbatas dapat diduga, bahwa tanda-tanda kehinduan di Jawa Tengah mulai tampak sejak abad ke-7 dengan diketemukannya prasasti Sojomerto, atau mungkin lebih awal lagi pada abad ke-5--6 dengan ditemukannya prasasti Tuk-Mas yang menurut Prof. Dr. Poerbatjaraka diperkirakan dari tahun 500an, sedangkan tanda-tanda kebudhaan di Jawa Tengah mulai tampak sejak abad ke-7, yaitu dengan berkembangnya agama Budha aliran Hinayana sekte Mulasarastiwada di Kerajaan Ho-ling. Sejak Kerajaan Ho-ling lenyap, tidak diketahui lagi kelanjutan perkembangan agama itu, tetapi sejak abad ke-8 di Jawa Tengah muncul agama Budha aliran Mahayana. Kedua macam agama itu hidup dan berkembang berkat dukungan dinasti Sanjaya dan Sailendra yang memerintah Jawa Tengah.

Hubungan Jawa Tengah dengan India secara tidak langsung diketahui melalui prasasti Nalanda (860). Dalam prasasti itu disebutkan

Balaputradewa sebagai raja Suwarnadwipa, dan dituliskan pula silsilahnya. Dalam silsilahnya itu disebutkan Samaragrawira sebagai ayahnya, dan disebut pula neneknya yang bergelar Sri Wairiwiramathana, keduanya dari dinasti Sailendra Balaputradewa adalah raja terakhir dinasti Sailendra Jawa Tengah yang dikalahkan oleh Pikatan pada tahun 856 yang kemudian melarikan diri dan berkuasa di Sumatera.

Akibat hubungan kultural dengan India itu, ialah berubahnya sistem kerakaan menjadi sistem kerakaan, berubahnya sistem pandang/kepercayaan, munculnya lembaga-lembaga baru. Dengan munculnya sistem kerajaan, lenyaplah sistem kerakaan. Raka yang semula memerintah secara paternalistik mengubah statusnya menjadi raja yang memerintah secara otoriter. Raja tidak lagi dipilih secara demokratis, melainkan mewariskan kekuasaannya itu turun-temurun kepada anak-cucunya. Dengan demikian timbullah dinasti-dinasti seperti berkuasanya dinasti Sanjaya dan Sailendra di Jawa Tengah. Pandangan hidup/kepercayaan berubah pula. Masyarakat menganut agama Hindu Buddha yang merupakan agama-agama yang perkembangannya memperoleh dukungan raja yang berkuasa.

Dengan berlakunya sistem kerajaan, muncullah lembaga-lembaga baru yang bertumpu pada dasar-dasar agama yang baru itu. Misalnya lembaga pemerintah dari tingkat pusat (keraton) sampai ke wanua, lembaga drwya haji, lembaga gawai haji, dan lain-lain.

Tentang hubungan Jawa Tengah dengan bangsa-bangsa lain tidak ada sumber yang menerangkan hal itu, tetapi mengingat Jawa Tengah yang terletak dalam jalur jaringan pelayaran internasional meskipun agak jauh, mungkin banyak berhubungan atau didatangi oleh pedagang-pedagang dari Arab, Persi, India, Kamboja, dan Champa. Pada periode mendekati akhir zaman Majapahit, agama Islam mulai masuk di Indonesia, khususnya di beberapa tempat di daerah pesisir utara dan timur Aceh, pesisir Banten, daerah Demak, Tuban, Gresik, Hitu, dan lain-lain. Timbulnya kerajaan Islam di Demak, berakibat mulai terdesaknya agama Hindu di Jawa Tengah. Mungkin yang membawa dan menyiarkan agama Islam itu orang Jawa Tengah sendiri, tetapi mungkin juga orang asing.

## BAB III

### MASA BARU (1500 --1800)

#### **3.1 Pendahuluan**

“Sirna hilang kertaning bumi” (1400 Saka), demikian Babad Tanah Djawi melukiskan suasana keruntuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa dalam lingkungan kekuasaan Majapahit, menjelang akhir abad ke-15 dalam bentuk candrasangkala tersebut, karena sifatnya yang litere-mengisah dan terlalu plastis menggambarkan sesuatu, tetapi tidaklah pula dapat kita abaikan demikian saja kebenaran sejarah yang melatarbelakanginya.

Kerajaan Majapahit sebagai suatu imperium memang mengalami masa keruntuhan pada tahun 1478, namun baru pada tahun 1526 Majapahit mulai lenyap dalam pencaturan sejarah Indonesia. Suatu imperium politik yang kuat saat itu telah mengalami proses desintegrasi. Sinar kekuasaan politik yang memancar dari pusat Kerajaan Majapahit ke segenap daerah *mitroka satata* di wilayah Asia Tenggara benar-benar telah redup. Konstelasi politik di Asia Tenggara telah menginjak babakan baru.

Benarkah Majapahit dapat dikualifikasikan sebagai sebuah negara nasional politis yang menguasai segenap bumi Indonesia seperti yang kita kenal sekarang sebagai wilayah politik Republik Indonesia, sehingga layak dipakai sebagai titik-tolak untuk membicarakan masyarakat Indonesia keseluruhan secara politis historis. Memang

predikat, “nasional” tidak mudah kita terapkan pada Negara Majapahit, kalau kita berpegang teguh pada syarat-syarat juridis formal menurut ukuran sekarang. Namun demikian sejarah berkembang terus selama syarat dan norma dalam masalah dalam masalah sosial yang abadi sepanjang zaman. Kriteria dan ukuran selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat.

Bertolak dari kenyataan ini, maka predikat nasional secara tegas diterapkan pada Kerajaan Majapahit. Dasar-dasar pemberian predikat ini dapat diperbuat dengan bukti-bukti, bahwa sesungguhnya kuasa Majapahit secara politis, benar-benar sudah melingkupi segenap wilayah tempat daerah Indonesia sekarang dalam artian nasional politis.

Pada hakekatnya politik Majapahit telah merintis tumbuhnya sistem perkotaan di dalam masyarakat Indonesia. Karena itu sekalipun Kerajaan Majapahit mengalami proses desintegrasi, tetapi tidaklah demikian halnya bagi segala aspek kehidupan masyarakatnya, karena suasana keruntuhan hanyalah terjadi di pusat kekuasaan politik saja. Keruntuhan kekuasaan Majapahit memberi kesempatan kepada pertumbuhan suatu kehidupan baru yaitu kehidupan perdagangan, kehidupan maritim, dan kehidupan kekotaan yang benih-benihnya telah ditanamkan oleh Majapahit sebagai akibat dari politik luar negerinya.

Kehidupan baru yang sedang tumbuh itu semata-mata bersandar pada perekonomian keuangan (*geldwirtschaft*). Suatu perkembangan baru dasar kehidupan telah dimulai. Dinamika kehidupan masyarakat tumbuh di kota-kota sepanjang pesisir pulau-pulau. Sebagian masyarakat memperoleh kesempatan lebih besar untuk berkenalan dengan “dunia luar” melalui bentuk kehidupan baru yaitu kehidupan perdagangan maritim. Kota-kota pesisir dan bandar melepaskan diri dari ikatan kekuasaan Majapahit dan menjalankan politik menurut garisnya sendiri-sendiri. Dunia perdagangan yang bersendikan kebebasan akan melahirkan kehidupan kekotaan (*urban life*) yang sangat penting artinya sebagai faktor penggerak politik yang dinamis. Dasar kehidupan masyarakat sosial ekonomis yang merupakan faktor pokok berubahnya pandangan masyarakat di bidang politik, di samping faktor-faktor lain.

Agama baru yaitu agama Islam yang telah dikenal masyarakat sejak pemerintahan Airlangga (terbukti dengan diketemukannya kuburan Islam yang tertua di Desa Leran-Gresik yang bertahun-tahun 1082 mengalamikan perkembangan pesat. Agama ini telah diperkenalkan oleh para pedagang baik oleh pedagang Indonesia yang merantau ke luar negeri maupun oleh pedagang asing terutama dari Gujarat, Arab, Persi dan bahkan pedagang-pedagang Cina mempercepat proses perkembangan agama Islam. Berkembangnya arus kekuatan agama baru, Islam, yang sifatnya lebih militan ikut mempercepat surutnya kekuasaan politik Majapahit. Agama baru itu mencari sandaran pokok pada kekuatan politik untuk kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Demak berhasil didirikan sebagai pusat kekuasaan politik, tempat tumpuan kekuatan baru dan pusat pemancaran agama serta politik baru. Dengan adanya pusat kekuasaan politik baru itu, masyarakat mendapatkan jalan menemukan kekuasaan untuk memutuskan hubungan dengan "kekuatan lama" yang tidak dapat lagi menyesuaikan dan mengimbangi perkembangan kehidupan abad ke-16, berhubungan dengan berubahnya konstelasi politik di Asia Tenggara. Demak dan beberapa kabupaten pesisir serta kota-kota bandar meninggalkan politik lama dan menumbuhkan politik baru yang bersandikan pada perdagangan maritim dengan Demak sebagai eksponen utama, sehingga berturut-turut kota-kota pesisir di pantai utara Jawa seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Gresik, Surabaya, Pasuruhan, dan Panarukan melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan mulai menjalankan politik baru sesuai dengan tuntutan agama baru.

### ***3.2 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan***

#### ***4.2.1 Pertumbuhan***

Kerajaan Demak yang semula dikenal sebagai Kedipatian Glagahwangi di bawah pemerintahan Majapahit pada tahun 1478 memisahkan diri dari kekuasaan pusatnya. Raden Hasan Putra Brawijaya I atau yang dikenal Prabu Kertawijaya, meresmikan kerajaan baru yaitu Demak (tahun 1481). Sebagai raja yang berdaulat ia bergelar Syah Akbar Al Fatah atau lebih dikenal lagi dengan sebutan

Raden Patah. Saat penobatannya diabadikan dengan candra sangkala "Geni mati siniram Janmi" (1403 Caka -- 1481 Masehi).

Demak yang hanya mengalami tiga kali pergantian kepala negara itu hanya berlangsung sampai kematian Sultan Trenggono yang tragis pada tahun 1550 oleh suatu pengkhianatan yang dilakukan oleh putra Adipati Surabaya. Pembunuhan itu terjadi dalam rangka perluasan daerah ke Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi berupa pelabuhan seperti Panarukan, Pasuruhan, dan lain-lain. Usaha perluasan daerah itu dimulai oleh putra mahkota yang dalam berita Portugis dikenal dengan nama Pati Unus. Pati Unus atau sebutan lain bagi Adipati Junus, sedangkan dalam cerita rakyat telah dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor karena berhasil menyeberangi lautan untuk menyerbu benteng Portugis di Malaka.

Dalam periode yang pendek Demak telah berhasil mengembangkan potensi Jawa Tengah. Seluruh wilayah Jawa Tengah dikuasai. Salah satu alasan penaklukan daerah Mataram atau daerah pedalaman Jawa Tengah oleh Demak ialah karena daerah tersebut merupakan lambang kejayaan pusat pemerintahan zaman pemerintahan Pengging sebagai lambang kekuasaan Majapahit di Jawa Tengah segera direbut. Keturunan Adipati Handayaningrat yang masih beragama Hindu, dijadikan Adipati Pengging setelah masuk Islam.

Segera setelah Sultan Trenggono wafat menyusul perpecahan dalam istana untuk memperebutkan hak atas tahta kesultanan Demak di antara para ahli waris. Sunan Prawoto menggantikan ayahnya, tetapi Haryo Penangsang, adipati Jipang, menuntut juga haknya atas tahta Kerajaan Demak, karena ia sebenarnya putra Pangeran Seda Lepen pewaris tahta Kerajaan Demak sesudah Adipati Junus yang dibunuh oleh Sunan Prawoto. Untuk memenuhi tuntutananya, Haryo Penangsang harus menyingkirkan lawan-lawannya. Sunan Prawoto dibunuh, kemudian Pangeran Hadiri Adipati Kalinyamat (Jepara) berusaha melindungi Aryo Pangiri, putra Sunan Prawoto untuk menghadap Sunan Kudus untuk menuntut keadilan, namun kembalinya dari Kudus di tengah perjalanan ia dibunuh oleh pengikut Haryo Penangsang.

Ratu Kalinyamat, istri Pangeran hadir, menuntut balas atas kematian suaminya. Ia bersumpah akan bertapa di Gunung Danaraja sampai kematian suaminya terbalas, dan kepada siapa yang dapat

membunuh Aryo Panangsang berhak mewarisi tahta kerajaan. Danaraja terletak dekat sekali dengan benteng Portugis di Ujung Watu. Adakah kemungkinan Ratu Kalinyamat meminta bantuan Portugis untuk memerangi Aryo Panangsang ? Ratu Kalinyamat sendiri terkenal sebagai seorang ratu yang gagah berani cakap dan keras pendiriannya dan yang kelak pernah membantu orang muslim melawan Portugis merebut Malaka dan Aceh (1573 -- 1574).

Pangeran Hadiwijaya segera mengerahkan pasukannya untuk menyebrangi Aryo Panangsang. Ia dibantu Ki Ageng Pemanahan. Dalam pertempuran itu Aryo Panangsang gugur. Hasil yang pasti dari perang yang lebih dikenal dengan perang saudara itu ialah runtuhnya kesultanan Demak. Hampir semua wilayah Jawa Tengah sudah berhasil dipersatukan. Sebagian wilayah Jawa Timur tunduk di bawah kekuasaan sultan Demak, bahkan sultan telah berhasil menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon dengan bantuan Faletihan atau Fatahillah. Selanjutnya Pelabuhan Pemalang, Kendal, Semarang, kecuali Jepara yang sudah lebih dulu ditaklukan, merupakan lambang kekuasaan maritim Demak. Lebih-lebih bila dihubungkan dengan pelabuhan-pelabuhan Tuban, Gresik, dan Supit Urang di Jawa Timur. Inventarisasi wilayah kekuasaan Demak di masa Sultan Trenggono menunjukkan gambaran geopolitis sebagai berikut. Kedipatian Bagelen di bawah Adipati Mas Timur, Kedipatian Jipang di bawah Haryo Panangsang, Kedipatian Jepara di bawah Ratu Kalinyamat, Kedipatian Madura di bawah Pangeran Langgar, Kedipatian Pajang /Mataram di bawah Hadiwijaya, dan Kedipatian Madiun di bawah Pangeran Timur. bagaimana pun periode Demak ini merupakan wajah suatu negara yang baru tumbuh.

#### 4.2.2 Perkembangan

Sebagai pemenang dari perang saudara di Demak ialah Adipati Hadiwijaya yang kemudian mengendalikan tradisi pemerintahan Jawa dari istana Kesultanan Pajang sejak tahun 1550. Pusaka Kerajaan Majapahit sebagai lambang kenesaan keraton telah diboyong dari Demak ke Pajang. Dalam waktu singkat diadakan konsolidasi dalam pemerintahannya. Segera diadakan pergantian penguasa daerah yang akan menunjang kelestarian pemerintahan yang kuat. Misalnya putra

Ki Ageng Pemanahan, kawan seperjuangan melawan Aryo Penangsang yaitu Sutawijaya, diangkat menjadi panglima tentara yang berkedudukan di Mataram dengan gelar Panembahan Senopati, tetapi dia pulalah yang kemudian menggulingkan Adiwijaya dari tahtanya pada tahun 1582.

Sementara itu administrasi pemerintahan Pajang yang meliputi wilayah yang makin luas telah disempurnakan. Ada tiga pembagian wilayah besar yang terdiri atas Negara Agung, Wilayah Pesisiran, dan Monconagoro. Mudah dipahami kalau kawasan Negara Agung meliputi Pajang dan Mataram. Kemudian wilayah Pesisiran meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon, Tegal, Pemalang, Demak, Pati, Tuban, Surabaya dan Blambangan, sedangkan Monconagoro terdiri atas Blitar, Purboyo (Madiun), Krapyak (Kedu), Selarong (Banyumas), masing-masing dipimpin oleh Adipati. Setiap kedipatian membawahi para *akuwu*, *mantri* atau *tanda*, dan buyut atau lurah.

Dalam periode Pajang pulalah Kedipatian Semarang mulai muncul. Atas restu Sultan Trenggono, putra Pati Unus yang bernama Made Pandan, membuka hutan di Tirang dan putranya kemudian menjadi Adipati Pandan Arang I. Pengganti Pandan Arang I ialah Pandan Arang II, pada akhir hayatnya ia mengasingkan diri dari keduniawian dan yang terakhir ia lebih terkenal sebagai Sunan Bayat karena menetap di daerah Tembayat sebagai mubaligh.

Bersamaan dengan perpindahan kekuasaan Pajang ketangan Senopati yang bergelar *Senopati Ing Alogo Sayidin Panoto Gomo*, maka pewaris tahta Pajang yaitu Pangeran Benowo diangkat sebagai adipati Pajang, tetapi merasa tak kuasa, lalu menyerahkan kekuasaan kembali kepada Senopati.

Periode Mataram yang mula-mula dibina oleh Senopati tumbuh dan berkembang dengan ditandai oleh perjuangan politik. Gagasan persatuan Tanah Jawa dilaksanakan dengan kekerasan senjata. Pengikut-pengikut Pajang yang telah ditaklukan oleh Senopati ternyata merupakan lawan raja-raja Mataram sampai Sultan Agung kemudian berhasil mengalahkannya. Para adipati di kawasan Jawa Timur, terutama Adipati Surabaya, selalu berada di belakang pihak Pajang. Tradisi kepahlawanan rakyat Surabaya nampaknya dimulai sejak



perlawanan rakyat Surabaya melawan blokade Mataram di masa Sultan Agung ini. Kota tersebut baru jatuh pada 1625 setelah Sungai Brantas dibendung yang mengakibatkan kekeringan, kelaparan, dan penyakit. Dalam pada itu para penguasa pesisir Jawa Tengah di bawah di bawah koordinasi Demak berkali-kali takluk dan bentrok melawan pemerintahan pusat Mataram di Kota Gede. Pergolakan yang terakhir ini pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari pertarungan dalam memperebutkan status penguasa tunggal antara kelompok pesisir dengan kelompok pedalaman yang telah tumbuh sejak masa surut Kerajaan Majapahit. Dalam hal ini Sultan Agung berjuang keras untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Jawa.

Diawali dengan usaha Mas Jolang (1601--1603) yang telah ditunjuk Senopati sebagai penggantinya, sedangkan Pangeran Puger, putra sulungnya, hanya diangkat sebagai adipati Demak. Keputusan ini menimbulkan perasaan tidak senang Pangeran Puger, sehingga dapat dijadikan alasan bagi adipati Surabaya untuk membantu Pangeran Puger dan bupati-bupati pesisir melawan kekuasaan Mataram. Sejak itu berlangsunglah peperangan-peperangan yang berkepanjangan selama masa pemerintahan Mas Jolang. Denak dapat dikuasai kembali sedangkan Pangeran Puger dapat ditawan di Kudus. Usaha memerangi bupati-bupati pesisir belum berhasil karena Mas Jolang wafat di Desa Krapyak dan kemudian terkenal dengan gelar Sedo Kropyak dan dimakamkan di makam Pasar Gede.

Cita-cita mempersatukan Jawa dengan menaklukan raja-raja pesisir dilanjutkan oleh putra sulungnya Mas Rangsang yang kemudian bergelar *Panembahan Agung Senopati Ing Alogò Ngabdurachman* (1613 --1645). Setelah memakai gelar sultan, ia lebih dikenal dengan gelar Sutan Agung. Sultan Agung berjuang keras untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Jawa. Satu-persatu kerajaan pesisir dikuasai. Pasuruhan (1616), Tuban dan Gresik (1622), menyusul Madura (1624). Pangeran Pekik, bupati Surabaya ditaklukan, kemudian diangkat kembali setelah dikawinkan dengan putrinya, Ratu Wandansari. Sunan Giri berusaha mempertahankan diri. Serangan pasukan Mataram yang pertama dapat digagalkan tetapi dalam serangan kedua yang dipimpin Ratu Wandan sendiri Sunan Giri menyerah dan dapat ditahan serta dibawa ke Mataram. Ia mendapat

pengampunan kemudian diangkat kembali dengan pangkat panembahan. Blambangan baru ditaklukkan pada tahun 1639. Usaha menaklukkan Pati mengalami kegagalan. Jawa Barat tidak luput dari serangan Mataram. Cirebon dan seluruh Priangan mengakui kekuasaan Sultan Agung di Mataram. Tinggallah Banten yang tidak mau menyerah terhadap Mataram. VOC yang telah didirikan pada tahun 1602 dan berkedudukan di Ambon agaknya berusaha mencari keuntungan dalam peperangan-peperangan di Jawa. Kantor VOC di Jepara yang didirikan atas izin Sultan Agung, dirampas kembali setelah kedatangan bukti bahwa VOC merampas beberapa perahu, dan tujuhbelas orang Belanda ditawan kemudian dibawa ke Mataram pada tahun 1618. Dalam rangka penyerangan VOC mendirikan benteng VOC dianggap musuh yang berbahaya oleh Sultan Agung, oleh karena itu bandar-bandar di pesisir Jawa dilarang keras melayani VOC dalam memenuhi kebutuhan berasnya. Usaha-usaha Sultan Agung mengusir VOC mengalami kegagalan sampai akhir hayatnya.

Kota Gede sebagai ibu kota sejak awal pertumbuhan Mataram telah ditinggalkan oleh Sultan Agung yang selanjutnya memilih Pleret sebagai pusat pemerintahannya (1613--1645), tetapi Sunan Amangkurat I (1638--1677) telah memindahkan ibu negara ke Kartasura. Semacam selingan ibu kota pernah hijrah ke Kediri karena ke sanalah Tarunajaya memboyong pusaka Keraton Mataram setelah Kartasura direbut dari tangan Amangkurat I. Di Kediri pula Amangkurat II dinobatkan sebagai sunan Mataram yang langsung mengembalikan pusat pemerintahan ke Kartasura. Karena Keraton Kartasura hancur selama Perang Mahkota III dan pemberontakan Cina, maka keraton baru pun didirikan di Surakarta yang kemudian mendapat julukan Surakarta Hadiningrat sejak tahun 1744.

“Proses membagi diri” dalam Kerajaan Mataram berjalan amat cepat dan berturutan. Persengketaan segi tiga antara Paku Buwono II, Mangkubumi, dan Raden Mas Said perihal tanah Sukowati yang berlangsung hingga Paku Buwono III naik tahta, telah mengiring Mangkubumi duduk berunding di bawah pohon rindang di Gianti pada tahun 1755. Perundingan inilah merupakan sebab terpecahnya Mataram menjadi dua, Paku Buwono III tetap di Surakarta Hadiningrat sebagai sunan atau susuhunan dan Mangkubumi diangkat menjadi

Sultan Hamengku Buwono I yang berpusat di Ngayogyakarta Hadiningrat. Dua tahun kemudian telah lahir sebuah negara baru dalam Negara Agung akibat Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Negara baru itu ialah Mangkunegara yang diperintah oleh Raden Mas Said dengan gelar Adipati Mangkunegara I. Kemudian pada tahun 1813 wilayah kekuasaan Hamengkubuwono dibagi lagi yaitu dengan disahkannya eksistensi Kedipatian Paku Alaman dalam wilayah Negara Agung.

Sementara itu perlu diketahui bahwa dalam setiap pergolakan yang terjadi dalam Kerajaan Mataram, pihak VOC selalu mendapatkan keuntungan berupa perluasan wilayah atau berupa konsesi atau aktivitas perdagangan tertentu dalam wilayah Mataram sebagai imbalan atas jasa-jasanya. Sejengkal demi sejengkal tanah kerajaan, terutama di kawasan yang subur dan strategis dari kawasan Mancanegara, jatuh ke tangan VOC sebagai hasil taktik kolonialnya, dengan cara *divide et impera*, yaitu cara memecah belah dan menguasai wilayah. Akibatnya yang termasuk kawasan Moncongoro dalam tata administrasi pemerintahan Mataram tinggal Banyumas, Madiun, Kediri, Jipang (di sebelah tenggara Rembang), Japen (dekat Surabaya), Grobogan, dan daerah-daerah kecil dekat Kedawung (di sebelah tenggara Surakarta). Daerah-daerah yang dekat dengan Negara atau pusat pemerintahan ialah kawasan negara Agung yang meliputi daerah-daerah Mataram, Pajang, Bangwetan (Sukawati) yang terletak di sebelah timur laut Surakarta, Begelan, Kedu, Bumi Gede yaitu daerah antara Surakarta dan Semarang. Dalam pada itu ikatan antara daerah kebumputan dengan pemerintah pusat demikian longgarnya hingga mudah sekali datangnya kesempatan untuk memberontak. Para bupati tidak menerima gaji, tetapi memperoleh penghasilan sendiri dari daerahnya. Untuk mempererat hubungan antara daerah kebumputan diangkat para bupati yang masih sanak saudara raja. Akan tetapi banyak juga bupati yang berasal dari keturunan raja-raja yang ditaklukan dulu, misalnya para bupati Surabaya dan Semarang.

#### 4.2.3 Kepemimpinan dan Pengaturan

Munculnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah bukan hanya lahirnya merupakan suatu revolusi dalam sistem kepemimpinan di Jawa,

tetapi pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari pola kepemimpinan tradisional. Jiwa bebas, persamaan dan musyawarah yang merupakan ciri kepemimpinan dalam Islam hanya berkembang selama masa periode Demak saja. Pengaruh para wali yang pada hakekatnya lambang musyawarah berhadapan secara terbuka dengan sistem kekuasaan mutlak para raja dari daerah pedalaman. Raden Patah sendiri sebetulnya mewakili rezim lama yang lahir kembali melawan rezim yang telah menaklukan leluhurnya. Seperti diketahui di muka rezim Girindrawardhana dari Daha telah menggantikan pendiri Majapahit pada tahun 1478, dan Raden Patah adalah pewaris tahta Majapahit dari keturunan rezim yang digulingkan tadi. Untuk sementara para penguasa Demak bisa dikendalikan Sunan Kudus sebagai Lambang garis radikal dalam kelompok para wali sebagai aktor *intelektualis*. Meskipun demikian peranan Sunan Kalijogo tidak pula bisa diabaikan dalam memberikan corak kepemimpinan dan pengaturan hidup bernegara. Lembaga Walisanga sebagai penyiar agama dalam usaha-usahanya lebih menggambarkan azas “musyawarah.” Berbeda dengan Sunan Kudus, Sunan Kalijogo sering lebih moderat, tetapi sekalipun Walisanga merupakan lambang musyawarah, kebijaksanaan mereka dalam menentukan pengganti sultan Demak sepeninggal Trenggono tetap tak bulat. Keruntuhan Kesultanan Demak mempengaruhi keruntuhan garis keras Sunan Kudus dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan di Jawa. Agaknya peristiwa itu mempercepat proses kembalinya pola kepemimpinan di Jawa yang tradisional yang ditandai dengan munculnya Kesultanan Pajang.

Gelar Syah Alam Akbar bagi raja-raja Demak menunjukkan pengaruh Persia, terbukti dengan penggunaan istilah syah. Sejak Trenggono menjadi sultan, banyak raja Jawa menggunakan gelar sultan, sedangkan nama raja tetap menggunakan nama Jawa. Dengan dimulai oleh pendiri Kesultanan Mataram yang bergelar Senopati Ing Alogo Sayidin Panongtogomo, gelar kepala negara bersifat perpaduan antara penguasa dan pimpinan agama, juga antara gelar Jawa dan gelar Islam; sebuah gejala yang kemudian menjadi langgeng, seperti *Amirul Mukminin Sayidin Panotogomo Khalifatullah tanah Jawi*. Nyatalah di sini adanya perangkapan jabatan raja sebagai kepala negara yang meliputi kekuasaan militer, kenegaraan, dan agama.

Memperhatikan gelar raja-raja selama periode Islam ini tampaknya adanya suatu kecenderungan yang pasti, yaitu bahwa raja adalah penguasa tunggal. Selama periode Demak dipergunakan gelar Sultan Syah Alam Akbar yang berarti Raja Sang Penguasa Besar. Dalam periode Pajang tidak tampak diciptakan tradisi baru dalam pemberian gelar.

Hal lain lagi yang menarik ialah adanya kecenderungan menjalankan diplomasi perkawinan untuk menyelesaikan pergolakan politik atau untuk meluaskan wilayah. Misalnya apa yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam menaklukan Pati. Sebelum itu kita kenal yang dilakukan Sultan Trenggono dengan putri-putrinya dalam melancarkan diplomasi perkawinan tadi. Ratu Mas dikawinkan dengan Pangeran Langgar dari Madura, Ratu Mas Pemantingan dijodohkan Panembahan Tejawulan, Ratu Mas Gorobang dengan Sultan Hasanudin dari Cirebon, Ratu Kalinyamat mendapatkan Thoyib dari Aceh yang kemudian disebut Pangeran Hadiri, Adipati Joko Tingkir pun putra menantu Trenggono. Kecuali itu kerabat keraton atau putra mahkota disertai tugas pula sebagai penguasa kedipatian, contohnya Ratu Kalinyamat sebagai penguasa di Jepara, Pangeran Timur jadi Panembahan di Madiun, Begelen dipegang oleh Mas Timur, dan Jipang diserahkan kepada Aryo Penangsang.

#### *4.2.4 Hubungan Antarnegara*

Sejak keruntuhan Majapahit tidak lagi terdapat suatu pemerintahan kuat yang mampu mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Sebetulnya awal mulanya yaitu sejak Gajah Mada meninggal dunia. Sejak itu pula kontrol Majapahit terhadap negara-negara taklukan serta negara-negara di bawah pengaruh Majapahit yang termasuk dalam wilayah-wilayah Mitreka Satata mulai kendor. Negara-negara pesisir yang pada hakekatnya organ di bawah pengawasan Majapahit mempunyai peluang baik sekali untuk dapat berdiri sendiri. Menjelang abad ke-16 di Jawa Tengah telah muncul negara baru yang kuat di pesisir Jawa Tengah yaitu kesultanan Demak. Sejak itu secara kait-mengait lahirlah kesultanan-kesultanan baru di Indonesia. Semuanya adalah negara-negara maritim (pesisir) yang hidup dari sektor perdagangan laut.

Dengan Kesultanan Aceh yang menjadi besar peranannya di Nusantara bagian barat sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Demak menjalin hubungan yang akrab. Demikian pula dengan kesultanan Makasar yang lahir dan menjadi kuat di wilayah Nusantara bagian timur. Negara itu meningkat peranannya sejak pelaut-pelaut Portugis. Selama serangan-serangan angkatan laut Demak atas benteng Portugis di Malaka, Adipati Junus atau lebih terkenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor mendapat bantuan dari pelaut-pelaut Aceh maupun Makasar. Sayang sekali serangan gabungan itu tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Selanjutnya persahabatan dengan Aceh ditingkatkan dengan perkawinan Ratu Kalinyamat dengan Pangeran Hadiri dari Aceh (Pasai). Solidaritas dari negara-negara itu kecuali didasari oleh persamaan agama lebih-lebih bila diingat bahwa gerakan-gerakan Portugis di Nusantara mempunyai latar belakang balas dendam terhadap bangsa Moor yang beragama Islam, dan di Nusantara mereka menemukan kesultanan-kesultanan itu sebagai sasaran balas dendam. Dalam serangan gabungan itu tak ayal lagi Adipati Junus mendapat bantuan Palembang, yaitu negara yang diperintah oleh kakeknya.

Sementara itu dalam usaha-usahanya menampung kesibukan perdagangan laut di Selat Sunda akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, Sultan Demak telah mendirikan Kesultanan Banten. Perjuangan untuk memperluas daerah ke Jawa Barat dipercayakan kepada Fatahillah itu mempunyai tujuan pula dalam menyebarkan agama Islam ke daerah Jawa Barat yang masih memeluk agama Hindu. Demikian pula waktu dia menaklukan Sunda Kelapa dan Cirebon di Jawa Barat. Selama periode Demak dan Pajang baik Banten maupun Cirebon terikat oleh hubungan perkawinan, yang mulai ditanamkan oleh Pangeran Trenggono.

Sejak Mataram berusaha memerangi kerajaan-kerajaan pesisir dan mengutamakan garis politik yang berorientasi ke pedalaman, mulai terdapat kemunduran dalam solidaritas Islam atau *Ukhuwah Islamiyah* itu. Banten mulai membuat jarak dan tidak bersedia bekerja sama dengan Mataram dalam menghadapi VOC di Batavia, walaupun Batavia yang dulu bernama Jayakarta itu bekas wilayah Banten. Alasan karena Banten takut dikuasai Mataram, sedangkan Cirebon karena

berada di jalan penyerbuan Sultan Agung ke Batavia mengakui kedaulatan Mataram.

Ketika Mataram berada di bawah perintah para pengganti Sultan Agung, Makasar mempunyai penilaian yang negatif. Amangkurat I sangat memusuhi para ulama dan sementara itu sikapnya terhadap VOC sangat lemah. Berbeda dengan ayahnya, maka Amangkurat I bersedia bekerja sama dengan Belanda, akibatnya Belanda memperoleh sebagian tanah Mataram maupun konsesi dagang. Oleh karenanya masuk akal kalau bekas pejuang Kraeng Galengsong yang terusir dari Makasar kemudian bergabung dengan pejuang Trunajaya yang menentang Amangkurat I yang didukung oleh VOC. Nampaknya simpati Makasar ada di pihak para pemberontak di Jawa.

Sejak Sultan Agung berkuasa, sebetulnya Mataram menganut politik menutup diri. Satu-satunya hubungan dengan dunia luar yaitu pelabuhan ada di bawah pengawasan Negara karena politik monopoli berasnya. Akibatnya sampai dengan akhir abad ke-19 tidak terdapat jalinan persahabatan antara negara-negara di Nusantara. Satu-satunya hubungan ialah dengan VOC.

### ***3.3 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat***

Daya tarik utama wilayah Jawa Tengah bagi orang luar ialah beras. Walaupun luas areal sawah diduga tidak seperti sekarang; tetapi daerah-daerah Pajang, Mataram, Banyumas, Pekalongan maupun Pati, sejak permulaan abad ke-16 telah merupakan daerah beras. Kecuali itu di daerah-daerah tersebut dapat juga ditanami tebu, kopi, maupun lada yang sangat menarik bagi pedagang antar-pulau waktu itu. Mudahnya diduga bahwa sebagian besar rakyat Jawa Tengah adalah petani, sedangkan di beberapa daerah hidup dari pembuatan garam seperti di daerah Juana-Rembang. Di daerah-daerah pesisir rakyat juga mengusahakan tambak dan menjadi nelayan.

Selama periode Demak dan Pajang diusahakan pembukaan areal sawah. Cerita-cerita sekitar "Babad Alas" yang dituturkan dalam *Babad Pati*, *Embah Panggung* maupun *Pangeran Pandan Arang*, dan *Sunan Bayat* membuktikan adanya tokoh-tokoh cikal-bakal pembuka daerah baru.



Selama periode Mataram nampaknya permintaan akan beras demikian besarnya hingga Sultan Agung perlu mendatangkan puluhan ribu orang Madura ke Jawa Tengah untuk bekerja di sawah-sawah pada tahun 1624. Sementara itu banyak petani dari Jawa Tengah dikirim ke daerah Krawang guna membuka areal persawahan baru.

Inilah terutama dilakukan dalam usaha penyediaan beras selama waktu penyerangan dan pengepungan tentara Sultan Agung terhadap Batavia. Golongan inilah yang merupakan lapisan masyarakat paling besar di Jawa Tengah. Meskipun demikian pada zaman Sultan Agung tidak pernah terdengar adanya pemberontakan, para petani nampaknya keyakinan bahwa raja adalah penguasa yang harus ditaati.

Di daerah pesisir sementara itu terdapat sektor kehidupan ekonomi lain yaitu perdagangan. Mereka cepat menjadi kaya karena sektor perdagangan ini. Keadaan demikian tidak menimbulkan masyarakat berkembang ke arah borjuasi, sebaliknya yang muncul adalah bentuk feodalisme kekotaan. Ada tiga sebab utama mengapa hal itu bisa terjadi. Pertama karena para penguasa daerah pesisir bagaimana pun masih keturunan bangsawan Majapahit. Pola hidup bangsawan masih tetap melekat dalam cara berfikir mereka. Sementara itu modal perdagangan laut ini masih seluruhnya dipegang oleh para bangsawan pesisir ini. Mungkin dalam pergaulan dengan dunia luar telah di kenal pola kemasyarakatan baru, tetapi belum lagi masa peralihan terjadi, administrasi monopoli perdagangan telah berlaku. Keadaan ini memang kebijaksanaan Sultan Agung agar tidak terjadi pemberontakan - pemberontakan di daerah pesisir yang sudah merasa kaya-raya. Nampaklah di sini bahwa susunan masyarakat Jawa waktu itu terdiri atas golongan petani, golongan bangsawan, pemilik modal, dan golongan bangsawan pemilik tanah kerajaan.

Kecenderungan yang berlaku waktu itu dalam masyarakat ialah para petani makin hidup pesimistis dan apatis karena adanya harapan. Oleh karena itu setiap kali terjadi gerakan perlawanan seperti yang dilakukan Trunajaya, Untung Suropati, dan nantinya Pangeran Diponegoro, rakyat selalu menerimanya sebagai Sang Ratu Adil. Sementara itu karena pemegang modal tidak memiliki kebebasan berdagang, mereka tertutup dari pergaulan bangsa-bangsa. Akibat selanjutnya Mataram tidak sanggup lagi menyelenggarakan monopoli



beras. Mataram tidak sanggup lagi menguasai lautan. Kecuali karena tradisi sebagai bangsa pelaut telah menipis juga karena pada tahun 1641 Malaka telah jatuh ke tangan VOC sehingga Mataram tidak dapat lagi berdagang dengan Malaka.

Dalam pada itu Mataram makin membutuhkan uang, bukan saja untuk membiayai memadamkan pemberontakan dan perang-perang perebutan mahkota yang terjadi sepeninggal Sultan Agung, tetapi juga karena tuntutan kehidupan bangsawan yang makin besar dengan gaya kebangsawanan mereka. Sumber uang hanya ada pada VOC, karena itu jatuhlah kemudian Mataram sebagai negara wajib penyettor dan wajib kerja kepada VOC.

Corak kehidupan kemasyarakatan makin menuju ke arah hidup yang feodalistis. Tradisi sebagai pelaut pedagang telah lama ditinggalkan sejak pemerintahan Sultan Agung, yang berorientasi pada daerah pedalaman yang dengan sendirinya bersifat agraris. Lalu peranan Jawa di lautan telah digantikan oleh Aceh, Banten, dan Makasar. Kekuasaan di lautan tinggal VOC yang melakukan monopoli baik di daratan maupun di lautan. Hanya pelaut-pelaut yang gagah berani sebagai bajak laut, yang masih sanggup melawan VOC di lautan. Sementara itu Mataram telah menjadi daerah protektorat VOC sejak 11 Desember 1649 waktu Paku Buwono II dalam keadaan sakit payah menitipkan seluruh wilayah kepada VOC. Kemudian mekanisme kehidupan perekonomian berjalan sebagai berikut. Rakyat sebagai petani wajib menyerahkan hasil bumi mereka kepada kepala-kepala desa yang telah bertindak sebagai raja-raja kecil. Selanjutnya mereka atas nama raja menyerahkan kepada bupati atau petugas yang bertindak dengan izin dan atas nama VOC. Meskipun demikian di lapisan masyarakat paling rendah tetap terselenggara tata kehidupan yang diwarnai oleh ikatan desa. Di antara mereka tampak adanya mekanisme gotong-royong yang menjamin kehidupan ekonomi konsumtif di antara warga desa. Di desa jauh dari sistem perekonomian keuangan, sewa maupun upah kenal dengan sistim bagi hasil dan *bawon* yaitu acara pengupahan *innatura*.

Ada corak budaya yang memiliki pola pengembangan yang berbeda yang menandai zaman antara 1600--1800 di Jawa Tengah. Keduanya seolah-olah membentuk dua wilayah yang saling bertentangan, yaitu

daerah pesisir dan wilayah pedalaman. Wilayah pesisir dengan pola kebudayaan yang dibentuk dan dikembangkan dari mesjid sedangkan di wilayah pedalaman. Waktu, tenaga kehidupannya dicurahkan untuk pengembangan agama Islam. Sambil menyebarkan agama mereka, mereka membuka daerah pemukiman baru dengan jalan "babad alas" sehingga muncullah nama-nama wali yang berasal dari nama kota. Sunan Bayat diberikan kepada wali yang membuka daerah Tembayat. Sunan Panggung yaitu wali yang membuka daerah tegal dan terkenal karena mendirikan pentas atau panggung ketika memainkan wayang kulit. Kecuali itu menurut cerita rakyat, sebagai sungai tuntang dibuat oleh para wali. Kemudian sebagai tanda peringatan mereka mendirikan sebuah mesjid sekaligus mempunyai kegunaan praktis yaitu sebagai tempat beribadah, dan juga selama para wali tersebut mengerjakan suatu *civics mission*. Dari mesjid mereka kemudian mengatur langkah *Civics mission* mereka dan didalam mesjid pula mereka mengajarkan agama baru itu secara terbuka.

Diperkirakan tradisi mengajarkan agama di serambi-serambi mesjid itu merupakan lembaga pendidikan pertama di Jawa yang bersifat lebih liberal dan demokratis. Trasisi pendidikan selama zaman Hindu yang sudah dikenal ialah tersirat dalam sistem guru kula, di mana sang guru menyampaikan ajarannya kepada beberapa murid yang duduk didepannya. Sifatnya tidak massal, cara yang sklsusif ini masih dipakai oleh beberapa tertentu seperti Syeh Siti Siti Jenar dan muridnya yaitu Sunan Drajat atau Embah Panggung. Dalam kesempatan seperti itu diajarkan kasunyatan atau hakekat hidup yang termasuk tujuan ilmu tassawuf. Cara itu tidak disetujui oleh masyarakat para wali sehingga tokoh *tassawuf* banyak yang dihukum mati.

Dalam pada itu materi yang diajarkan tidak hanya prinsip-prinsip keimanan dan keislaman, peribadatan, moral Islam, dan lain-lain yang sangat bersifat olah jiwa, melainkan diajarkan pula bidang kanuragan atau olah raga yaitu ilmu bela diri. Diperkirakan kecenderungan itu terjadi segera setelah Sultan Trenggono wafat yaitu selama masa yang dalam cerita rakyat dikenal Zaman Kemelut di Demak, hingga

diperlukan kesiapsiagaan oleh setiap pihak yang bersaing pada waktu itu. Muncullah di mana-mana padepokan-padepokan tempat para santri belajar ilmu agama dan ilmu bela diri yang dipimpin oleh seorang kiai.

Demikianlah dominan peranan mesjid hingga selama periode Demak tercatat banyak sekali mesjid yang terkenal dan berkaitan dengan tokoh wali maupun raja seperti Mesjid Demak, Mesjid Kadilangu, Mesjid Bonang, Mesjid Kudus, Mesjid Laram, Mesjid Jipang. Pada tinggalan mesjid dan makam yang biasanya terletak di samping mesjid kita dapat melihat arsitektur zaman permulaan Islam di Jawa Tengah, sebab tidak satu pun kita jumpai petilasan berupa istana atau keraton. Dari segi arsitektur, bangunan mesjid masih sangat terpengaruh oleh bangunan-bangunan Hindu. Kecuali bentuk atap kebanyakan mesjid yang tersusun tiga yang merupakan sisa-sisa meru, bentuk gapura beberapa mesjid dimiliki oleh Mesjid Kudus dan Mesjid Jipang, sedangkan menara Mesjid Kudus mendapat pengaruh motif-motif hias Cina dari Jawa Timur. Kecenderungan lain dalam seni bangunan Islam waktu itu ialah dalam seni hias mesjid. Berbeda dengan seni hias Hindu maka seniman-seniman muslim menghindari penggambaran tokoh manusia. Sebagai gantinya mereka menghiasi dinding maupun tiang mesjid dengan ukiran tumbuh-tumbuhan menjalar ataupun bentuk lain yang distilasi. Seniman-seniman Jawa kurang menyenangi penggunaan *arabesk* atau kaligrafi huruf Arab. Sebaliknya mereka ukirkan huruf Jawa pada kesempatan yang tepat seperti "*titimangsa*" pendirian bangunan dan lain-lain.

Pada periode Mataram peranan keraton sangat menonjol dalam pengembangan kebudayaan, secara fisik bangunan keraton lebih diutamakan dari pada bangunan lain. Ini adalah konsekuensi dari sistem sosial yang feodalistis. Kedudukan para wali atau pemuka agama bukan lagi sebagai aktor intelektualis, melaunkan sebagai penasihat atau bahkan sebagai pembantu. Bukanlah Sultan sudah bergelar Panotogomo Khalifatullah ? Dengan begitu semua penciptaan seni budaya berorientasi pada keraton. Pertunjukan wayang bukan lagi sebagai media dakwah yang dilakukan oleh para wali, melainkan pada hakekatnya sebagai upacara penghormatan para arwah nenek-moyang yang juga merupakan pemujaan pada keunggulan kehidupan kebangsawanan. Tema cerita wayang yang berkisar pada moral

kepahlawanan merupakan sumber inspirasi dan kekuatan moral kaum bangsawan keraton di Jawa. Kalau selama periode Demak, bentuk suluk seperti suluk Malang-Sumirang ciptaan Embah Panggung, suluk Wijil karangan Sunan Bonang maupun suluk Sukarsa, menguraikan bahwa teosofi Islam merupakan gejala umum, sehingga bentuk cerita sejarah, pemerintahan, kepahlawanan, dan lain-lain merupakan ciri yang menonjol pada periode Mataram. Kita catat misalnya judul-judul buku *Serat Nitistruti*, *Serat Nitiproyo*, *Serat Sewaka*, *Serat Bratayuda*, *Serat Dewa Ruci*, *Serat Menak*, *Serat Ambia*, *Serat Tajusalatin*, dan lain-lain. *Babad Tanah Jawi* yang disusun oleh Sultan Agung dianggap sebagai sebuah karya agung karena kecuali merupakan semacam bahan sejarah Indonesia pada periode tertentu juga merupakan usaha legalisasi Sultan Agung sebagai cikal-bakal raja-raja Jawa Tengah. Buku lain yang merupakan buah karya pengarang Keraton Mataram ialah *Serat Centini*, semacam ensiklopedi Jawa, buah karya Sinuhun Paku Buwono V. Sebelum Sinuhun Paku Buwono IV berhasil menyusun *Wulang Reh*, sebuah buku pedoman bagi para penguasa dan tidak boleh dilupakan buku-buku karangan anak-beranak Yosodipuro yang dapat dianggap sebagai pelopor kesusastraan Mataram. Darah merekalah yang mengalir pada pujangga Mataram yang terkenal pada awal abad ke-19, yaitu R. Ng. Ronggowarsito, Yosodipuro telah menulis antara lain *Serat Tajusalatin*, *Serat Cabolek*, *Babad Giyanti*, *Wicara Keras* dan lain-lain, tetapi puncak kesusastraan Jawa keraton baru terjadi setelah zaman Ronggowarsito.

### 3.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan

Seperti dikemukakan dalam pendahuluan, babakan zaman baru ini dalam bidang spiritual ditandai oleh munculnya corak baru dalam pikiran bangsa, yaitu agama Islam. Agama itu tidak saja sebagai agama rakyat tetapi resmi sebagai agama negara. Agama Islam telah menggantikan Hinduisme. Agama baru itu telah terpancar dalam semua aspek kehidupan bangsa, baik dalam kehidupan kenegaraan, kehidupan kemasyarakatan maupun kehidupan seni budaya di Jawa Tengah.

Prinsip kepercayaan agama baru ini adalah kepercayaan dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad ialah utusan Allah. Sesuatu keyakinan baru dalam

kehidupan bangsa Indonesia yang selama ini meyakini politisme dan bahkan panteisme. Agama baru ini bersifat monoteistik, karena hanya meyakini pada keesaan Allah. Meskipun demikian agama baru ini diterima dengan serta-merta oleh rakyat Indonesia, tanpa menimbulkan kegoncangan sosial yang berarti karena disebarkan dengan cara yang sangat bijaksana oleh para wali yang lebih dikenal dengan Wali Sanga. Prinsip keyakinan lain dalam Iman Islam ialah percaya pada kitab-kitab suci Allah yaitu *Taurat*, *Zabur*, *Injil* dan *Qur'an* sekaligus. Orang Islam juga harus meyakini akan para nabi dan rasul sejak Adam sampai Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Rukun iman yang keempat yaitu percaya pada para malaikat sebagai petugas Allah. Kemudian orang Islam percaya pada akan datangnya hari kiamat sebagai hari akhir. Proses kehidupan tidak lagi berupa siklus seperti menurut iman Hindu yang selama itu dipercaya oleh bangsa Indonesia. Pada akhir proses kehidupan yang disebut hari kiamat ini umat manusia akan menjumpai diri mereka tinggal di surga ataupun neraka tergantung dari amal perbuatan mereka di dunia. Jadi tidak dalam ujud penjelmaan kembali seperti dalam iman Hindu. Dan sebagai prinsip keimanan Islam ialah mempercayai akan adanya faktor takdir dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud ialah ketentuan Tuhan bagi jalan kehidupan setiap makhluk Tuhan.

Pancaran Rukun Iman tersebut dalam kehidupan muslim ialah kewajiban untuk menegakkan Rukun Islam yang terdiri atas lima kegiatan. Berturut-turut terdiri atas membaca dua kalimat syahadat atau persaksian seperti tersebut dalam prinsip pertama Rukun Iman. Kedua ialah kewajiban menegakkan sembahyang lima waktu mengikuti garis keras sunan yang disusul dengan kewajiban menjalani masa berpuasa dalam bulan Ramadhan. Kewajiban setiap orang Islam selanjutnya ialah membayar zakat, yaitu pemberian sebagian harta kepada orang yang membutuhkannya. Akhirnya bagi yang mampu diwajibkan menunaikan rukun haji, pergi berziarah ke Mekah mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim tu kali seumur hidup.

Sesungguhnya tidak benar kalau dikatakan bahwa kepercayaan asli Indonesia di Jawa Tengah telah digantikan oleh agama Islam dalam arti yang sebenar-benarnya. Prestasi para wali dalam menyebar kan agama Islam dengan gaya *penetration pasifique* yang terkenal itu ternyata

dapat diterima oleh masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Perpaduan antara unsur kebudayaan Islam, Hindu, dan asli atau lebih dikenal sinkretisme itu ikut memperkaya perbendaharaan baru, untuk memperkaya nilai-nilai kerohanian yang telah lama mereka hayati. Gejala ini sebagian besar terdapat di kalangan penduduk pedalaman. Seperti halnya di India maka di Jawa Tengah dalam kondisi yang demikian itu mudah sekali menerima aliran yang mengajarkan prinsip *Manunggaling Kawula lan Gusti*, yaitu salah satu aliran tasawuf Al Hallaj dari Bagdad. Aliran ini berkembang dengan pesat sejak periode Pajang.

Selama periode Mataram nampaknya aliran yang mengikuti garis kebijaksanaan Sunan Kalijogo mengalami perkembangan yang subur. Aliran ini sangat moderat dalam cara penyebaran agama. Zaman Sultan Agung dianggap sebagai lambang kejayaan Islam. Pada zamannyalah diresmikan tarikh Jawa yaitu perpaduan antara tarikh Saka dengan tarikh Hijriyah. Nama-nama bulan maupun hari diambilkan dari tarikh Hijriyah yang disesuaikan pada perjalanan bulan mengitari bumi dan dikenal dengan prinsip qamariah sebagai lawan syamsiah, sedangkan titi mangsa tetap memakai tahun Saka yang mempunyai selisih waktu sekitar 78 tahun bila dibandingkan dengan tahun Masehi. Sekarang berselisih sekitar 68 tahun. Dalam masyarakat Indonesia berlaku tiga buah tarikh yaitu Masehi, Saka, dan Hijriyah. Kedatangan bangsa barat yaitu Portugis dan kemudian Belanda juga ikut memperkaya alam pikiran bangsa Indonesia. Orang Portugis dalam perlawatannya ke daerah Timur selalu diikuti oleh para rokhaniwan yang ikut menyebarkan agama Roma Katolik kepada rakyat Indonesia. Di samping orang-orang Portugis orang Belanda juga membawa para rokhaniwan agama Protestan dan agama Roma Katolik. Pada dasarnya agama Katolik maupun Protestan, mula-mula hanya melayani untuk orang-orang Belanda dan belum memiliki kebebasan bergerak di kalangan masyarakat. Rakyat masih belum dapat menerimanya karena dianggap sebagai agama Kompeni yang dikatakan kafir oleh rakyat. Namun demikian lama-kelamaan ada pula masyarakat yang menerima agama baru tersebut, sehingga ikut memperkaya perbendaharaan kebudayaan Indonesia. Pada dasarnya agama-agama itu hidup

berdampingan saling hormat-menghormati sesuai dengan sikap bangsa Indonesia yang toleran.

### 3.5 Hubungan Antarbangsa

Salah satu ciri zaman baru dalam sejarah di kawasan Asia ialah makin terlibatnya orang-orang dari kawasan itu dengan pergaulan bangsa-bangsa secara lebih luas. Yang dimaksud ialah keterlibatan mereka dengan bangsa-bangsa pendatang dari Eropa. Orang-orang Eropa memandangnya sebagai zaman penemuan daerah baru. Sejak itulah pelaut-pelaut Eropa yang baru menemukan Asia lewat laut mulai terlibat secara langsung dalam pergaulan ekonomi dan sebagai akibatnya tidak dapat dihindari pula kontak-kontak politik dan sosial budaya. Sebelum masa itu komoditi terutama yang datang dari India dan Indonesia telah memenuhi pasaran Eropa dengan jalan berantai. Aktivitas ekonomi waktu itu melibatkan pelaut-pelaut yang sekaligus pedagang dari negeri-negeri penghasil barang, pedagang-pedagang perantara dari India, Persia, dan Arab, serta pedagang Genoa. Dengan sendirinya harga komoditi di pasaran Eropa menjadi makin tinggi.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam periode Demak, kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa Tengah merupakan tempat pertemuan para pedagang, baik yang datang dari pulau-pulau di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Daya pikat utama mereka datang ke Jawa Tengah ialah beras, tetapi pelaut-pelaut Jawalah terutama yang menjadi pedagang keliling dan menguasai perairan Indonesia. Dengan perahu-perahu ramping buatan Jepara mereka menjembatani pelabuhan Malaka dengan pelabuhan-pelabuhan di Maluku. Dengan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* mereka memperkenalkan agama Islam ke wilayah Indonesia Timur. Pedagang Jawa mengenal agama itu dari pedagang Cina, Persia maupun langsung dari pedagang Arab yang selalu saja bisa berjumpa dalam hubungan perdagangan. Pergaulan mereka terjalin seimbang. Bukan hanya para pedagang Asing yang mengawini gadis-gadis Jawa tetapi juga para pedagang dan penguasa Jawa pun berhasil mempersunting gadis-gadis asing ini terutama dilakukan oleh kaum elite Jawa. Di sepanjang pasisir utara Jawa sampai sekarang tersisa pemukiman pedagang-pedagang asing. Itu seperti terlihat pada nama perkampungan Arab, Pacinan, Pekojan, dan lain-lain.



Dengan bangsa Arab bangsa Indonesia memupuk hubungan yang khas. Tradisi ini nampak dikembangkan karena persamaan agama yaitu agama Islam. Oleh karena itu sifat perhubungan kemudian berkembang sedemikian rupa hingga para raja memakai gelar sultan yaitu gelar yang biasa dipakai raja-raja di tanah Arab. Seperti yang dilakukan Raden Patah, Sultan Agung, juga menggantikan gelar panembahan dan memakai gelar *Sultan Agung Anyokrokusumo Sayidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawi*. Bangsa Cina pun telah lama singgah di pelabuhan-pelabuhan Jawa. Di Jawa Tengah mereka bermukim di pelabuhan Semarang yaitu di daerah Simongan dan sepanjang Kali Semarang, tetapi tidak diketahui secara jelas bilamana mereka mulai bermukim di Simongan, yang pasti tahun 1412 mereka sudah banyak yang menetap di situ. Pada tahun 1412 tersebut Cheng Ho bersama pembantu-pembantunya, yaitu Ma Huan dan Feh-Tsin datang di Simongan dan disambut secara meriah oleh masyarakat Cina di kota tersebut dan dipuja sebagai tiga pahlawan besar atau *Sam Po Tai Yin* atau dalam dialek lain "*Sam Po Kong*", sedangkan masyarakat Jawa menyebutnya Dampo Awang. Mula-mula mereka memeluk agama Islam dari Mazab Hanafi dan mendirikan mesjid di Simongan, namun oleh masyarakat Cina yang datang berikutnya mengubah mesjid tersebut menjadi sebuah Klenteng yang terkenal dengan nama Klenteng Gedung Batu. Sekembalinya Cheng Ho ke Tiongkok, baik Ma Huan maupun Feh Tsin mengarang kitab mengenai kisah perjalanannya. Kitab *Jing Jai Sheng Lan* (1416) dikarang oleh Ma Huan sedangkan Feh Tsin mengarang kitab *Tsing Tsa Sheng Lan* (1431). Pada umumnya masyarakat Cina di Jawa hidup dalam per-dagangan, pertukangan, perikanan, dan pertanian, namun sebagian besar mereka mengutamakan perdagangan sebagai mata pencahariannya. Daerah sekitar Gedung Batu yang kemudian lebih dikenal dengan nama Klenteng Sam Po Kong diperkirakan sebagai pemukiman pertama Haji Cheng-Ho. Di sana pulalah kemudian berkembang masyarakat Cina yang pertama di Semarang.

Keseimbangan dalam pergaulan bangsa-bangsa itu kemudian terganggu oleh kedatangan pelaut bangsa Portugis, dari Malaka yang berhasil mereka rebut dari tangan penguasa Melayu pada tahun 1511. Bangsa Portugis bergerak di kawasan Asia Tenggara. Kontak-kontak



senjata terjadi susul-menyusul. Tercatatlah kemudian serangan gabungan antara pelaut-pelaut Makasar, Aceh, dan Demak ke utara. Pelaut-pelaut Demak yang bergerak dari pangkalan laut Jepara dipimpin oleh Adipati Junus (Pangeran Sabrang Lor), tetapi serangan gabungan ini gagal. Bangsa Portugis yang memusuhi orang-orang Moor nampaknya telah menemukan sasaran baru yaitu pelaut-pelaut muslim dari Aceh, Jawa, dan Makasar di perairan Indonesia. Semangat mencari untung telah melibatkan Portugis dalam mengurus rempah-rempah dari Maluku. Di samping agama Nasrani di Indonesia. Sementara itu kita memperoleh perbendaharaan bahasa yang cukup banyak dari mereka.

Sifat pergaulan antara bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia di Jawa Tengah memiliki corak lain lagi. Mereka memiliki mentalitas saudagar tulen. Segera mereka melibatkan diri dalam setiap pergolakan sosial dan politik Mataram sebagai petualang yang selalu mencari keuntungan. Kehadiran mereka selalu diharapkan oleh paling tidak satu pihak dari pihak-pihak yang bersengketa itu. Nyatanya hanya dari Sultan Agung saja mereka mendapat perlawanan yang berarti. Seperti halnya dengan perlawanan Sultan Agung maka setiap perlawanan rakyat melawan Belanda selalu gagal, sebaliknya Belanda beruntung dengan bertambahnya wilayah mereka.

Sejak wafatnya Sultan Agung, VOC makin memainkan peranan yang aktif dalam bidang politik. Campur tangan mereka makin nyata dalam urusan dalam negeri Mataram karena kelemahan pribadi para sultan di Jawa. Amangkurat I terpaksa minta bantuan Belanda dan sikap itu diteruskan oleh Amangkurat II dalam rangka menghadapi Trunojoyo. Pangeran Puger menandatangani perjanjian dengan VOC pada waktu menghadapi Amangkurat III serta Untung Suropati. Puncak dari kelihaian Belanda dalam merongrong keutuhan wilayah Mataram ialah ketika pada tahun 1749 Paku Buwono II menyerahkan seluruh kekuasaan Jawa kepada Belanda. Sejak itu semua penobatan sultan atau susuhunan di Jawa harus mendapatkan persetujuan gubernur jenderal di Batavia.

Sementara itu proses pembagian kekuasaan maupun wilayah di Jawa telah melahirkan Negara Surakarta Adiningrat di bawah Paku

Buwono, Negara Ngayogyakarta Adiningrat di bawah Hamengku Buwono, dan Mangkunegara di bawah seorang adipati. Kesemuanya menjadi negara wajib setor kepada VOC dan rakyat yang hidup dalam suasana kemiskinan selalu mendambakan datangnya Ratu Adil.

## BAB IV

### MASA ABAD KE-19 (1800 -- 1900)

#### 4.1 *Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan*

Pada abad akhir abad ke-18 VOC atau *Vereenigde Oost Indische Compagnie* yaitu suatu kompeni dagang yang didirikan di Negeri Belanda pada tahun 1602 dengan hak *Okroi* yang diberikan oleh *Staten General* Belanda telah mengalami kebangkrutan selama menjalankan politik monopoli perdagangannya di Indonesia. Pada hakekatnya organisasi pemerintah VOC tidak pernah berhasil menguasai seluruh kepulauan Indonesia karena kekuasaan VOC hanya terbatas pada Kota Batavia, Semarang, Jepara, Rembang, Ambarawa, dan Unggaran. Di luar daerah kekuasaannya masih ditemukan kerajaan Indonesia yang berdaulat.

Dalam tahun 1790 *Staten General* membentuk suatu *committee tot de zaken van de oost Indische Compagnie* dengan tugas untuk menyelidiki keadaan Badan Usaha Dagang VOC tersebut dan mungkin memperbaikinya. Selama ini mungkin Badan Dagang VOC telah mempergunakan anggaran untuk menyelenggarakan administrasi kepegawaian, organisasi kepegawaian sipil dan militer, sedangkan para pemegang sahamnya telah menuntut deviden yang tinggi sehingga VOC terpaksa meminjam anggaran belanja Pemerintah Negeri Belanda.

Sehubungan hal tersebut VOC pada tahun 1793 telah menanggung hutan sebesar 112 juta gulden. Di samping itu Pemerintah Belanda sendiri telah menghadapi oposisi terhadap monopoli VOC yang makin lama makin mengikat dan mencapai puncaknya dalam babakan terakhir abad ke 18. Dalam tahun 1796 hutan badan dagang tersebut menjadi 120 juta gulden.

Sementara itu dalam tahun 1789 meletus Revolusi Perancis yang dipimpin oleh golongan Borjuis Modern. Ide-ide Revolusi tersebut mendapat sambutan yang hangat dari golongan pengusaha liberal kapitalis. Di Negeri Belanda sendiri golongan Borjuis modern ini diwakili oleh aliran unitaris. Kaum unitaris inilah yang menuntut perubahan bentuk pemerintahan Republik Federal yang dikuasai oleh golongan aristokrasi dagang lama dan keluarga bangsawan feodal serta yang dipimpin oleh keluarga oranye, menjadi suatu republik kesatuan yang dikuasai oleh mereka. Mereka menuntut agar VOC yang monovolitis sifatnya itu segera diakhiri.

Dalam tahun 1795 Negeri Belanda diduduki oleh tentara revolusioner Perancis dan dengan pertolongan tentara tersebut kaum unitaris dapat pelimpahan kekuasaan dalam Republik. Stadhouder Willem V terpaksa lari dan mengungsi ke Negeri Inggris

Pada 24 Desember 1795 *Haren Zaventien* diganti oleh suatu Panitia Negara yang bertugas untuk mengurus perdagangan dan daerah pendudukan di India Timur (*Committee tet de Zaken Van de Oost Indische Handel en Bezittingen*). Panitia ini mulai bekerja pada 1 Maret 1796.

Berdasarkan konstitusi tahun 1798, bentuk pemerintahan Republik Federal diubah menjadi bentuk pemerintahan Republik Kesatuan atau *Bataafse Republiek*.

Menurut pasal 247 konstitusi (*Staats Regeling*) tahun 1798 *Charter VOC*, harus diakhiri dan negara akan mengambil alih semua milik serta hak dan kewajibannya. Kemudian para pemegang saham akan diganti kerugiannya. Jadi *Charter VOC* berakhir pada 1 Januari 1800.

Berdasarkan konstitusi 1798 kekuasaan untuk mengurus semua daerah koloni di Asia akan dilaksanakan oleh suatu Dewan yang disebut *Raad van Aziatische Beziattingen en Etablissementen* yang

bertanggung jawab terhadap Dewan Eksekutif Republik (Ataatbewind) dan anggota-anggotanya juga diangkat oleh Dewan Republik itu .

Selanjutnya konstitusi tahun 1798 diganti dengan konstitusi 1801. Dengan keputusan Dewan Eksekutif 11 November 1802 dibentuklah suatu panitia yang bertugas merancang suatu sistem pemerintah untuk koloni (Panitia Nederburgh-Hugendorp). Pada tahun 1803 panitia ini menyampaikan rancangan sistem pemerintah *Bataafse Republiek* terhadap daerah-daerah jajahan Asia. Surat keputusan Dewan Eksekutif *Charter* tentang sistem pemerintah daerah koloni di Asia itu ditetapkan 27 September 1804. Namun demikian dalam tahun 1805 Dewan Eksekutif Republik dihapuskan dan kekuasaannya diambil alih oleh *Raadpensionaris Schimmel-penninch*, yang mencabut *Charter* 1804 itu. Dalam konstitusi tahun 1805 di antara pasalnya memberi kekuasaan kepada *Raadpensionaris* untuk menetapkan pemerintahannya, sehingga dengan *Secreet Beluit* pada 27 Januari 1806 ditetapkanlah *Reglement op het beleid van de Regering en het Justitiewezen on de Aziatische Bezittingen van de Bataafse Republiek (Regerings reglement)*.

Dengan surat keputusan 11 November 1805 Van Grasveld diangkat sebagai gubernur jenderal dan bersama Elout diangkat sebagai komisaris jenderal (*commissarissen generaal*) yang bertugas menjalankan *reglement* tersebut. Halnya mereka tidak jadi berangkat karena pada 5 Januari 1806 saudara kaisar Napoleon yaitu Louis Napoleon diangkat sebagai raja Kerajaan Belanda. Dengan dekret 11 Juli 1808 *reglement* tersebut dicabut dan dengan surat keputusan tersebut pada 29 Juli 1806 *Raad van Aziatische Bezittingen en Etablissementen* dihapus dan kekuasaannya diserahkan kepada seorang Menteri Angkatan Laut dan Daerah Jajahan (*Minister Van Marine en Kolonien*).

Pada 7 Agustus 1806 diadakanlah perubahan mengenai Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Dengan surat keputusan raja pada 9 Januari 1807 ditetapkan Instruksi Gubernur Jenderal bersama-sama *Raad van Indie* untuk daerah koloni dan kekuasaan di Asia. Selanjutnya pada 28 Januari 1807 diangkat Jenderal Daendels sebagai gubernur jenderal.

Berdasarkan dekrit Kaisar Napoleon 9 Juli 1810, Kerajaan Belanda dimasukkan ke dalam Imperium Perancis dan bagi Nederland sejak saat itu mulai berlaku konstitusi Imperium Perancis. Pada tahun 1811 Pulau Jawa diduduki oleh Inggris, yang pada waktu itu sedang berperang dengan Negeri Perancis. Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1813, Kaisar Napoleon dapat dikalahkan oleh Inggris, Austria, Rusia. Pada tahun itu pula tepatnya pada 21 November 1813 Van Hogendorp Van der Duyn Van Maars berhasil merebut kekuasaan atas nama keluarga Oranye, yaitu Prins Stadhouder Willem V yang lari dan mengungsi ke Inggris pada tahun 1795 saat Republik Tujuh Provinsi diduduki pasukan Revolusioner Perancis.

Dengan suatu proklamasi pada 2 Desember 1813 putra Oranye Willem V menerima kedaulatan sebagai raja Negeri Belanda dan memakai nama Willem I. Di dalam proklamasi tersebut Willem I menyatakan bahwa ia menerima kedaulatan itu demi berkat Tuhan dan berdasarkan persetujuan semua rakyat.

Pada 29 Maret 1814 konstitusi Negeri Belanda ditetapkan dan konstitusi itulah yang setelah mengalami beberapa kali perubahan tetap menjadi dasar *Koninklijk der Nederlanden*. Berdasarkan konstitusi Nederland diatur sebagai suatu negara yang bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Dengan *Koninklijk Besluit* 22 September 1814 diangkatlah suatu komisi jenderal (*Commissie General*) yang terdiri atas tiga orang dan yang bertugas atas nama kerajaan belanda untuk mengoper daerah jajahan di Asia dari Inggris sesuai dengan Konvensi London pada 13 Agustus 1814. Komisi jenderal ini mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemerintah di daerah koloni.

Pada tahun 1816 komisi Jenderal tersebut tiba di Jakarta, yang waktu itu disebutnya Batavia serta mengadakan timbangan terima kekuasaan dengan Pemerintah Inggris. Jadi komisi pada saat itu mulai menyusun pemerintah sentral dan lokal dengan berdasarkan ketentuan *Reglement* 3 Januari 1815. Namun demikian keadaan telah berkembang selama masa pemerintahan Inggris dari tahun 1811--1816, sehingga sukar disesuaikan dengan isi *Reglement* tersebut. Karena itu pada 22 Desember 1816 ditetapkan suatu *Regerings reglement* yang baru, dengan Van der Capelen, salah seorang anggota komisi jenderal diangkat menjadi gubernur jenderal.

Sifat pokok politik kolonial Belanda di Indonesia dapatlah dibandingkan dengan imperialisme negara Eropa lainnya. Pada akhir abad ke-18 VOC bangkrut dan pada tahun 1800 kekayaannya diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda ini melanjutkan politik tradisional dengan tujuan pokok untuk memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, kesemuanya ini demi keuntungan Kerajaan Belanda.

Belanda membutuhkan hasil bumi daerah Indonesia dan untuk mendapatkan dengan cara pemungutan upeti karena pada bagian pertama abad ke-19 mereka tidak mempunyai barang-barang hasil negeri Belanda yang dapat dijual di daerah jajahan. Keadaan tersebut lain halnya dengan orang-orang Inggris yang sebagai akibat revolusi industri di Inggris, banyak menghasilkan kain tenun yang dapat diperjualbelikan di daerah jajahannya di Asia dengan harga yang lebih murah dari pada kain tenun buatan penduduk pribumi.

Perbedaan fungsi tanah jajahan antara Belanda dan Inggris berakar pada kondisi ekonomi negeri-negeri induknya. Bagi negeri Inggris dengan industri yang telah maju, perdagangan lebih menguntungkan dari pada pemungutan upeti sehingga tanah jajahannya dijadikan daerah pasaran bagi hasil industrinya. Negera Belanda keadaan berlainan karena negeri ini setelah diduduki Perancis selama 20 tahun, tidak memiliki industri dan modal. Daerah-daerah jajahan dianggapnya sebagai penghasil barang-barang ekspor yang dibutuhkan untuk perdagangan di pasaran Eropa. Sejak semula politik kolonial konservatif ini sudah mendapat kritik yang keras dari golongan liberal, yang menganjurkan suatu sistem pemerintah secara langsung berdasarkan prinsip-prinsip liberal dan perdagangan serta inisiatif swasta.

Pemerintahan Inggris di Jawa yang dipimpin oleh Raffles antara tahun 1811 -- 1816 bersifat liberal. Salah satu yang khas dari masa pemerintahan Raffles adalah sistem pemungutan pajak tanah.

## ***4.2 Daerah-daerah Jawa Tengah Dalam Abad Ke-19***

### ***4.2.1 Surakarta***

#### ***4.2.1.1 Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan***

Kartasurya sebagai pusat pemerintahan kerajaan Jawa, waktu itu diperintah oleh Sunan Paku Buwono II. Sewaktu terjadi pemberontakan Cina pendirian beliau tidak tetap karena kadang-kadang ia berpihak pada orang-orang Cina. Sikap demikian menyebabkan orang-orang Cina menyerbu Kota Kartasura dan mengakibatkan jatuhnya kota tersebut ke tangan mereka pada 30 Juni 1742.

Sunan Paku Buwono II bersama-sama pengikutnya dan utusan VOC yaitu Mayor Van Hegendorp menyingkir ke Ponorogo. Setelah kota tersebut ditinggalkan oleh sunan, orang-orang Cina mengangkat R.M. Garendi seorang bangsawan keturunan Keraton Kartosuro diangkat raja dengan geler Susuhunan Mangkurat Prabu Kuning. Namun demikian dengan bantuan VOC Keraton Kartosuro akhirnya dapat direbut kembali oleh Sunan Paku Buwono II Sunan Mangkurat Prabu Kuning melarikan diri, tetapi dapat ditangkap di daerah Surabaya dan kemudian dibuang ke Sailon pada tahun 1743.

Sunan Paku Buwono kemudian dapat bertahta kembali pada tahun 1743 tetapi Keraton Surakarta sudah kelihatan rusak dan telah dianggap hilang pula kesaktiannya. Berdasarkan alasan tersebut sunan ingin memindahkan Keraton dan pelaksanaannya diserahkan kepada pangeran Wijil I dari Kadilangu dan (seorang keturunan Sunan Kalijaga) bersama-sama tiga orang pembantu yaitu (1) Kyai Kalifah Buyut, bertugas mencari tanah yang baik untuk mendirikan keraton, (2) Penghulu Pakih Ibrahim mendapat tugas memberi tumbal dan memberi keselamatan serta memberi kewibawaan kerajaan, dan (3) Pujangga keraton yang bernama Kiai Tumenggung Tirtawiguno bertugas mencatat dan meramalkan keadaan yang akan datang serta yang sedang terjadi. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap tempat yang dipilih maka tempat tersebut kemudian dinamakan Pratalawangi atau Talawangi artinya tanah yang berbau harum. Sekarang tempat tadi terletak di belakang Sriwedari bernama Kadipala. Pada tempat ini semula didirikan kupel untuk peristirahatan raja. Agaknya perlu diketahui bahwa kupel ini sampai tahun 1956 masih berdiri utuh.

Sesudah diadakan pengukuran pada tempat tersebut Kiai Tumenggung Tirtawiguno berpendapat bahwa tempat ini kurang baik karena kurang luas. Berdasarkan keputusan ini pencarian tempat baru



diadakan ke arah timur lagi. Dalam hal ini tim penyelidik tempat ditambah lagi anggotanya yaitu Mayor Van Hogendorp, Kiai Tumenggung Hongowongso, Kiai Ngabei Yosodipuro, Patih Adipati Pringgoloyo. Para penyelidik ini menemui Kiai Sala, seorang bekel kamitua Desa Sala bernama Kiai Nurudin yang tinggalnya sebelah yang makam kiai Bathang (putra Raden Pabelaan). Makam tersebut kini masih pada tempatnya semula. Mereka minta restu dan kepastian untuk memilih Desa Sala sebagai lokasi Keraton Surakarta. Akhirnya peresmian berdirinya Keraton Surakarta dapat dilakukan pada hari Rabu Pahing, 17 bulan Sura atau Muharam tahun Je 1670/tanggal 27 Februari 1745 Masehi dengan sangkalan, Saraning Rasa Tunggal, yang berarti tahun 1670. Desa Sala lalu diganti namanya menjadi Surakarta Hadiningrat.

### **Istana Mangkunegaran**

Istana Mangkunegaran didirikan pada masa pemerintah RM. Said atau Pangeran Suryokusumo dan terkenal gelarnya dengan sebutan Pangeran Sabernyowo. Setelah penandatanganan perundingan Salatiga pada 13 Maret 1757 RM. Said diangkat menjadi sunan dengan gelar KPAA. mangkunegoro I. Adapun pelantikannya dilakukan ditempat yang kemudian menjadi "Pendopo Mangkunegaran" yang sekarang ini, hanya waktu itu bentuknya masih sederhana. Pendapa inilah yang kemudian diperluas oleh Mangkunegoro II dan yang dilanjutkan oleh Mangkunegoro II. Pada tahun 1886 Pura Mangkunegoro ini diperbaiki dan dilengkapi oleh Mangkunegoro IV dengan menambah bangsal besi disekeliling pendapa, yang bahan-bahannya dipesan dari Negara Jerman. Perlu diketahui bahwa penyempurnaan pembangunan Istana Mangkunegaran sampai diperoleh bentuknya sampai sekarang adalah hasil karya Mangkunegoro VII (1916 - 1944).

Seperti diketahui bahwa setelah Perang Diponogoro berakhir, Yogyakarta dan Surakarta diperkecil wilayahnya. Di samping itu pemerintah Belanda selalu turut campur dalam urusan pengangkatan sultan dan sunan kerajaan tersebut. Pada 27 Desember 1830 ditandatangani perjanjian tentang perubahan batas Surakarta dan Yogyakarta yang menetapkan: (a) daerah Pajang dan Sukawati diserahkan kepada sunan di Surakarta (b) daerah Mataram dan Gunung Kidul diberikan kepada sultan Yogyakarta, dan (c) pemakaman

yang terletak di Imogiri, Kota Gede, dan Sala dimiliki bersama oleh sunan dan sultan. Belanda dan khawatir akan bahaya perang Dipenogoro mulai memperkecil di daerah-daerah kerajaan Jawa. Sultan Yogyakarta kehilangan daerah Banyumas dan Kedu, sedangkan sunan di Surakarta harus menyerahkan daerah Kediri dan Madiun kepada Pemerintahan Belanda. Selain itu Pemerintah Belanda berusaha mencari bukti untuk menuduh Paku Buwono VI yang selalu membantu Pangeran Diponogoro secara diam-diam, namun sunan tidak puas dengan tuduhan dan Keputusan Pemerintah Belanda tersebut, oleh sebab itu beliau lalu meninggalkan Kota Surakarta dan bertapa di tepi pantai selatan Jawa. Perbuatan Sunan Paku Buwono ini dilaporkan oleh bupati Klaten kepada Belanda sehingga akibatnya Paku Buwono ditangkap dan dibuang ke Ambon. Sebagai penggantinya, diangkatlah Pangeran Purboyo yaitu Pamanda Pakubowono VI menjadi sunan di Surakarta dan bergelar Paku Buwono VII (1830 - 1858).

#### *4.2.1.2 Kehidupan Seni Budaya*

Istana Mangkunegoro yang didirikan oleh RM. Said atau atau yang terkenal dengan Pangeran Sambernyowo, berbentuk joglo dengan empat sakaguru dan sebuah dalem bentuk limasan dengan delapan buah sakuguru. Adapun langit-langit pendapa dihiasi dengan motif batik kuna yaitu jenis modang dengan warna-warni serta lukisan lambang zodiak dengan mata angin yang digambarkan dengan atribut dewa. Sejak tahun 1968 Istana Mangkunegaran terbuka bagi para wisatawan. Pada pendapa Istana pendapa istana dapat diketemukan seperangkat gamelan yang dinamakan kiai Kanyut Mesem. Gamelan inilah yang menjadi standar bunyi untuk gamelan. Semula gamelan ini berasal dari Demak dan diperkirakan kurang-lebih pada tahun 1778, karena dalam sebuah demung atau saron besar terdapat angka tahun 1700 Saka atau 1778 Masehi. Jadi tahun inilah gamelan tersebut dibawa dari Demak ke Mangkunegaran. Dalam ruang dalem letaknya di muka "Krobongan terdapat bermacam-macam koleksi benda seni dan budaya.

#### **Radyapustaka**

Radyapustaka ini didirikan atas prakarsa RA. Sosroningrat IV, seorang patih Sinuhan Paku Buwono IX pada 5 Mulud Ehe 1820 atau

28 Oktober 1890. Lembaga ini merupakan lembaga ilmu pengetahuan yang tertua di Indonesia. Semula Radyapustaka ditempatkan di Dalem Kepatihan dan berstatus otonom 100%, lengkap dengan perpustakaan dan museumnya. Sebagai ketua yang pertama yaitu Djojoningrat II yang menjabat selama enam tahun (1899 - 1905). Kegiatan Radyapustaka pada waktu itu ialah mengadakan musyawarah tentang ilmu dan kesusastraan Jawa pada setiap Rabu di Balai Antisina Kepatihan. sedangkan perpustakaan dan museum ditempatkan di Balai Pantiwibawa di sebelah Utara. Aktifitas Radyapustaka yang lain ialah memelopori penerbitan majalah bulanan berbahasa Jawa yaitu *Sosodoro* dan *Tjodrokanto*. Untuk mengenang dan memperingati jasa pendirinya, Radyapustaka pada 21 Desember 1928 telah mengabadikan mendiang KRA. Sosoroningrat IV dalam bentuk pahatan alam Wignyosuwarno yang ditempatkan ditengah-tengah Museum Radyapustaka. Selain itu juga telah dibangun gedung untuk memperingati alm. RTH Djojoningrat selalu ketu pertama yang diletakan di sebelah timur museum dengan nama Walidyosono. Setelah 23 tahun lamanya Radyapustaka menempati Dalem Kepatihan, pada hari Rabu Kliwon 22 Suara tahun Alip 1845 atau Januari 1913 dipindahkan ke Gedungnya yang baru ialah Laji Kadipala. Gedung inilah yang seterusnya dinamakan Museum Radyapustaka. Gedung ini semula dimiliki seorang Belanda yang bernama Johannes Busselaar lalu dibeli oleh sinuhun PB. X dengan perantaraan *ondermajor* RMT. Wirjoningrat. Pada waktu pemindahan gedung tersebut ketuanya yang pertama telah wafat, kemudian digantikan oleh R.T. Djojonegoro yang berhasil memangku jabatan selama sembilan tahun (1905 - 1914). Radyapustaka meskipun bersifat otonom nemun mendapat bantuan penuh dari Pemerintah Kasunanan berupa subsidi dan tenaga pegawai yang dinamakan "Garap Medana Pangarsa". Adapun cikal-bakal yang mengurusinya sehari-hari ialah RM. Suwito yang kemudian tersebut dengan nama RMT. Ronggowarsito. Pengganti beliau adalah Ng. Wiropustoko alias Ki Padmosusastro, sedangkan jabatan ketua Radyapustaka setelah RT. Wirjoningrat ialah KGPH. Hadiwijaya. Selanjutnya pada 11 November 1950 Radyapustaka ditingkatkan menjadi sebuah yayasan, namun nama dan tujuan masih tetap dan mendapat subsidi dari Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan di bidang kesusastraan yang perlu diketahui ialah penyatuan cara menulis

Jawa yang kemudian terkenal dengan nama “Ejaan Sri Wedari” atau *Sri Wedari Spelling*. Juga pada 15 Nopember 1941 Radyapustaka mendirikan “Panitia Basa” yang diketahui oleh KGPH. Kusumoyudo. Di bidang kesenian dan ilmu pengetahuan Radyapustaka menyelenggarakan kursus-kursus seperti (a) kursus dalang dengan pembimbing Ng. Lebdotjarito (1924 - 1942), (b) kursus gamelan dengan pembimbingnya Ng. Wirowijogo dan Ng. Sutosukarjo, (c) kursus bahasa Kawi di bawah pimpinan Dr. H. Kraemer dan Dr. Pigeaud (1926 - 1929). Kegiatan yang perlu diketahui seperti pagelaran membuat Wayang, mengukir kayu, membuat keris, membatik, dan lain-lain.

### **Langendriyan**

Langendriyan adalah sebuah seni tari dan tembang kebanggaan Istana Mangkunegaran dan yang menceritakan kepahlawanan Damarwulan, seorang putra kesatria Majapahit yang dapat mengalahkan raja perkasa Minak Jinggo dari Blambangan. Semula Langedriyan tersebut diciptakan oleh BRM. Tondokusumo atas permintaan tuan Gotlieb yaitu seorang pengusaha batik keturunan Jerman guna dipersembahkan kepada Mangkunegara IV (1853--1881). Pada awalnya Langendriyan ini dipentaskan secara berjongkok, jadi jelas merupakan seni dari rakyat kepada rajanya. Kemudian dalam prosesnya mendapat perbaikan dari Mangkunegara IV sehingga akhirnya seni tersebut di terima menjadi seni istana Mangkunegaran.

### **Budayawan Surakarta**

Keraton Surakarta mempunyai tokoh-tokoh seniman dan budayawan yang terkenal, di antara mereka itu ialah RMNg Ronggo warsito. Dia adalah putra R. Pandjangsworo, abdi dalem keraton Surakarta dan merupakan cucu pujangga Josodipuro II jadi memang berdarah pujangga. Dia dilahirkan pada hari Senin pukul 12.00, 10 Dulkaidah tahun Be 1728 atau dalam bulat Maret 1801 di Kota Solo. Sebelumnya ia bernama Bagus Burham. Buku-buku yang dikarang antara lain adalah Serata Paramajoga, Serta Djitapsoro, Serat Pustaka Raja, Serat Babad Pakepung, Djajengbojo, Djaka Lodang, Kolotido,

Sabdotomo, Tjemporet, dan lain-lain. Buku yang terakhir ini di karang dengan izin Sinuhun Paku Buwono IX.

KGPH. Hadiwijaya lahir di Keraton Surakarta pada 14 Mulud, Djimakir 1818 atau 18 November 1888. Ia adalah putra Sunan Paku Buwono X. Dia memperoleh pendidikan khusus dan diawasi oleh ayahnya sendiri, Pernah mengaji, "ngalakoni". menari, main anggar serta menuntut ilmu pada *Universiteit Leiden* jurusan Indologie. Perhatian terhadap arkeologi amat besar, suka mengarang, dan amat berjasa dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang paedagog dia amat berjasa karena berahasil mendirikan sekolah-sekolah, antara lain sekolah Angka Loro di desa-desa, HIS, AMS, *Ambacht School* pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda. Pada tahun 1952 beliau mendirikan lembaga pendidikan Yayasan Sarawati, yang menempati istananya sendiri.

### Perayaan Sekaten

Salah satu upacara tradisional di daerah Surakarta ialah perayaan sekaten yang sangat menarik. Perayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Demak. Adapun perayaan Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta diselenggarakan pada setiap bulan Maulud yaitu sebagai peringatan Maulud Nabi sehingga sering dinamakan Mauludan.

#### 4.2.2 *Kebupatian Semarang*

##### 4.2.2.1 *Kehidupan Pemerintah dan Kenegaraan*

Dalam tahun 1575 Kiai Ageng Pandan Arang diangkat menjadi bupati Semarang yang pertama dan menempati kebupatian di Kampong Bubakan, yang kemudian menjadi gedung *Landraad Semarang*. Bupati yang pertama tersebut digantikan oleh putranya yaitu Sunan Tembayat, tetapi hanya menjabat selama tiga tahun, kemudian mengembara sampai di Klaten. Beliau bergelar Pandan Arang II.

Raden Ketib kemudian menggantikan ayahnya menjadi bupati Semarang. Dia kawin dengan putri Sultan Hadiwijaya dari Pajang, dan kemudian mendapat sebutan Pangeran Mangkubumi. Pada tahun 1657 beliau wafat dan dimakamkan di Bergota, Semarang. Pengganti beliau sebagai bupati Semarang ialah putranya yang bernama Kiai Khalifah

atau Kiai Kalipo dan memakai gelar Pangeran Mangkubumi II. Dia diberhentikan oleh Sunan Amangkurat I dan digantikan oleh Mas Tumenggung Tambi. Di dalam tahun 1659 Tumenggung Tambi juga diberhentikan oleh Amangkurat I dan sebagai gantinya diangkatlah Mas Tumenggung Wongsorejo dari Sedayu (1659 - 1666). Pada waktu itu Kebupatian Semarang dipindahkan ke Kampung Gabahan. Ia digantikan oleh Mas Tumenggung Prawiroproyo yang memindahkan Kebupatian Semarang ke Kampung Sekayu. Beliau digantikan oleh Tumenggung Alap-alap, bupati jepara yang menjabat, yang menjabat bupati Semarang selama empat tahun (1670 - 1674). Sebagai bupati Semarang X telah diangkat Kiai. Mertonoyo oleh Amangkurat II. Ia adalah salah seorang keturunan Pandan Areng I, yang kemudian bergelar Kiai Tumenggung Yudonegoro. Beliau inilah yang memakai gelar Kiai Adipati Suromenggolo I.

Pengangkatan Kiai Mertonoyo terjadi setelah Semarang diserahkan kepada kompeni Belanda karena telah membantu menumpas perlawanan Trunojoyo. Dalam surat perjanjian antara Mataram dengan Kompeni 15 Januari 1678, antara lain dinyatakan bahwa Tumenggung Mertonoyo dengan izin Amangkurat II menggandakan Kota Semarang kepada Kompeni yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Speelman. Setelah Laksamana tersebut meninggal pada tahun 1684 Mataram berniat merebut kembali Semarang, dengan dipimpin tumenggung Sindurejo. Couper yang waktu itu menjabat sebagai kepala kompeni di Jepara telah mengangkat seorang lurah dari zaman bupati alap-alap yang bernama Ki Ronggo Yudowongso sebagai bupati boneka.

Pada zaman Adipati Suromenggolo I dari Mataram, dia memperoleh benda-benda serta peralatan senjata sebagai tanda kebesaran yaitu berupa empat buah bilah keris, dua pucuk meriam, 60 senjata, 120 bilah pedang, lima perangkat gamelan. Di samping itu juga menerima daerah kekuasaan sepanjang jalan antara Semarang-Salatiga yang meliputi 2000 desa. Dalam masa hidupnya dia menjabat sebagai bupati Semarang selama 27 tahun dan wafat tahun 1713, yang kemudian dimakamkan di Bergoto, Semarang.

Kemenakan R. Mertoyudo yang semula menjabat sebagai Patih Semarang diangkat menjadi bupati Semarang. Ia kawin dengan seorang

putri Solo dan mendapat gelar R. Soeminingrat. Karena ia menentang sunan, maka ia diserahkan kepada VOC. selanjutnya ditawan di Batavia. Sebagai gantinya diangkat keturunan Cina yang bernama Mas Tumenggung Astrowijoyo, tetapi karena meletus pemberontakan Cina, dia pun harus meledakkan jabatannya.

R. Soeminingrat yang telah ditawan 20 tahun di Jakarta Valkeniar diangkat kembali menjadi bupati Semarang dengan gelar Surohadimenggolo I. Dia menjabat sebagai bupati selama delapan tahun. Pada tahun 1751 ia digantikan putranya yang sebelumnya menjabat sebagai bupati Lasem. Berkat jasanya dalam penumpasan pemberontakan bupati Blambangan, dia diangkat menjadi pangeran oleh VOC. Di antara keluarga Surohadimenggolo yang perlu dicatat yaitu Surohadimenggolo II, karena dialah yang dianggap sebagai pendiri mesjid besar Semarang.

Pembangunan Mesjid Semarang tersebut terjadi ketika Nicoilaas Hartingh menjadi gubernur Pantai Utara Jawa dan Timur Pulau Jawa (1754 -- 1761). Adapun Surohadimenggolo III memerintah selama 22 tahun dan meninggal pada tahun 1773. Dia digantikan oleh cucunya dengan gelar Surohadimenggolo IV. Pada lingkungan masyarakat Semarang dia terkenal dengan sebutan Kanjeng Terboyo. Setelah Kanjeng Terboyo, pengganti-penggantinya selama hampir 12 tahun bukanlah dari keturunan keraton karena yang diangkat hanyalah sanak keluarga Surohadimenggolo IV sebagai bupati Semarang dengan gelar Surohadimenggolo V. Jabatan yang pernah dipegang yaitu sebagai *fiscal griffier* atau beskal di Surabaya dan jabatan bupati Semarang didudukinya selama lima tahun. Surohadimenggolo V kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama R. Tumenggung Surohadiningrat dan yang meninggal pada tahun 1841. Kemudian putranya yang masih berusia 12 tahun menggantikan, tetapi jabatan bupati sebenarnya dipangku oleh dua orang patihnya. Pada tahun 1855, ia meletakkan jabatan karena lebih senang tinggal di Sumenep bersama putranya. Selanjutnya jabatan bupati Semarang dipangku oleh salah seorang patih yang bernama Mas Ngabei Reksonegoro selama lima tahun. Setelah bupati tersebut, diangkatlah putra Kangjeng Terboyo dan yang sebelumnya menjabat sebagai bupati Salatiga yaitu RTP. Suryokusumo menjadi bupati Semarang. Namun demikian pada tahun



1891 dia diganti oleh RMTA. Purbaningrat yang kemudian meninggal pada tahun 1891. Untuk selanjutnya bupati Semarang dipangku oleh putra Bupati Grobogan R. Cokrodipuro, tetapi pada tahun 1897 karena alasan kesehatan, di meletakkan jabatan. Menjelang akhir abad ke-19 bupati Semarang dijabat oleh RM. Soebiyono (28 April 1887/20 September 1927) putra R.M.T.A. Purbaningrat. Dalam perjanjian 5 Oktober 1705 antara Sunan Paku Buwono I dengan Gubernur Jenderal Yoen van Hoern serta Majleis Hindia Belanda (Rad van Iandia) daerah semarang dengan resmi diserahkan kepada Belanda.

Dalam masa pemberontakan Cina di Batavia, pada 20 Juni 1741 para pemberontak berhasil mengepung Kebupatian Semarang. Bupati yang masih mempunyai darah Cina tersebut malah bergabung dengan para pemberontak Cina di Kota Semarang. Peristiwa ini bisa juga dinamakan perang Semarang. Pasukan kompeni Belanda berhasil menumpas pemberontak pada 13 November 1741.

Pada waktu meletus perang Dipenogoro tahun 1825, pengaruhnya juga sampai ke daerah Semarang. Perjuangan Pangeran Dipenogoro berkobar di daerah Surakarta bagian Barat, daerah Bagelen, daerah Banyumas, Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Perjuangan di daerah Semarang dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Pangeran Serang. Pada 22 Agustus 1826 pangeran Serang berhasil merebut daerah Purwodadi dan perlawanan rakyat menjalar ke daerah Demak, Kudus, Wirosari, Grobongan, dan Semarang. Pertahanan Kota Semarang dipimpin oleh Jenderal Van Goen yang mendatangkan bala bantuan dari kota-kota Surabaya, Solo, dan Sumenep (Madura). Dalam pertempuran di sekitar Kota Demak pada 15 September 1826 Pangeran Serang bersama para pengikutnya dapat terdesak oleh pasukan Van Goen dan terpaksa mengundurkan diri.

#### 4.2.2.2 *Kehidupan Seni Budaya*

Peranan alat kehidupan masyarakat pada abad ke-19 seperti surat kabar dan komunikasi yang lain besar sekali artinya. Menjelang pertengahan abad tersebut surat kabar pertama yang terbit di Semarang adalah bernama *Semarangsche Advertrentie blad*. Surat kabar tersebut terbit pada tahun 1815, tetapi kemudian pada tahun 1861 berganti



nama menjadi *De Locomotif*. Adapun surat kabar yang memakai bahasa Melayu ialah *Slomporet Melayu* yang terbit pada tahun 1851. Semula hanya sebagai surat kabar mingguan karena hanya terbit pada setiap hari Sabtu, namun kemudian terbitnya bertambah pada setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Bertepatan dengan pertumbuhan surat kabar di Semarang, sekaligus merupakan awal pertumbuhan pasar Johor, suatu pasar yang ditumbuhi oleh pohon-pohon Johar dan yang berdekatan letaknya dengan Pasar Pedamaran yang lebih dahulu telah berperanan. Pada tahun 1865 pohon Johor yang tumbuh di pasar tersebut nampak subur dan belum ditebang. Dari hari ke hari pasar tersebut makin menjadi besar bahkan pada tahun 1890 sudah sama ramainya dengan Pasar Pedamaran.

Pada 16 Juli 1864 dibukalah pembukaan jalan kereta api pertama oleh Gubernur Jenderal Mr. Baron Slot van Se Beele dengan stasiunnya yang pertama di Semarang yaitu Tambaksari. Sebenarnya kereta api pertama seluruh Indonesia dirintis oleh NIS. Trayek yang ditempuhnya mula-mula Semarang - Temanggung kurang-lebih 23 km, sedangkan pembukaannya dilakukan pada tahun 1867 untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dari daerah *Vorstenlanden*. Peristiwa tersebut dianggap peristiwa penting dan bersejarah sehingga satu-satunya surat kabar Belanda di Kota Semarang, *Seamarangsche Nieuws en Advertentieblad*, secara spontan mengganti namanya menjadi harian *De Locomotif*.

Setelah jalan kereta api antara daerah Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta selesai dikerjakan pada tahun 1872, kedudukan Kota Semarang sebagai kota perdagangan semakin berkembang. Barang ekspor yang penting dalam pertengahan kedua abad ke-19 adalah gula, sehingga Semarang adalah pelabuhan pengekspor gula yang utama di Pulau Jawa.

Pada tahun 1881 *De Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS.) perusahaan kereta api swasta yang pertama di Indonesia mendirikan anak perusahaannya yaitu *Semarang-Juana Stoomtram Maatschappij*. Adapun stasiun pertamanya di Jurnatan, dan pada tahun 1889 oleh NIS didirikan trem uap di Kota Semarang yang jalurnya

menghubungkan Bulu-Jurnatan-Jomblang. Kemudian pada tahun 1884 telopon pertama di Semarang dibuka dan boleh dikatakan di sekitar tahun tersebut merupakan waktu perluasan jalur kereta api di Kota Semarang dan sekitarnya, seperti pembukaan kereta api Semarang-Juwono tahun 1882 trayek Mayong 1887, trayek Demak-Blora pada tahun 1894. Dua tahun mendatang Kota Semarang baru mengenal spedel atau sepeda motor, yang satu dua buah telah digunakan oleh orang kulit putih.

Demikianlah gambaran alat penghubung yang dikemukakan di Kota Semarang pada abad ke-19 dan yang dipegang atau dikendalikan oleh orang-orang Belanda atau orang Cina pada masa itu, sedangkan kegiatan ekonomi bangsa Indonesia di Semarang masih menjadi obyek pemasaran orang Belanda atau pembayar pajak kepada penguasa pada saat itu. Kegiatan ekonomi yang pincang itulah antara lain yang menyebabkan pemimpin bangsa Indonesia di Semarang dan sekitarnya membantu dan meneruskan perjuangan Pangeran Dipenogoro bahkan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh orang Belanda dan Cina itulah yang menimbulkan penderitaan bangsa Indonesia di Semarang dan sekitarnya.

### **Rumah Yatim Piatu**

Rumah yatim piatu Protestan pertama di Semarang mulai didirikan di sekitar tahun 1740. Kemudian gedung untuk rumah piatu didirikan pada tahun 1755 oleh Nicolas Hartingh, gubernur jenderal VOC untuk daerah pantai utara dan timur Pulau Jawa yang berkedudukan di Semarang. Gedung yatim piatu itu terletak di jalan Letnan Soeprapto, dahulu *Heerensetraat*, dekat Gereja Blenduk. Rumah yatim ini telah memiliki sebuah sekolah untuk mendidik anak-anak yang dirawat. Adapun rumah yatim piatu Katholik yang pertama didirikan atas inisiatif Paastoor Lambertus Prinscen, seorang pastoor pertama yang datang di Kota Semarang pada tahun 1808. Dalam tahun 1817 rumah asuhan itu makin berkembang dan memerlukan rumah yang lebih besar lagi. Dalam tahun 1828 Pastoor Y.H. Scholten memberikan sebuah rumah besar milik Kolonel H.C. Cornelis, bekas rumah sakit Belanda. Gedung tersebut terletak di Jalan Ronggowarsito No. 8 dan sekarang terkenal dengan nama Susteran Gedangan. Untuk mendidik anak-anak asuhan rumah yatim tersebut, pada tahun 1830 telah didirikan sebuah

sekolah. Ketika pastoor Y. Liynen menjadi pimpinan gereja Gedangan, beliau pergi ke Nederland pada tahun 1867 untuk mencari tenaga guru wanita. Pada tanggal 5 Pebruari 1870 datang di Semarang 11 orang suster dari Orde Santo Fransiscus yang dipimpin oleh Moeder Alfanse.

Gedung Ronggowaristo No. 8 Semarang itu sebenarnya didirikan pada tahun 1728 untuk rumah sakit militer, sedangkan lembaga perawatan orang-orang tua, para pensiunan serdadu Belanda baru didirikan pada tahun 1819 oleh Gubernur Jenderal van der Capellen di Semarang.

### **Mesjid Semarang**

Sebelum berdiri mesjid besar Semarang seperti keadaanya yang sekarang, pada masa Kiai Pandan Arang juga sudah didirikan mesjid di Kota Semarang, tetapi sewaktu terjadi pemberontakan Cina pada tahun 1741, mesjid besar yang semula terletak disebelah timur laut Kabupaten Semarang dan yang tidak begitu jauh dari Pecinan, telah terbakar bersama-sama rumah penduduk pribumi. Setelah peristiwa tersebut, kemudian dibangun mesjid baru di Jalan Kauman Semarang oleh Bupati Soerohadimenggolo III. Mesjid Semarang ini pernah disambar petir sehingga terbakar pada 10 April 1885. Pembangunan kembali dilakukan pada 23 April 1889 dengan mendapat bantuan dari Residen G.I. Blume dan Bupati Semarang RT. Cokrodipuro. Adapun perayaan “dugderan” di kota Semarang diadakan sejak Bupati RM. Tumenggung Ario Purbaningrat dalam tahun 1882. Perayaan itu maksudnya untuk menyongsong tibanya bulan suci Ramadhan dengan diiringi bunyi bedug dan meriam Kabupaten Semarang.

#### *4.2.2.3 Alam Pikiran dan Kepercayaan*

Beberapa upacara tradisional Kabupaten Semarang bercorak Islam dan bercorak kebudayaan Cina. Upacara tradisional bercorak Islam dapat diketemukan pada saat ziarah ke makam Kiai Pandan Arang I. Kecuali sebagai bupati di Semarang yang pertama, beliau juga sebagai tokoh penyebar agama Islam. Pada abad ke-19 hiduplah seorang tokoh ulama terkemuka di Kota Semarang, bernama Kiai Darat Saleh Ulama yang wafat pada hari Jum'at 28 bulan Ramadhan, tahun 1521 Hijrah,

bertepatan dengan 28 Desember tahun 1903. Upacara peringatan “kol” di makam Kiai Saleh Darat diadakan pada setiap tanggal 10 bulan Syawal.

### **Klenteng Sam Po Kong**

Klenteng Sam Po Kong oleh masyarakat Semarang dan daerah sekitarnya dikenal dengan sebutan Gedung Batu. Bangunan tersebut bukan merupakan klenteng pada umumnya melainkan merupakan sebuah gua batu, bekas tempat istirahat Cheng Ho (Sam Po), seorang laksamana Kaisar Yung Lo dari Cina sewaktu singgah di Semarang. Gua batu tersebut mulai dibangun sekitar tahun 1724 dengan dibuatkan serambi tempat orang berteduh setelah mengadakan upacara sembahyang. Pada setiap tanggal 29 bulan enam tahun Imlek diadakan pernyataan untuk memperingati Sam Po mendarat di Semarang. Pernyataan ini dilakukan dengan pawai mengarak patung Sam Po Tay Yien ke Klenteng Tay Kak Sie di Gang Lombok Semarang. Prayaan ini juga disebut Dampo Awang.

#### *4.2.3 Kabupaten Banyumas*

##### *4.2.3.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan*

Sejak perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, daerah Banyumas termasuk daerah kesultanan Mataram atau Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang dinobatkan sebagai sultan Mataram yang pertama dengan gelar Hamengku Buwono I, mengangkat Bupati Banyumas Yudonegoro II menjadi Patih Mataram dan bergelar Danurejo I. Nama-nama bupati yang pernah memerintah Kabupaten Banyumas secara berurutan adalah Adipati Wargoutomo I, Adipati Wargoutomo II zaman Amangkurat I, kedipatennya terletak di Desa Kejawar Banyumas di tepi Sungai Serayu), Ngabai Mertosuro I (Ngabehi Jamah), Ngabehi Mertosuro II, Tumenggung Mertoyudo, Tumenggung Mertonegoro (Tumenggung Sedo Mesjid), Tumenggung Toyokusumo (berasal dari Kartosuro), dan Tumenggung Yudonegoro I putra Mertonegoro).

Pada zaman Mertonegoro, Keraton Mataram pindah ke Kartosuro, yaitu semasa pemerintahan Amangkurat Mas (1703 - 1708). Tumenggung Mertonegoro ketika itu menentang Sunan Mas sehingga

dijatuhi hukuman mati. Waktu dijatuhi hukuman mati ia sedang berada di mesjid sehingga sejak itu ia terkenal dengan sebutan Tumenggung Sedo Mesjid atau Tumenggung Kokum atau Kaukum, artinya dihukum. Sebagai gantinya diangkat Tumenggung Toyokusumo dari Kartosuro sebagai bupati Banyumas. Pada zaman pemerintahannya, daerah Banyumas tidak tentram karena gangguan perampok sehingga rakyat menjadi gelisah. Berdasarkan hal tersebut bupati Banyumas diberhentikan dari jabatannya dan sebagai gantinya diangkatlah putra Tumenggung Mertonegoro dengan gelar Yudonegoro I. Putra Yudonegoro I yang kedua bernama Mas Mertowijoyo mengabdikan diri pada Sunan Paku Buwono II di Mataram. Ia memakai nama Raden Panji Gondokusumo dan diberi pangkat adipati anom. Pada zaman Yudonegoro I keadaan daerah Banyumas menjadi aman dan tentram kembali. Kebupatian Bayumas yang semula berada di Desa Kejawar, di tepi Sungai Serayu, kemudian dipindahkan ke Desa Mangganti dan Kebupatian lama akhirnya menjadi Desa Karang Kamal.

Pada waktu terjadi pemberontakan Cina tahun 1740 di Kartosuro yang terkenal dengan sebutan Geger Pacinan, para pemberontak mendapat bantuan dari Bupati Grobogan Tumenggung Martopuro dan Raden Adipati Notokusumo, seorang patih Kartosuro. Pada masa tersebut Tumenggung Yudonegoro I dipanggil oleh Sunan Pakubuwono II. Maksudnya supaya membantu para pemberontak, tetapi dia tak setuju perintah sunan, sehingga sunan terpaksa mengirim utusan lagi guna memaksa bupati Banyumas datang ke Kartosuro dengan ancaman jika menolak supaya dihukum mati. Di kala menerima surat dari sunan tersebut Bupati Yudonegoro I sedang duduk di pendapa keputatian. Begitu terkejutnya membaca isi surat perintah serta ancaman dari sunan, Adipati Yudonegoro I meninggal ketika di pendapa keputatian. Karena itulah dia juga terkenal dengan sebutan Sedo Pendopo.

Ia kemudian diganti oleh putranya yang bernama Raden Panji Gondokusumo dan bergelar Yudonegoro II. Setelah menjadi bupati, dia mengangkat saudaranya yaitu Mas Notowijoyo (kakaknya) menjadi lurah tamtama (komandan tentara). Adiknya yang bernama Bagus Demang, diangkat menjadi kliwon di Merden dengan gelar Dipoyudo. Ia kemudian pindah ke Purbolinggo.

### **Perang Mangkubumen**

Pemberontakan orang-orang Cina akhirnya dapat dipadamkan oleh kompeni Belanda. Sunan Paku Buwono II memindahkan pusat kerajaannya ke Desa Solo dan diberi nama Surakarta. Berhubung sikap Belanda yang selalu mencampuri urusan pemerintahan Keraton Mataram, maka timbullah perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan dibantu oleh Raden Mas Said dan Pangeran Bumino. Perlawanan tersebut dengan nama Perang Mangkubumen. Dalam masa perang tersebut Pakubuwono II wafat lalu diganti oleh Pakubuwono III. Perang ini makin meluas sehingga Sunan Pakubuwono III memerintahkan kepada RT. Yudonegoro II agar membantu kepada kompeni di perbatasan daerah Begelen. Dalam hal ini para prajurit Banyumas dipimpin oleh Mas Notowijoyo, Tumenggung Dipoyudo I, Demang Arsantaka (Pagendean), Demang Mertoloyo (Sigaluh), dan Demang Wonodirono (Panggalang). Pertempuran juga terjadi di wilayah Purwokerto, daerah Jenar. Dalam pertempuran tersebut Mas Notowijoyo gugur dan jenazahnya dimakamkan di paserehan Dawuhan. Setelah perang Mangkubumen usai Tumenggung Yudonegoro diangkat menjadi patih Mataram dengan gelar Danurejo. Jabatannya sebagai bupati Banyumas digantikan oleh putranya dengan gelar Yudonegoro II.

### **Pembagian Wilayah Daerah Bayumas**

Sewaktu Tumenggung Yudonegoro II menjadi Bupati Banyumas, Pulau Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Raffles. Ketika Gubernur Jenderal tersebut mengadakan peninjauan ke Daerah Banyumas, bupati Banyumas mengusulkan supaya daerah Banyumas dipisahkan dari daerah dan kekuasaan Surakarta, namun Raffles tidak menyetujuinya. Ketika hal itu dibicarakan dengan Sunan Pakubuwono IV, sunan marah sekali sehingga bupati Banyumas diturunkan pangkatnya menjadi mantri Anom.

Seterusnya daerah Kebupatian Banyumas dibagi menjadi dua daerah atau wilayah yaitu (a) wilayah Kanoman, yang dipimpin oleh Raden Tumenggung Brotoningrat (bupati Sukaraja) dengan pangkat wedana bupati dan (b) wilayah Kesepuhan, yang juga dipimpin oleh

seorang wedana bupati ialah Radean Tumenggung Cokrowadono (bupati Purwokerto).

Bupati Panjer Ngabehi Wongsonegoro setelah meninggal digantikan oleh Ngabehi Surengrono, adik RT. Yudonegoro IV, tetapi karena membantu Yudonegoro IV dalam usahanya melepaskan diri dari kekuasaan sunan Surakarta, Bupati Surengrono diberhentikan. Sebagai pengganti diangkat Panjer ialah R.Ng. Suredirjo, seorang putra dari RT. Arumbinang di Surakarta. Akhirnya R. Ng. Surengrono kembali ke Banyumas dan tinggal di Desa Sukawera.

Secara Hierarkis jabatan wedono bupati itu membawahi para bupati dan bertanggung jawab langsung kepada sunan di Surakarta. Adapun Wedono bupati daerah Kanoman ialah R. Brotoningrat yang daerahnya meliputi Kebupatian Purbolinggo (Bupati Tumenggung Dipokusumo), dan Kebupatian Sukaraja (Bupati R.Ng. Surodirejo), sedangkan Wedono bupati daerah Kesepuhan ialah RT.Cokrowadono. yang daerahnya meliputi Kebupatian Adirejo (bupatinya RT. Dipoyudo ke IV). Kebupatian Adipala (bupati R.Ng Kartoprojo), dan Kebupatian Banjar (bupati R.Ng Ranudirejo). Setelah daerah Banyumas dilepaskan dari daerah kekuasaan Sunan Pakubuwono IV dan menjadi wilayah Pemerintah Belanda, daerah tersebut dibagi menjadi lima kebupataian yaitu Kebupatian Banyumas, Kebupatian Banjarnegara, Kebupatian Purbalingga, Kebuptian Cilacap, Kebupatian Purwokerto.

### *Kota Cilacap*

Seperti diketahui RT. Kartonegoro (menantu RT. Yudonegoro I) menjadi bupati nayoko di Surakarta, kemudian diganti oleh putranya RT. Ketonegoro II. Dahulu pada suatu tempat di muara Sungai Donan di pantai selatan sering mendapat serangan bajak laut. Mereka ini sering menyusup sampai ke daerah Jeruklegi. Oleh sebab itu untuk menjaga keamanan daerah tersebut. R.T. Kertonegoro II ditetapkan sebagai ngabehi di derah Bonan dan bertempat tinggal di Ngayah, sedangkan yang disertai menjaga keamanan muara Sungai Donan adalah adik Kertonegoro II yang bernama Mas Ronggo Kertonorono. Pada tepi Sungai Donan ini lalu didirikan suatu benteng yang dijaga oleh 40 orang prajurit, serta dilengkapi dengan senjata meriam. Sebagai imbalannya prajurit ini di berikan sawah. Ketika para prajurit ini

sedang mengerjakan sawah, secara tiba-tiba datanglah serangan para perampok bajak laut. Mereka itu berhasil merampas milik prajurit dan bahkan berhasil membunuh Mas Ronggo.

Setelah peristiwa tersebut, R. Ng Kartonegoro pindah ke Adipala. Setelah ia meninggal, digantikan oleh putranya R. Ng. Kartoprojo. Dengan adanya peristiwa tersebut Pemerintah Belanda lalu membangun benteng yang lebih kuat. Daerah tersebut dan sekitarnya makin lama makin ramai serta banyak penghuninya dan akhirnya menjadi kota yang disebut Cilacap. Di tengah-tengah segera anakan didirikan suatu pos penjagaan. Akhirnya tempat tersebut menjadi kampung yang terkenal dengan sebutan Kampung Penjagaan.

#### 4.2.3.2 *Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat*

Dalam perang Dipenogoro daerah Banyumas termasuk wilayah kancah peperangan. Perang Diponegoro meluas ke daerah Banyumas antara lain alasan geografis, wilayahnya luas, beberapa daerah masih sulit dicapai karena belum ada jalan raya, bergunung dan berbukit, bahkan banyak hutan belukarnya. Kondisi sangat cocok untuk melancarkan perang gerilya. Pada waktu itu pasukan P. Diponegoro memang belum pernah berhasil menduduki Kota Banyumas tetapi para pendukung dan penganjur perang Diponegoro berhasil menghimpun suatu kekuatan di daerah tersebut, sehingga dapat menguasai tempat yang strategis sebelah selatan yaitu Kecamatan Kemrajen dan daerah Banyumas sebelah selatan yaitu Kecamatan Kemranjen dan daerah Banyumas sebelah barat yaitu di daerah Ajibarang.

Di daerah-daerah pedalaman pasukan Diponogoro berhasil menguasai wilayah yang cukup luas antara lain Bobot, Pegunungan Perabu, Ajibarang, daerah Banjarnegara, Puncak, Marden Semagede, dan lain-lain. Pemerintah Belanda baru memberikan perhatian yang lebih besar terhadap daerah Banyumas setelah berakhirnya Perang Diponogoro. Daerah Banyumas langsung dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda terlepas dari daerah dan kekuasaan kesunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta.

Pada waktu markas besar P. Diponogoro masih Selarong “Kedua”, Lowono (sebelah barat Yogya), Gampang (sebelah timur Yogyakarta),



Selarong, Gunung Kidul, Pajang, Soekawati Pesisir, dan Monconegoro, senopati-senopati untuk daerah Banyumas ialah Tumenggung Mertonegoro, Tumenggung Danukusumo, dan Tumenggung Gondokusumo. Mereka mengadakan pertahanan di daerah Roma atau Romajatinegara dan di desa Jetis. Sebagian dari senopati melalui Kaliwiro, Tunggoro, Banjarnegara, terus ke barat menuju Banyumas. Pasukan ini di pimpin oleh Pangeran Suryonoputro, RT Yoso Sudirjo dan RT Tambakboyo. Di samping Banyumas, medan perang P. Dipenogoro meluas meliputi daerah Pekalongan, Tegal, Rembang, Madiun, Begelen, Kedu, Semarang, sekitar Yogyakarta, dan Surakarta. Pertahanan Belanda di daerah Banyumas dipusatkan di Kota Banyumas, dipimpin oleh Mayoer Buyskes dan pasukan kerajaan Jawa dipimpin oleh Bupati R. Adipati Brotoningrat dan P. Kusumoyudo yaitu pamanda P. Suryatmadja.

Seperti disebutkan di atas bahwa setelah perang Diponogoro selesai, daerah Banyumas dimasukkan ke dalam wilayah pemerintahan Belanda. Pada tahun 1831 Jenderal Kock sendiri datang ke daerah Banyumas untuk menetapkan bahwa daerah Banyumas menjadi daerah keresidenan, yang terdiri atas lima kabupaten yaitu Banyumas, Ajibarang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Majenang. Dengan demikian daerah Banyumas menjadi semakin sempit. Untuk menghubungkan daerah-daerah pedalaman, dibangunlah jalan-jalan kereta api dan jembatan-jembatan, kurang-lebih setelah tahun 1839. Tempat Jenderal De Kock menetapkan pendirinya keresidenan Banyumas ialah di pendapa Kabupaten Banyumas, yang sekarang ini menjadi kantor Kewedanaan Banyumas. Tidak lama setelah itu Kabupaten Majenang dihapus dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Purwokerto, kemudian Kabupaten Cilacap sekitar tahun 1841. Dalam perkembangan selanjutnya, daerah Majenang dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Cilacap sampai sekarang. Kota Banyumas sendiri peranannya makin berkurang setelah dibangunnya beberapa jembatan yang melintasi Sungai Serayu. Sejak jalan kereta api Banyumas Yogyakarta melalui Maos dan Kroya dibuka dalam tahun 1886 dan perusahaan kereta api *Serajoedal Stoomtram Maattschappy* didirikan dalam tahun 1893, pengangkutan barang dapat dilakukan dari Maos lewat Purwokerto ke Banjarnegara. Hal tersebut

menyebabkan Banyumas semakin mundur, tetapi Kota Purwokerto semakin maju, apa lagi setelah hubungan kereta api cepat Cirebon-Yogyakarta dan Surabaya melalui Purwokerto dibuka.

#### 4.2.3.4 *Kehidupan Seni Budaya*

Di daerah Banyumas ditemukan cerita rakyat yang sangat populer yaitu tentang *Babad Pasirluhur*. Babad itu menceritakan kisah percintaan antara Raden Kamandoko putra raja Siliwangi dari Pejajaran dengan Tjitoroso putri bungsu adipati Pasirluhur, empat kilometer di sebelah barat Kota Purwokerto. Beberapa kesenian rakyat di daerah Banyumas antara lain seni calung, ebeg atau jatilan, dan dalang jemlung.

#### 4.2.3.4 *Alam Pikiran dan Kebudayaan*

Pendapa Kebupatian Banyumas terkenal namanya dengan sebutan “Pendopo si Panji”. Pendapa ini berasal dari zaman Raden Tumenggung Yudonegoro II. Pendapa si Panji dianggap keramat oleh keluarga Kebupatian Banyumas pada umumnya. Pada tahun 1861 terjadi banjir besar Sungai Serayu yang melanda Kota Banyumas. Banjir yang hebat ini oleh rakyat Banyumas sering di sebutnya “Blablur Bayumas”. Pada waktu itu banyak orang mengungsi ke halaman kebupatian dan konon Pendopo si Panji seolah-olah terlepas dari pondamennya sehingga terapung. Waktu kota keresidenan di Purwokerto, ibukota Kebupatian Banyumas, juga akan dipindahkan ke Purwekerto. Bupati Banyumas XV R. Sudjiman Metodirjo Gondosubroto (1933 - 1950) minta kepada pemerintah agar Pendopo si Panji dapat pula diangkut ke Purwokerto. Permintaan itu dikabulkan oleh Pemerintah Belanda dan pemindahan dilakukan pada bulan Januari 1937. Pemindahan pendopo itu mempunyai keistimewaan yaitu tidak boleh menyeberang Sungai Serayu sehingga terpaksa dibawa melalui kota Wonosobo, Semarang, Pekalongan, Bumiayu, terus ke Purwokerto sebenarnya hanya kurang-lebih 18 km saja. Sampai sekarang Pendopo Si Panji dari Kebupatain Banyumas di Purwokerto masih dipandang keramat oleh masyarakat setempat.

Kecuali itu di kalangan penduduk asli Banyumas masih ada kepercayaan terhadap benda-benda pusaka yang terdapat di Kota Kalisalak,

Kebasen yang letaknya kurang-lebih 15 km sebelah selatan Purwekerto. Benda pusaka itu berupa uang logam kuna, daun lontar, lawon atau mori, beras kuning dalam takaran beras biasanya disebut bekong. Benda-benda ini setiap tahun sekali dibersihkan yaitu pada bulan Maulud, dengan suatu upacara yang terbuka untuk umum. Menurut kepercayaan penduduk setempat benda-benda itu dapat bertambah atau berkurang jumlahnya sehingga dapat dijadikan ramalan bagi situasi zamannya. Sebagai contoh jika beras dalam bekong berkurang, merupakan suatu kiasan bahwa akan terjadi musim paceklik dan lain-lain.

#### 4.2.4 *Kebupatian Banjarnegara*

##### 4.2.4.1 *Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan*

Pada kurang-lebih tahun 1600 Adipati Wargo Utomo II, yang kemudian terkenal dengan sebutan Adipati Mrapat, membagi Kedipatian Wirasaba menjadi empat, yaitu Kedipatian Wirasaba, Kedipatian Banjar Petambakan, Kedipatian Merden, dan Kedipatian Kejawar. Sampai beberapa waktu lamanya kedipatian Banjar Petambakan tidak mempunyai seorang pemimpin. Kemudian Raden Semangun menunjuk Ngabehi Ranudirja sebagai bupati untuk daerah itu dan berkedudukan di sebelah timur Kali Merawa yaitu Desa Petoman. Padamasa pemerintahan penggantinya, yaitu Ngabehi Mangun yuda, Kedipatian dipindah ke sebelah barat Kali Merawa. Pengganti beliau selanjutnya ialah Ngabehi Sedo Mukti. Setelah wafat beliau diganti oleh putranya yang bernama Ngabehi Sedo Mukti. Setelah wafat beliau diganti oleh putranya yang bernama Ngabehi Manguyu Sedo Loji. Beliau disebut demikian karena wafat di Loji Mataram. Berhubung beliau tidak mempunyai putra laki-laki, maka Adipati Banyumas menunjuk Ngabehi Dipoyudo dari merden sebagai penggantinya. Nyabehi Dipoyudo ini kemudian bergelar Raden Tumenggung Dipoyudo. Beliau memindahkan kedipatiannya ke Kotawaringin dan mengganti nama kedipatiannya menjadi Banjarnegara. Dengan demikian beliau inilah yang merupakan bupati pertama di Banjarnegara (1831 - 1878). Selanjutnya secara turut-turut yang menjabat sebagai bupati ialah Raden Tumenggung Dipodoningrat (1846 - 1878), Raden Atmodipuro, yang kemudian bergelar RT. Jayanegara I (1878 - 1896),

sebelum beliau menjabat patih Kebupatian Purworejo, beliau diangkat oleh pemerintah Belanda, Raden Tumenggung Jayanegara II (1896 - 1927), R. Soemitro yang kemudian bergelar RAA. Kolopaking Purbanegara (1929 - 1927), R. Soemarto, sebelumnya menjadi patih Kebupatian Banjarnegara (1949 - 1959) M. Sujirno (1960 -1969), R. Sudibyo (1969 - 1975), Drs. Suwandi.

#### 4.2.5 *Kebupatian Magelang*

##### 4.2.5.1 *Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan*

Seperti diketahui, Perang Diponegoro 20 Juli 1825--30 Maret 1830 telah meluas ke daerah Jawa tengah sehingga oleh Pemerintah Belanda Perang tersebut dinamakan perang Jawa. Di Jawa Tengah pasukan Diponogoro dipimpin Sentot Alibasah Prawirodirdjo (putra wedana bupati Maospati R. Rangga Prawirdjo yang tewas waktu melawan Belanda) dan seorang ulama besar yang bernama Kiai Maja. Untuk mencegah makin meluasnya perang tersebut Pemerintah Belanda mempergunakan siasat antara lain membentuk gerombolan penjahat. Untuk mengawasi masyarakat Belanda mempergunakan pengaruh Sultan Sepuh agar P. Diponogoro mau berunding dan menghentikan perlawanan, membentuk benteng stelsel guna membatasi daerah pertempuran, dan terakhir mempergunakan siasat perundingan.

Dalam menghadapi perang Diponegoro ini Pemerintah Belanda telah mempergunakan siasat mengembalikan Sultan Sepuh dari pengasingannya dan kemudian diangkat kembali menjadi Sultan dengan harapan dapat mempengaruhi perlawanan Diponegoro. Sultan Sepuh diturunkan dari tahtanya oleh Rasffles karena beliau melawan Pemerintah Inggris. Ia kemudian diasingkan ke Pulau Penang ternyata siasat ini tidak membawa hasil bahkan kereta yang membawa Sultan Sepuh ditembaki oleh pasukan Diponogoro. Di samping siasat tersebut Jenderal De Kockh menjanjikan akan memberikan hadiah sebesar 20 ringgit kepada siapa pun yang berhasil menangkap P. Diponegoro.

Sementara itu pada tahun 1829 timbul perselisihan pendapat antara P. Diponogoro dengan Kiai Maja. Dalam tahun itu juga Kiai Maja dapat ditangkap Belanda dan diasingkan ke Menado. Demikian pula Sentot Prawirodirdjo terpaksa menyerah kepada pasukan Belanda yang

dipimpin oleh Cochijs di Imogiri pada tahun 1829. Dengan demikian Pasukan Pangeran Diponegoro berkurang kekuatannya. Pada tahun 1829 Jenderal De Kock pergi ke Salatiga untuk mengadakan perundingan dengan P. Diponegoro tetapi gagal. Selanjutnya pada tahun 28 Maret 1830, tepatnya pada hari Minggu, sehari seterusnya setelah hari lebaran, P. Diponegoro setuju untuk mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Perundingan diadakan di sebelah selatan. Pada perundingan ini P. Diponegoro didampingi oleh kedua orang putranya ialah RM. Akhim dan RM. Jonet serta dua orang menantunya di antara pihak R. Mertonegoro. Dari pihak Belanda yang turut dalam perundingan tersebut ialah Jenderal De Kock, Reseden Kedu Volck, Residen Yogyakarta Sevenhoven, Letnan Kolonel Roest, Mayor Steurs, dan Kapten Roeps. Mayor Steurs inilah yang melukis P. Diponegoro seperti yang dikenal sekarang.

#### 4.2.5.2 *Kehidupan Seni Budaya*

Daerah Magelang mempunyai beberapa bentuk kesenian antara lain campur, jatilan, dan keparajuritan. Di samping itu Magelang juga terkenal mempunyai peninggalan kebudayaan yang sudah tak asing lagi yaitu Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Candi Borobudur didirikan di sekitar abad ke-9 oleh keluarga Sailendra dan bersifat Budistis. Pada abad ke-19 antara lain yang dilakukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles, dengan merintis membuat foto dan tulisan mengenai candi tersebut. Usaha perbaikan yang lain ialah dilakukan oleh Residen Kedu Hartaman pada tahun 1834 dengan cara membersihkan tanah dan pelbagai pohon-pohonan di sekeliling Candi Borobudur. Kemudian pada tahun 1835 jelas nampak tanda-tanda keretakan di sana-sini pada candi tersebut sehingga faktor ini mendorong Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat gambaran publikasi. Menjelang akhir abad ke-19 banyak para ahli bangsa asing mulai mempelajari Candi Borobudur dan membuat keterangan mengenai relief dan bangunan stupanya. Di antara para ahli tersebut ialah Dr. NJ. Krom.

#### 4.2.5.3 *Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat*

##### 4.2.5.3.1 *Pengaruh Kekuasaan Eropa*

Pada akhir abad ke-18 VOC bangkrut dan sejak tahun 1800 VOC diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional VOC dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan hasil dari upeti dan keuntungan perdagangan. Seperti halnya politik dan administrasi kompeni, dijalankanlah sistem pemerintahan secara tidak langsung. Kepala-kepala pribumi tetap disertai tugas mengurus urusan penduduk dan pejabat Belanda mengadakan pengawasan terhadap hasil tanaman paksa untuk pasaran Eropa.

Pada masa VOC belum ada pegawai pamongpraja. Petugas-petugas VOC yang bertugas dalam bidang pemerintahan mempunyai pangkat yang disesuaikan dengan tugas sebagai organisasi dagang, misalnya *opperkooplieden* (pedagang utama), *Kooplieden* (pedagang biasa), *onderkooplieden* (pedagang rendah), *boekhouders* (pemegang buku), *asisten* (pembantu). Urusan mereka terutama adalah soal perdagangan dan urusan pemerintahan ditugaskan kepada para kepala pribumi. Para bupati sebagai kepala feodal mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai raja lokal. Beberapa orang bupati ada yang mempunyai pengiring sampai 500 orang kalau mereka melakukan perjalanan. Yang mula-mula mengadakan perubahan drastis mengenai kedudukan bupati adalah Daendels, yaitu dengan mengangkat para bupati sebagai pegawai negeri (*ambtneraar*). Pengangkatannya dilakukannya oleh gubernur jenderal.

Sejak permulaan, Politik kolonial yang konservatif mendapat kritikan pedas dari golongan liberal yang menganjurkan pemerintah secara langsung berdasarkan prinsip-prinsip liberal perdagangan dan inisiatif swasta. Sistem liberal mempunyai kesempatan pertama pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles (1811 - 1816). Raffles mempergunakan sistem administrasi yang sesuai dengan doktrin liberal yaitu kepastian hukum dan kebebasan ekonomi. Salah satu ciri yang tetap berlangsung dari pemerintah Raffles ialah pajak tanah. Bagi Inggris perdagangan lebih menguntungkan dari pada pungutan hasil bumi. Politik Pemerintah Raffles yang liberal akhirnya kandas karena adanya perbedaan besar antara ide liberalisme dan keadaan sosial budaya masyarakat tradisional di Jawa. Meskipun Raffles menganut ide liberal, namun dia masih tetap mempertahankan tanam paksa yang hasilnya sangat dibutuhkan untuk perbendaharaan negara.

Sebetulnya periode 1800 - 1830 adalah suatu masa pertentangan yang tajam dalam menentukan politik kolonial yang dianut, baik sistem konservatif maupun sistem liberal. Politik kolonial Belanda di Indonesia sangat erat hubungannya dengan situasi politik di Negara Belanda, juga erat hubungannya dengan perubahan-perubahan politik di Negeri Belanda. Dalam permulaan abad ke-19 Negeri Belanda masih bersifat agraris dan dapat digolongkan sebagai negara kapitalis muda, hanya memiliki industri kecil-kecilan. Perdagangan Inggris menguasai pasaran di daerah koloni, sedangkan perdagangan hanya meliputi kurang dari 25%. Situasi ekonomi Negeri Belanda mempengaruhi politik kolonial Belanda di Indonesia. Setelah akhir perang Perang Diponegoro dan Perang Belgia perbendaharaan Negara Belanda diancam oleh kebangkrutan, sistem kebebasan ekonomi dan perusahaan Barat yang bersifat kapitalistis ditolak, karena sistem tersebut memberi kesempatan kepada Inggris untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, juga sistem pajak tanah mengakibatkan kerugian keuangan dan kegelisahan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Dengan memperhatikan penyelewengan dan kekacauan-kekacauan sosial ini van den Bosh mengajukan sebuah sistem feodal di Jawa. Sistem ini lebih dikenal dengan sebutan *cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa. Meskipun *cultuurstelsel* mengadakan pungutan secara tradisional namun dalam prakteknya *cultuurstelsel* memerlukan bermacam-macam peraturan. *Cultuurstelsel* pada hakekatnya merupakan suatu jenis pajak innatura dan pajak tenaga kerja yang diselenggarakan melalui sistem feodal, tetapi karena para pegawai bangsa Eropa ikut mencampuri urusan produksi, maka kedudukan bupati sebagai penguasa tak terbatas secara berangsur-angsur dikurangi.

Dalam *Fabrieken Ordonantie* tahun 1874 ditetapkan bahwa pendirian dan perluasan perusahaan gula dan nilai harus mendapat izin lebih dahulu. Pemakaian tanah-tanah sewa (*perceel*) tampak makin luas setelah berlakunya Undang-undang Agraria Tanah *perceel* tahun 1869 hanya 71 buah meliputi luas 38.000 bau atau 27.000 hektar, enam tahun kemudian jumlah ini meningkat menjadi 174 buah dan luasnya 66 atau 46 ribu hektar (N.G. Pierson = *Koloniale Politik*. Amsterdam P.N. Van Kemven en Zoon 1877- hal 288). Berikut ini dapat dilihat

pula individualisasi tanah milik di Jawa dan Madura dalam 1000 ha dan dalam % (dikutip dari D.H. Burger, Prayudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, hal 218).

Tahun	Milik per	Milik Bersama		Tanah Jabatan	Jumlah
		dengan bagian tetap	dengan Pemberkalah pertukarah		
1882	1760(47%)	810(21%)	780(21%)	340(11%)	1370
1907	3150(64%)	1000(20%)	545(11%)	205(5%)	4900
1932	5459(83%)	597(9%)	297(4%)	242(4%)	6651

Perkembangan perusahaan tebu di Jawa dalam masa *cultuurstelsel* telah meningkatkan pula jalur kereta api di Jawa dan Madura, seperti dibawah ini (dihitung dalam kilometer).

Tahun	1867	1879	1888	1899	1913	1920
Km	25	372	1286	3008	4540	5016

Sumber : Dikutip dari G. Gonggrijp : *Schets ener Economische Gesch denis van Nederlandsche* 1949 Cetakan hal 165.

Dalam masa pemerintahan Hamengkubuwono V (1828 - 1855) Gebang Kinosok, Kandang Jinongkang, Dadung Sinedel. Sekitar tahun 1870 di daerah surakarta dikacaukan oleh gerombolan Kecu Djodongso dari Sragen dan lain-lain (selanjutnya baca : Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia*, pidato Dies Natalis ke 18 UGM 1967 hal. 9).



### 4.3 Keadaan Masyarakat dalam Abad Ke-19

Akibat sistem tanam paksa, di Jawa Tengah yang sangat menderita terutama daerah Demak dan Grobogan. Daerah yang miskin ini selalu terganggu oleh bahaya kekurangan air dan banjir. Sebagai akibat tanam paksa pada tahun 1864, Demak mengalami paceklik dan pada tahun 1949 -- 1850 daerah Grobogan dalam waktu dua tahun 9/10 dari penduduk mati kelaparan, yaitu 89.500 orang tinggal 9.000 orang. Penduduk Demak dari 33.600 jiwa tinggal 12.000 Jiwa. Di bagian Jawa Tengah lainnya yang meninggal akibat kelaparan seluruh 534 ribu Jiwa. Sebagai reaksi terhadap sistem tanam paksa tersebut ialah timbulnya kekacauan di beberapa daerah Pasuruhan, Surabaya, Besuki (Jatim), Rembang, Kedu, Banyumas (Jateng), sedangkan keuntungan yang diperoleh dari tanam paksa antara tahun 1841 - 1863 menurut Pierson sebesar 461 juta rupiah. Mendengar penderitaan rakyat di Demak dan Grobogan, Gubernur Jenderal Rochussen (1848 - 1851) menetapkan bahwa daerah-daerah yang diserang bahaya kelaparan mendapat keringanan dalam *cultuurstelsel*. Tahun 1859 diadakan undang-undang penghapusan perbudakan. Tahun 1860 terbit buku Max Havelaar tulisan Douwes Dekker (Multatuli), mantan asisten residen di Lebak (Banten) yang menarik perhatian umum di luar Parlemen terhadap keadaan penderitaan rakyat Indonesia. Dalam masa jabatan menteri jajahan tahun 1863 -- 1866 juga diadakan beberapa penghapusan sebagai berikut:

- (a) setoran wajib untuk cengkeh dan Pala di Maluku dihapuskan.
- (b) penanaman paksa, selain kopi dan tebu di Jawa, dihapuskan.
- (c) *cultuurproesenten* untuk pegawai dan kerja rodi di hutan-hutan pemerintah dihapuskan.

Pada tahun 1864 *Staten Generaal* Negeri Belanda menerima *Comptabiliteat*, yang baru mulai tahun 1867. Pada tahun 1870 berlaku UU Gula (*Suikerwet*) yang menghapuskan tanam paksa tebu. Produksi makin mendesak. Sehrieko mengatakan bahwa kedudukan para bupati pada masa *cultuurstelsel* tidak ubahnya sebagai mandor tanaman saja, yaitu alat-alat kolonial yang tidak mempunyai kekuasaan sama sekali.

Hasil tanam paksa dari Negeri Belanda sangat menguntungkan yang memberikan *batig saldo* 637 juta rupiah dan setelah stelsel tanam

paksa dihapuskan pada tahun 1780, *batig saldo* terus mengalir ke negeri Belanda. Sampai akhir abad ke-19 kekayaan Indonesia yang mengalir ke Negeri Belanda sebesar (832 juta rupiah. Reaksi terhadap *cultuurstelsel* dimulai sekitar tahun 1848 setelah kemenangan partai liberal dalam parlemen Belanda. Maka mulai diadakan revisi terhadap UUD Negeri Belanda. Sebelum tahun 1848 politik kolonial Belanda berada di luar pengawasan parlemen. Serangan terhadap *cultuurstelsel* di luar parlemen dilancarkan oleh sekelompok penulis, pegawai menteri, sebelum besar kolonis lama. Para penulis banyak jasanya dalam pengungkapan keburukan-keburukan *cultuurstelsel*. Dua orang tokoh yang berjasa menarik perhatian umum terhadap masalah kolonial ialah Douwes Dekker dan Baron van Hooevel.

Periode 1850 -- 1870 merupakan permulaan dari politik kolonial liberal. Dalam tahun 1854 *Regeerings Reglement* (RR) telah meletakkan dasar-dasar liberalisme. Tahun 1870 pada umumnya dianggap titik balik dalam politik kolonial Belanda dengan alasan bahwa pada tahun tersebut terwujudnya UU Agraria (*Agrarishewet*). Dalam UU Agraria itu di antaranya ditetapkan :

- (a) larangan pengambilalihan tanah-tanah penduduk pribumi
- (b) Perusahaan perkebunan dapat menyewa tanah pertanian penduduk dalam jangka pendek (lima tahun)
- (c) perusahaan perkebunan dapat menyewa tanah pemerintah dalam jangka panjang.

Mengalirnya kekayaan Indonesia ke Negeri Belanda juga mendorong Ch. van Deventer menulis sebuah rislah *Een Eereschuld* (Hutang Budi atau Hutang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah *De Gids* yang terbit di Negeri Belanda dalam tahun 1894.

Periode Politik kolonial Belanda sejak permulaan abad ke-20 dikenal dengan politik etis. Sebelum tanda dimulainya politik koloneal etis ialah pidato Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 di depan Parlemen Belanda.

#### **4.4 Seni Budaya**

##### **4.4.1 Pengaruh Kebudayaan Asing dan Awal Perkembangan**

Menjelang akhir abad ke-19 masyarakat Indonesia sebagai jajahan Belanda, baru sedikit sekali yang mendapat pengajaran. Dari penduduk

Pulau Jawa yang jumlahnya 28,5 juta hanya 24 ribu orang anak yang mendapat pengajaran di sekolah. Di beberapa daerah bencana banjir sering merupakan ancaman yang kritis terhadap pertanian. Berbagai macam wabah penyakit sering meminta banyak korban jiwa seperti pes, kolera, dan cacar. Pemerintah bersifat otokratis, feodal, dan tidak mengenal perwakilan rakyat yang demokratis. Politik eksploitasi hanya membawa perkembangan material dan untuk memperlengkap alat-alat produksi bagi penanaman modal.

Penanaman modal asing yang diberi kesempatan dengan terwujudnya UU Agraria tahun 1870 sudah barang tentu membawa pengaruh serta perubahan dalam masyarakat Indonesia khususnya di Jawa. Pengaruh tersebut antara lain berupa pemakaian jalan kereta api, bangunan irigasi untuk kepentingan perdagangan, dan industri gula milik orang Belanda. Demikian pula administrasi kolonial serta tradisi Eropa ikut terbawa ke Indonesia dan mempengaruhi perkembangan masyarakat. Teknologi modern dipergunakan di daerah koloni dengan tujuan utama untuk meningkatkan produksinya.

Disamping politik ekspansi juga adanya deskriminasi bangsa merupakan faktor yang sangat menghambat kemajuan bangsa. Dengan adanya rasdiskriminasi ini membawa perbedaan pula dalam lapangan perlakuan hukum, perbedaan pajak, kewajiban kerja, dan kesempatan kerja, perbedaan dalam hal memperoleh pengajaran bahkan juga perbedaan dalam kesempatan memperoleh hiburan atau rekreasi.

Bangsa Indonesia sendiri mulai menyadari adanya beberapa hambatan kemajuan, yaitu sistem feodal dan ikatan tradisi yang membatasi lapangan bergerak. Semangat baru untuk mengejar keterbelakangan di kalangan pemuda Indonesia mendorong mereka untuk lebih menuntut ilmu. Mereka mempelajari ilmu pengetahuan dari dunia Barat dan mereka mulai mempergunakan pakaian Eropa, bahkan terjadi perpaduan pakaian adat dan pakaian Eropa. Tibalah saatnya masa emansipasi, seperti tercermin dalam suatu surat edaran dari tiga orang putri bupati Jepara ialah RA. Kartini, RA. Reokmini, dan RA. Kardinah. Mereka menyarankan agar kaum muda Indonesia bersatu dan mengajar kemajuan, kalau perlu membuang adat istiadat yang menghambat kemajuan mereka. Seruan tersebut mendapat dukungan

dari beberapa orang progresif seperti bupati Tuban, Temanggung, Jepara, Demak, Karanganyar dan Sri Paku Alam. Di antara para bupati yang tergolong maju, dapat disebutkan misalnya PA. Tjodronegoro, bupati Pati pada akhir abad ke-19. Beliau terkenal dengan tulisannya antara lain tentang kisah perjalanan di Jawa. Beberapa karangannya antara lain dimuat dalam majalah *Lembaga Kebudayaan*. Demikian pula Bupati Demak PA. Hadiningrat, telah banyak menaruh perhatian terhadap kesengsaraan penduduk, perluasan pengajaran serta kemajuan bangsanya. Beliau tergolong salah seorang bupati yang telah memiliki kemajuan setarap dengan bangsa barat. Tokoh-tokoh lain yang telah memiliki kemajuan yang setarap dengan bangsa Barat adalah R. Saleh Sarif Hustaman, RM. Ismangun Danuwinoto, Kolonel Mayungkoro, Mas Atmodiroto, Kamil.

Di kalangan wanita golongan priyayi mulai timbul cita-cita untuk mengubah keadaan terbelakang dan melepaskan hal-hal yang menghambat kemajuan, Raden Ajeng Kartini sebagai seorang perintis emansipasi bangsanya berkata, *"Berikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, berikan pendidikan hati pikiran kepada wanita Indonesia, nanti merkeka akan menjadi peserta dalam menunaikan tugas suci, memajukan peradaban rakyat kita yang bercita-cita ini!"* Apabila kepada ibu-ibu (diberikan pendidikan yang tegas bijaksana, maka kemajuan bangsa hanya soal waktu saja.

Surat-surat RA. Kartinai kepada sahabat-sahabat karibnya yang ditulisnya selama lima tahun (1899 - 1904) dikumpulkan dalam sebuah buku, *Habis Gelap Terbit Terang*, yang terbit pertama kali 1911. Gaya bahasa sederhana dan tidak dibuat-buat. Isinya merupakan suatu cita-cita perjuangan menentang kuna yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Yang diuraikan dalam surat-suratnya itu antara lain, Pergaulan dalam lingkungan, bagaimana sifat dan pendirian ayah - ibunya serta saudara-saudaranya, pengalaman dan kesan dari suatu perjalanan suatu kejadian yang istimewa, soal agama, keadaan rakyat yang terbelakang dan sengsara nasibnya, tentang adat istiadat kuna seperti pemberian hormat dan pingitan anak gadis, moral perkawinan yang merendahkan derajat wanita.

Raden Ajeng Kartini setelah tamat sekolah rendah sebenarnya ingin mengikuti jejak temannya Lessy, meneruskan pelajaran ke sekolah

guru di Negeri Belanda, tetapi adat harus ditaati yaitu meng hadapi perkawinan.

Raden Ajeng Kartini bercita-cita ingin menjadi guru bagi anak-anak para bupati, tetapi usul Mr. Abendanaon mendirikan sekolah itu ditolak oleh pemerintah Belanda atas desakan para bupati yang keberatan. Cita-cita RA. Kartini terkenal pula di Negeri Belanda van Kol, bersedia mengusahakan bea siswa bagi RA. Kartini dan adiknya RA. Reokmini untuk belajar di Negeri Belanda, tetapi rencana ini pun gagal. Kemudian diusulkan untuk memberi bea siswa di Jakarta, tetapi tidak terlaksana juga, karena RA. Kartini akan dikawinkan dengan Bupati Rembang R. Adipati Djojoaningrat.

Pada tahun 1912 dibukalah sekolah Kartini yang pertama di Semarang atas dorongan Mr. Deventer. Selanjutnya dibuka pula di Jakarta, Malang, Madiun dan Bogor dengan pengantar bahasa Belanda, sedangkan sekolah kartini di Cirebon, Rembang, Pekalongan, Indramayu, dan Surabaya mempergunakan pengantar bahasa daerah.

#### 4.4.2 *Pekembangan Pendidikan di Jawa Tengah*

Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kesadaran nasional adalah perluasan pengajaran bagi pemuda Indonesia. Pada masa VOC pengajaran bagi rakyat tidak mendapat perhatian sama sekali. Dalam bidang pengajaran, Daendels dapat dikatakan sudah lebih maju selangkah dibandingkan dengan masa kompeni, tetapi karena kesulitan keuangan, maka urusan pendidikan rakyat diserahkan kepada bupati dengan biaya yang sangat sedikit. Sekolah rendah pertama kali didirikan di Jakarta pada 24 Pebruari 1817 khusus bagi anak-anak bangsa Eropa. Sebagai kenangan permulaan adanya sekolah, maka salah sebuah jalan di Jakarta dalam tahun 1817 diberi nama *Schoolweg* (jalan sekolah).

Sampai akhir abad ke-19 pengajaran bagi rakyat Indonesia masih sangat kurang. Pada tahun 1898 di seluruh Jawa yang berpenduduk  $\pm$  30 juta jiwa, hanya 60 ribu anak yang mendapat pengajaran, berarti hanya 0,2%, dari jumlah penduduk. Untuk membiayai sekolah partikelir, dalam tahun 1905 hanya dua juta rupiah setahun, artinya, jika dihitung untuk 40 juta jiwa penduduk pada waktu itu, maka biaya

pengajaran hanya lima sen untuk tiap jiwa (J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*, J.B. Wolters Batavia 1938).

Masuknya kebudayaan Barat melalui pengajaran mempengaruhi perasaan dan cara berpikir bangsa Indonesia. Sifat kebudayaan borjuis Eropa seperti individualisme, rationalisme, dan naturlisme sangat mempengaruhi kehidupan kaum bangsawan Jawa, terutama golongan pemudanya. Atas inisiatif P.C. Rienwardt, seorang guru besar dari Amsterdam, didirikan suatu pendidikan untuk mendidik calon mantri cacar bagi bangsa Indonesia dalam tahun 1820. Dari jenis sekolah inilah yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi pendidikan kedokteran di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-19 tidak hanya di Jepara saja yang didirikan pada tahun 1852. Kemudian pada tahun 1859 di Jawa tengah didirikan sekolah yang namanya *Nederlandsche Gereformeeede Zendingsvereniging*, suatu sekolah swasta Protestan yang mendapat subsidi Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1871 Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan berdasarkan beslit kerajaan, artikel I, yang mengatur sekolah pendidikan guru atau *kweekschool* dengan pertimbangan bahwa pembentukan sekolah dasar bumi putra harus didahului oleh pembentukan tenaga pengajaran. Namun demikian perlu diketahui bahwa bahasa Belanda pada tahun 1865 telah diajarkan pada sekolah tersebut dan sejak tahun 1871 telah dijadikan mata pelajaran wajib. Selanjutnya pada tahun 1875 *Kweekschool* berhasil didirikan di Surakarta dipindahkan ke Magelang. Lembaga pendidikan lain yang didirikan di tempat tersebut adalah yang disebut *Hoofdenschool* pada tahun 1875. Tujuannya yang pokok yaitu memberi pelajaran yang lebih lanjut pada lulusan Sekolah Dasar dan sekaligus mendidik orang-orang bumi putra untuk dikerjakan di pengadilan.

Di Semarang pada tahun 1817 berhasil pula didirikan *Hogere Burger School* atau HBS kini terletak di jalan Menteri Soepeno. Boleh dikatakan sekolah ini yang memberi dasar pengajaran di perguruan tinggi. Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1879, Pemerintah Belanda mendirikan sekolah baru yang disebut *Speciale School* dengan tujuan untuk memperluas pengajaran bahasa Belanda dikalangan orang bumi putra. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah pertengahan abad ke-19 pendidikan barat telah ditanamkan dan

dikembangkan di Jawa Tengah, walaupun masih terbatas pada sebagian kaum bangsawan saja.

Kelompok bangsawan tersebut jumlahnya amat kecil, namun penting peranan pada masa akhir abad ke-19 atau pada pemulaan abad ke-20. Seperti diketahui bahwa seluruh bangsawan Jawa pada abad ke-19 hanya berjumlah 2% dari seluruh penduduk Jawa dan secara rinci terdiri atas keluarga raja, golongan priyayi, atau pegawai pangrehpraja bumi putra, yang dari awal abad kekuasaan mereka makin menjadi berkurang antara lain menjadi . penarik pajak (zaman Raffles), mandor penanaman (zaman tanam paksa), peranan mereka sebagai pemimpin produksi ekspor terhapus setelah para pengusaha Barat masuk ke Jawa. Para bangsawan yang jumlahnya sangat kecil tersebut antara lain ialah Bupati Demak PA. Hadiningrat, Bupati Jepara RA. Condronegoro, bupati Demak yang pada tahun 1864 mendatangkan guru dari Negeri Belanda untuk mengajar putranya. Dari kalangan murid-murid ini kelak akan timbul ide-ide baru sebagai reaksi dari golongan priyayi terpelajar terhadap pemerintah kolonial, deskriminasi pendidikan, dan lain-lainnya. Dengan demikian gejala akan lahirnya gerakan nasional, yang teratur di Jawa, khususnya Jawa Tengah sudah mulai nampak.

#### **4.5 Alam Pikiran dan Kepercayaan**

##### **4.5.1 Pergerakan Masyarakat Samin (1905 -- 1914) : Asal Mula dan Perkembangannya**

Surantika Samin dilahirkan kira-kira pada tahun 1859 di suatu desa dekat Randublatung terletak di bagian selatan Kabupaten Blora. Ia adalah seorang petani pemilik dari tiga bau sawah. Meskipun ia seorang pemimpin dari suatu kepercayaan baru, ia dianggap oleh pengikutnya, sebagai keturunan bangsawan. Menurut Tjipto Mangoenkoesoemo dalam laporan penyelidikannya terhadap gerakan Samin tersebut pada tahun 1918 ( *Het Saminisme, Raportuitgebracht aan de Vereniging Insulinde*, Semarang 1918 ), Samin adalah anak kedua dari lima bersaudara. Oleh orang-orang desa ia disamakan dengan Bima atau Wrekudoro. Kakeknya adalah seorang kiai berasal dari Rajekwesi Bojonegoro dan ayah kakeknya ini ialah Pangeran Kusumaningaya. Menurut Dr. Tjipto, pengalaman Samin dengan istrinya yang pertama, telah menyebabkan ia mengecam susunan



masyarakat yang terdapat pada waktu itu. Dengan mengatakan bahwa Samin bukan seorang yang beragama Islam, istrinya tersebut mencoba membatalkan perkawinannya dengan dilakukan oleh naib (penghulu).

Sejak tahun 1890 Samin mulai menarik pengikut dari desa di sekitarnya. Pada tahun 1905 mulai terdapat perubahan pada pengikut gerakan Samin. Mereka mulai mengasingkan diri dari kehidupan desa dan menolak untuk menyerahkan padinya di lumbung-lumbung desa atau menyatukan ternaknya dengan kepunyaan orang desa lainnya. Mereka masih bersedia membayar pajak, tetapi mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu keharusan, tetapi hanya suatu sumbangan yang berdasarkan sukarela. Samin sendiri telah berhenti membayar pajak, tetapi ia mengatakan kepada penganutnya bahwa mereka belum cukup "murni" (waktunya) untuk mengikutinya. Pada bulan Januari 1903 residen Rembang melaporkan bahwa pada waktu itu pengikut Samin dalam 34 desa di Blora Selatan dan daerah Kabupaten Bojonegoro yang berdekatan berjumlah 772 orang. Desa-desa daerah Ngawi dan daerah Kabupaten Grobongan juga telah banyak menganut paham Samin dalam tahun 1906 telah menyebar ke Kabupaten Rembang bagian selatan. Dalam hubungan ini menantu-menantu Samin, yang bernama Surohidin dan Karsiyah sangat giat menyebarkan ajaran tersebut. Pada tahun 1907 jumlah pengikut Samin sudah menjadi 3000 orang. Pada tahun itu kabar angin telah sampai pada pegawai kontroler setempat bahwa orang-orang Samin akan memberontak pada 1 Maret 1907. Kontroler tersebut menjadi panik dan segera meminta agar dikirim pasukan. Atasannya kemudian mengambil tindakan terhadap sekelompok orang di Kedung Tuban pada waktu mereka sedang menjalankan upacara slametan dengan tuduhan bahwa orang-orang itu ada hubungannya dengan rencana pemberontakan tersebut. Pada waktu itu Samin belum ditangkap, tetapi beberapa hari kemudian ia menerima undangan dari bupati untuk datang ke Rembang, dan di sana kemudian ditangkap. Bersama delapan orang pengikutnya ia kemudian dibuang ke luar Jawa Jawa. Samin meninggal dalam pembuangan di Padang (Sumatera) pada tahun 1914.

Penangkapan tersebut telah menyebabkan kemunduran pada gerakan Samin sehingga persebarannya di daerah Rembang menjadi terhenti. Meskipun demikian, gerakan Samin tidak mati. Pada tahun



1908 seorang yang bernama Wongsorejo telah menyebarkan paham Samin di Distrik Jiwan dekat Madiun. Ia segera ditangkap dan dibuang dengan dua orang pengikutnya. Ia mengatakan kepada pengikutnya supaya jangan membayar pajak atau menjalankan kerja wajib (*cervees*) dan bahwa mereka akan kebal terhadap pedang orang Belanda, tetapi pengikut Wongsorejo hanya sedikit, dan setelah beberapa tahun gerakannya hilang dari daerah itu. Pada tahun 1911 menantu Samin bernama Surohidin dan seorang pembantunya bernama Engkrak, telah menyebarkan paham Samin di daerah Kabupaten Grobogan, sedangkan suatu pusat gerakan Samin yang lain telah dikembangkan oleh Karsiyah (menantu Samin yang lain) di Kabupaten Pati.

Gerakan Samin mencapai puncaknya pada tahun 1914 dan mungkin ini disebabkan adanya kenaikan pada pajak kepala. Di daerah Grobogan pengikut-pengikut Samin tidak menghormati kepada pejabat pemerintah, dan bahkan mendapat dukungan dari beberapa pejabat desa. Pada waktu itu seorang bernama Prodjodikromo mengatakan kepada orang-orang di Distrik Balerejo sebelah utara Madiun bahwa pajak akan dinaikkan lagi dan meminta kepada mereka dan memperdayai (menipu) pegawai mengukur tanah. Di daerah Kajen, Pati, Karsiyah mulai menyebut dirinya Pangeran Sendang Djanur dan mendesak pengikutnya untuk menentang pemerintah. Di Desa larangan, pengikut Samin menolak untuk membayar pajak, menyerang kepada desa dan melawan polisi yang dikirim untuk menangkap mereka. Dalam peristiwa ini beberapa orang menderita luka-luka, tetapi tak ada orang yang meninggal. Pengikut Samin tersebut kemudian ditangkap dan dipenjara di Kota Pati.

Daerah lain yang juga dipengaruhi paham Samin ialah Desa Topellan dalam Kabupaten Bojonegoro di mana terdapat pengikut-pengikut Samin sejak 1890. Tahun 1912 pengikut-pengikut Samin di daerah itu telah menyewa tanah-tanah yang terletak di tepi Sungai Sala. Pada tahun 1914 mereka mulai menolak membayar uang sewa tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah itu adalah kepunyaan orang-orang yang mengerjakan dan bahwa mereka "tahu akan hak-hak mereka". Mereka mengusir orang-orang desa yang telah ditunjuk sebagai pemilik tanah tersebut dan mengancam dengan tajam dan arit ketika asisten wedana datang untuk menyelesaikan persoalan tersebut,

tetapi pada akhirnya mereka dapat dilucuti dan kemudian dipenjara oleh polisi tanpa seorang korban pun yang jatuh.

Kejadian-kejadian ini bersamaan waktunya dengan meluasnya pengaruh Sarikat Islam di seluruh Jawa tetapi perhatian pemerintah lebih besar terhadap gerakan orang Samin. Pemberontakan yang terjadi di dekat Surabaya pada tahun 1916 pada orang-orang yang menyewa tanah milik perseorangan dan suatu kerusuhan di daerah Tuban, oleh pemerintah dihubungkan dengan gerakan Samin. Mereka juga dituduh kerjasama dengan Sarikat Islam untuk mengorbankan Perang Suci melawan Belanda. Pejabat tinggi pemerintah Belanda termasuk kepada Departemen Dalam Negeri (*Binnenlands Bestuur*) berpendapat bahwa perlawanan dari pengikut Samin tersebut disebabkan kesalahan kebijaksanaan Dinas Kehutanan dan kelakuan yang tidak baik dari pegawai pegawainya, tetapi tuduhan ini ditolak oleh Dinas Kehutanan. Pada tahun 1917, asisten residen Tuban yang bernama J.E. Jasper ditunjuk oleh pemerintah untuk menyoediki latar belakang ekonomi dari gerakan Samin. Pada waktu itu gerakan Samin sudah melewati masa puncak perkembangannya dan mulai mengalami kemunduran, meskipun ada juga perluasan ke daerah Undaan (Kudus Selatan) pada tahun 1916. Jasper melaporkan bahwa jumlah pengikut Samin pada waktu itu adalah 2.305 keluarga, di mana 1.701 keluarga ada di daerah Kabupaten Blora, 283 keluarga di Kabupaten bojonegoro, dan selebihnya terdapat di daerah Pati, Rembang, Grobogan, Ngawi dan Kudus.

Pemikiran Dasar Ekonomi dari Gerakan Samin dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti dikatakan di atas, gerakan Samin berupa penolakan untuk membayar berbagai macam pajak dan menolak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh pejabat pemerintah. Komisi J.E.Jasper telah ditugaskan untuk menyelidiki sebab ekonomi tersebut. Daerah yang diancam orang Samin adalah daerah kapur yang tandus, sehingga para petani di daerah sekitar Blora adalah lebih melarat kehidupannya dari petani-petani di daerah lain. Selain keadaan tanah yang kurang subur tersebut, yang telah menyebabkan perlawanan orang Samin, ialah beban pajak yang berat, campur tangan pemerintah terhadap kehidupan di desa dan pelaksanaan peraturan Dinas Kehutanan. Dalam laporannya J.E. Jasper mengatakan bahwa bebas

pajak terhadap orang desa berat dan ketidakadilan sering terjadi di dalam pemungutannya. Misalnya pelaksanaan dari pajak tanah baru tahun 1914 menyebabkan pemilik tanah seluas 1/4 bau (yang sebelumnya tak dikenal pajak) menjadi terkena pajak. Hal inilah yang mungkin telah turut menyebabkan timbulnya kembali kebangunan yang kedua dari gerakan Samin. Di samping karena banyaknya tarikan pajak yang telah dideritanya, tersebar kabar bahwa mereka masih akan dikenakan bermacam-macam pajak lagi misalnya pajak penguburan orang meninggal, pajak jika memandikan kerbau di sungai, pajak jika berjalan di jalan, dan lain-lain.

Dalam hal ini, perasaan tidak puas dan menentang terhadap kemungkinan ditarik pajak baru tersebut sebagian timbul dari pelaksanaan peraturan baru. Beberapa peraturan itu telah menyebabkan ketidakpuasan mereka karena beban keuangan tambahan yang harus mereka pikul seperti pemerintah memasukkan sapi/kerbau dari Benggala untuk memperbaiki keturunan kerbau asli, maka setiap petani harus membayar 5 sampai 20 rupiah dan kadang harus memberikan tenaganya juga untuk pemeliharaan. Hal ini dianggap sebagai suatu paksaan, karena kerbau tak memegang peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi mereka. Juga penyerahan tanah milik berasama (desa) untuk membiayai kas desa telah mengurangi jumlah tanah yang diperuntukkan bagi orang-orang desa secara bergilir (*Undang Undang Masyarakat Pribumi (Native Community Regulatien)* tahun 1906 menetapkan dibentuknya pemerintahan desa)

Juga peraturan baru seperti pembangunan rumah baru telah menyebabkan banyak kesukaran di daerah Ngawi pada tahun 1916 - 1917, pinjaman tanpa bunga diberikan kepada penduduk tetapi rakyat sulit untuk mengembalikan, sehingga menganggap hal ini sebagai pemerasan lebih lanjut. Juga ketika sekolah-sekolah desa didirikan, penduduk dipaksa untuk membayar, sehingga orang-orang Samin menolak untuk menyekolahkan anaknya. Misalnya lagi, tugas seperti ronda malam dan menyediakan batu kerikil untuk perbaikan jalan telah dianggap sebagai perkosaan yang baru. Dalam hubungan ini dapat dikutip pendapat Robert van Niel tentang timbulnya gerakan Samin sebagai berikut.

Sementara desa semakin menjadi bertambah tidak puas terhadap tekanan dari pemerintah untuk mengadakan perubahan dan perbaikan (ialah : perluasan kegiatan pemerintah sebagai akibat pelaksanaan politik Ethis 1901). Ketidakpuasan mereka biasanya menjadi berbentuk kebingungan yang tak dapat dimengerti dari pada suatu penentangan yang bersifat pasif. Tetapi meskipun begitu kadang-kadang penentangan mereka bisa berbentuk terjadi secara kekerasan. Sebagian besar dari kekerasan ini terjadi diluar Jawa karena pengaruh Barat lebih terasa dari pada di Jawa. Tetapi juga di Jawa, gerakan Samin yang bersifat kekerasan itu telah meletus di sana-sini dari tahun 1905 sampai tahun 1914 dan yang dikatakan bahwa secara langsung disebabkan karena campur tangan pejabat-pejabat pemerintah terhadap segala bentuk/macam urusan didalam desa, yang menunjukkan ketidakpuasan yang semakin meletus karena dilaksanakan program pembaharuan tersebut.

Tentang sebab penentangan mereka terhadap peraturan kehutanan yang baru dapat dikatakan di sini, bahwa pengusaha hutan (daerah kediaman orang-orang Samin adalah hutan-hutan jati) yang sejak tahun 1874 diberikan kepada pihak swasta. Sejak tahun 1897 pengusaha hutan tersebut dipegang sendiri oleh pemerintah. Ini menyebabkan bahwa hutan tersebut kemudian diusahakan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pengawasan hutan yang semakin keras oleh pegawai kehutanan, sehingga kemungkinan pengambilan kayu di hutan yang biasa dilakukan oleh penduduk menjadi berhenti. Di banyakan desa di mana tanah untuk pertanian kurang maka penduduk mengajukan permintaan agar tanah hutan dibuka bagi tanah pertanian, tetapi ditolak oleh Dinas Kehutanan. Transaksi yang sering terjadi antara penduduk dan Jawatan Kehutanan untuk saling menukar tanah juga menimbulkan kesukaran, karena setelah para petani menyerahkan tanahnya kepada Dinas Kehutanan, mereka tidak diperbolehkan menanam tanah yang diperuntukkan baginya karena "beberapa pohon kayu jati masih tumbuh di situ". Dalam beberapa hal transaksi itu sering mengakibatkan petani kehilangan tanahnya, dan dalam hal ini mereka tak dapat mengadu kepada siapa pun. Samin sendiri mengakui hak pemerintah untuk menanam pohon kayu jati, tetapi berpendapat bahwa hutan itu terbuka bagi semua orang, ia sering didenda karena mencuri

kayu di hutan meskipun ia selalu memberi tahu kepada desa sebelum mengambil kayu tersebut. Orang Samin sering berkata “Lemah pada duwe, Banyu pada duwe, kayu pada duwe”. Ketidakadilan seperti tersebut di atas tentu saja terjadi jika petani yang masih sederhana barmemu atau berhubungan dengan birokrasi asing yang kuat.

### **Agama Nabi Adam**

Selain alasan ekonomi tersebut di atas gerakan Samin juga mempunyai sifat atau keyakinan kepercayaan yang kuat, sehingga tingkah lakunya tak dapat diterangkan hanya karena ketidakpuasan dalam hal ekonomi saja. Kepercayaan orang Samin ialah bahwa mereka tak percallya kepada Allah atau dewa lain, karena ia tak melihat Allah tersebut. Mereka juga tak mempercayai surga atau neraka. Memang orang Samin tak percaya kepada Tuhan seperti orang Islam, sehingga sering disebut “atheistis” Namun demikian percaya bahwa “Tuhan ada pada diri (di dalam) saja”, seperti kepercayaan mistik Jawa dari Kiai Ageng Pengging. Samin melukiskan ajarannya sebagai Elmu Nabi Adam” (Ilmu dari Nabi Adam) Tetapi Ia mengatakan bahwa “Nabi” baginya berarti “pria”. Menurut seorang penulis Belanda (J. Bijleveld, *De Samin Deweging*”, *Kolonial Tijdschrift*, (1923),) wanita oleh orang Samin disebu “Adam Nabi”, dan orang laki-laki disebut “adam wali”. Ini menekankan pentingnya pernan seks dan kekuatan magis di dalam paham Samin. Mereka mnyebut istrinya “sikep” dan menyebut diri mereka “wong sikep”.

Selain itu Jasper mengutip tata cara mereka yang sederhana, “tidak boleh malas, jangan berdosa, jangan mencuri, jangan membuat zinah, bertingkah laku sabar, jika disakiti jangan membalas, jangan meminta uang atau makan, tetapi jika seseorang meminta dari kamu baik makan atau uang berilah”. Orang Samin dari dahulu sampai saat ini terkenal sebagai petani yang jujur, murah hati, sabar dan rajin (tekun), sehingga mereka sering menjadi contoh dalam cara mengerjakan sawah/tanah dari petani di sekitarnya. Mereka juga bersifat tak mau menjalankan kekerasan. Jika dipukul oleh polisi mereka tak akan balas, tetapi gembira di hati dan kemudian berpuasa. Seorang yang akan menjadi pengikut paham Samin harus mengucapkan “Bumi-ajijaman”. Onghokham berpendapat, bahwa kata-kata tersebut berhubungan dengan sia-sia pemujaan kesuburan pertanian.

Gerakan Samin sering dianggap sama atau semacam gerakan Ratu Adil (Herucokro) yang mendambakan kedatangan seorang ratu Adil. Tetapi dalam hal ini gerakan Samin beralainan dengan Ratu adil. Kalau gerakan Ratu Adil berupa kekerasan, gerakan Samin tetap bersifat *non violent* (tak memakai kekerasan). Pada waktu itu tak ada korban pun yang jatuh. Mereka memiliki ketabahan hati yang ulet, sehingga mereka tetap mempertahankan diri sampai pada saat ini. Mereka juga selalu dapat mencari *modus vivendi* di dalam keadaan yang selalu berubah.

## BAB V

### MASA KEBANGKITAN NASIONAL ( ±1900 -- 1940 )

#### ***5.1 Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan***

##### ***5.1.1 Pemerintah Hindia Belanda***

Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan dalam politik kolonial Pemerintah Belanda di Indonesia yaitu mengganti politik liberal dengan suatu politik yang lebih menekankan kesejahteraan orang pribumi, sebagai suatu tanggung jawab moral dari Pemerintah Belanda terhadap orang Indonesia. Politik baru ini, dikenal dengan nama *Ethische Politiek*. Politik tersebut dijalankan terutama disebabkan oleh perubahan keadaan politik di Negara Belanda, di mana paham liberal yang menguasai politik kolonial sejak tahun 1870 tidak lagi sesuai dengan perkembangan baru. Kaum liberal dengan terpaksa mulai menerima paham baru yang memberi peranan lebih besar kepada pemerintah atau negara untuk memajukan kesejahteraan pribumi. Desakan ke arah politik baru tersebut juga disebabkan oleh tuntutan golongan sosialis yang sejak tahun 1887 mempunyai wakilnya yang pertama dalam parlemen Belanda. Mereka menuntut tindakan pemerintah yang lebih aktif seperti yang kemudian disuarakan oleh Van Kol melalui partai sosialisnya. Juga golongan konservatif yang pada

waktu itu bersatu dengan golongan agama (Partai Roma Katolik, Partai Anti revolusioner dan Partai Kritten Historis) juga menghendaki campur tangan Negara dalam mengusahakan suatu “kemajuan yang teratur”. Abraham Kuiper telah mengemukakan program politik baru tersebut dalam brosurnya, *Ons Program*, yang terbit pada tahun 1880. Ia menjadi perdana menteri Belanda pada tahun 1901 dan dengan segera memasukkan ide politik baru yang menyatakan bahwa perintah memegang tanggung jawab moral bagi orang pribumi. Dengan ini mulai dilancarkan politik kolonial baru yang disebut “politik etis”.

Di antara golongan *ethici* itu, dapat disebut nama-nama seperti C. Tj Van Deventer dari Partai Liberal yang menulis karangan *Een Ereschuld* (Hutang Budi) dan yang menuntut dijalankan politik kesejahteraan, desentralisasi dan pemberian pekerjaan yang lebih banyak bagi orang pribumi dalam korps kepegawaian Hindia Belanda. Memang otonomi dan desentralisasi telah menjadi semboyan dari politik baru tersebut. Van deventer dapat disebut “bapak dari politik *ethis*”, karena ia menempatkan kesejahteraan orang pribumi di atas segala-galanya dan sangat mengecam kemelaratan orang Jawa yang menurut dia disebabkan oleh praktek dari sistem Tanam Paksa dan dari pengusaha-pengusaha perkebunan tebu.

P. Brooshoft di Semarang yang memberi nama politik baru tersebut, dan yang menekankan sikap keadilan yang harus dipunyai oleh orang Eropa terhadap orang Jawa yang lebih lemah. Dr. C. Snouck Hurgronjo selama tahun 1890 telah mendapat pengetahuan yang luas tentang kehidupan dan adat istiadat orang Jawa. Pendapatnya kemudian dipopulerkan di Universiteit Leiden dimana ia menjadi profesor pada tahun 1906. Ia menganjurkan pemberian pendidikan Barat kepada golongan atas (*elite*) bangsa Indonesia sehingga mereka menjadi orang yang berpendidikan dan berkebudayaan barat (*assosiasi* atau *assimilasi*). Banyak orang Indonesia yang kemudian berhasil mendapat pendidikan yang tinggi karena jasa dan perlindungannya, misalnya Ahmad Jayadiningrat, yang kemudian jadi bupati di Semarang, dan saudaranya Hoesein Jayadiningrat berhasil mendapat gelar dokter dalam Kesusasteraan Timur di Universiteit Leiden.



Asisten Residen Purwekerto WPD. de Wolff van Westerrode (meninggal tahun 1904) yang menjadi pelopor dari Bank Penyimpanan, sewa, dan Kredit Pertanian kemudian menjadi dasar dari sistem Kredit Rakyat (*Vokscredit wezen*) yang diadadakan pemerintah pada tahun 1904 untuk memberi kredit atau pinjaman kepada orang desa. *Vokscreditwezen* ini terdiri atas tiga lembaga kredit yaitu umburg desa dan bank distrik dan bank kabupaten (*Volksbank*) untuk para pengusaha bangsa Indonesia.

JH. Abendanon pada tahun 1900 menjadi direktur bagian Pendidikan dan Pemerintahan Hindia Belanda. Bersama dengan istrinya ia banyak berjasa dalam menimbulkan kesadaran bangsa Indonesia. Orang-orang terpelajar tersebut antara lain adalah RA. kartini, putri bupati Jepara, yang menganjurkan perluasan pendidikan dan mengajarkan bagi kaum wanita, Abdul Moeis yang kemudian menjadi pemimpin terkenal dari Sarekat Islam bersama dengan HOS. Cokroaminoto, dan H.A. Salim salah seorang terpelajar bangsa Indonesia yang sering mengadakan pertemuan di rumah Abendanon.

### 5.1.2 *Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903*

Tuntutan ekonomi dan desentralisasi telah menjadi suatu bagian yang terpenting dari politik etnis. Menurut Furniball, ini mengandung tiga arti; pertama, penyerahan kekuasaan dari pemerintahan di Nedeland kepada pemerintah di Hindia Belanda, dari pemerintah Hindia Belanda, kepada departemen-departemen dan pejabat/pegawai setempat, dari pegawai Eropa kepada pegawai-pegawai bumi putra; kedua, pembetulan badan-badan pemerintah yang mempunyai kekuasaan otonom yang bekerjasama dengan pemerintah, sehingga dapat mengurus urusannya sendiri, dan ketiga pemisahan anggaran keuangan umum dan anggaran keuangan pribadi di dalam negara-negara swarpraja. Hal yang pertama berarti pemberian pemerintah desentralisasi administratif dan bertujuan mencapai efisiensi yang lebih besar, sedangkan hal yang kedua bersifat politik yang menuju sebagian kepada tercapainya efisiensi dan sebagian otonom.

Seperti diketahui, Pemerintah Hindia Belanda dan pada tahun 1900 bersifat terpusat dan otokratis. Gubernur jenderal di Batavia mewakili raja Belanda dalam memerintah secara otokrasi di Hindia Belanda,

sedangkan menteri jajahan di Negeri Belanda bertanggung jawab kepada parlemen Belanda tentang tindakan pemerintah Hindia Belanda. Di Hindia Belanda gubernur jenderal dibantu oleh *Raad van Indie* (Dewan Hindia) yang anggotanya diangkat oleh raja dan yang mempunyai kekuasaan untuk pemberian nasihat/pertimbangan tidak mengikat kepada gubernur jenderal. Di bawahnya terdapat berbagai departemen dari pemerintahan umum, terdiri atas Keuangan, Pemerintah. Dalam Negeri Pekerjaan Umum, Pendidikan, Agama, Industri, Kehakiman, Urusan Militer dan Urusan Angkatan Laut. Korps Pegawai Pamong Praja bangsa Belanda terdiri atas gubernur-gubernur yang membawahi beberapa keresidenan; keresidenan diperintah residen, residen yang mempunyai staf yang terdiri atas asisten residen (membawahi daerah *afdeling*) dan *Contraleur* yang mengawasi pemerintah distrik (kewedanaan) dan *onder distrik*. Korps Pegawai Pamong Praja Bumiputra (Bangsa Indonesia) terdiri atas bupati untuk setiap kabupaten (berada di bawah residen atau asisten residen), wedana untuk setiap distrik atau kewedanaan dan asisten-wedana untuk setiap sub distrik. Golongan priayi adalah pegawai bangsa Indonesia (bumi putra) yang menduduki jabatan dari bupati sampai asisten wedana. Bagi seorang bangsa Indonesia yang ingin menduduki jabatan priayi ini (biasanya adalah mereka yang sudah tamat Sekolah Pamongpraja OSVIA) harus memulai pengabdianya dari pangkat yang terendah, ialah sebagai juru tulis. Jabatan bupati pada waktu itu masih merupakan jabatan yang turun temurun.

Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 dimaksudkan untuk memberikan hak otonom dan pembentukan dewan daerah pada setiap keresidenan (*gewest*) dan kota-kota besar (*gemeente*). Pada tahun 1905 diterima *Desetralisasi Desluit* (*Staatsblad* 1905 No. 137) untuk dilaksanakan di Indonesia, sedangkan pembentukan daerah daerah otonom, keresidenan di Jawa Tengah baru dapat dilaksanakan pada tahun 1907 dengan urutan sebagai berikut. Untuk Keresidenan Bayumas termuat dalam Stbl. 1907 No. 136, Keresidenan Pekalongan termuat dalam Stbl. 1908 No. 174, Keresidenan Kedu termuat dalam Stbl. 1909 No. 177, Keresidenan Semarang termuat dalam Stbl. 1908 No. 175, dan Keresidenan Rembang termuat dalam Stbl. 1907 No. 134.

Di samping menunjuk daerah keresidenan otonom, undang-undang tersebut juga menghidupkan kota-kota tertentu di dalam gewest (keresidenan) sebagai kota-kota otonom, yang ternyata didalam pembentukannya terjadi lebih dahulu dari penunjukan daerah keresidenan sebagai daerah otonom. Pada tahun 1905, tiga kota besar di Jawa, ialah Betawi, *Meester - Cornelis* (Jatinegara), dan Bogor (Buitenzorg) telah ditunjuk sebagai daerah kota otonom (*gemeenteraad*). Betawi dalam Stbl 1905 No. 204, Meester Cornelis dalam Staatsblad 1905 No. 206 dan dalam staatsblad 1905 No 208 Setelah tiga kota tersebut dalam tahun 1906 untuk Jawa Tengah ditunjuk kota, yaitu : Kota Semarang dalam Staatsblad 1906 No. 120, Kota Tegal dalam Sataatsblad 1906 No. 123, Kota Pekalongan dalam Staatsblad 1906 No. 125, Kota Magelang dalam Staatsblad 1906 No. 125.

Adapun yang dapat ditunjuk sebagai daerah kota otonom tersebut ialah kota besar yang mempunyai sifat kebaratan yaitu yang mempunyai penduduk bangsa Eropa yang banyak dan disekitar kota itu terdapat *onderneming* gula, kopi, atau yang lain. Selain itu, otonomi yang diberikan tersebut terutama hanya dinikmati oleh golongan masyarakat Eropa, bukan otonom yang sebenarnya, melainkan hanya berupa "perbaikan jalan dan taman atau parit belaka.

Susunan keanggotaan Dewan Daerah Keresidenan dan Dewan daerah Kota yang terdiri atas lapisan atas masyarakat. Pada bangsa Eropa (Belanda) kebanyakan terdiri atas para sisten residen dan administrateur *onderneming* atau perusahaan, sedangkan pada bangsa Indonesia terdiri atas bupati-bupati dan patih. Anggota-anggota Dewan Keresidenan ditunjuk karena kedudukannya (pangkat) dan diangkat oleh gubernur jenderal atas usul dari ketua dewan (residen) dari dua orang nama. Berlainan dengan Dewan Kota yang mempunyai ketua (*burgermeester* atau walikota) yang bukan seorang pegawai pamong praja seperti pada residen, maka Dewan Keresidenan diketuai oleh residen, sehingga mengurangi kebebasan dari anggota-anggota dewan yang kebanyakan terdiri atas pegawai negeri.

Dalam hubungan ini, kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Keresidenan ialah hak membicarakan anggaran pemerintah dan

belanja, pinjaman, undang-undang pemungutan pajak atau bea, pemborongan, dan soal-soal lain yang penting. Yang dapat mengesahkan (menerima atau menolak) Anggaran Penerima dan Belanja Keresidenan ialah gubernur jenderal.<sup>10)</sup>

Di dalam perkembangannya, ternyata gemeente (Daerah Otonom Kota) menunjukkan kehidupan yang lebih baik dan subur dari pada daerah otonom keresidenan (*gewest*). Hal ini disebabkan ketua gementeraad (dewan daerah kota) bukan seorang pegawai negeri, tetapi seorang *burgermeester* yang bukan pegawai pemerintah, serta hanya mempunyai wilayah yang terbatas sedangkan anggota-anggota Dewan kota tersebut kebanyakan terdiri atas bangsa Eropa (Belanda). Keadaan ini menyebabkan bahwa pada tahun 1922, daerah otonom kota diperbolehkan membentuk Badan Pengurus Harian yang disebut *College van Burgermeester en Wethouders* (Dewan Pengurus Harian yang terdiri wali kota dan para penyelenggara undang-undang) untuk mendampingi walikota (*burgermeester*) dalam pekerjaan sehari-hari. Juga keanggotaan Dewan Daerah Kota yang di pilih (meskipun hanya dari golongan atas) telah menyebabkan Daerah Otonom Kota mempunyai perkembangan yang lebih berhasil sebagai daerah otonom. Di dalam buku *Indonesia Town Studies in Urban Sociology* dikatakan sebagai berikut.

Kotapraja itu selalu dilihat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai semacam "daerah kantong orang-orang Barat dan sifat kebaratan dari kota-kota itu telah dipergunakan sebagai alasan untuk membagi-bagi kursi keanggotaan didalam Dewan Kota dalam cara yang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin mayoritas dari orang-orang Eropa. Barulah pada tahun 1938 dan 1940 bahwa di dalam dua buah kota praja yang lebih kecil orang-orang Indonesia telah diangkat sebagai walikota."

Di dalam perkembangannya, maksud memberikan otonom dan desentralisasi tersebut kemudian dijalankan dalam bentuk penyerahan kekuasaan yang lebih luas (yang dipegang oleh pegawai pamongpraja bangsa Belanda) kepada pegawai-pegawai pamongpraja bangsa Indonesia. Kehendak politik ini bagi bangsa Belanda dikenal sebagai *ontvoeding* dan dilaksanakan pada tahun 1918 dengan *Ontovoogding*

*Ordonantie (Staatsbla)* No. 674). Ide ini sebetulnya berasal dari Graaft sebagai wakil direktur kepegawaian, pada tahun 1905 mengusulkan penyatuan kedua cabang pegawai pamongpraja tersebut (Belanda dan bumiputra) dan penggantian pegawai-pegawai bangsa Belanda dengan pegawai-pegawai bangsa Indonesia serta berhubungan dengan usulnya tentang pembagian Jawa menjadi daerah teritorial dengan kekuasaan yang lebih besar kepada pegawai-pegawai setempat. Pada tahun 1918 Idenburg dan van Limburg Stirum melaksanakan sebagian usul de Graaff tersebut dalam bentuk peraturan *Ontvoogding* dengan maksud untuk dapat mengurangi jumlah asisten residen dan menghapuskan jabatan *controleur*. Penyerahan kekuasaan (*ontvoogding*) ini dapat diartikan sebagai didikan kepada pegawai bumiputra tanpa didampingi “atau dipimpin” oleh pegawai-pegawai bangsa Belanda dengan mengambil kebugatan-kebugatan yang bupati mempunyai pendidikan agak luas dan tinggi. Bidang-bidang yang diserahkan meliputi urusan-urusan agraria, keramaian (pemberiaan izin mengadakan keramaian) personalia (pengangkatan pegawai-pegawai rendah) seperti tulis, agen polisi dan lurah), dan penetapan pajak (menyelenggarakan daftar *hoofgeld*). Urusan pemerintah yang penting, seperti urus keamanan, tetap dipegang oleh pegawai bangsa Belanda. Maka tidaklah mengherankan bahwa seorang bupati bangsa Indonesia yang telah dibebaskan, yaitu Raden Djayadinigrat, mengatakan bahwa hal tersebut tak menyebabkan perbedaan di dalam kedudukan nya, dan selama 10 tahun berikutnya. Administrasi pemerintah Eropa tetap seperti sebelumnya. Adapun kebugatan yang memperoleh *ontvoogding* di Jawa Tengah ialah Kebugatan Banyumas (Stbl 1919 No. 668), Kebugatan Blora (Stbl 1919 No. 804), Kebugatan Batang (Stbl 1920 No. 45), Kebugatan Jepara (Stbl 1920 No.480), Kebugatan Kebumen (Stbl 1920 No. 608).

Didorong oleh pergolakan-pergolakan politik yang terjadi di Hindia Belanda dan di Negara Belanda, maka setelah Perang Dunia I perundang-undangan desentralisasi tahun 1903 dirasa tidak memuaskan lagi. Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang tentang reorganisasi pemerintah 1922 dengan nama *Bestuurshervermingswet* 1922 (*Staatsblad* 1922 No. 216) pasal 119, 120, 121, 122 *Indische Staatsregeling* 1925).

Undang-undang tahun 1922 tersebut memungkinkan pembentukan daerah otonom yang lebih besar dari gewest (UU. tahun 1903) dengan nama provincie, sedangkan bagian dari propinsi ini dapat dibentuk sebagai daerah-daerah otonom berdasarkan UU. tahun 1922 tersebut. Berdasarkan *Bestuurhervormingswet* 1922 tersebut, kemudian dibentuk:

- (1) *Provincieordonantie*, yang memuat ketentuan-ketentuan lanjut tentang daerah otonom Propinsi (*Staatsblad* 1924 - 78: perubahan terakhir 1940 - 226, 251).
- (2) *Regentschapsordonantie*, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang daerah otonom *regentschap* (kecamatan) (*Staatsblad*) 1924 - 79, perubahan terakhir *Staatsblad* 140 -2264)
- (3) *Stadsgemeenteordonantie* (kotapraja) Jawa Madura (*Staatsblad* 1926 - 365 perubahan terakhir *Staatsblad* 1940 - 226 dan *Staatblad* 1948 - 195).

Berdasarkan undang-undang tersebut, di Jawa Madura, kemudian bentuk tiga provinsi otonom yaitu propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Kecamatan-kecamatan beberapa *gemeenten* (kotapraja) sedangkan daerah otonom keresidenan (*gewestelijke ressorten*) berdasarkan *Desentralisatiewet* tahun 1903 dihapus.

Seperti telah disebutkan di atas, sebagai contoh Daerah Otonom (Kota Besar Semarang yang dibentuk dalam *Staatsblad* tahun 1906 No. 120. Pemerintah Kota besar Semarang sejak itu dijalankan oleh *burgemeester* (walikota), *Coolege van Burgemeester en Wethouders* (Badan Pengurus Harian ), dan *Gemeenteraad* (Dewan Kota) jumlah anggota *Gemeenterood* ialah 27 orang (15 orang Belanda, delapan orang Indonesia, dan empat orang Timur, Asing) sedangkan anggota Badan Pengurus Harian ialah empat orang (dua orang Belanda, satu orang Indonesia, dan satu orang Cina).

*Burgemeester* kedudukannya kuat, karena ia menjadi kepala semua pegawai (chef). Ketua *College van Burgemeester en Wethouders* (Badan Pengurus Harian), dan ketua dari *gemeenteraad* (Dewan Kota), serta diangka oleh pemerintah pusat. Syarat-syarat untuk menjadi walikota ialah laki-laki dan berumur paling sedikit 30 tahun, sedangkan syarat-syarat keanggotaan *gemeenteraad* ialah laki-laki,

warga negara Belanda, paling sedikit berumur 21 tahun, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, Melayu atau bahasa pribumi yang lain di tempat itu, benar-benar bertempat tinggal di wilayah kotapraja setempat, dan mempunyai ketetapan pajak dari Kantor Pajak Negeri paling rendah f. 300,-

Dalam hal ini sampai bulan Agustus 1916 *Gemeente Semarang* belum mempunyai seorang *burgemeester* (walikota) yang berdiri sendiri, karena ketua *gemeenteraad* tersebut masih dirangkap oleh kepala pemerintah setempat (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*) atau asisten residen Belanda di Semarang, yaitu LR.Priestor (1906 - 1910), PKW. Kerm (1910 - 1913, Van der Ent (1913 - 1914), dan JW. Mejer Panneft (1914 - 1915). Pada tahun 1916 ada keinginan untuk mengadakan suatu jabatan ketua *Gemeenteraad* yang tegak mandiri dalam arti tidak dirangkap oleh kepala pemerintah setempat (asisten residen). maka pada tahun itu, *Gemeenteraad* (Dewan Kota Praja) Semarang mengajukan beberapa orang calon kepada pemerintah (gubernur jenderal) untuk memangku jabatan tersebut, yaitu Ir. D. de Zongh Mr. Meijroos, dan Hilderling (Asisten resimen Kudus). Ternyata yang dipilih ialah calon yang pertama sehingga Ir. D. de Zongh telah tercatat sebagai walikota Semarang yang pertama secara berurutan walikota semarang dan 1916 - 1942 adalah:

- |             |                 |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|
| (a) Agustus | 1916 - Mei 1927 | : Ir. D.de Zongh  |
| (b) Mei     | 1927 - 1936     | : A. Bagehus      |
| (c) 1936    | 1942            | : H.R. Boissevain |

Jadi pembentukan pemerintah otonom kota, keresidenan, dan kemudian kabupaten ia serta provinsi pada waktu itu menyebabkan terdapatnya dua macam untuk pemerintah (dualistis). Satu pemerintah modern yang tertib dan teratur, tetapi yang hanya dikuasai oleh golongan orang Eropa, dan satu pemerintah yang tradisional yang masih dipegang oleh pejabat-pejabat pamongpraja bangsa Indonesia (dari bupati sampai asisten wedana). Tentu saja bahwa pemerintah dari pegawai-pegawai bangsa Eropa adalah yang memerintah dan menguasai pemerintah dari pegawai pamong praja bangsa Indonesia.

## 5.2 Kaum Pergerakan di Daerah

### 6.2.1 Budi Utomo

Seperti diketahui B.U. didirikan oleh murid-murid (mahasiswa-mahasiswa) Sekolah Stovia di Jakarta (Sutomo, Gunawan Mangunkusomo, Tjipto Mangunkusumo) pada 20 Mei 1908, setelah hati mereka tergerak oleh usaha dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan perjalanan propaganda di kota-kota di Jawa pada tahun 1906 untuk mendirikan *Studie fonds* bagi orang-orang Jawa yang akan membutuhkan biaya guna meneruskan pelajarannya. Sebelum mendirikan BU., Sutomo juga mengadakan perjalanan propaganda untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya suatu perkumpulan serta persiapan cabang-cabang perkumpulan pada murid-murid sekolah menengah bumi putra seperti Osvia dan sekolah-sekolah guru, dan tidak mengunjungi HBS dan sekolah-sekolah menengah lainnya yang sebagian besar muridnya adalah orang-orang Eropa dan Indo Eropa. Pembentukan BU. di Jakarta tersebut diikuti oleh murid-murid Osvia dan Sekolah Guru di Bandung, Magelang, Yogyakarta, dan Probolinggo. Cabang-cabang kemudian didirikan di sekolah-sekolah tersebut dan juga di sekolah-sekolah Pertanian dan Kedokteran Hewan. Di Yogyakarta didirikan cabang BU. yang terdiri atas pegawai negeri bangsa Indonesia dan bangsawan, terutama keluarga Paku Alaman.

Untuk membentuk Persatuan Umum Bangsa Jawa (*Algemene Javasche Bond*) kemudian diputuskan untuk mengadakan kongres BU. Cabang yang pertama di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Di dalam kongres ini ternyata golongan priayi (terutama dari BU. Cabang Yogya) berhasil memegang pengaruh yang terbesar dan menyisihkan golongan muda yang kebanyakan masih belajar sebagai murid Stovia. Dari golongan muda ini golongan Tjipto Mangkusumo dan Suwardi Suryaningrat adalah yang berhaluan lebih radikal.<sup>16</sup> Di dalam hubungan ini Bernhard Dohm mengutip pendapat dari Akira Nagazumi (*The Origin and the Earlier Years of Budi Utomo 1908 - 1967*) yang menyatakan bahwa pernyataan yang permulaan dari murid-murid Stovia adalah seirama atau sama dengan pendapat Tjipto Mangkusumo, ialah bahwa BU. suatu pergerakan protes sosial



menentang kedudukan golongan priayi yang lebih tinggi kedudukannya di dalam masyarakat Jawa. Tujuannya adalah "mengulurkan tangan kepada orang-orang biasa dan membebaskan mereka dapat lebih dipersenjatai di dalam perjuangan hidupnya dan dapat lebih berdiri tegak dalam menentang campur tangan dari orang luar". Karena pengalaman penunjukan bahwa "bantuan tak dapat diharapkan dari golongan priayi tinggi yang selalu tunduk kepada tekanan dari atas," maka mereka meletakkan harapannya kepada murid-murid sekolah/mahasiswa-mahasiswa sebagai "penasehat dari orang biasa". Pernyataan yang kedua menunjukkan sifat yang lebih nasional dari BU. karena disebutkan bahwa Persatuan Umum Bangsa Jawa yang akan dibentuk bekerja untuk "perkembangan yang harmonis dari tanah rakyat Hindia Belanda dan harapan untuk membentuk suatu persaudaraan nasional tanpa mengandung jenis bangsa, kelamin atau agama, serta bersedia untuk meleburkan dirinya didalam persekutuan yang lebih besar untuk dapat mencapai perkembangan, tidak hanya dirinya, tetapi juga bagi banyak golongan-golongan bangsa dan penduduk Hindia Belanda. Namun demikian meskipun terdapat dua pernyataan tersebut diatas, dalam dua bulan setelah pembentukannya, perkumpulan BU mendapat sambutan dari para bupati sehingga golongan muda kemudian dari kongres di Yogyakarta tersebut menyatakan bersedia untuk menyerahkan kepemimpinan kongres dan pengurus pusat kepada golongan tua.

Kongres BU. yang pertama tersebut kemudian memilih Raden Adipati Tirtokusumo, bupati Karaganyar (Kedu Selatan), seorang bupati yang berpikir maju, sebagai ketua pertama dari BU. Di antara anggota-anggota pengurusnya yang pertama terdapat dr. Wahidin Sudirohusodo (wakil ketua), Dwidjosewoyo (guru pada Sekolah Guru di Yogya, sekretaris) Raden Sastrasuganda (guru pada Sekolah Guru di Yogya, sekretaris). Sikap pihak pemerintah terhadap kongres tersebut dan terhadap pengangkatan seorang bupati sebagai ketua dari Pengurus Pusat BU. dapat dilihat dari pendapat De Graaff, sekretaris Pemerintah Pusat Hindia Belanda, yang disampaikan kepada residen Kedu bahwa pemerintah menyambut baik dan tidak berkeberatan terhadap pengangkatan bupati Karanganyar Raden Tumenggung Ario Kusumo,"seorang yang cakap dan maju juga sungguh bijaksana"

sebagai ketua BU. dan memberitahukan kepada kepada residen kedua supaya mengizinkan pengangkatan tersebut. Jika nanti bupati Karanganyar tersebut meminta nasihat dari padanya; sebab kata de Graaf," dari pergerakan itu hanya dapat diharapkan hasil-hasil bernilai dari pimpinannya sejak semula di letakkan di tangan yang baik".<sup>18)</sup> Lebih lanjut dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Van Heutz pada 30 Desember 1908, Kepala Kantor Urusan Bumiputra G .A.J. Hazeu, antara lain mengatakan tentang pembentukan BU. sebagai berikut.

Bukan saja segolongan kecil priyayi-priyayi yang tersebar di sana-sini, tetapi juga siswa-siswa tertinggi dari perguruan tinggi dari bumi putra (teristimewa Sekolah Dokter Jawa di mana Sudiro Husodo banyak mempunyai hubungan ) setuju sekali dengan cita-cita untuk berhimpun dengan tujuan, memajukan orang-orang Jawa. Sebagai hasil dari propaganda itu sekarang adalah dari pendirian Budi Utomo, baru saja di bulan Juli yang baru mendapatkan 600 anggota termasuk murid-murid Sekolah tersebut diatas murid-murid Sekolah tersebut diatas, juga dikalangan priyayi-priyayi (dokter-dokter Jawa, Mantri-mantri guru, dan beberapa bupati hampir semua dari Jawa Tengah). Segera terasa keinginan untuk mengadakan suatu pertemuan umum di mana sebanyak-banyaknya para anggota, perkumpulan hadir membicarakan bersama peraturan-peraturan administratif yang diperlukan dan menetapkan program umum atau rencana kerja. Hal ini menuju kepada kongres di Yogyakarta Oktober yang lalu. Kenapa kongres memberikan kesan yang istimewa, bangsa bumiputra dan bangsa Eropa terheran-heran bahwa pertemuan orang-orang Jawa dari berbagai daerah di Jawa dimana secara parlementer dibicarakan bersama kepentingan-kepentingan umum orang-orang Jawa terbukti sekarang mungkin kenyataannya ..... Selanjutnya segera ternyata bahwa pada beberapa acara-acara penting sekali-sekali tidak tercapai kesatuan pendapat .....Terang sekali dalam hubungan ini adanya fakta, bahwa beberapa bupati yang berjasa dan berpikir modern tidak terpilih dalam pimpinan pusat, sedangkan dari dua orang mereka, bupati Temanggung dan bupati Jepara, segera sesudah itu mengirimkan surat-surat selebaran, di mana mereka menyatakan telah mengambil inisiatif untuk pembentukan suatu perhimpunan bupati di Jawa dan Madura.

Para Bupati yang tidak begitu menyetujui tujuan BU. untuk me-  
majukan pendidikan kepada orang-orang biasa bangsa Jawa, memang  
telah merasakan suatu serangan terhadap kedudukan mereka. Mereka,  
seperti telah ditunjukkan oleh pendapat-pendapat yang bersifat maju  
dari Bupati Demak Hadiningrat, juga menyuarakan ketidakpuasan  
terhadap lambatnya pendidikan bagi golongan priyayi, tetapi  
mempertahankan pendapat bahwa pendidikan harus lebih dahulu  
diberikan kepada golongan priyayi sebagai pemimpin masyarakat bumi  
putera. Pada 27 Maret 1905, Bupati Temanggung Tjokroadi kusumo  
membentuk perkumpulan para bupati yang diberi nama "Sasanka  
Purnama" dengan tujuan untuk memperluas dan memajukan pendidikan  
di kalangan para bupati. Rumah bupati Temanggung yang mempunyai  
perpustakaan, sering menjadi tempat pertemuan dan ceramah yang  
dihadiri oleh golongan priyayi di daerahnya. Dokter Wahidin  
Sudirohusodo meminta dukungan Sasanka Purnama terhadap  
pembentukan *studi fonds* dan pernah memberikan ceramah tentang  
*theosofie*. Sasanka Purnama ini tidak merasa puas terhadap Pengurus  
BU., karena meskipun Pengurus Pusat BU. diketuai oleh Bupati  
Karanganyar Tirtokusumo, tetapi ia adalah seorang bupati yang maju  
dalam kariernya, bukan karena keturunan, melainkan berkat  
kemampuannya sendiri, dan anggota-anggota lain dari pengurus pusat  
terdiri atas orang-orang dari golongan priyayi rendah demikian juga  
keanggotaan BU. yang pada waktu itu (Oktober 1908) sudah berjumlah  
1200 orang. Ketidakpuasan tersebut dan penentangan mereka terhadap  
golongan radikal dari Tjipto Suwardi telah menyebabkan mereka pada  
tahun 1909 membentuk perkumpulan para bupati yang pada tahun  
1911 memakai nama "Sedio Mulyo".

### 5.2.2 *Tjipto Mangunkusumo dan Indische Partij*

Golongan muda di dalam BU. (Sutomo, Gunawan, Tjipto)  
mengundurkan diri dari kepengurusan BU. yang sejak BU. itu dikuasai  
oleh golongan mederat, seperti dr. Rajiman dan Dwidjosewoyo.  
Golongan moderat ini menginginkan agar BU. tetap meneruskan tugas  
dan sifat kebudayaan Jawa-nya. Sokongan juga diperoleh dari golongan  
bangsawan Jawa (terutama keluarga Pakualaman), pegawai rendah,  
dan priyayi rendah. Pada tahun 1911 Pangeran Notodirojo telah dipilih

menjadi ketua BU. Di dalam hubungan ini golongan bupati tak hanya merupakan golongan yang memisahkan diri dari BU. yang dianggapnya terlalu revolusioner, tetapi golongan radikal dari Tjipto - Suwardi juga menganggap BU. terlalu konservatif dan tidak sesuai dengan cita-cita mereka untuk membentuk persatuan dari semua golongan bangsa yang menghuni Hindia Belanda. Mereka kemudian mencari perkumpulan lain yang lebih memberi kepuasan dari BU. dan kemudian mereka tidak jauh menemukannya bersama-sama dengan E.F.E. Douwes Dekker, mereka merupakan tiga serangkai yang mendirikan Indische Partij pada tahun 1911.

Dokter Tjipto adalah putra tertua dari sembilan orang putra Pak Mangunkusumo, lahir di Ambahrawa, pada tahun 1886. Ayahnya adalah seorang guru agama Islam, kemudian memperoleh pendidikan Barat sehingga menjadi guru "Sekolah Bumiputera Kelas Dua" di Kota Ambahrawa, akhirnya menjadi guru kepala HIS. di Semarang dan menjadi anggota *gemeenteraad* di kota itu. Tjipto Mangunkusumo memasuki pendidikan di Stovia pada umur 13 tahun (1899) dan tamat pada umur 19 tahun (1905) di mana ia terkenal sebagai seorang murid yang cakap dan berjiwa kemerdekaan yang kuat. Ia mempunyai jiwa demokrat yang kuat dan selalu membela kepentingan orang-orang biasa (orang kecil) terhadap golongan priyayi terutama dalam lapangan pendidikan. Setelah tamat dari Stovia ia dipekerjakan sebagai dokter pemerintah dan ditempatkan di Banjarmasin, kemudian pindah ke Demak di mana ia makin mengenal atau ia mulai mengeluarkan kritiknya yang tajam terhadap masyarakat kolonial. Di dalam sebuah karangan dalam harian *De Locomotief*, ia mengecam pemerintah yang pada tahun 1907 menjadikan jabatan bupati sebagai suatu jabatan turun-temurun. Menurut Tjipto, ini bertentangan dengan keinginan politik etnis bahwa rakyat harus memerintah sendiri, pengetahuan dan kemampuan, dan bukan kelahiran, yang harus menjadi faktor yang menentukan.

Seperti diketahui, tujuan Indische Partij seperti dinyatakan dalam harian *Het Tijdschrift* tertanggal 15 Mei 1912, ialah Hindia bagi semua bangsa yang berdiam di Hindia, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan pemisahan dari Negeri Belanda. Dalam kongresnya di Bandung bulan Desember 1912, IP. beranggota 5000 orang serta

memilih Douwes Dekker, dr. Tjipto sebagai ketua dan wakil ketuanya. Tujuan IP. ialah “membangunkan kecintaan semua orang Hindia Belanda bagi tanah air Hindia, persamaan politik, memakmurkan tanah air Hindia dan mempersiapkan bagi kemerdekaan”.

### 5.2.3 *Sarekat Islam*

#### 5.2.3.1 *Pembentukan SI di Solo*

Latar belakang dari pendirian SI (SDI) adalah kebangunan di kalangan gedagan-gedagan Arab dan Sumatera yang kedudukan mereka tercantum karena kegiatan pedagang-pedangan Cina. Kejadian yang terjadi di daratan Cina telah mempengaruhi golongan orang Cina di Hindia Belanda untuk menuntut perbaikan dalam status sosial mereka, lebih-lebih setelah kedatangan orang Eropa. Pada permulaan abad ke-20, orang Cina telah berhasil memperoleh konsesi yang penting dari pemerintah kolonial. Konsesi itu antara lain adalah penghapusan *uratpass* (larangan) bagi orang Cina yang akan bepergian di luar daerah-daerah yang menjadi tempat tinggalnya (biasanya mereka berdiam di suatu bagian kota). Konsesi ini diberikan karena perdagangan Belanda membutuhkan orang Cina sebagai pedagang perantara di desa-desa. Konsesi lain yang diberikan oleh pemerintah ialah pendirian sekolah Cina-Belanda (HCS) oleh pemerintah pada tahun 1908, pembentukan perkumpulan pedagang Cina yang disebut *Siang Hwe* pada tahun 1901, dan pengakuan yang sama bagi orang Cina dalam kedudukan hukum dengan golongan orang Eropa, dalam hal hukum perdata dan hukum dagang, meskipun dalam hal hukum perdata mereka masih harus tunduk kepada hukum perdatanya sendiri. Namun demikian pada waktu yang bersamaan dengan pemberian konsesi tersebut pemerintah telah mengambil over beberapa perusahaan yang sebelumnya dipegang oleh orang Cina, misalnya rumah gadai, peminjaman kepada orang-orang (terutama) di desa dan perdagangan candu. Hal ini mengakibatkan berpindahnya modal orang Cina tersebut ke bidang perdagangan lain. Kegiatan orang Cina tersebut telah menimbulkan para pedagang Arab dan Sumatera untuk membentuk perkumpulan dan bersatu seperti orang Cina tersebut agar dapat membela hak mereka serta mengajukan tuntutan perbaikan kepada pemerintah.

Pendirian SDI (Serikat Dagang Islam) di Solo di dahului dengan didirikannya perkumpulan oleh pedagang-pedagang Arab dan Sumatera Barat karena mersakan ancaman terhadap kedudukan mereka dari pedagang Cina tersebut. Pedagang-pedagang Arab - Sumatra ini pada tahun 1904/1905 mendirikan perkumpulan dengan nama *Jamyat Khair*. Perkumpulan ini selain bersifat ekonomi juga mempunyai sifat nama Islam kuat. Sekolah-sekolah bagi orang Arab didirikan dan guru-guru dari Arab didatangkan. Pada tahun 1708 perkumpulan ini mendirikan perkumpulan pendidikan dari orang-orang Indonesia yang beragama Islam dengan nama *Sumatera-Batavia Alcheira*. Perkumpulan yang terakhir ini juga berhasil menarik minat dan pengikut dari orang Indonesia yang menjadi pengusaha atau pedagang.

Karena terpengaruh oleh kegiatan perkumpulan *Jamyat Khair* tersebut dan juga dari pembentukan perkumpulan Budi Utomo di Yogya, kebangunan kembali minat kepada agama Islam, dan ancaman yang semakin besar dari pedagang-pedagang Cina, maka haji Samanhudi, seorang pedagang batik di Solo telah merencanakan untuk mendirikan perkumpulan semacam itu bagi pedagang-pedagang Indonesia di Kota Solo, tetapi karena tidak mempunyai bakat serta waktu untuk melaksanakan maksud tersebut, maka ia membutuhkan seorang yang dapat mengordinisasi dan memimpin perkumpulan tersebut. Pilihannya jatuh pada seorang yang telah berpengalaman dalam pembentukan perkumpulan-perkumpulan pedagang, Raden Mas Tirtoadisurya, yang telah ikut serta mendirikan perkumpulan *Jamyat Khair* di Batavia. Ia (Tirtoadisuryo) adalah seorang putra dari golongan priyanto priyayi dan ayahnya seorang pegawai pemerintah di Jawa Tengah dan mendapat pendidikan di sekolah pamonapraja Stovia. Setelah selesai mendidik, ia menjadi pegawai rendah bumiputra, tetapi karena tidak puas terhadap pekerjaannya ia keluar dari pegawai negeri dan mencari pekerjaan di lapangan surat kabar. Dengan mendapat sokongan moral dan keuangan dari golongan-golongan pedagang-pedagang Arab - Sumatera di Batavia, ia mengirimkan surat kabar perdagangan bangsa Indonesia di Bandung yang diberi nama Medan Priyayi. Ia dikatakan telah menulis karangan-karangan dalam bahasa Melayu dan Jawa dan ia dianggap sebagai

“bapak pers bangsa Indonesia”. Karena surat kabarnya menunjukkan hasil, maka ia mendapat dukungan dari pedagang-pedagang Sumatera - Arab untuk mendirikan perkumpulan yang diberi nama “Sarekat Dagang Islamiyah” di Batavia pada tahun 1909, dan kemudian pada tahun 1911 mendirikan cabang perkumpulan di Bogor dengan nama “Sarekat Dagang Islam”. Kegiatannya ini telah menarik perhatian Haji Samanhudi sehingga Tirtodisurya kemudian diundang ke Solo untuk membentuk perkumpulan yang serupa di antara pedagang-pedagang di Kota Solo tersebut.

Dengan demikian cabang Sarekat Dagang Islam (SDI) telah didirikan oleh H. Samanhudi dan Tirtodisurya di Kota Solo pada akhir tahun 1911. Perkumpulan ini mempunyai dasar koperasi dengan tujuan untuk kemajuan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam yang merupakan agama yang terbesar dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu terjadi kesalah-pahaman antara H. Samanhudi dengan Tirtodisurya, sehingga mengakibatkan penerbitan surat kabar SDI di Solo bernama Sarotomo menjadi terbengkalai. Meskipun demikian, Tirtodisurya berhasil meluaskan perkumpulan-perkumpulan (SDI)nya yang ada di Batavia, Bogor dan Bandung. Surat kabar Sarotomo yang diterbitkan oleh SDI cabang Solo tersebut dicetak di Yogya dan diasuh oleh Tirtodisurya. Haji Samanhudi juga menyokong saudaranya Haji Amir untuk mendirikan cabang SDI di Kota Bandung.

Sementara itu di Kota Solo, gerakan SDI telah mempunyai anggota di kalangan rakyat, sehingga menyebabkan perkumpulan itu tidak semata-mata bersifat perdagangan seperti keadaan sebelumnya. Kota Solo pada waktu itu sangat merasakan kegiatan yang semakin maju dan misi agama Kristen dan kegiatan dari pedagang-pedagang Cina yang telah mencampuri bidang kegiatan perekonomian (ialah industri batik) yang selama ini masih dapat dikuasai oleh orang Indonesia. Keadaan ini mengakibatkan sikap permusuhan yang berkobar-kobar di antara orang Indonesia terhadap orang Cina, sehingga mengakibatkan terjadinya perkelahian. Orang Cina di jalan di serang dan toko-toko mereka dirusak. Keributan ini selain terjadi di Solo, juga terjadi di Surabaya. Karena pemerintah khawatir bahwa hal tersebut lambat-laun akan berubah menjadi gerakan yang menjadi gerakan yang melawan



pemerintah, maka residen Surakarta telah membekukan SDI Solo pada 12 Agustus 1912 dengan melarang menerima anggota baru dan melarang mengadakan rapat. Penggeledahan di rumah-rumah diadakan, tetapi karena tak terdapat tanda-tanda yang menentang pemerintah, maka pada 26 Agustus 1912 larangan tersebut dicabut.

Sementara itu seorang tokoh baru maju ke depan yaitu Raden Umar Said Tjokroaminoto yang mengadakan reorganisasi SDI cabang Solo, yang lalu terkenal dengan nama HOS Tjokroaminoto dan kemudian menjadi pemimpin SI yang paling besar. Tjokroaminoto dilahirkan pada tahun 1882 di dekat Madiun sebagai anak seorang wedana. Seperti juga Tirtoadisurya, ia pernah bersekolah di Osvia, tetapi kemudian tidak menyukai pekerjaannya sebagai pamogpraja (sebagai sekretaris patih Ngawi), sehingga ia keluar dari dinas pamongpraja dan menggabungkan diri pada pada pertunjukan wayang orang. Ia kemudian bekerja pada suatu perusahaan di Surabaya sambil belajar di waktu petang hari, sehingga kemudian dapat diterima sebagai seorang ahli kimia di suatu pabrik gula. Pada waktu itulah dihubungkan oleh H. Samanhudi untuk mereorganisasi SDI Solo. Berkat jasa Cokroaminoto, pada 10 September 1912 di Surabaya dikeluarkan/diumumkan Anggaran Dasar yang baru dari SDI Solo dengan nama yang baru, yaitu Serikat Islam. Dalam organisasi yang baru itu, Haji Samanhudi menjadi ketua Pengurus Besar SI dan HOS. Cokroaminoto menjadi komisaris Anggaran Dasar SI yang baru tersebut bertujuan (a) memajukan semangat bangsa Indonesia (b) memberikan bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran disebabkan bukan karena kesalahan sendiri (c) memajukan perkembangan spiritual (jiwa) dan kepentingan-kepentingan kehidupan bangsa (d) menghilangkan paham-paham yang keliru (salah pengertian) tentang agama Islam dan memajukan kehidupan keagamaan diantara rakyat Indonesia sesuai dengan hukum dan adat istiadat dari agama Islam. Ini semua akan dicapai dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesopanan masyarakat. Mengenai dan keanggotaan terdapat anggota biasa dan anggota yang terhormat.

Pada 14 September 1912, Anggaran Dasar SI yang baru ini



diajukan kepada pemerintah untuk dapat pengesahan hukum. Tujuan politik tak dicantumkan di dalam Anggaran Dasar tersebut karena pendirian partai politik pada waktu itu tidak diperbolehkan. Dengan demikian berdirilah perkumpulan Sarikat Islam di Solo yang kemudian memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah kebangunan Nasional bangsa Indonesia.

Mengenai perkembangan keanggotaan SI dapat disebutkan bahwa pada waktu SI didirikan mempunyai anggota yang berjumlah 60.000 orang, kemudian selama tahun-tahun pertama dari pertumbuhannya jumlah anggota SI ternyata telah berlipat ganda secara cepat sekali. Hal ini belum pernah dialami oleh partai-partai sebelumnya (BU dan Indsche Partij). Ini menyebabkan SI sering dianggap sebagai perkumpulan bangsa Indonesia pertama yang dapat mencapai golongan rakyat, terutama orang-orang yang berdiam di desa-desa. Di bawah ini terlihat perkembangan jumlah anggota SI di Jawa antara tahun 1912 - 1914.

#### **Keanggotaan SI di Jawa Tahun 1912 -- 1914**

April 1912 (Serikat Dagang Islam)	:	45. 000 orang
Agustus 1912	:	66.000 orang
Desember 1912 (Srikat Islam)	:	93.000 orang
April 1913	:	150.000 orang
April 1914	:	366.913 orang

Kongres SI yang pertama diadakan di Surabaya pada 26 Januari 1913 dipimpin oleh Cokroaminoto menerangkan bahwa SI bukan partai politik dan tidak beraksi melawan Pemerintah Belanda. Meskipun begitu dengan agama Islam sebagai lambang persatuan dan dengan penuh kemauan mempertinggi derajat rakyat. Kongres mencapai hasil yang besar dan cabang SI tersebar di seluruh Jawa sebagai banjir yang hebat". Di Jakarta saja jumlah anggotanya mencapai kurang-lebih 12.000 orang. Kongres kedua diadakan di Solo dalam kongres ini diputuskan bahwa SI hanya terbuka bagi bangsa Indonesia bukan pegawai negeri sehingga tidak mengubah sifat SI sebagai organisasi rakyat. Dalam hal ini pemerintah Kolonial tak senang melihat kekuatan SI yang semakin besar.

Permintaan SI untuk mendapatkan status hukum ditolak. Pada 30 Juli 1913 pemerintah menetapkan bahwa cabang-cabang SI di daerah

harus berdiri sendiri, tetapi pemerintah tidak berkeberatan bila cabang-cabang SI di daerah harus berdiri sendiri, tetapi pemerintah tidak berkeberatan bila cabang-cabang SI daerah akan bekerja bersama dalam badan perwakilan pengurus sentral.

Pada tahun 1915 di Surabaya didirikan Central SI yang mempunyai 30 cabang. Maksud pembentukan ialah untuk memajukan dan membantu SI di daerah-daerah untuk mengadakan hubungan kerja sama. Dalam kongresnya yang ketiga di Bandung pada bulan Juni 1916 (Kongres SI Nasional), jumlah anggota dikatakan mencapai 800.000, bahkan pada tahun 1919 ketika SI sedang memperhebat propogandanya untuk menentang kapital asing, jumlah anggota dikatakan meningkat sampai dua juta.

Perkembangan yang sangat cepat dari SI tersebut mungkin disebabkan oleh dua hal. Pertama, kenaikan jumlah orang Jawa yang melakukan ibadah haji ke Mekah sebagai akibat dari kebangunan mina terhadap agama Islam. Pada tahun 1895 terhadap seorang haji di setiap desa, tetapi pada tahun 1905 menjadi dua orang setiap desa, dan kemudian menjadi empat orang. Tahun 1911 adalah tahun haji akbar yang berarti lebih banyak orang melakukan ibadah haji. Hal ini ada hubungannya dengan perkembangan SI. Kebangunan Islam yang terjadi sejak tahun 1900 telah menyebabkan keanggotaan SI bertambah. Dengan jalan mempropagandakan agama Islam jumlah orang yang naik haji menjadi meningkat juga. Tabel dibawah ini menjelaskan hal tersebut.

#### Daftar Orang yang Naik Haji Tahun 1908 --1914

Tahun	dari Jawa	dari Indonesia
1908	6.814	10.300
1909	6.987	10.994
1910	8.198	14.234
1911	15.328	24.025
1912	10.902	18.353
1913	17.391	26.321
1914	19.784	28.427

Sebab yang kedua bahwa orang-orang desa tertarik untuk menjadi anggota SI terutama oleh karena terpengaruh akan kepercayaan mereka

terhadap Ratu Adil atau Herucokro. Mereka menganggap bahwa Pemimpin SI Tjokroamainoto adalah Ratu Adil yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keadilan kepada semua orang tetapi Tjokroaminoto sendiri yang menyadari adanya pengaruh tersebut berusaha untuk menghilangkan segi anti asing dari kepercayaan Ratu Adil dengan mengatakan bahwa ia dan SI tidak bersikap anti Pemerintah Belanda, tak bermaksud mengusir Belanda dari Indonesia dan akan berjuang dengan cara yang tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar SI. Haji Agus Salim yang setelah bergabung dengan SI berusaha keras untuk menghilangkan pengaruh kepercayaan Ratu Adil tersebut dari pengikut SI.

#### 5.2.3.2 *SI Cabang Semarang*

Pendiri SI cabang Semarang ialah Raden Muhammad Joesoep, seorang *Klerk* disalah satu Perusahaan trem dan Raden Soedjono, seorang sekretaris di kantor kabupaten kota Semarang pada masa itu (1912 - 1915) adalah suatu kota yang sedang berkembang pesat dan mengalami perubahan yang cepat dalam arti mengalami urbanisasi dan pertambahan kaum buruh yang cepat. Keadaan ini menyebabkan mudah timbulnya perasaan penentangan dan menjadi daerah yang subur bagi kegiatan golongan revolusioner kiri.

Pada tahun 1914/1915 ketika beberapa orang Belanda melakukan penekanan agar orang Indonesia yang menjadi pegawai pemerintah jangan memasuki SI Raden Soedjono dan Muhammad Joesoep tetap menjadi pemimpin SI Cabang Semarang, bahkan kemudian diangkat anggota pengurus pusat SI di Solo. Mungkin untuk memenangkan golongan radikal yang menguasai SI cabang Semarang dan yang memisahkan diri dari pusat SI yang dipengaruhi oleh suasana pedalaman yang feodal. Ternyata kemudian R. Muhammad Joesoep juga kehilangan pengaruhnya di dalam SI cabang Semarang yang semakin dikuasai oleh golongan radikal dan Sarekat buruh. Kedudukannya di Semarang kemudian digantikan oleh Semaun, yang berhasil menguasai SI cabang Semarang dan yang kemudian juga diangkat menjadi anggota Pengurus Pusat SI. Bagaimana tentang R. Muhammad Joesoef tidak diketahui selanjutnya.

Mengenai Semaun, sejak 1915 ketika ia berumur 19 th, ia ber sama-sama dengan temannya, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin

Prawirodirdjo telah mulai menggerakkan dan meluaskan pengaruh komunis dikalangan SI. Ia juga aktif didalam Serikat Buruh Kereta Api dimana ayahnya termasuk. Serikat buruh ini yang bernama VSTP (*Vereeniging Van Spoor en Tramwegpersoneel*) yang didirikan pada tahun 1908 di Semarang (sebelumnya pada tahun 1905 telah didirikan S. Bond). VSTP ini sejak tahun 1913 berada dalam Sneevliet yang datang di Jawa pada tahun itu juga sebagai seorang sekretaris pada suatu perkumpulan dagang. Sneevliet bersama teman-temannya mulai mempropagandakan paham komunis dan sosialis dikalangan orang Belanda dan orang Indonesia. Semaun yang menjadi muridnya, segera dapat menguasai VSTP dan SI cabang Semarang pada tahun 1916.

Pada bulan Mei 1914 di Semarang, Sneevliet dan kawan-kawan mendirikan ISDV (*Indische Social Democratische*) yang bertujuan menyebarkan paham Marx. Pada tahun 1921 Semaun mendirikan *Revolutionaire Vakcentral* yang berpusat di Semarang. Seperti diketahui, pembentukan *Revolutionaire Vakcentral* ini adalah untuk menyaingi PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) yang dibentuk pada bulan Desember 1919 di Jogja) dan yang dikuasai oleh lawan Semaun di dalam SI yaitu Salim, Suryopranto dan Abdul Muis yang menguasai Pengaruh Pusat SI *Revolutionaire Vakcentral* yang dipimpin oleh Semaun ini telah mencampuri pemogokan buruh yang terjadi di Surabaya pada bulan Agustus 1921, dan Semaun tidak ditunjuk untuk berunding dengan kaum majikan supaya majikan jangan meneruskan niatnya untuk menurunkan upah buruh.

Pada bulan Agustus 1920 di tubuh Semarang - Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) timbul perselisihan perubahan, dan VSTP yang dikuasai Semaun mengirimkan ultimatum direksi. Direksi menyanggupi untuk memberikan syarat kerja yang sama dengan yang diberikan oleh SS kepada pegawai-pegawainya, tetapi ini ditolak oleh VSTP yang mengajukan permintaan supaya gaji buruh dinaikkan dan waktu kerja 8 jam sehari. Sekonyong-konyong di luar campur tangan VSTP timbul pemogokan diseluruh jalan kereta api Semarang-Cirebon tersebut. Karena tindakan VSTP, maka pemogokan dapat dihentikan. Dalam Kongres VSTP bulan Maret 1923, diusulkan supaya diadakan pemogokan, tetapi Semaun menganggap bahwa lebih baik ditempuh jalan bermusyawarah lebih dahulu. Setelah perundingan pada 12 April

1923 tidak berhasil menyetujui usul mengadakan pemogokan, bersama-sama Darsono yang pada waktu itu baru kembali dari luar negeri.

Perselisihan PPKB dengan Revolutionaire Vakcentral dapat dikurangi dengan dibentuknya persatuan dari Serikat Buruh di Yogya dan Semarang itu dengan nama PVH (*Persatuan Vakbonden India*) di Madiun pada 3 September 1922. Pada rapat sentral PVH di Surabaya 29 - 30 April 1923 dan rapat VSTP di Semarang 6 Mei 1923, Semaun menerangkan bahwa pemogokan harus dimulai pada saat ia ditangkap. Ketika pada 8 Mei 1923 Semaun ditangkap meledaklah pemogokan besar dari pegawai dan buruh kereta api. Tindakan pemerintah yang keras dengan jalan mengurangi hak bersidang dan mengadakan hukuman terhadap propaganda pemogokan (artikel-artikel baru dalam UU Hukum Pidana) menyebabkan pemogokan menjadi berhenti setelah 3 minggu berjalan. Pada bulan Agustus 1923 Semaun diasingkan ke luar negeri.

Pada 21 Juli 1925 timbul lagi pemogokan di Semarang pada buruh-buruh percetakan, sebab terdapat pegawai yang diberhentikan secara tidak adil. Pada 1 Agustus 1925 terjadi pemogokan Rumah Sakit Umum Negeri, disebabkan angkuh dan keras dari kepala-kepala bangsa Belanda. Juga terjadi pemogokan-pemogokan pengangkutan di *Semarangse Setoombooten Prauwenveer* oleh seribu orang buruh. Pemimpin-pemimpin seperti Darsono, Aliarcham, dan Marjohan ditangkap dan diasingkan, sehingga pemogokan berhenti.

Sebagai akibat pemberontakan tahun 1926, VSTP menjadi rusak sama sekali. Sebagai penggantinya pada bulan Juli 1927 didirikan PBST (Perhimpunan Beamte Spoor dan Tram) yang tidak mencampuri politik sehingga anggota yang bertambah menjadi 5000 orang.

Pada bulan Mei 1920, ISDV diubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil ketua. Orang Eropa anggota ISDV yang tidak setuju kepada Sneevliet, telah memisahkan diri dari ISDV dan membentuk perkumpulannya sendiri yang disebut *Indische Sociaal Democratische Partij* atau ISDP. Salah seorang dari kaum sosialis modern ini ialah D.M.G. Kock yang lebih erat hubungannya dengan golongan HA. Salim - Abdul Muis di

dalam SI Pada bulan Desember 1920 PKI menggabungkan diri dari pada *kominterm* dan pada bulan Januari 1922 Semaun sebagai wakil dari Jawa mengunjungi kongres Buruh Timur Jauh serta mengunjungi Shanghai dan Moskow. Pada bulan Desember 1921 kongres pertama PKI diadakan di Semarang. Anggota-anggota bangsa Belanda mendekati serdadu-serdadu Belanda (Sneevliet), serdadu angkatan laut (Bradsteder) dan pegawai negeri bangsa Belanda (Ir. Baars dan van Burink), sedangkan anggota bangsa Indonesia akan memasuki SI untuk dapat mendekati rakyat banyak. Setelah semua diasingkan ke luar negeri, pimpinan PKI jatuh ketangan Darsono. Pengurus Pusat di Semarang, antara lain terdiri atas Semaun, Sneevliet, Darsono, Suyono, Kadarisman, Margono, Tan Malaka, Suradipa; Sugiri, dan lain-lain.

Pada tahun 1919 - 1920 Semaun berhasil mengumpulkan dan dari rakyat (satu sen - dua sen atau berupa barang, seperti bata) untuk membangun "gedung rakyat Indonesia" di Semarang (dibangun pada tahun 1919 dan selesai pada tahun 1920). Gedung ini dipergunakan untuk mengadakan rapat SI pada malam hari, dan sebagai sekolah pada waktu siang hari. Pada tahun 1926 - 1927 gedung ini ditutup, tetapi dipergunakan lagi untuk keperluan rapat-rapat pada tahun 1930 oleh panitia yang terdiri atas PBI, Partindo PNI-Baru.

Mengenai pengaruh Semaun dengan SI cabang Semarang terhadap SI dapat dikatakan bahwa hal ini telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan di dalam tubuh SI. Di dalam SI yang menentang pengaruh Semaun dan penyebaran paham komunis ialah Abdul Muis dan Haji Agus Salim, sedangkan Pemimpin SI Tjokroamainoto berusaha keras untuk tetap dapat mempersatukan SI. Pengaruh ini terlihat dengan bergeraknya SI kearah haluan yang lebih radikal seperti dalam kongres SI yang kedua bulan Oktober 1917 di Batavia yang mengambil keputusan untuk melawan kapitalisme yang "haram" (asing). Keputusan lain di dalam kongres itu ialah tuntutan terhadap pemerintah sendiri (*zelfbestuur*) sebagai tujuan perjuangan terhadap politik penjajahan. Meskipun suara yang semakin terdengar dikalangan SI untuk menentang kapitalis yang "haram" tersebut disuarakan atas nama sosialis Islam, tetapi nyata juga pengaruh dari tuntutan-tuntutan semakin radikal dari golongan Semaun

- Darsono. Di dalam kongres SI tersebut Semaun juga menuntut supaya SI tidak ikut serta dalam komite *Indie Werbaar* dan dalam *Volksraad* yang akan dibentuk, tetapi usul Semaun tersebut tidak diterima.

Mengenai kerusuhan anti Cina di antara anggota-anggota SI dengan orang-orang Cina yang terjadi di Solo pada bulan Juli 1912, dapat diturunkan sebagai berikut. Kerusuhan dimulai dengan perkelahian yang terjadi di antara dua orang anggota pasukan Mangkunegaran dengan segorombolan orang-orang Cina. Pada hari berikutnya terjadi penyerangan oleh pasukan berkuda Mangkunegaran terhadap kampung-kampung Cina. Selama beberapa minggu Kota Solo dilanda perkelahian antara golongan kedua bangsa. Laporan-laporan resmi pemerintah menyatakan bahwa kanak-kanak terlibat dan tersiar kabar bahwa orang Belanda akan diusir ke luar Jawa untuk digantikan oleh orang Cina. Kerusuhan di Solo itu kemudian meluas ke bagian utara daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Misalnya di Semarang terjadi kerusuhan di Kampung Brondongan yang terletak didalam Kota Semarang, anggota SI telah dapat mengumpulkan uang untuk membuka sebuah toko. Akibatnya seorang pedagang Cina di kampung tersebut yang bernama Lien Mo Sing kehilangan banyak pembeli (langganan) sehingga sangat marah terhadap orang SI. Menurut laporan residen Semarang tertanggal 7 April 1913, Lien Mo Sing telah melemparkan sepotong daging babi sebesar sebuah langgar di kampung tersebut. Selain itu juga beberapa orang Cina telah bertindak sangat propokatif misalnya dengan memukul kaleng-kaleng ketika sedang diadakan sembahyang di langgar tersebut. Di dalam kerusuhan kerusuhan dan perkelahian yang kemudian terjadi, lima orang Cina telah terluka dan salah seorang diantaranya meninggal beberapa hari kemudian.

Kerusuhan anti Cina kemudian meluas ke daerah keresidenan Rembang. Di Tuban kerusuhan meletus ketika pekerja-pekerja menolak untuk bekerja pada seorang Cina karena pembayaran terlalu rendah. Kepala desa telah dipukul karena perlakuannya yang keras terhadap pekerja-pekerja tersebut. Kemudian anggota-anggota SI di tempat itu bertindak untuk menyelesaikan kerusuhan tersebut suatu tindakan yang sebetulnya menjadi urusan pemerintah. Suatu kerusuhan lain terjadi



karena dibunuhnya kucing wasiat oleh seorang Cina yang telah berjanji untuk membayar ganti kerugian, tetapi segerombolan besar orang dengan membawa senjata telah berkumpul di muka rumah orang Cina tersebut dan melakukan penyerahan. Pejabat pemerintah diancam akan diserang jika mereka melindungi orang Cina tersebut. Akhirnya pejabat Pemerintah mengalah dengan memerintahkan dua orang Cina bernama Lie Hi Tjong diperbolehkan pergi dengan tanpa gangguan, mungkin disebabkan orang Cina tersebut telah menganut agama Islam.

#### 5.2.4 *Pergerakan Partai Nasional Indonesia (PNI)*

Setelah PNI didirikan di Bandung pada 4 Juli 1927 oleh Ir. Soekarno dari *Algemene Studieclub* dan yang bertujuan Indonesia Merdeka, maka di Semarang pada tahun 1927 dibentuk cabang PNI dengan para pemimpinnya, Jatmika, Moch. Sopiana, Sumardi, Kadarusman, Supardi dan Atmosantosa. Meskipun PNI cabang Semarang itu mengalami intaian dari polisi Belanda, namun anggotanya semakin bertambah banyak. Rapat umum yang pertama diadakan telah dikunjungi oleh ribuan rakyat yang menyerukan "Indonesia Merdeka" dan mengibarkan bendera merah putih dengan lambang "kepala banteng". Ketika terjadi penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI (Ir. Soekarno, Maskun, Supriadinata, Gatot Mangkupraja) pada 29 Desember 1929, PNI cabang Semarang juga mengalami penggeledahan dan penangkapan.

#### 5.2.5 *PBI-Parindra*

Di Semarang pada tahun 1927 didirikan cabang PBI (Partai Bangsa Indonesia) yang dipimpin oleh Sudewa Notowijaya, Sutia, Mulyadi, Rasid, Kasbun, Suwodo, Dawud, Padmosukamo. Setelah terjadi Fusi PBI dengan BU menjadi Parindra pada tahun 1935, di Semarang didirikan pula cabang Parindra yang dipimpin oleh Sudewa, Notomijaya, Ruslani dan Gitorisyo.

#### 5.2.6 *Partai Indonesia (Pertindo) dan PNI-Baru*

Pada tahun 1928 didirikan Partindo cabang Semarang, yang dipimpin oleh S. Ciptoatmosantoso, Woro Reksokusumo, Sukirman, Dwijo Sutanti, Amat Taris, Wiryadi dan Karno Kecil. PNI (Pendidikan



Nasional Indonesia) cabang Semarang berdiri pada tahun 1928 dengan pimpinan oleh Kasbun, Sumardi, Dawud, Sa'an, Harjasumatra, Marpani, Yahya, Yasin, Padmosukarno, Surowindo, Pasinan, Supardi, Reksowinoto, Slamet, Prayinto. Para pemuda yang bersumpah kepada PNI mempersatukan diri dalam "Suluh Pemuda Indonesia" (SPI) cabang Semarang yang mempunyai pemimpin-pemimpin seperti Soebanoe, Panoet, Soetarman, Sarju, Sumandi, Abdul Sumarsono, Made Tastie, Sugriwa, Suhud, dan Mulyasidi. Para Pemuda yang bersifat kepada Partindo mempersatukan di dalam Perpri (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia), yang dipimpin oleh ;Cipto Lolos, Soetomo Jauhar Arifin Sudi Mulyono dan Datirin.

### ***5.3 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat***

#### ***5.3.1 Keadaan Umum Perekonomian Abad Ke-20***

Pada tahun 1900 seluruh Hindia Belanda telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Belanda. Pelawanan-perlawanan dan peperangan-peperangan lokal telah berakhir, sehingga perdamaian yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda itu disebut juga *Pax Nederlandica* yang dapat disamakan dengan *Pax Romana* atau *Pax Mongolica*. Segala perdamaian tersebut berdasar penakluknya, persekutuan, dan perjanjian. Salah satu manfaat dari adanya *Pax Nedelandica* tersebut ialah kemajuan lalu-lintas diantara daerah di Indonesia. Berbagai daerah yang terdahulu tak dapat berhubungan dengan daerah luar (terisolasi) menjadi terbuka. Penanaman kekuasaan pemerintah kolonial di daerah luar Jawa setelah tahun 1900 disebut juga "Pembukaan" daerah-daerah secara umum.

Mengenai keadaan perekonomian secara umum dapat dituturkan sebagai berikut. Pada akhir abad, antara tahun 1878 - 1894, telah terjadi "depresi agraris" yang berlangsung di seluruh dunia. Pada waktu depresi tersebut, ekspor dari Jawa mengalami pukulan yang berat. Waktu itu gula dan kopi mengalami penurunan harga yang menyolok. Harga gula dari Jawa dalam tahun 1877 - 1884 jatuh dari f.19- menjadi f.9 - per kilogram. Juga harga kopi merosot sampai separuhnya. Tambahan pula penanaman gula dan penanaman kopidiserang hama dan penyakit dengan hebat. Karena itu dalam tahun 1884 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat.

Kira-kira tahun 1900 depresi itu dapat diatasi dan harga naik lagi, sehingga produksi ekspor mengalami kemajuan lagi. Malahan mulailah ekspansi produksi ekspor yang sangat hebat, sehingga setelah tahun 1900 dapat dikatakan mulai periode baru yang berlangsung hingga penduduk Jepang pada tahun 1941. Dalam periode itu dapat dibedakan dua masa ; tahun 1900 - 1930 memperlihatkan ekspansi ekonomi yang besar, tetapi dalam tahun 1930an hal itu hampir berhenti sama sekali sebagai akibat dari depresi dunia. Sesudah akhir tahun 1930an terjadi sedikit perbaikan sebagai akibat dari persenjataan kembali yang mendahului Perang Dunia II.

Pertambahan ekspor Indonesia dalam akhir abad ke-19 dan selama abad ke 20 berjalan sejajar dengan bertambahnya lalu-lintas dunia pada masa tersebut. Dalam masa itu, Indonesia semakin terlibat dalam rumah tangga dunia. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan pula, bahwa ekspor Indonesia dalam pertengahan abad ke-19 (periode Tanam Paksa) sebagian terbesar datang dari pemerintah Kolonial, yang dalam stelsel Tanam Paksa tersebut pemerintah bertindak sendiri sebagai pengusaha besar. Pada tahun 1856, ekspor sudah mengalami perubahan, yaitu 2/3 bagian datang/berasal dari pihak pengusaha partikelir. Setelah stelsel Tanam Paksa dihapuskan, bagian pemerintah berkurang dengan cepatnya. Dalam tahun 1885, bagian pemerintah dalam ekspor telah turun menjadi 1/5 dari ekspor Indonesia dan pada akhir abad ke-19. merosot lagi menjadi 1/10 dan dalam abad ke-20 ini menjadi hanya 1%. Sebaliknya, dalam bagian terakhir abad ke-19 timbulah ekspor oleh perusahaan-perusahaan swasta Barat juga dalam abad ke-20 mulailah tampil produksi ekspor rakyat.

Dalam dasa warsa pertama abad ke-20, terjadi perkembangan yang penting dalam produksi ekspor, baik di bidang pertanian, maupun dibidang pertambangan, baik di Jawa maupun di daerah luar Jawa dan tidak hanya meliputi perusahaan besar Barat saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan kecil rakyat Indonesia. Selama abad ke-19, pertanian ekspor sebagai tanam paksa. Setelah tahun 1900 perkebunan mengalami perluasan. Penanaman tebu diperluas dan tetap terbatas di Pulau Jawa. Banyak penanaman baru seperti karet dan kelapa saswit, yang diperluas juga ke daerah pulau Jawa. Juga pertanian dan perdagangan rakyat setelah tahun 1900 makin berkembang, teristimewa di

daerah luar Jawa, misalnya munculnya penanaman karet rakyat di Sumatera dan Kalimantan. Dalam dasa warsa ketiga abad ke-20, perindustrian menjadi semakin bertambah penting. Dalam hasil ekspor yang terpenting disamping nila. Kemudian penanaman nilai menjadi hilang sama sekali karena saingan bahan warna sintetis.

Pada akhir abad ke-19, penanaman gula mengatasi kopi. Pada waktu itu penanaman kopi terancam keruntuhan karena disaerang penyakit kemudian diganti dengan kopi arabica (kopi Jawa) dan kopi robusta. Dalam periode in (akhir abad ke-19, munculah penanaman terbuka. Dengan demikian hasil ekspor terpenting pada waktu itu ialah gula, kopi, dan tembakau. Setelah tahun 1900 penanaman tebu mengalami perluasan secara besar-besaran, yang terus berlangsung sampai tahun 1930, sehingga pada tahun kedua puluh (1920) gula tetap merupakan tanaman yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*arbeids - intensif*). Pada tahun 1900 timbullah hasil-hasil baru. Penanaman teh, lada, dan kapok diperluas dan produksi karet, sabut, minyak kelapa sawit dimulai. Dengan demikian pertanian ekspor menjadi diperluas dan makin bermacam ragam.

Gula yang pada akhir abad ke-19 dan selama 30 tahun pertama abad ke-20 merupakan hasil ekspor terpenting setelah tahun 1930 terdesak dari kedudukannya. dalam masa depresi tahun 1930an penanaman tebu berkurang menjadi separuhnya dan dalam tahun 1937 gula menduduki tempat kelima dalam ekspor (5% dari seluruh ekspor). Ekspor yang terpenting ialah, karet, minyak bumi, kopra dan timah. Tabel-tabel berikut akan lebih memperjelas uraian di atas.

**Nilai Ekspor dari Beberapa Hasil Ekspor yang Penting (dalam jutaan gulden)**

1856	36	29	4	1	-	-	-	-	-
1860	30	32	4	1	-	-	-	-	-
1870	44	32	3	4	2	-	-	-	7
1880	60	49	3	16	2	-	-	-	10
1890	37	51	-	32	2	2	-	-	9
1900	29	74	-	91	4	10	-	5	24
1913	23	157	-	91	22	55	24	113	37
1920	52	1060	-	170	40	93	194	310	65
1930	36	254	-	59	70	77	173	190	58
1939	12	78	-	27	57	29	195	159	59

**Produksi dari Beberapa Hasil Pertanian  
(dalam ribuan ton)**

1840	54	58	-	-	-	-	-
1850	74	102	-	-	-	-	-
1860	83	130	1	-	-	-	-
1870	90	172	2	-	-	-	-
1880	64	221	2	-	-	-	-
1890	28	423	4	-	-	3	-
1900	54	744	7	94	-	6	-
1913	39	1466	24	234	5	8	-
1920	70	1577	48	182	79	10	1
1930	99	3077	72	375	296	12	50
1939	121	1579	83	537	383	2	244

**Hasil Ekspor yang Terpenting Menurut Urutan Kepentingan  
(dengan Bagian Masing-masing Dalam %  
Dari Seluruh Nilai Ekspor)**

Tahun	Hasil No. I		Hasil No. II	
1856	Kopi	(36)	Gula	(29)
1885	Gula	(45)	Kopi	(10)
1895	Gula	(36)	Kopi	(24)
1900	Gula	(29)	Tembakau	(12)
1913	Gula	(23)	Minyak bumi	(17)
1920	Gula	(48)	Minyak bumi	(14)
1930	Gula	(21)	Minyak bumi	(16)
1940	Karet	(40)	Minyak bumi	(19)

Juga sejak tahun 1900, lalu-lintas dalam negeri semakin berkembang dengan cepat. Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 dibuat jalan darat, jalan kereta api, dan pelabuhan modern. Pengangkutan dengan mobil timbul setelah Perang Dunia I, dan penerbangan setelah tahun 1930. Di Jawa, jalan kereta api dibuat karena alasan ekonomi, yaitu untuk mengangkut hasil ekspor dan perusahaan ke pelabuhan. Karena itu, mula-mula timbul jalan kereta

api setempat atau jaringan kereta api setempat, misalnya jalan kereta api Bogor - Jakarta untuk pengangkutan teh dan kopi (1864), jalan kereta api Semarang - daerah-daerah Kerajaan (1862) akan membuka daerah yang paling sulit dicapai dan menjadi pusat yang sangat menguntungkan bagi penanaman-penanaman perkebunan partikelir (kedua jalan kereta api tersebut kurang lebih sepanjang 250 km baru dapat selesai pada tahun 1873). Jalan kereta api dibuat untuk pengangkutan gula dari Jawa Tengan dan Jawa Timur (pada tahun 1875 pemerintah mulai membuat jalan kereta api Surabaya - Malang untuk membuka daerah-daerah perkebunan gula).

Kebutuhan pengusaha perkebunan akan pengangkutan dengan keretaapi sangat mendesak, sehingga antara tahun 1900 - 1913, meskipun telah terdapat jalan kereta api kepunyaan pemerintah sepanjang 500 km, diusahakan juga perkembangan yang lebih cepat dari jalan trem kepunyaan partikelir, yang pada umumnya adalah jalan kereta api ringan yang dihubungkan dengan jalan kereta api induk. Kebanyakan jalan dan jarang setempat ini di hubungkan satu sama lain sehingga dalam tahun 1914 orang telah dapat naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya.

Di samping itu, pelabuhan baru juga dibuat pada akhir abad ke-19 untuk keperluan lalu lintas laut, antara lain Tanjung Priok (1872 - 1893), Cilacap (1886) *Emmahaven* dekat Padang (1893), dan Belawan Deli (1890). Hal ini mengakibatkan rakyat Indonesia lebih intensif masuk ke dalam lalu-lintas uang. Di daerah luar Jawa hal ini mengakibatkan karena bertambahnya hasil tanaman rakyat untuk perdagangan(perkebunan orang Barat di luar Jawa hanya terdapat di Sumatera Timur dan Sumatera Selatan). Di Jawa karena kekurangan tanah yang belum dibuka (banyak tanah telah ditanami sejak tahun 1870 dengan jalan sewa *erpacht*/jangka panjang oleh perusahaan Barat, yang disebut penanaman gunung), tak dapat timbul lagi penanaman untuk perdagangan besar rakyat. Di sini (Jawa) seperti telah disinggung di atas bertambahnya lalu-lintas uang terutama disebabkan oleh diperluasnya pertanian perusahaan (penanaman pendek) terutama penanaman tebu yang diusahakan di atas tanah penanamann yang sangat banyak menggunakan tenaga kerja, serta banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membayar sewa tanah, upah dan uang sebagai

injeksi telah mendorong masuknya lalu-lintas uang di desa-desa. Juga banyaknya modal luar negeri (asing) yang ditanam di Indonesia (Jawa) pada abad ke-20 yang menurut perbandingan adalah lebih besar dari di India atau Cina, sehingga pengaruh Barat di Indonesia sebelum perang jauh lebih besar dari pada di India. Banyaknya perusahaan pertanian ekspor Eropa di Jawa tersebut telah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah orang Eropa (Belanda) yang berdiam di Indonesia(Jawa), sehingga pengaruh Barat di Indonesia(terutama Jawa) selama abad ke-20 telah lebih mendalam dari pada di India. Furnivall yang mengenal keadaan India, Birma dan Indonesia berdasarkan penyelidikannya, menyebutkan bahwa dalam tahun 1930 terdapat lapisan atas yang luar biasa dari perusahaan besar Barat di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di Asia yang termasuk daerah kolonial (jajahan) atau setengah koloni, maka pengaruh Barat Jawa mendalam sekali.

### 5.3.2 *Akibat Pengaruh Barat Terhadap Masyarakat Jawa (Proses Modernisasi)*

Di atas sudah dikatakan, bahkan pengaruh Barat yang secara berangsur-angsur meresap ke dalam pergaulan hidup orang Jawa, mula-mula hanya dalam lingkungan feodal, tetapi kemudian meluas ke masyarakat desa. Kontak orang Eropa dengan masyarakat Jawa berangsur-angsur beralih pada raja-raja kepada bupati-bupati kemudian kepada kepala desa dan akhirnya kepada orang desa sendiri. Dalam pada itu kehidupan ekonomi dilepaskan dari sifat feodal dan di modernisasikan atas dasar kontrak. Ekonomi feodal tahun 1800 diganti dengan rumah tangga lalu-lintas. Karena perubahan kemasyarakatan itu lama-kelamaan secara besar-besaran di bantu oleh orang Indonesia, maka untuk tahun-tahun kemudian perkataan pengaruh Barat lebih baik diganti dengan "proses permodernan".

Dalam hubungan ini, Prof. Burger sependapat dengan Prof. Supomo, bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengajaran Barat, adalah suatu faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan pembaruan/ perubahan di desa-desa. Namun demikian menurut Prof.Burger, lalu-lintas uang adalah yang lebih kuat pengaruhnya di desa. Pengajaran Barat pada masa sebelum perang yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, memang mempunyai pengaruh yang besar

terhadap para muridnya meskipun pengajaran ini hanya mencapai jumlah yang kecil sekali (jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Jawa atau Indonesia). Pengaruh pengajaran itu praktis hanya mencapai lingkungan di atas desa. Desa sendiri tak dapat dicapai dengan pengajaran Barat berbahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sebaliknya faktor yang terpenting yang telah membawa pembaharuan di desa ialah bertambahnya lalu-lintas uang. Lalu-lintas uanga ini memang kurang intensif dalam mempengaruhi penduduk dari pada pengajaran Barat, tetapi lalu-lintas uang telah lebih lama (lebih dahulu), sehingga telah lebih lama mempengaruhi penduduk. Lalu-lintas uang adalah faktor terpenting yang melepaskan individu dari ikatan masyarakat desa. Sebagai akibat maka desa-desa, kemurahan hati dalam perhubungan diganti dengan dipertajamnya hubungan *zakelijk*, sikap tolong menolong berkurang, dan orang mengeluh tentang bertambahnya sikap masa bodoh dari orang kaya terhadap orang miskin di desa-desa dan berkurangnya kesukaan menjamu orang, sehingga misalnya dalam urusan kredit dan hukum, sikap tidak mengenal dan *zaken zijn zaken* menggantikan kerukunan orang Jawa yang dahulu penuh kesabaran dan selalu menyelesaikan pertikaian dengan perundingan yang ramah-tamah. Mengenai sampai beberapa meresapnya pengaruh lalu-lintas uang tersebut dalam kehidupan desa serta akibatnya bagi kehidupan orang di desa, terdapat banyak variasi, misalnya penyelidikan yang telah dilakukan Prof. Dr. H. Burger di desa Distrik Tayu dan Jakenan di Kabupaten Pati (Jawa Tengah 1920 - 1929). Jakenan dan Rembang yang berdekatan letaknya mempunyai banyak persamaan masih terikat pada tradisi yang kuna dan hanya terdapat sedikit lalu-lintas uang. Di daerah ini masih terdapat desa yang terletak jauh di hutan jati. Jika dibandingkan dengan keadaan pada kira-kira tahun 1800 hanya mengalami sedikit perubahan. Di dalam desa ini segala sesuatunya masih diorganisasikan atas dasar persaudaraan dan perhambaan, tolong-menolong masih mempunyai arti yang penting dan selain perdagangan pasar, hubungan dengan dunia luar sedikit sekali, sehingga desa-desa itu terutama masih mencukupi kebutuhannya sendiri.

Sebaliknya Distrik Tayu telah mengalami perubahan akibat pemasukan lalu-lintas uang. Distrik Tayu mempunyai penanaman

kapok yang penting serta perusahaan Eropa, dan tanahnya lebih subur dari pada Distrik Jakenan. Di distrik ini lalu-lintas perdagangan, pengangkutan dan kredit memegang peranan penting. Sebagian besar penduduk tidak mementingkan pertanian, tetapi mencari penghasilan dari perusahaan lain dan ini tidak dilakukannya sebagai pekerjaan pokok. Dalam hal ini pertanian, juga telah banyak terjadi perubahan. Meskipun penjualan dan penggadaian tanah dilarang oleh hukum adat, tetapi menyewakan tanah dengan bagi hasil diperbolehkan. Akibatnya hanya separuh dari sawah di Distrik Tayu yang dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Di Desa Tayu dan Margoyoso hanya 26% dan 33% dari pemilik sawah yang mengerjakan tanah sendiri, bahkan banyak desa persentasinya lebih rendah lagi. Dengan demikian tanah pertanian Distrik Tayu ini telah masuk dalam lalu-lintas uang dengan hebatnya. Hasil pertanian di Tayu banyak sekali yang dijual, kerja tolong menolong sebagian besar diganti dengan kerja upah.

Mengenai perdagangan, dapat dikatakan bahwa perdagangan dalam negeri di atas tarap desa, sampai pada permulaan abad ke-20 hampir seluruhnya diusahakan orang-orang Cina. Impor dan ekspor hampir seluruhnya berada di tangan orang-orang bukan Indonesia, tetapi lambat-laun dalam abad ke-20, timbullah perusahaan-perusahaan Indonesia yang lebih besar yang menjulang di atas suasana desa. Sejak tahun 1930 perdagangan orang-orang Cina di Jawa Barat dan Jawa Timur mengalah saingan kuat dari perdagangan perantara bangsa Indonesia. Akibat orang Cina harus menyerahkan perdagangan terutama buah-buahan kepada orang Indonesia. Di kalangan perusahaan Indonesia timbulah fungsi pengusaha dan pembentukan modal. Terutama dalam tahun-tahun 1930an golongan pengusaha Indonesia yang disebut golongan menengah, mengalami perkembangan yang berarti. Golongan menengah bangsa Indonesia ini ialah golongan pengusaha Indonesia yang memimpin suatu perusahaan dalam perdagangan atau industri, yang semata-mata dibentuk atas dasar kontrak dan telah terlepas sama sekali dari ikatan desa. Para pedagang dan pengusaha industri yang berkecimpung dalam peredaran uang ini sebelum perang jumlah tak seberapa. Namun kemudian bertambah. Anggota golongan menengah ini tidak berasal dari kaum bangsawan, tetapi timbul dari rakyat serta penduduk kota tingkat rendahan. Di Jawa



tengah, mereka tidak termasuk golongan terpendang. Di sini kaum bangsawan memandang kaum menengah ini sebagai rakyat biasa (lanjutan di atas) dan mereka diperlakukan sama dengan orang kecil atau orang dusun walau pun mereka itu mempunyai kemampuan ekonomi yang besar.

Menurut beberapa ahli, dalam waktu sebelum Perang Dunia I justru kegiatan berusaha dari bangsa Indonesia tersebut paling jelas tampak berkembang di Tanah Sunda, Jawa Barat. Koperasi-koperasi misalnya, di daerah inilah paling maju. Meskipun di Jawa Tengah terdapat beberapa golongan pengusaha yang besar, tetapi corak kegiatan tadi tidaklah begitu umum. Juga Jawa Timur rupa-rupanya ketinggalan jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Demikian pula ketika perang berakhir, kegiatan dalam perusahaan itu lebih nyata kelihatan di Jawa Barat dari pada di Jawa Tengah atau Jawa Timur, sehingga dapat dikatakan bahwa Jawa Barat menduduki tempat nomor satu, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pengaruh kebudayaan Jawa dan cara hidup kebangsaan dan bentuk kehidupan komunal di desa-desa lebih kuat di Jawa Tengah dari pada di Jawa Barat atau Jawa Tengah. Di daerah Sunda dan Madura, pengaruh kebudayaan Jawa jauh lebih lemah dari pada di Jawa Tengah di mana paling kuat terasa pengaruh tingkatan masyarakat feodal yang keras. Di sini dapat di kemukakan beberapa contoh, misalnya dalam hal industri tenun yang mendapat kemajuan pesat (terutama di Priangan) setelah pada tahun 1927 Lembaga Tekstil di Bandung mendapatkan suatu tenun yang lebih baik dan dapat menghasilkan tujuh kali sebanyak alat tenun desa yang lama. Industri tenun ini adalah atas inisiatif bangsa Indonesia sendiri, tetapi kemudian timbullah desakan dari bangsa Cina dalam perusahaan ini. Dalam tahun 1940, 34% dari industri tenun terdapat di Keresidenan Priangan, 18% di Cirebon, 4% di Kendiri, 12% di Surabaya, 9% di Sala. Dalam bidang industri batik yang pada tahun 1930an mengalami banyak kesulitan, seluruhnya dikuasai oleh bangsa Indonesia dan orang Cina dapat terdesak sepenuhnya oleh bangsa Indonesia dalam industri ini. Separuh dari industri batik ini terdapat di Yogya, Solo pada tahun 1941 meliputi 289 buah perusahaan bangsa Indonesia dengan menghasilkan 10 juta gulden setiap tahunnya. Juga berbagai macam industri kecil lain menunjukkan kemajuan yang pesat.

Misalnya industri rokok kretek (Kudus) antara tahun 1933 - 1939 (yang dikerjakan dengan tangan) meningkat dari 14,2 hingga 18,8 juta gulden, dan produksi sigaret (yang dikerjakan dengan tangan) meningkat dari 1 juta menjadi 11,2 juta gulden. Penghasilan dari rokok yang dikerjakan dengan mesin dari tahun 1936 - 1939 naik dari 19,7 menjadi 37 juta gulden. Produksi payung di Tasikmalaya antara tahun 1934 - 1940 bertambah dari 330.000 buah menjadi 1.800.000 buah, sedangkan di Juwiring (Klaten) pada tahun 1940 menghasilkan 400.000 buah payung.

Tentang akibat pengaruh barat terhadap susunan kemasyarakatan desa, dapat disebutkan bahwa terhadap golongan penguasa (para bupati kebawah/golongan priyai) pengaruh Barat tersebut mengakibatkan kemunduran kekuasaan mereka baik dimata rakyat maupun dimata pegawai bangsa Eropa. Kemudian kedudukan penguasa-penguasa pribumi tersebut telah dimulai sejak abad ke-19.

Pada tahun 1870 politik liberal pemerintah kolonial antara lain bertujuan hendak membebaskan masyarakat Jawa dari pengaruh feodal, karena hal ini diperlukan bagi hubungan kerja - kontrak, sehingga mengakibatkan kaum feodal kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka. Pada tahun 1900 mereka telah kehilangan sebagian besar dari kekuasaannya dalam lapangan kebudayaan, kehakiman pemerintahan militer, dan perekonomian, demikian juga tanda-tanda kebesarannya telah dibatasi oleh pemerintah kolonial. Keadaan tersebut menjadi semakin buruk lagi pada abad ke-20 karena pemerintah mengambil tindakan juga terhadap cara penghormatan terhadap mereka. Berbagai cara penghormatan harus ditiadakan. Menurut pemerintah, pemberian hormat sedemikian adalah hina sekali bagi mereka yang telah timbul rasa harga dirinya. Kepada pegawai pemerintah bangsa Eropa ditetapkan bahwa mereka boleh membiarkan adat ini berlangsung tetapi tak boleh melindungi atau memperkuatnya. Pembebasan dari ikatan feodal yang dipelopori oleh bangsa Eropa itu dengan kemauan sendiri dilanjutkan oleh bangsa Indonesia. Di kalangan bangsa Indonesia sendiri, mulai timbul kebencian terhadap sistem perhambaan feodal. Tantangan ini terutama dimulai di kota-kota dan pada pegawai yang telah mendapat pendidikan Barat. Penghormatan dan penghambaan feodal yang sedemikian itu dirasakan sebagai suatu yang merendahkan.

Hampir semua gerakan nasional bangsa Indonesia dalam abad ke-20 merupakan gerakan anti feodal. Pangeran Djodjodiningrat pada tahun 1924 di dalam *Volkraad* mengemukakan tentang kemerosotan prestasi dari para pegawai pangrehpraja bangsa Indonesia.

Cara hidup bupati-bupati juga mengalami perubahan. Mereka tidak lagi menggunakan payung jika hendak bepergian, sedangkan kuda dan tempat sirih telah digantikan dengan mobil dan tempat rokok. Dalam pertemuan tidak hanya orang Eropa dan para bupati yang duduk di kursi, tetapi juga pegawai-pegawai di bawahnya sampai kepala desa. Dengan demikian pada abad ke-20 pelbagai macam paham modern telah memasuki kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, seperti paham kepentingan bersama, demokrasi, kemajuan, dan kedudukan manusia yang sama.

#### **5.4 Kehidupan Seni Budaya**

##### **5.4.1 Keadaan Pendidikan**

Jawa Tengah dapat merasa bangga karena salah seorang putrinya telah menjadi pahlawan nasional dan perintis kebangunan nasional yakni R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada 21 April 1879 sebagai putra kelima dari Raden Mas Adipati Ario Sostroningrat, bupati Jepara, salah seorang bupati yang mula-mula menerima pendidikan Barat. Kartini menerima pendidikan sampai tamat ELS, tetapi tidak berhasil melanjutkan pelajaran di HBS Semarang karena tak diizinkan ayahnya. Ia kemudian mengadakan surat-menyurat dengan teman-temannya, diantaranya terdapat beberapa orang Belanda terpelajar seperti JH. Abendanon, direktur Departemen Pendidikan (1900—1905), pemimpin Partai Sosial Demokrat Van Kol, Penginjal Daerah Toraja N. Adriani. Surat-suratnya menunjukkan persahabatan-nya dan pembebasan kaumnya dari keterbelakangan pendidikan. Namun demikian ia juga mengecam pejabat Belanda yang tidak menaruh perhatian terhadap rakyat kebanyakan, melainkan hanya menaruh hormat kepada para bupati, serta menghambat perluasan pendidikan orang bumiputra (Indonesia) karena dianggap membahayakan kedudukan pemerintah mereka. Surat Kartini tersebut diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1911 atas usaha Tuan JH. Abendanon dan istri. Pada tahun 1923 surat tersebut dicetak untuk keempat kalinya dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Perancis. Maksud penerbitan tersebut ialah untuk mendapatkan dana

mendirikan Sekolah Gadis dan Guru Perempuan di Indonesia. Pada tahun 1921 didirikan *Kartini Fonds* di Den Haag untuk maksud tersebut. Sejak itu didirikan Sekolah Kartini dengan pengantar bahasa Belanda di Semarang, Jakarta, Malang, Bogor, dengan pengantar bahasa daerah, di Cirebon, Rembang, Pekalongan, Indramayu, dan Surabaya. Surat-suratnya tersebut dan pendirian sekolah-sekolah Kartini menunjukkan bahwa ia adalah seorang perintis kebangunan kaum terpelajar bangsa Indonesia.

Menurut Bernhard Dahm dalam bukunya, beberapa surat Kartini terutama yang mengecam pemerintah kolonial menunjukkan pengaruh dari pamannya RMAA. Hadiningrat, bupati Demak. Ia adalah seorang Bupati yang besar pengaruhnya di antara bupati-bupati bangsa bumi putra pada akhir abad ke-19 tersebut. Ia sering diminta pendapatnya oleh pemerintah kolonial, dan pada tahun 1893 pemerintah menunjuk dia untuk mengadakan penyelidikan terhadap sebab-sebab dari kemunduran martabat (wibawa) para bupati di mata rakyat dan untuk memberikan saran-saran guna memperbaikinya. Di dalam laporan hasil penyelidikannya, yang diterbitkan pada tahun 1899 (pada tahun yang sama Van Deventer juga menerbitkan karangannya tentang Hutang Budi), Hadiningrat mengatakan bahwa kesalahannya terletak pada kurang terbukanya kesempatan bagi pendidikan orang Jawa. Ia mengatakan bahwa para bupati yang tak berpendidikan Barat tak pernah diperhatikan oleh pengusaha Belanda sehingga menyebabkan mereka kehilangan wibawa dan menumbuhkan sikap membudak dan merendahkan diri. Ia menganjurkan agar di masa depan pendidikan sekolah diuji dengan ujian-ujian, dan memberi kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian ia telah menekankan unsur-unsur yang baru dalam pengangkatan pegawai pamongpraja, ialah hak dan pendidikan, bukan semata-mata keturunan dan darah. Ia juga mengatakan bahwa hak untuk memimpin bangsa, tidak harus dibatasi pada para bangsawan (bupati) saja, meskipun sebagai seorang bupati ia menganjurkan pembaharuan dari atas. Bernhard Dahm lebih lanjut mengutip sebagian dari laporan penyelidikannya, sebagai berikut.

"Bagaimana seseorang dapat menolong dirinya, jika ia dilahirkan di sebuah rumah/gubug di desa, dan bukan di rumah kabupaten?  
.... Karena ini saya setuju untuk menunjukkan kepada orang-orang bumiputra bahwa adalah suatu hak bagi mereka walaupun bukan

keturunan bangsawan untuk mencapai pangkat yang tertinggi dalam administrasi kepegawaian dengan jalan pendidikan, usaha yang besar dan pengabdian kepada pekerjaannya. Tetapi tidak berpendapat bahwa hal itu perlu (dapat) dijalankan pada masa sekarang, ketika rakyat belum mempunyai kesempatan yang jelas, untuk memajukan golongan yang bukan bangsawan, karena kemajuan semacam ini masih bertentangan dengan pendapat-pendapat orang bumiputra tentang apa yang dianggap benar.

Keadaan pendidikan sekitar tahun 1900 dapat diuraikan sebagai berikut. Sampai tahun 1900 pendidikan di Hindia Belanda tidak mengalami kemajuan yang berarti. Pada tahun 1850 didirikan sekolah guru dan mencapai jumlah 562 sekolah (lebih setengahnya diusahakan oleh pihak swasta) sedangkan penduduk P. Jawa waktu itu sebanyak 28 juta.

Pada tahun 1893 sekolah bumiputra pemerintah (*Inlandsche School*) di Jawa dapat dibagi dua golongan, golongan sekolah bumi putra klas satu untuk memberi pendidikan kepada anak-anak golongan priyayi, dan sekolah bumiputra klas dua, dan Gubernur Jendral Van Heutz mengusahakan pembentukan sekolah-sekolah desa (1906) yang biasanya lebih rendah dan harus dibiayai oleh desa sendiri. Adapun sekolah rendah untuk orang-orang Eropa ELS (*Europeesche Lagere School*) juga menerima orang-orang Indonesia secara terbatas asal mengerti bahasa Belanda. Menarik untuk dicatat bahwa pada tahun 1900 semakin banyak orang Indonesia yang memasuki sekolah ELS meskipun ini merupakan beban keuangan berat bagi keluarganya. Tabel berikut ini dapat memperjelas uraian di atas.

**Murid-murid ELS pada Tahun ± 1900**

Tahun	Murid anak Eropa	Murid anak Timur	Murid anak Indonesia	Beragama Kristen dalam murid Indonesia	Jumlah Sekolah
1890	11.421	148	808	338	144
1890	12.690	185	1.135	391	1591
1900	13.592	325	1.545	557	169
1905	15.105	525	3.725	1.046	184

Pemerintah menjadi khawatir akan makin besarnya jumlah orang Indonesia yang memasuki ELS, karena itu pada tahun 1906 pemerintah memasukkan bahasa Belanda didalam kurikulum sekolah. Bumi putra kelas sat dan memperpanjang masa belajar dari lima menjadi tujuh tahun, serta disamakan ijazahnya dengan sekolah rendah Eropa. sekolah - sekolah yang kemudian didirikan (1914) disebut *Hollands Inlandsche School* (HIS) yang memberi kesempatan kepada anak Indonesia untuk menerima pendidikan yang lebih tinggi tanpa melalui Sekolah Eropa. Kemudian juga didirikan (*Meer Uitgebreit Lager Onderwijs*) (MULO) yaitu pendidikan Dasar yang diperluas semacam Sekolah Menengah Pertama. Anak Indonesia yang telah tamat ELS dapat melanjutkan ke *Hogere Burger School* (HBS) yang berada ditiga kota (Batavia, Semarang, Surabaya) dengan masa belajar lima tahun dan yang menuju kejenjang Universitas. Pada tahun 1900 hanya sedikit anak Indonesia yang memasuki HBS, tetapi jumlahnya semakin banyak pada tahun berikutnya. Populasi murid HBS tahun 1885-1905 dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Murid-murid HBS pada Tahun ± 1990**

Tahun	Murid-murid Eropa	Murid-murid bangsa Timur Asing	Murid-murid bangsa Indonesia
1885	353	6	2
1890	354	-	5
198	558	3	4
1900	549	4	13
1905	577	16	36

Anak Indonesia yang telah tamat HBS tidak selalu dapat melanjutkan pelajaran atau mencari pekerjaan seperti teman-temannya bangsa Eropa. Mereka tak dapat menduduki jabatan-jabatan pegawai pamongpraja Eropa seperti controleur, asisten residen, dan sampai tahun 1920 tak terdapat universitas di Hindia Belanda. Hanya anak-anak orang kaya, misalnya anak-anak para bupati, yang dapat melanjutkan pelajarannya di Eropa. Akibat dari kepincangan itu banyak dari mereka yang mendapat pekerjaan yang tak ada

hubungannya dengan pelajarannya di sekolah dahulu. Salah seorang dari mereka itu ialah HA. Salim yang mendapat angka tertinggi, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajaran di Negeri Belanda, sehingga harus puas menjadi penerjemah dan klerik di suatu perusahaan pertambangan sebelum bergabung dengan Sarekat Islam.

Pada tahun 1900, orang-orang Indonesia yang telah tamat dari ELS, dapat melanjutkan pelajarannya di tiga jurusan sekolah. Pertama sekolah dokter Jawa atau Stovia (*School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* yaitu sekolah untuk mendidik dokter-dokter bumiputra) yang merupakan perombakan beberapa kali dari Sekolah Mantri Epidemi sejak didirikan pada tahun 1851. Pendidikan di Stovia berlangsung selama tiga tahun masa persiapan dan enam tahun pelajaran kedokteran penuh. Sekolah ini hanya untuk orang bumi putra. Orang Indo-Eropa atau Belanda yang ingin menjadi dokter dapat memasuki NIAS (*Nederlandsche Artsen School*) yang didirikan di Surabaya pada tahun 1913. Kedua sekolah pamongpraja bumi putra atau OSVIA (*Opleiding School Van Inlandsche Ambtenaren*, yaitu sekolah latihan untuk pegawai-pegawai bumi putra) yang pada tahun 1910 terdapat tiga buah di Jawa dan tiga buah di luar Jawa (Bandung, Magelang, Probolinggo, Bukittinggi, Tondano, Makasar). Osvia adalah perubahan dari Sekolah Kepala (*Chief's School* atau *Hoofdenschool*) yang didirikan pemerintah pada tahun 1879 untuk mendidik anak-anak bupati tentang jabatan-jabatan dalam kepegawaian) untuk disesuaikan kurikulumnya dengan sekolah-sekolah lanjutan lain. Masa belajar di Osvia adalah lima tahun. Ujian untuk memasuki Osvia sering disebut ujian *Klein-Ambtenaar*. Margono Jojo Handikusumo yang pernah menjadi murid Osvia antara tahun 1907--1911 dan kemudian menjadi juru tulis pamongpraja dan pegawai *Volkscdietwezen* menulis sebagai berikut.

Ujian "klein ambtenaar" hanya untuk membedakannya dari ujian "groot ambtenaar" yaitu untuk mereka yang sudah tamat HBS (Hogere Burger School) dan masih harus meneruskan pendidikannya selama dua atau tiga tahun untuk korps pamong praja Eropa. Pendidikan ini merupakan persiapan untuk studi Indologi di Leiden. Ujian Klein Ambtenaar itu hanya terdiri dari bahasa Belanda dan berhitung, yang tingkatnya sama dengan kelas tertinggi Sekolah Rendah Eropa. Sekolah ini kemudian diubah namanya menjadi Mosvia (Middelbare Opleidingschool Voor Inlandsche Bestuurambtenaren, yaitu Sekolah



Pendidikan Menengah untuk Pejabat-Pejabat Bumi putra Pamong praja, yaitu lama pendidikan lima tahun.

Ketiga, ialah lima sekolah guru yang disebut Kweekschool, dua di antaranya terdapat di luar Jawa, yang lama pelajarannya enam tahun untuk mempersiapkan pendidikan guru-guru bagi sekolah pemerintah, sedangkan untuk menjadi guru di sekolah desa cukuplah jika mempunyai ijazah Sekolah Bumiputra Klas Satu. Selain itu pendirian Sekolah HIS (pada tahun 1914) juga membutuhkan permintaan akan adanya guru yang terdidik, yang sebagian dipenuhi dengan mendatangkan guru-guru Belanda dari Eropa dan sebagian dengan mendirikan Sekolah Guru Lanjutan di Purworejo pada tahun 1914.

Gambaran keadaan pendidikan tersebut di atas dapat memberikan kesan tentang adanya golongan elite terpelajar bangsa Indonesia yang masih sangat terbatas jumlahnya pada tahun 1900 (jika dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Jawa-Madura pada waktu itu yang berjumlah 28.386.000 orang)

Namun demikian sekolah lanjutan yang terdapat pada waktu itu seperti Stovia, Osvia, dan Sekolah Guru ternyata telah menjadi persemaian dari pemimpin pergerakan kebangunan nasional bangsa Indonesia dibedakan dengan golongan priyayi atau elite fungsional, meskipun keduanya di mata rakyat biasa dianggap termasuk sebagai golongan priyayi. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan perbedaan sifat sekolah Stovia, Sekolah Guru dengan Osvia. Stovia merupakan sekolah dokter bumi putra yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari suku Jawa saja, melainkan juga dari daerah di luar Jawa (Sumatera, Sulawesi, Maluku) sehingga di antara mereka mudah tumbuh rasa persaudaraan sebangsa ditambah lagi bahwa mereka sebagian besar berasal dari anak golongan priyayi rendah, misalnya anak guru, pegawai, juru tulis, agen polisi, bangsawan melarat, dan petani. Sebaliknya, Osvia adalah sekolah calon priyayi pegawai pamongpraja yang kebanyakan berasal dari golongan priyayi tinggi dan yang kelak menduduki jabatan di pamongpraja bumi putra. Banyak pemimpin pergerakan nasional berasal dari tamatan Stovia, Osvia atau Sekolah Guru.

Robert Van Niel lebih lanjut mengatakan, "membatasi sekolah pamongpraja bumi putra (Osvia) hanya bagi anak golongan priyayi



tinggi adalah mudah, tetapi dengan didirikannya sekolah kesehatan (kedokteran) sekolah hukum tingkat menengah, dan sekolah lainnya yang lebih tinggi dari sekolah tingkat dasar Eropa, maka diperlukan untuk menarik murid-murid (mahasiswa) yang berasal dari tingkat lebih rendah dari golongan priyayi tinggi. Mahasiswa ini, setelah dapat menyelesaikan studinya, mulai menentang pembatasan dalam bidang pendidikan yang berlaku pada waktu itu (demikian juga pembatasan sosial yang selalu terdapat pada hubungan kolonial). Mereka menuntut agar syarat yang berdasarkan kelahiran dihilangkan dari lembaga pendidikan Barat ..... Golongan intelektual mendapatkan alat mereka yang paling tepat di dalam perkumpulan Budi Utomo dan organisasi ini menjadi pemimpin dalam menetapkan tuntutan untuk memperluas pendidikan Barat kepada semua orang yang diinginya.”

## ***5.5 Perkembangan Agama di Jawa Tengah (1900–1942)***

### ***5.5.1 Agama Kristen Protestan di Jawa Tengah (1850–1942)***

Pada masa VOC di Jawa sudah terdapat beberapa jemaat Kristen di kota-kota pantai, seperti Jakarta (1619), Semarang (1753), Surabaya (1785), Cirebon, dan Banten. Di Jakarta, Semarang, dan Surabaya di samping jemaat Eropa, terdapat juga jemaat berbahasa Melayu, tetapi pada masa VOC tidak diadakan penyebaran Injil kepada orang Jawa, sehingga selama hampir 200 tahun kekuasaan VOC di Indonesia (1619–1815) tak terdapat pengaruh apa pun dalam usaha penginjilan di Jawa. Ketika VOC diganti oleh kekuasaan Pemerintah Belanda, gereja Kristen Protestan di Indonesia dipersatukan dalam satu gereja (Gereja Protestan Indonesia) dan dinyatakan sebagai Gereja Negara (1835), tetapi pemerintah masih merintangi penyebaran Injil di kalangan orang Jawa, karena mereka khawatir bahwa hal tersebut akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan, lebih-lebih setelah terjadinya Perang Diponegoro (1825–1830) dan usaha pemerintah untuk mencari keuntungan dengan kultuurstelsel.

Pada tahun 1831 buku Perjanjian Baru yang dicetak dalam bahasa Jawa terjemahan Briicher telah disita oleh pemerintah. Dalam tahun 1847 Gubernur Jenderal Van Rochussen berkata kepada DS. Van Rhijn

bahwa , pemberitaan Injil yang bebas mau tak mau harus mengakibatkan suatu perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Jawa sebenarnya merupakan suatu lapangan tertutup bagi pekabaran Injil sampai tahun 1850. Barulah pada tahun 1850 usaha pekabaran Injil di Jawa (dan Jawa Tengah) mendapat izin dari pemerintah. Para pekabar Injil dari (NZG) *Nederlands Zendelinggenootschap* yang sebetulnya diperuntukkan bagi pulau Jawa, telah dikirimkan ke Indonesia Timur. Pada waktu itu di Jawa hanya Lembaga Alkitab Belanda yang boleh menempatkan seorang ahli bahasa, ialah Gercke di Surakarta. Satu-satunya pekabar Injil di Jawa Briicher yang ditempatkan oleh NZG di Semarang sebagai pendeta Gereja Protestan tetapi kemudian ia pindah ke pedalaman keliling dari desa ke desa. Pada tahun 1847--1849 terjadi perubahan di Surabaya yang kemudian mendapat penginjil bernama Jellesma, ditempatkan di Surabaya yang kemudian mendapat penginjil bernama Jellesma, ditempatkan di Surabaya yang kemudian mendapat izin untuk memasuki daerah pedalaman Jawa.

Di Jawa Tengah masa permulaan penyebaran Injil terjadi antara tahun 1850--1900. Pertobatan yang pertama bukan dilakukan oleh pekabar-pekabar Injil, tetapi oleh beberapa orang Kristen yang mengambil inisiatif sendiri. Di Kota Tegal atas usaha Residen AAMN Keuchenius, dapat ditempatkan dua penginjil di kota tersebut dengan mendapat bantuan dari "Perhimpunan untuk Pekabaran Injil di Dalam dan di Luar gereja". Kedua penginjil tersebut berasal dari golongan Mr. Anthing di Jakarta, dan di Tegal dapat mengumpulkan 40--50 orang penduduk. Usaha Keuchenius menarik kedatangan seorang pekabar Injil yang diutus oleh NGZV ke Tegal, ialah Vermeer. Ia berhasil mendirikan suatu jemaat kecil di Kota Tegal dan bersama-sama dengan salah seorang penginjil dari kedua penginjil yang telah datang sebelumnya, ia melayani jemaat Kristen di Tegal sejak tahun 1861. Kemudian ia mendirikan sebuah rumah piatu di Muara Tua Tegal yang diharapkan menjadi tulang punggung gereja di kemudian hari.

Di Jawa Tengah Selatan, usaha pekabaran Injil dimulai dengan pertobatan dua orang wanita Indo - Belanda, yaitu Nyonya Oostrom Philips di Banyumas dan iparnya Ny. Philipis Stevens di Purworejo. Kedua wanita itu kemudian mengumpulkan pelayan-pelayannya serta

sekelompok orang Jawa yang menaruh minat terhadap agama Kristen dalam rumah mereka masing-masing, bahkan Ny. Philips berusaha membawa Injil masuk ke desa-desa dengan memperkerjakan beberapa orang penginjil Jawa, misalnya Abisai, Furub, dan Sadrach, yang berasal dari golongan Mr. Anthing dan Paulus Khaw Tek San. Mereka sangat giat menyebarkan Injil dan berhasil menarik banyak orang untuk menjadi Kristen, tetapi mereka tidak diizinkan melakukan pembaptisan. Karena itu pembaptisan yang pertama dilakukan di gereja Protestan Purworejo. Sebetulnya jemaat Kristen di Purworejo hanya melayani orang Belanda saja karena mereka menolak melayani terus orang Kristen Jawa. Orang Kristen Jawa yang pertama dari daerah Banyumas dibaptiskan di Semarang oleh seorang pekabar Injil dari NZG yang bernama Haezoo. Karena Haezoo tidak mendapat izin untuk melakukan pembaptisan itu (2 orang laki-laki dan 7 wanita) harus berjalan kaki dari Banyumas ke Semarang 42 jam lamanya. Pembaptisan dilakukan pada 10 Oktober 1858.

Haezoo kemudian menganjurkan kepada Vermeer di Tegal supaya ia meminta izin untuk bekerja di Jawa Tengah bagian selatan. Sesudah mendapat izin, Vermeer memasuki daerah Jawa Tengah bagian selatan dan dapat membaptiskan sejumlah besar orang Jawa. Pada tahun 1873 sudah dapat dibaptiskan lebih-kurang 2.000 orang Jawa, tetapi kemudian orang-orang ini menjadi pengikut Sadrach, sehingga bukannya Vermeer yang mendapat pengaruh atas mereka, melainkan Sadrach.

Tentang Sadrach dapat dituturkan sebagai berikut. Sebagai penginjil ia bertempat di Karangjoso juga menjadi pusat gerakannya selama selama berpuluh-puluh tahun. Pada masa puncak hidupnya (1889) ia memimpin jemaat yang meliputi 3.000 jiwa yang terdiri atas 21 jemaat dengan 241 jiwa di Keresidenan Banyumas, 4 jemaat (341 jiwa) di Tegal, 6 jemaat (515 jiwa) di Keresidenan Pekalongan, 9 jemaat (1013 jiwa) di Keresidenan Yogyakarta. Ketika masih muda ia bernama Radin, ia berhubungan dengan guru-guru ngelmu Jawa dan pernah masuk pesantren di Rembang. Ia kemudian bertemu dengan penginjil Haezoo sehingga ia tertarik untuk masuk Kristen. Atas nasehat dari Tunggul Wulung, ia pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Mr. Anthing, di mana ia tinggal selama dua tahun di rumah Mr,

Anthing . Pada 14 April 1867 ia dibaptiskan di Gereja Sion di Jakarta. Setelah itu ia bekerja sebagai penginjil di Jawa Barat, tetapi kemudian ia kembali ke Jepara (1867) dan menemui Tunggul Wulung (1868), dan terus ke Surabaya dan Mojowarno. Pada tahun 1869 ia diminta oleh beberapa pengikut Tunggul Wulung untuk bekerja bersama-sama dengan Ny.Philips di Purworejo. Setelah Ny. Philips meninggal, ia menjadi pemimpin rokhani jemaat Kristen di Jawa Tengah bagian selatan, dan mengubah namanya menjadi Suropranoto (pahlawan ketertiban). Ia berusaha mencari bentuk ke-kristenan Jawa, dan tak menyukai Kristen Londo, di dalam jemaatnya adat istiadat Jawa sangat di utamakan, bahkan jemaat-jemaatnya dapat dianggap merupakan jemaat-jemaat ngelmu. Rapat-rapat bulanan diadakan pada Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon dan doa-doa tertentu diucapkan ketika menyembelih sapi, kambing atau ayam, atau ketika mandi di sumur dekat ladang. Dengan sendirinya Sadrach dan jemaatnya tidak mau mengikuti pejabat-pejabat gereja yang diakui oleh pemerintah. Sebaliknya, juga pemerintah maupun gereja tidak mengakui Sadrach dan jemaatnya. Memang keadaan di Jawa Tengah pada waktu itu dan usaha Sadrach mempunyai sifat yang istimewa dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan apa yang terjadi di daerah lain. Selanjutnya gerakan Sadrach menempuh jalan perkembangan sendiri. Pada tahun 1898 gerakan Sadrach bergabung dengan bidat "kerasulan" dan Sadrach diangkat sebagai Rasul Jawa. Jalan ini merupakan jalan satu-satunya supaya ia diangkat pemerintah, tetapi Sadrach tidak mempunyai hubungan dengan gereja lain sehingga mereka tidak dapat berkembang, karena mereka menolak sekolah, pendirian rumah sakit, dan usaha penghasilan lain dan hanya membatasi lingkungannya pada orang-orang desa yang buta huruf saja. Baru setelah Sadrach meninggal keadaan dapat berubah. Pengganti Sadrach ialah Jatham anak angkat Sadrach, bekas murid sekolah guru Kristen di Purworejo. Ia kemudian mencari jalan untuk bekerja sama dengan Pekabaran Injil. Sejak tahun 1930 beratus-ratus orang dari gerakan Sadrach telah masuk ke dalam jemaat Kristen yang biasa.

Sejak tahun 1902 usaha pekabaran Injil di daerah Jawa Tengah bagian selatan dilakukan juga oleh pekabar Injil dari gereja *Gereformeerd* dari Negeri Belanda. Di dalam hal ini gereja

*Gereformeerd* menetapkan bahwa satu-satunya tujuan dalam usaha pekabaran injil ialah untuk memuliakan nama Allah, sehingga usaha pembantu disamping usaha pokok tersebut. Ini menyebabkan terbentuknya jemaat-jemaat yang merupakan umat umat yang dikuduskan oleh Allah, yang memupuk kepercayaan perseorangan dan tidak boleh sesat ke dalam mistik Jawa atau kekristenan Jawa yang samar-samar. Karena itu sangat ditekankan usaha untuk menanam serta memupuk gereja-gereja yang setempat. Organisasi umum (seperti sinedo) tak memiliki hak penuh seperti sinedo lain di Indonesia. Jika sudah dapat dilantik pejabat gereja setempat atas tanggungan jemaat setempat itu sendiri, gereja itu diakui sah. Dalam hal ini dititik beratkan kepentingan tata gereja sebagai tulang punggung dari gereja. Dalam usaha pekabaran Injil, maka tiap gereja setempat bertanggung jawab sendiri atas usaha pekabaran Injilnya, sehingga sebagai akibatnya gereja setempat di Belanda berhubungan langsung dengan Purworejo, Amsterdam dengan Yogya, Rotterdam dengan Purbolinggo, Zeeland dengan Magelang, dan sebagainya. Di sini kelihatan bahwa pekabaran Injil di Jawa Tengah Selatan lebih dahulu berlangsung di kota-kota. Usaha Pembantu pekabaran Injil dibidang pendidikan dan sosial dikerjakan dengan giat. Menurut statistik pada tahun 1937 di Jawa Tengah bagian selatan telah didirikan oleh gereja *Gereformeerd*, 159 sekolah dasar, dengan 15.622 murid, 50 Sekolah HIS/HIK dan MULO dengan murid  $\pm 10.000$  orang, 9 buah rumah sakit dengan  $\pm 3.000$  tempat untuk para pasien dan tiap tahun  $1\frac{1}{2}$  juta orang mendapat perawatan di klinik. Dalam hak tata gereja, pada tahun 1920 terdapat sembilan gereja setempat yang sudah berdiri sendiri dengan majelis gereja masing-masing. Pada tahun 1926 telah dibaptiskan seorang pendeta Jawa yang pertama yaitu Sopater. Pada tahun 1938 sudah berdiri 55 gereja, di antaranya 14 dengan pemimpin seorang pendeta Jawa. Dalam hal keuangan, gereja tersebut masih memerlukan bantuan dari gereja di Belanda. Pada tahun 1926 dibentuk klasis yang pertama, yaitu Klasi Kebumen. Pada tahun 1927 sudah berdiri empat klasis, pada tahun 1937 telah terdapat enam klasis dan satu klasis dari gereja Cina. Langkah berikutnya ialah pembentukan sinode, diaadakan pada 12 November 1931, yang meliputi lima klasis dan 31 gereja. Pada bulan Juni 1932 ditempatkan tata gereja untuk seluruh gereja Jawa Tengah. Pada tahun 1949, dalam keputusan Sinode Salatiga,

dipersatukan gereja-gereja Jawa Tengah, bagian utara yang diusahakan oleh para pekabar Injil Salatiga yang bentuknya disusun oleh suatu panitia dari kedua sinode itu dan kemudian ditetapkan dan disahkan oleh mereka. Setelah kemerdekaan, dalam rangka gerakan oikumene, gereja kristen Jawa Tengah menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia.

Dalam hal pendidikan tenaga pendeta, pada tahun 1888 telah didirikan Sekolah penginjil yang diberi nama "Sekolah Kenchenius" yang pada tahun 1905 dipindahkan ke Yogya dan mempunyai dua jurusan (jurusan untuk pendidikan guru sekolah pekabaran Injil dan untuk mendidik penginjil). Jurusan yang kedua kemudian yang berkembang menjadi sekolah guru Injil dan selanjutnya menjadi Sekolah Pendeta. Pada tahun 1925 ditambahkan suatu kursus untuk para tamatan Mulo dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar yang berlangsung selama tiga tahun (kemudian menjadi empat tahun), tetapi tak diadakan perbedaan tingkat diantara kursus Jawa dan Belanda. Mereka semua mendidik menjadi pendeta dan yang kemudian diserahkan kepada gereja masing-masing. Juga diterbitkan surat kabar *Mardi Raharjo* yang mempunyai oplaaag 35.000 dan mingguan penabur dalam bahasa Indonesia.

Di daerah Jawa Tengah bagian utara, permulaan penginjil juga terjadi atas inisiatif pribadi. Di atas telah disebutkan seorang pekabar Injil G. Briicner dari NZG (berasal dari Jerman) yang di tempatkan di Semarang pada tahun 1815. Ia tak menyetujui praktek gereja yang dianggap lalai dalam hal pembaptisan, ia kemudian berpindah kepada perhimpunan Baptis Inggris selama beberapa tahun dan akhirnya bekerja secara perseorangan. Ia telah menerbitkan surat-surat selebaran dan terjemahan *Perjanjian Baru* dalam bahasa Jawa( 1830), tetapi tak ada satu jemaat pun yang dididiknya. Ia meninggal dunia di Salatiga pada tahun 1849.

Sebagai Pekabar Injil di Semarang, tempatnya kemudian digantikan oleh Hoesoo yang dikirimkan oleh NZD pada tahun 1849. Dalam mendekati orang-orang Jawa. Hoesoo tak bersusah payah karena sebelumnya Injil telah tersebar dari Mojowarno sampai Kayupu (1853), Rembang (1854), Salatiga (1855) dan Ngalapa Pati(1859). Di

daerah itu telah bermunculan jemaat kristen secara kecil-kecilan di samping juga adanya pengaruh Tunggal Wulung dan Sadrach.

Sementara itu telah timbul suatu jemaat Kristen 199 baru di daerah perkebunan Simo, dekat Salatiga atas usaha Nyonya Le Jolle. Pada tahun 1855 Hoesdoo sudah dapat melayani pembaptisan yang pertama. Pada tahun 1857 jemaat yang kecil tersebut berpindah ke Ngemoh karena keadaan ekonomi yang kurang baik. Setelah di Ngemoh jemaat tersebut dipimpin oleh seorang penginjil yang datang dari Mojowarno, yaitu Petrus Sedoyo. Jemaat ini merupakan yang pertama di Jawa Tengah bagian utara. Atas usaha Ny. Le Jolle setelah ia kembali dari Negeri Belanda, pekabaran Injil ermelo di Negeri Belanda mengirimkan seorang pekabar Injil bernama De Boer berhasil mengkristenkan sejumlah besar orang Jawa. Sejak tahun 1884 suatu perhimpunan pekabar Injil Jerman bernama *Neukirchener Missiohaus* yang didirikan pada tahun 1880 memberikan bantuan kepada jemaat di Ngemoh. Sejak itu pekabaran Injil diseluruh daerah di Jawa Tengah bagian utara (dari Tegal sampai ke Rembang dan Bojonegoro) dipersatukan oleh pekabar-pekabar Injil dari dari Ngemoh yang dibantu oleh *Neukirchener Missiohaus* yang dikenal dengan pekabaran Injil Salatiga. Perhimpunan ini membawa suatu anasir baru ke dalam sejarah gereja di Indonesia, yaitu sifat *alliance* yang menghidupkan kembali sikap *pietisme*. Organisasi dan pejabat-pejabat gereja tak dipentingkan, karena tujuan serta intisarinya ialah perhimpunan mereka yang benar-benar hidup di dalam iman sebagai anak-anak Allah karena halnya dalam iman saja dan dengan dipimpin oleh tuhan segala sesuatu dapat dilaksanakan. Karena itu mereka juga disebut *fatt mission*, usaha pekabaran Injil di dalam iman. Tak mengherankan apabila mereka tidak berusaha untuk mendirikan suatu gereja dengan organisasinya. Jika di Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur gereja-gereja telah didirikan, mereka hanya membentuk "parepatan Agung", yaitu suatu permusyawaratan di antara jemaat yang tidak mempunyai hak dan kekuasaan atas jemaat. Sifat mereka sesuai dengan *kongregasionalisme*.

Mereka telah memperluas daerah-daerah usaha mereka dari Ngemoh-Wonorejo dan Salatiga ke Tingkir, Ambarawa, Kalianget, dan Ungaran untuk mendirikan jemaat-jemaat kemudian menuju ke barat



yaitu Kendal, Pekalongan dan Tegal yang sudah ditinggalkan oleh pekabar-pekabar Injil dari NGZV (*Nederlands Gereformeerde Zendingen Vereeniging*) Semarang diambil oleh dari NZG (*Hoezoo*) dan ke timur di Purwodadi, Blora, dan Bojonegoro. Meraka juga mendirikan sekolah rakyat, dan sebuah Sekolah Guru yang didirikan di Tinggkir sejak tahun 1908 sampai 1932. Pada tahun 1930 dibuka sekolah bagi guru-guru Injil, Sabda Mulya di Unggaran. Juga didirikan rumah sakit dengan sejumlah besar poliklinik. Pada tahun 1940 di daerah-daerah tersebut ialah tercatat kira-kira 6000 orang yang sudah dibaptiskan, diantaranya 3.400 anggota tetap. Mereka terbagi dalam lima jemaat yang mempunyai Majelis sendiri-sendiri. Di samping itu terdapat 42 jemaat yang belum dilantik, dan kira-kira 60 tempat *evangelisasi*.

Pada masa perang kemerdekaan timbullah keinginan untuk mempersatukan orang-orang Kristen Jawa dalam satu gereja, karena itu pada tahun 1945 dalam Sinode Salatiga diputuskan untuk membentuk persatuan Gereja Kristen Jawa Tengah Selatan dan Jawa Tengah Utara. Sejak itu Gereja Kristen Jawa Tengah mempersatukan semua orang Kristen di daerah Jawa Tengah dari Tegal sampai Bojonegoro, dan dari Cilacap sampai Gunung Kidul (Wonosari) kecuali di sekitar Gunung Muria yang menjadi daerah pekabaran Injil dari aliran Mennonit (*Doosgenzindd*).

#### 5.5.2 *Agama Kathotik di Jawa Tengah (1851--1942)*

Dalam tata gereja Katholik, daerah Jawa Tengah dibagi dalam dua wilayah keuskupan yaitu Keuskupan Agung Semarang (di bawah usaha missi dari ordo Sarekat Yesus, SY.) dan Keuskupan Purwokerto (di bawah ordo Salib Suci MSC). Untuk memudahkan uraian akan disebut saja Keuskupan Semarang dan Keuskupan Purwokerto.

#### **Keuskupan Agung Semarang**

Daerah Keuskupan Agung Semarang meliputi Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Pati. Pada tahun 1880 Pater YB. Polinolex SY. yang sejak tahun 1859 bekerja di Jawa mengirimkan laporan ke Roma mengenai kemungkinan usaha missi di antara orang Jawa. Ia berpendapat bahwa usaha missi di daerah Yogyakarta dan Kedu akan mempunyai harapan tipis sedangkan di Banyumas dan Begelen akan



lebih besar hasilnya, tetapi kemudian ternyata bahwa Yogyakarta dan Muntilan merupakan pusat dari usaha misi Katholik yang pertama di Jawa Tengah.

Kontak pertama (sebelum keanehan kedatangan Pater Van Lith di Jawa pada tahun 1896) telah terjadi keanehan di Jawa Tengah bagian utara. Pada akhir tahun 1889 seorang haji dari Sidoharjo (daerah Surabaya) datang menghadap pastor Keyzer di pastoran Gedangan (Semarang) ingin mengikuti pelajaran agama Katholik. Beberapa tahun lamanya haji tersebut dengan beberapa kawannya mengikuti pelajaran *katekismus* dengan setia tetapi kemudian tak pernah ada kabar beritanya. Dalam tahun 1896, seorang yang pernah bekerja sebagai *sendeling* Protestan di Nusa Tenggara dan kemudian menjadi guru agama di Ambarawa bagi prajurit-prajurit garnizon, bernama Matheus Teffer, ketika berobat di Semarang, telah mendapat bantuan dari Pastor Keyzer dan kemudian minta dibaptiskan sebagai orang Katholik. Hal ini kemudian diikuti oleh beberapa orang umatnya di Ambarawa, di antaranya Yohanes Vreede dan Martenus Martodirejo yang semula bekerja sebagai katekis bagi Matheus Reffer. Pada tahun 1894-1895 telah terdapat 340 orang Jawa yang diterima dalam gereja Katholik, 47 orang di antaranya adalah bekas Protestan. Kemudian didirikan pusat pertama usaha misi di Bedono (dekat Ambarawa) dan Semarang, di tempat itu pada tahun 1896 dibuka dua sekolah kecil di Mlaten dan Lamper. Kursus guru katekis dimulai pada tahun 1897 mempunyai empat orang murid dari Minahasa dan 10 orang dari Jawa Tengah. Perkembangan ini tak akan dapat dikerjakan sendiri oleh Pastor Keyzer, karena itu kemudian didatangkan Pastor W. Hellings dari Maluku (1895) yang dengan segera mulai mempelajari bahasa Jawa. Pada akhir tahun 1895 dapat diterbitkan *Kitab Sembahyang Cilik Kanggo Para Wong Room-Katholik*. Pada bulan Desember 1895 dipermandikan 12 orang Jawa di Magelang, 18 orang di Muntilan. Pastor Voogel bekerja di Magelang yang pada hari-hari tertentu mempersembahkan Missa Kudus di beberapa desa dan menyewa sebuah rumah kecil di Muntilan bagi Pastor Hellings dan Pastor Hebrans. Pada permulaan tahun 1896 Yohannes Vreede mulai bekerja di Yogyakarta sehingga pada tahun itu dapat dipermandikan 90 orang di Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul.

Pada bulan Oktober 1896 datanglah dua orang pastor di Semarang

dari Negeri Belanda yang kemudian akan memainkan peranan yang besar dalam usaha missi di Jawa Tengah, yaitu Pastor van Lith SY. dan Pastor Petrus Hoevenaars SY. Untuk melayani usaha missi kemudian diadakan pembagian pekerjaan yaitu Pastor Hebrans SY. di Semarang dengan  $\pm$  100 orang Katholik dan dibantu oleh guru katekis Andres Manasse. Daerah kerja Pastor Hebrans akan meliputi juga daerah Demak, Kudus, dan Jepara yang telah mempunyai 71 orang yang telah dipermandikan. Pastor Van Lith SY. akan menetap di Muntilan yang meliputi daerah perkunjungan Ambarawa (Yohannes Vreede dan 53 orang), Bedono (Mertorejo dan 130 orang), Magelang dan Muntilan (131 orang). Pastor Hoevenaars SY. akan bekerja di Yogyakarta dimana sudah terdapat hampir 100 orang yang dipermandikan oleh Pastor Hellings dan Hebrans. Di Yogyakarta Pastor Hoevenaars kemudian dapat mempermandikan 62 orang lagi, sebelum dilarang lebih lanjut oleh Residen Amant.

Pada tahun 1897 terjadi malapetaka penipuan pembelian tanah oleh katekis Mertodimejo dan Yohannes Vrede sehingga mereka kemudian dipecat. Hanya di Semarang katekis Andreas Manasse yang masih tetap setia selama bertahun-tahun dalam usaha missi di Muntilan. Setelah kejadian ini diadakan pertemuan di antara Pastor F van Lith, Pastor Hoevenaars, Pastor L. Hebrans dan Eduard Engbers di Magelang pada 20 Desember 1898 untuk mengatur pekerjaan lebih lanjut di mana diputuskan bahwa daerah yang paling cocok untuk usaha missi ialah Kedu. Di situ akan didirikan suatu stasi di samping Muntilan. Pada bulan Mei 1899 dibeli suatu pabrik minyak kacang di Mendut. Pastor Hoevenaars dan Hebrans akan menetap di Mendut dengan murid-murid Sekolah Guru Semarang. Kemudian Pastor Hoevenaars menetap sendiri di Mendut dan Pastor Van Lith di Muntilan.

Di Mendut Pastor Hoevenaars pada hari Natal 1899 dapat membaptis 19 orang yang kemudian disusul dengan 79 orang Jawa dalam tahun 1900. Di sana didirikan suatu koperasi pertanian dan suatu bank kredit pertanian pada tahun 1904 yang bernama Retnogoeno. Beberapa sekolah kecil dan sederhana dibuka di sekitar Mendut, juga suatu kursus pekerjaan tangan (menjahit dan membatik) diberikan oleh Ibu Dwijoatmoko. Dibuka juga suatu poliklinik di mana 20 -- 30 orang

berobat tiap hari. Pada akhir tahun 1903 stasi Mendut telah mempunyai  $\pm$  300 orang Katholik.

Di Muntilan, Pastor van Lith menjalankan usaha yang hampir bersamaan, dengan lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan (terutama pendirian sekolah-sekolah guru) 1900 --1901 ia berhasil mempermandikan 20 orang. Sekolah Muntilan yang ditutup pada tahun 1897, dibuka lagi. Dibuka juga kursus tenun dengan mendatangkan Bruder Th. Kersten. Pastor van Lith juga memperluas kontak dengan masyarakat Jawa dengan golongan priyayi dan tani baik di Yogyakarta maupun Solo. Lebih dari 30 kali ia pergi ke Yogyakarta dan Solo memenuhi undangan beberapa pangeran untuk memperdalam pengertian mereka tentang cara seorang Jawa menghadap penciptanya. Jika Pastor Hoevenaars berpendapat, bahwa pemakaian "krama inggil" dalam doa menunjukkan semangat budak belian, maka Pastor Van Lith sebaiknya mengatakan bahwa kata "krama inggil" sama sekali tidak meniadakan hubungan cinta-kasih dan kepercayaan antara ayah dan anak.

Perbedaan dalam cara bekerja dan *approach* di antara dua pastor tersebut telah mengharuskan pihak pimpinan missi untuk mengambil keputusan. Ternyata pimpinan missi (Mgr. Luypen) lebih menyetujui cara bekerja Pastor Van Lith. Pada bulan Mei 1905 Pastor Hoevenaars mengusulkan pembentukan stasi Mendut (dan mungkin tempat-tempat lain) sebagai suatu tempat umat Katholik yang kompak dengan sekolah-sekolah desa dan usaha-usaha ekonomis, maka Pastor van Lith lebih menekankan pada pembentukan *elite Jawa* yang beragama Katholik (guru, pamongpraja, imam, dokter) yang akan menjadi nabi dan rosul pelopor di seluruh Jawa. Hal ini hanya mungkin dengan pendidikan dalam *internat* atau asrama. Di luar tujuan tersebut, kerasulan untuk sementara waktu harus bersifat tak langsung. Pada bulan April 1905 Pemerintah menyetujui pemberian subsidi bagi Xaverius College di Muntilan. Di Muntilan ini kemudian berkembang pesat pendidikan missi Katholik yang terbesar di Jawa Tengah. Sementara itu pada permulaan tahun 1903, Pastor van Lith dikunjungi oleh seorang guru kerasulan (agama Kristen Jawa dari aliran Sadrach) yang bernama Dawud dengan empat kepala desa dari daerah Pegunungan Kalibawang, yang menyatakan ingin menjadi Katholik bersama dengan

semua penduduk desa mereka. Pastor van Lith memang sebelumnya telah berusaha mendekati pengikut-pengikut Kiai Sadrach di dekat Muntilan agar mereka masuk Katholik, bahkan pada tahun 1900 mengunjungi Kiai Sadrach di Karangjasa (Bagelen). Pastor van Lith kemudian mengunjungi orang-orang yang berasal dari Kalibawang ini dan mereka dengan rajin mengikuti pelajaran agama di Muntilan. Pada 20 Mei 1903 keempat orang pemimpin mereka telah dipermandikan dan kemudian Pastor van Lith dapat mempermandikan 171 orang (separuh laki-laki separuh perempuan) di mata air Sendang Sono pada 14 Desember 1903.

Usaha misi di Jawa sekarang dipusatkan kepada pendidikan di Muntilan. Sekolah guru Muntilan pada permulaan tahun 1904 mulai mendidik guru untuk Sekolah Rakyat Angka Dua. Pada akhir tahun 1906 dibuka *Kweekschool* B di Muntilan di mana diberikan juga Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, untuk mendidik calon-calon guru, pejabat pamongpraja, tetapi pemerintah masih berpegang teguh pada monopoli pendidikan pegawai. Meskipun begitu, Pastor van Lith dapat juga menempatkan sejumlah bekas muridnya di *Hogere Kweekschool* di Purworejo, Stovia di Jakarta, sekolah pertanian, kehutanan dan sekolah kehewanan di Bogor. Yang telah berjasa besar di dalam perkembangan pendidikan di Muntilan ialah Pastor van Lith, Pastor Y. Mertens dan Bruder Th. Kersten.

Pada Februari 1908 datang empat suster Fransiskanes di Mendut untuk mendirikan sekolah bagi para pemuda. Pada akhir 1908 didirikan sekolah khusus bagi 17 puteri intern, yang dalam tahun 1911 menjadi 50 orang, dan akhirnya menjadi 400 orang. Pada tahun 1916 dibuka sekolah guru *Kweekschool* puteri 6 tahun di Mendut yang merupakan sekolah pertama di Indonesia. Pada tahun 1906 didirikan yayasan RC. *Kweekschool* di Muntilan yang mengurus sekolah-sekolah guru di Muntilan, Mendut, dan Ambarawa. Kemudian Pastor van Lith juga menciptakan suatu bentuk sekolah guru yang baru disebut *Normaalschool* *Normaal* 5 tahun, yang kemudian pada tahun 1915 dibuka pula empat *Normaalschool* negeri. Pada tahun 1916 dibuka pula empat *Normaalschool* negeri. Pada tahun 1916 dibuka HIS yang kedua. Atas usul Pastor van Lith, pada tahun 1924 didirikan *Schakelschool* 5 tahun oleh pemerintah yang terbuka bagi anak-anak

yang tamat kelas 3 *Standaard school* dan yang ijazahnya disamakan dengan ijazah HIS. Dengan demikian pendidikan di Muntilan semakin berkembang dan murid-muridnya menjadi benih-benih yang subur bagi persebaran agama Katholik di seluruh Jawa Tengah.

Pastor van Lith selain berjasa dalam usaha pendidikan di Muntilan juga menaruh perhatian yang besar dalam perkembangan kebudayaan Jawa. Ia berharap bahwa pendidikannya di Muntilan dapat menjadi jalan bagi orang-orang Jawa untuk meningkatkan kebudayaan mereka sendiri. Gagasan-gagasannya dikemukakan dalam ceramahnya *Paramasastra Jawa*. Ia juga diangkat sebagai anggota badan pengurus *Jawa Institut* yang didirikan tahun 1919. Dalam majalah Jawa ia menguraikan soal *De nationale spraakkunst*. Dalam konggres *Jawa Institut* tahun 1924 di Yogyakarta, ia menguraikan bagaimana kebudayaan pribumi dapat memperoleh peranan lebih penting dalam pendidikan siswa-siswa di Indonesia. Pemerintah menghargai jasanya dengan mengangkatnya menjadi anggota dari Dewan Pendidikan (*Onderwijsraad*) yang didirikan tahun 1918. Ia meninggal dan dimakamkan di Muntilan pada 9 Januari 1926.

Daerah Solo sampai tahun 1918 hanya satu kali sebulan dikunjungi oleh pastor Ambarawa. Pada akhir 1918 Pastor Stiphout menetap di Solo, tetapi dua tahun kemudian diganti Pastor H.Y. Jansen. Pada tahun 1921 dibuka HIS Katholik yang pertama. Pada tahun 1924 Pastor Hoevenaars menetap sebagai pastor di Solo. Ia yakin akan keunggulan sistem van Lith dan dalam waktu empat tahun berhasil mendirikan 10 *Standaardschool*. Daerah Klaten dan Wedi juga akan berkembang bagi usaha misi berkat jasa Pastor van Driessche dan Yg. Berudsen.

Di daerah-daerah lain juga dibuka sekolah-sekolah HIS oleh misi; di Magelang pada tahun 1919 terdapat dua HIS dan di Semarang tahun 1924 sebuah HIS.

Di Ambarawa sejak 1918 tak terdapat pastor yang tetap dan selama dua tahun hanya dikunjungi dari Semarang. Pada tahun 1920 didirikan sekolah *Normaalschool* putra di Ambarawa di bawah [pimpinan Pastor A. van Kalken. Ambarawa semakin berkembang didirikan dua *Standaardschool* dan asmara, dan pada tahun 1924

suster-suster *Fransiskanes* membuka *Normaalschool* putri dengan sekolah latihannya, yang disusul dengan Sekolah Kepandaian Putri. Di antara dua kompleks sekolah ini kemudian dibangun sebuah sekolah Mulo dengan asramanya. Kota Ambarawa ini juga menjadi pusat pendidikan yang penting dari missi di Jawa Tengah di samping Muntilan, di mana ratusan guru putra-putra telah dihasilkan olehnya.

Bagi daerah umat Katholik yang baru di Kalibawang (Kulon Progo) keputusan gubernur jendral tanggal 6 Mei 1905 menetapkan bahwa daerah kerja missi di Muntilan dan Mendut ditambah dengan Kulon Progo, sehingga hanya missi di Kalibawang sekarang yang ada dasar hukumnya. Tiap-tiap minggu sedikitnya 50--60 orang Katholik (pada hari besar sampai 200 orang lebih) dari Kalibawang berjalan kaki ke Muntilan untuk menerima pelajaran agama dan menghadiri missa kudus di pagi harinya. Mereka dipimpin oleh salah seorang dari empat orang yang pertama kali dimandikan, yaitu Barnabas Sarikrama. Ketika ia masih muda ia pernah mendapat luka di kakinya yang tak dapat disembuhkan, kemudian ia pergi ke Brunder Kerstens di Muntilan dan berhasil menyembuhkannya, sehingga ia berkata bahwa ia akan menggunakan kakinya untuk pekerjaan Tuhan. bertahun-tahun ia berkeliling di Pegunungan Menoreh untuk mengajar agama Katholik dan mengantarkan mereka ke Muntilan untuk dibaptiskan. karena jasa-jasanya, ia pada tahun 1929, kesempatan yubilium perak missi Jawa, dianugerahi bintang *Pro Ecclesia et Ponti Fice* dari Paus. Pada tahun 1914 daerah Kalibawang dikunjungi untuk pertama kali oleh Pastor Jansen dan dibuka sebuah sekolah, tetapi kemajuan besar daerah ini baru tercapai pada tahun 1923 ketika Pastor Y. Prenthaler mulai menjunginya secara teratur.

Perkembangan lain sebelum berdirinya *Vikariat Apostolik* Semarang pada bulan Agustus 1940 dapat diuraikan dengan singkat sebagai berikut. Pada tahun 1932 datang tiga imam missionaris keluarga Kudus (MSF) dan membuka paroki mereka di Atmodirono Semarang. Dari sana para rama MSF mulai meluaskan usaha kerasulan mereka ke timur, ke daerah Pati dan Kudus. Paroki Purwosari di Solo didirikan pada tahun 1940. Setelah Perang Dunia II mereka telah melayani 11 paroki.

Di samping kongregasi-kongregasi bruder dan suster yang berasal dari Eropa, juga didirikan bantuk-bentuk yang lebih asli Indonesia. Pada 1 Januari 1929 didirikan kongregasi para bruder hidup Apostolik oleh Rama F. Strater SY. di Yogyakarta, dengan maksud untuk bekerja sebagai katekis di pedusunan, tetapi para bruder kongregasi ini tak dapat berkembang dengan baik, dan pada tahun 1964 dibubarkan dengan masih mempunyai empat orang anggota. Selain itu, pada 29 Juni 1938 di Ambarawa didirikan kongregasi Suster-suster Abdi Dalam Sang Kristus oleh Mgr. P. Willekend SY. dengan maksud untuk melayani perawatan orang sakit dan mengajar. Mereka mulai dengan tujuh orang anggota pada tahun 1970 sudah beranggota 42 suster suster dan bekerja di Ungaran, Wonosari, Wedi, dan Wates, Jakarta, Malang, dan Banyuwangi.

Dalam hal pendidikan imam, pada tahun 1911 dua orang Indonesia yang tamat *Kweekschool* Muntilan yaitu Petrus Darmaseputra dan Fransiscus Satiman menyatakan keinginannya untuk menjadi imam Sarekat Yesus. Mereka kemudian melanjutkan pelajaran di Eropa (Sekolah Apostolik Turnhout di Belgia dan kemudian Kolese Kanisius di Nijmegen). Antara tahun 1916--1920 terdapat 10 orang siswa Muntilan pergi ke Nederland untuk belajar sebagai imam. Setelah itu diputuskan untuk mengadakan pendidikan imam di Indonesia sendiri. Pada 7 September 1922, dua *novis* pertama masuk *novisiat* yang baru dibuka di Yogyakarta. Pada 15 Agustus 1926 FX. Satiman SY. ditahbiskan sebagai imam Indonesia yang pertama di Maastricht. Pada bulan Mei 1925 Mgr. van Velsen membuka Seminari Kannisius di suatu rumah sewaan dekat Kolese Ignasius, Yogyakarta. Calon-calon imam juga dapat masuk ordo lain dari ordo Yesuit. Pada tahun 1928 dibuka seminari tinggi Santo Paulus di Muntilan dengan lima mahasiswa pertama yang menjadi calon imam praja. Pada 26 Juli 1942 empat orang imam praja yang pertama ditahbiskan tinggi akhirnya pindah ke Yogyakarta, sedangkan seminari menengah di Mertoyudan (Magelang). Menurut statistik, pada tahun 1927 misi di Jawa Tengah mempunyai 38 *standardschool* dan *Vervolgschool* (lanjutan *Volkschool* selama dua tahun), dan 36 *Volkschool* (tiga tahun) dengan lebih dari 7000 orang murid, selain itu juga 27 HIS (sekolah bagi anak-anak Indonesia dengan bahasa Belanda). Pada tahun 1931 jumlahnya bertambah menjadi 49 *standardschool*, 22 *Vervolgschool*, 168 *Volkschool*, dengan lebih dari



22.000 orang murid tersebar di daerah-daerah Yogyakarta, Solo, Semarang, Ambarawa, Muntilan, dan lain-lain.

Perkembangan yang penting dalam sejarah gereja Katholik di Jawa Tengah terjadi pada 1 Agustus 1940 dengan berdirinya *Vikariat Apostolik Semarang* dengan Rama Albertus Soegiyopranoto SY. diangkat oleh Sri Paus Pius XII sebagai *vikaris apostoliknya* yang pertama. Alasan bagi pembentukan *Vikariat Apostolik Semarang* ialah jumlah umat Katholik yang semakin bertambah maupun perbedaan situasi yang besar antara Jawa Barat/Kota Betawi dengan daerah Jawa Tengah. Dapat dikatakan bahwa Mgr. A Soegiyopranoto SY. adalah uskup pertama orang Indonesia. Ia dilahirkan di Solo pada 25 November 1896 sebagai anak kelima dari keluarga Karyasudarma, seorang abdi dalem Keraton Surakarta. Pada waktu masih muda, ia pindah ke Yogyakarta bersama orang tuanya, kemudian masuk Sekolah Rakyat Pakualaman dan kemudian HIS Wirogunan. Atas anjuran Pastor van Lith ia masuk Muntilan pada tahun 1909 dan pada hari Natal 1909 ia dimandikan dengan nama Albertus, tahun 1910--1915 ia belajar di *Kweekschool* dan kemudian menjadi guru di Muntilan juga. Sesudah satu tahun ia mengatakan keinginannya untuk menjadi imam. Tahun 1919 ia pergi melanjutkan pelajarannya di Negeri Belanda, sesudah satu tahun di Kolese Ordo Salib Suci di Uden, ia masuk Novisiat Sarikat Yesus di Mariendaal pada September 1920. Setelah selesai pelajaran, ia pulang ke Indonesia dan mendapatkan tugas sebagai guru dan redaktur majalah *Swara Tama*. Tahun 1928 Frater Soegiyo belajar theologia di Maastricht di mana ia ditahbiskan sebagai imam pada 15 Agustus 1931 bersama-sama dengan pastor M. Reksoatmaja SY. Setelah kembali di Jawa tahun 1933, ia bekerja di paroki Bintaran Yogyakarta, dan melayani stasi Ganjuran (sebelah selatan Yogya). Ia menyumbangkan tenaga dan pikirannya pada berbagai organisasi, misalnya "Pangrukti Laya" (koperasi atau asuransi untuk menanggung ongkos kematian), Baen Pertalian Katholik, Pusara Katholik Wandawa. Majalah *Swara Tama* dibimbingnya lagi mulai tahun 1939 dan ia diangkat sebagai konsultor Serikat Yesus di Indonesia.

Statistik bulan Juli 1941 menyebutkan, di Vikariat Apostolik Semarang terdapat 45.394 orang Katholik, 472 sekolah (dari TKK sampai seminari tinggi) dengan 50.263 murid dan 1.388 guru, 80 imam



(9 imam pribumi) bekerja di vikariat Semarang, 129 bruder (28 pribumi) dan 341 suster (84 pribumi). Perkembangan umat Katholik daerah keuskupan Semarang dapat dijelaskan dari angka-angka berikut.

Tahun	Bangsa Eropa	Bangsa Indonesia (Pribumi dan Cina)
1928	12.977	8.810
1933	12.863	17.442
1938	15.202	21.922
1940	15.824	25.278
1942	14.934	30.460

### Keuskupan Purwokerto

Wilayah Keuskupan Purwokerto meliputi daerah Banyumas, Kedu (dari Wonosobo sampai Kutoarjo), dan Pekalongan. Keuskupan Purwokerto dibentuk pada 25 April 1932, yang sebelumnya di bawah Vikariat Apostolik Jakarta. Sampai tahun 1927 daerah Jawa Tengah bagian barat ini (baik bagian utara maupun bagian selatan) hanya merupakan daerah kunjungan dinas. Bagian pantai utara mendapat kunjungan dari Cirebon atau Semarang bagian tengah dari Magelang, dan bagian pantai selatan dari Yogyakarta (Pastor van Drissche SY.), tetapi sejak tahun 1900an beberapa tempat sudah mulai disiapkan. Misalnya pada 21 November 1911 sudah dibeli sebidang tanah untuk membangun gereja, yang dilakukan oleh Mgr. Kuypen, vikaris apostolik Jakarta. Di Tegal pada waktu itu sudah terdapat sebuah bangunan gereja kecil, dan Purworejo terdapat sekolah HIS dan rumah pastoran yang tergabungkan dengan kapel. Pastor Y. Hoevenaars SY. sangat besar jasanya dalam mengunjungi daerah-daerah di Jawa Tengah bagian barat ini antara tahun 1895--1899 dan 1917--1927. Di daerah ini usaha Zending Gereja Gereformeerd (NGZV) sudah mengadakan hubungan dan perkenalan dengan penduduk pribumi sejak tahun 1880an. Juga di daerah Bagelen ini terdapat banyak penganut Kristen Jawa dari Pak Sadrach.

Pada 20 November 1926, Ordo Salib Suci (MSC) menerima baik tawaran dari Roma untuk mengerjakan usaha misi di daerah Pekalongan, Banyumas, dan sebagian Kedu dari Ordo Sarekat Yesus. Sejak itu pekerjaan misi di daerah ini diusahakan oleh imam dari Ordo Salib Suci (MSC). Pada 6 Mei 1927 Jenderal MSC menunjuk Pastor B.Y.Y. Visser akan didampingi oleh imam tetap Pastor B. Thien MSC dan Pastor M de Lange MSC. Pada 21 Oktober 1927 rombongan Pastor Visser tiba di Tanjung Priuk dan meneruskan perjalanan ke Kutoarjo pada 24 Oktober 1927. Setelah mengadakan pembicaraan dengan Mgr. van Velsen SY di Yogya, Pastor Visser diangkat sebagai konsultor uskup dan diputuskan untuk membagi daerah pekerjaan. Tegal di pantai utara (Pater Thien), Purwokerto di bagian tengah (Pater Visser), dan Purworejo di bagian selatan (Pater Lange).

Untuk menyelenggarakan persekolahan dan pemilikan gereja dibentuk "Yayasan Pius" yang menerima penyerahan satu-satunya sekolah HIS di daerah itu dari Yayasan Kanisius (dari SY.). Pada waktu itu ketiga pastor MSC tersebut mendapat gaji sebesar F 1 750,- sebulan dari pemerintah.

Mereka kemudian menyusun rencana kerja misi di daerah ini sebagai berikut.

- (1) Purworejo : (a) gedung gereja baru, (b) sekolah Schakel, (c) suster-suster OLVH, Hart untuk STKK, HIS, SKP, (d) katekis seperti oleh Pastor Prentaler S.Y.
- (2) Tegal : (a) dalam jangka panjang gedung gereja baru dari pastoran, (b) suster untuk STKK, SKKP dan Sekolah Menjahit.
- (3) Purwokerto : (a) gereja dan pastoran di atas tanah yang sudah dibeli, (b) kedatangan suster Ursulin akan dibicarakan dengan Mgr. van Velsen.
- (4) Wonosobo : (a) diselidiki apakah Wilde Schooltje Tuan Antes mempunyai kemungkinan untuk berkembang dan kemungkinan untuk diteruskan misi.
- (5) Cilacap : Untuk sementara tidak dikerjakan.

Beberapa kejadian penting dalam pekerjaan misi pastor-pastor MSC di wilayah Purwokerto dapat dicatat sebagai berikut.

- (1) Pada 4 Juli 1928 datang empat orang suster dari Cachtors OLVH Harta untuk membantu usaha missi di wilayah Purwokerto. Para suster tersebut ialah Sr. Veleria (kepala) Sr. Pacricia, Sr. Mariana, dan Sr. Crescentia.
- (2) Di Tegal dapat dibeli sebuah tanah milik keluarga Wermuth yang terletak di daerah "Kraton Lama" oleh yayasan Pius pada 3 Januari 1929 untuk dibangun kompleks bangunan missi.
- (3) Pada 18 April 1929 keluar keputusan gubernur jenderal yang menetapkan tiga "tempat kedudukan" dan perjalanan-perjalanan dinas yang dapat dibiayai oleh negara. Tiga tempat kedudukan tersebut ialah Tegal untuk mengunjungi tempat-tempat lain di Keresidenan Pekalongan ; Purwekerto untuk mengunjungi seluruh Keresidenan Banyumas, dan Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo yang ke tiga-tiganya di dalam Keresidenan Kedu.
- (4) Pada 1 Juli 1929 suster-suster membuka sekolah taman kanak-kanak untuk anak-anak Belanda dan kelas persiapan HIS putri di Purworejo. Juga dibuka asrama putra untuk 10 orang anak di rumah pastoran. Di Gombang dibeli sebuah kamar bola untuk dijadikan gereja. Di Wonosobo, sekolah swasta Tuan Anres diteruskan oleh missi. Di Tegal mulai disiapkan rencana pembukuan HIS yang akan dilayani oleh suster-suster OLVH Hart.
- (5) Pada bulan Oktober 1929 datang seorang pastor lagi untuk memperkuat usaha missi, yaitu pastor Y. Schenkeles. dibuat rencana untuk menjadikan Purwokero sebagai kedudukan tetap (kemudian Kota Purwokerto menjadi pusat keuskupan MSC untuk wilayah keuskupan Purwokerto). Kemudian juga Bruder-Bruder Van Liefde pada tahun 1930.
- (6) Pembukaan TKK dan HIS dipimpin suster-suster OLVH Hart di Tegal kedatangan suster-suster Ursulin dari Klein Klooster (Jakarta) ke Purwokerto untuk membuka ELS dan TKK pada Juli 1929.
- (7) Di Purwokerto dibeli tanah untuk biara dan sekolah HIS Bruderaan (Bruder-bruder van Liefde)
- (8) Pada tahun 1930 dibuka lima Sekolah Desa daerah pegunungan sebelah utara Purworejo, 8 Maret 1930 dibuka HIS Purwokerto, Kutoarjo dan Tegal MCS di Wonosobo, Kutarjo dan Gombang.

Pada bulan September 1930 tiba dua orang pastor dari Belanda yaitu Pastor C. Dammann(ditetapkan di Purwokerto) dan Pastor NV. Oers (ditempatkan di Pekalongan).

- (9) Statistik tahun 1930 menyebutkan tentang usaha misi di wilayah Purwokerto terdapa tujuh imam MSC, tujuh bruder karitis, 15 suster OLVH. Hart dan tujuh suster Ursulin, 21 buah sekolah dengan jumlah murid 1750 orang, Asrama di Purworejo (untuk putra dan putri)
- (10) Pada 25 April 1932 datang keputusan Santo Bapa Pius XI yang menetapkan pembentukan Prefektur Apostolik Bandung dan Purwokerto. Pada 2 Agustus 1932 diadakan pelantikan resmi Mgr. B.Y.Y. Visser sebagai Prekfek Apostolik Purwokerto. Saat itu wilayah misi Purwokerto menurut hukum resmi berdiri sendiri sebagai gereja setempat. Hadir dalam upacara pelantikan itu semua Pastor MSC (12 orang) yang bekerja di wilayah Purwokerto semua bruder (13 orang) dan para suster (40 Orang) serta pembesar-pembesar gereja lainnya sepeerti Mgr. V Velsen SY. Selain residen Banyumas, para asisten residen dan bupati Banyumas, Cilacap, Purbolinggo, Banjarnegara, dan umat Katolik di Purwokerto.

Perkembangan selanjutnya patut dicatat ialah sebagai berikut.

- (1) Penyerahan rumah sakit di Pekalongan dan Pemalang dari pemerintah kepada misi pada tahun 1934 yang kemudian akan diusahakan oleh suster OLV Hart.
- (2) Pada bulan Juli 1937 misi membeli tanah di Wonosobo seluas 11 bau (7,75 ha) yang akan diperuntukkan bangunan-bangunan lembaga perawatan bisu tuli.
- (3) Pada 10 Agustus 1937 seorang Jawa pertama ditasbiskan sebagai pastor MSC, yaitu RPTH. (Rajak) Padmawijaya MSC.
- (4) Pada bulan Nopember 1937 dimulai pembangunan gereja dan paturan di Kutoarjo.

Statistik terakhir bagi pekerjaan misi di daerah Purwokerto pada tahun 1941 adalah sebagai berikut. Jumlah pastor MSC 21 orang, 39 bruder, 104 suster, jumlah orang Katholik : orang Eropa 2852, orang

Jawa 3395; orang Cina 630. Selain itu missi mempunyai dua buah rumah sakit (di Pekalongan dan Pemalang). Sehingga sembilan asrama, 15 sekolah taman kanak-kanak (439 murid), empat sekolah ELS (438 murid), 11 HIS (1831 murid), tiga *Schakelschool* (302 murid), 6 HIS (898 murid), dua sekolah desa (182 murid), satu *standardschool* (248 murid) ONCS (87 murid), dua Mulo (144 murid), enam sekolah keahlian (319 murid), satu sekolah pendidikan Guru Desa (enam murid), satu sekolah pendidikan anak bisu tuli (36 murid)

### 5.5.3 Agama Islam

Dalam perkembangan agama Islam di Indonesia corak akomodasi dengan pola kebudayaan dan agama setempat atau dengan keadaan yang baru. Kita melihat pengislaman kota-kota pelabuhan seperti Malaka dan Banten, kemudian pengislaman daerah pedalaman atau daerah pinggiran keraton di Jawa Tengah. Kemudian timbullah gelombang atau perkembangan baru, yang berusaha mendekatkan masyarakat yang sudah mengakui dirinya sebagai penganut Islam kepada ajaran yang utuh dan abadi atau kearah ortodoksi yang sesungguhnya yaitu kepada ajaran, *ahlus sunnah wal jamaah* yang murni. Gerakan-gerakan ini terjadi dalam beberapa bentuk yaitu lewat pemurnian tarekat-tarekat atau dengan penghancuran segala macam tingkah-laku yang dianggap *bid'ah*. Pergerakan ke arah terwujudnya ortodoksi yang lebih murni menekan kan pentingnya kesesuaian antara tindakan dan syari'at mulai terjadi terutama pada abad ke-19, ketika semakin banyak orang Islam Indonesia berani menempuh perjalanan jauh dan berbahaya untuk naik haji ke Tanah Suci Mekkah. Di samping itu juga karena terdapat beberapa faktor lain, misalnya dikuasanya pantai barat Sumatera oleh Belanda, dan tersebarnya daerah dan madrasah ke daerah pedalaman. Clifford Geertz menyebutkan tentang peralihan dari "gaya klasik" ketika Islam dalam masa penyebarannya di Indonesia menekankan aspek kebatinan yang kadang-kadang bersifat *hetrodox*, ke zaman kitab, ketika tekanan diberikan kepada kesesuaian antara syariat dan kehidupan. Keadaan di atas itulah yang menyebabkan timbulnya gerakan pembaharuan dari kaum Wahabi di Sumatera Barat yang terwujud dalam pertentangan antara adat dengan

penganut Wahabi yang bersifat Islam Ortodox. Para paderi tersebut bertindak dengan kekerasan untuk mengakhiri kekuasaan kaum ibu (*matriarchat*) dan menggantikannya dengan hukum keluarga yang bersifat Islam Arab serta ingin menghapuskan bermacam-macam kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan Islam. Belanda kemudian membantu para kepala adat dan berhasil mengalahkan para paderi pada tahun 1837.

Gerakan pemurnian Islam seperti gerakan Wahabi di Sumatera barat tersebut di dalam sejarah Islam dikenal dengan nama "Gerakan Salaf" yang bertujuan untuk mengembalikan agama Islam kepada dua sumbernya yang murni, yaitu *Al Qur'anul Kariem* dan *Sunnah Nabi*, serta meninggalkan pertengkaran mazhab dan segala bid'ah serta khurafat. Meskipun kaum paderi mengalami kekalahan dan daerah pengaruhnya lenyap digantikan pendidikan menurut Syafi'ie, namun ajaran salaf tersebut secara diam-diam terus berkembang, terutama dalam bentuk-bentuk pengajian dan ceramah, kemudian menemukan kepribadiannya kembali setelah kaum muda tampil ke depan pemimpin revolusi berfikir pada umat Islam yang disebut *Sumatera Thawalib*. Sesudah itu timbullah pemikiran baru, sekolah dengan metode baru seperti dipergunakan orang di Mesir. Tahun 1909 merupakan tahun dimulainya pembaharuan metode pendidikan yang besumberkan salaf di Sumatera Barat. Berdirilah sekolah-sekolah yang berjiwa reform, seperti *Abiya School* di Padang oleh Syeh Abdullah Ahmad (1915), kemudian diubah namanya menjadi *HIS Adabiyah*, di mana diberikan pelajaran bahasa asing disamping Bahasa Indonesia dan Arab. Kemudian dilakukan pembaharuan dalam pendidikan dasar, menengah, dan atas oleh putra-putra Sumatera Barat yang telah mendapatkan pendidikan di Mesir dan Mekkah seperti H. Thaib Umar, Mahmud Yunus, Djalaludin Thaib, Abdullah Hakim, Alhanafi.

Gerakan modernisme Islam yang berkembang di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-20 tersebut juga terjadi di Jawa. Penganut-penganut gerakan modernisasi Islam ini menginginkan sikap yang modern dan rasional dalam menghadapi masalah yang dihadapi Islam pada zaman modern. Gerakan reformasi Islam ini dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di Mesir (ajaran Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha) dengan melalui pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di

perguruan Al Azhar Kairo. Aliran Arab yang berdiam di Indonesia, terutama dengan melalui majalah dan harian dari kaum pembaharuan yang dapat dibaca di Indonesia. Sebetulnya gerakan pembaharuan Islam yang terjadi di India lebih dahulu dari pada yang terjadi di Mesir, tetapi kebangunan Islam di India tersebut lebih dulu dikenal oleh orang-orang Islam di Indonesia dari pada kebangunan-kebangunan di India menggunakan bahasa Inggris sebagai alat penghubungnya. Di Indonesia(Jawa) gerakan pembaharuan Islam diperoleh pori oleh orang Arab Indonesia yang pada tahun 1905 mendirikan perkumpulan *Djami 'at al Chairiah* di Jakarta yang bertujuan mendirikan perguruan Islam dengan menggunakan metode pengajaran mutakhir dan memberikan mata pelajaran umum di samping pelajaran agama. Usaha *Djami 'at al Cahiriayah* ini terbuka bagi orang Arab maupun orang Indonesia beserta anak-anaknya. Perkumpulan ini mendatangkan seorang ahli bangsa Sudan dari Mekkah yang bernama Ahmad bin Muhammad Surkati al Ansari (meninggal tahun 1943) yang ternyata mempunyai gagasan yang sangat radikal, sehingga mengakibatkan terputusnya hubungan dengan perkumpulan yang disebut. Dengan bantuan orang-orang yang bukan sayid, ia mendirikan perkumpulan yang disebut *Al-Irsyad* yang bertujuan mendirikan sekolah untuk anak-anak bangsa Arab dan Indonesia di berbagai daerah di Jawa.

Gerakan pembaharuan tersebut juga mempengaruhi orang Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian menjadi pendiri dari perkumpulan Muhammadiyah serta orang-orang terpelajar lainnya mengenal bacaan-bacaan tentang reformasi yang didatangkan dari luar negeri. Kiai Haji Ahmad Dahlan (nama sebelumnya Muhammad Darwis) dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868, anak seorang ulama besar di Kota Yogyakarta serta keturunan ulama pengajar agama. Sejak kecil ia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang cerdas serta gemar memperdalam agama Islam. Ia melakukan dua kali perjalanan haji ke Mekkah, yang terakhir pada tahun 1902. perjalanan ini tidak saja untuk ibadah haji, tetapi juga untuk memperdalam agama Islam dengan membaca karangan-karangan dari Muhammad Abduh, Ibn Taimijjah, Tafsir Mannar dari Rashid Riddz, majalah *Urwatul Wustqa* dari Jamaluddin Al Afgham. Ia memulai gerakan pembaharuannya dengan mengisyafkan beberapa orang keluarga dan

teman sejawatnya yang terdekat di Yogyakarta dengan mengajak berpikir secara baru dalam pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah. Sesudah ia berpikir secara salaf (pembaharuan) ia kemudian mendirikan perkumpulahn "Persyarikatan Muhammadiyah" di Yogyakarta pada 18 November 1912. Pengurus pertama dari perkumpulan Muhammadiyah terdiri atas Dahlan, Abdullah Sirad, H. Ahmad, H. Abdurrahman, RH. Sarkawi, H. Muhammad RH. Jaelani. H. Amis, dan HM. Eakih. Muhammadiyah berpendapat bahwa yang menjadi dasar agama ialah *Al Qur'an dan Hadis* Muhammad mendirikan sekolah yang berdasarkan keagamaan, dan seperti missi Katholik serta protestan mereka juga mendirikan rumah-rumah yatim piatu, rumah untuk fakir miskin, balai pengobatan dan rumah sakit. Perkumpulan ini berpusat di Yogyakarta dan dengan segera mereka mendirikan cabang-cabang di tempat lain. Pekerjaan HA. Dahlan sebagai saudagar batik, sering berkelana sehingga memudahkan ia mencari kawan dan menyiarkan pahamnya. Perkumpulan lain yang juga berdasarkan pembaharuan (salaf), misalnya Nuzul Islam di Pekalongan, *Al Munir*, dan Sirotol Mustaqim di Makasar, *Al Hidayah* di Garut, *Sidiq Amanah-Fabligh-Fathonah* di Solo. Semua itu telah meleburkan diri dalam perkumpulan Muhammadiyah yang baru didirikan oleh HA. Dahlan,

Antara tahun 1920 - 1925 Muhammadiyah giat mendirikan sekolah-sekolah. Memang bidang pendidikan dan pengajaran mendapatkan tempat yang istimewa di dalam Muhammadiyah. Pada 14 Juli 1923 didirikan suatu badan oleh Muhammadiyah" yang diberi nama "Majelis Pimpinan Mengajar Muhammadiyah" dengan diketuai oleh M.Ng Jayasugito. Perkumpulan ini kemudian lebih terkenal dalam gerakan *Ahmadiyah* Lahore. Anak-anak terlantar dan yatim piatu mendapat perhatian khusus demikian juga orang-orang miskin, balau kesehatan didirikan dimana-mana, persatuan juru rawat diadakan, juga pertolongan terhadap korban bencana alam. Diadakan pula badan pembantu dalam urusan perkawinan, usaha-usaha untuk memperbaiki perjalanan haji, jiwa tolong menolong umat Islam dibangun kembali. Wanita mendapatkan seluruhnya dalam Aisiyyah dan gadis-gadis dalam *Nasyaiatul Aisiyyah*. Gerakan kepanduan didirikan pada tahun 1918 dengan nama *Hisbul Wathan* yang bearti "Penjaga Tanah Air."

Banyak juga dibentuk majelis yang mempunyai departemen-



departemen tentang dalam organisasi. Majelis Tarjih mengurus soal yang bertalian dengan hukum agama, Majelis Pendidikan dan Pengajaran mengurus Pendidikan dan Pengajaran dan Pendidikan agama. Majelis Hikmah yang mengurus politik dan kenegaraan, Majelis Tabligh mengenai penyiaran dan da'wah Islam, Majelis PKU (Penolong Kesengsaraan Umum) dalam pekerjaan menolong orang sakit, yaitu yatim-piatu dan kesehatan rakyat, Majelis Pemuda mengurus urusan Kepanduan. Haji Ahmad Dahlan menjadi ketua umum Muhammadiyah dari tahun 1912 - 1923, kemudian diganti KH. Ibrahim (1923 - 1932).

Dalam kongres Muhammadiyah bulan Maret 1925 di Yogyakarta dicatat bahwa pada waktu itu perkumpulan ini telah mempunyai 29 cabang dengan 4000 orang anggota, mengusahakan sekolah 55 buah dengan murid sebanyak 4000 orang, di bagian tablig (penyiaran agama) bekerja 274 orang laki-laki dan 100 orang wanita mempunyai klinik di Yogyakarta dan Surabaya yang telah menolong 12.000 orang sakit, mempunyai rumah piatu dan rumah miskin di Yogyakarta.

## BAB VI

### MASA PENDUDUKAN JEPANG

#### ***6.1 Pemerintahan dan Kenegaraan***

Masa pendudukan Jepang dibicarakan secara singkat dalam sejarah Jawa Tengah hanya untuk menilai seberapa jauh keadaan periode tersebut mempunyai peranan pada perjalanan sejarah daerah. Sebab pada hakekatnya sejarah pada masa pendudukan Jepang ini merupakan keadaan yang tidak banyak masalah yang menonjol. Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, selalu dihubungkan dengan ramalan “Jayabaya: yang menyebutkan masa singkat (31/2 tahun) tanah Jawa akan dijajah oleh bangsa Jepang. Masyarakat Jawa terlalu tebal kepercayaannya terhadap bunyi ramalan tersebut, sehingga ada yang mengatakan bahwa ramalan ini merupakan “Ilham Ilahi tentang nasib bangsa dan Pulau Jawa” (kepercayaan ini tidak bisa digoyahkan oleh akal).

Untuk daerah Jawa Tengah, pendaratan bala tentara Jepang dapat dikisahkan secara singkat sebagai berikut. Pada malam hari, 28 Februari, menjelang 1 Maret 1942 tentara Jepang melakukan pendaratan di Keresidenan Rembang, sekitar Lasem (Desa Kraggan), sebelah timur Kota Rembang dengan kekuatan antara tiga sampai empat divisi. Pendaratan dilakukan di daerah ini, karena lemahnya pertahanan di sana sehingga diharapkan dapat bergerak dengan cepat sehingga dengan mudah dapat memotong garis hubungan antara

pertahanan Belanda di Jawa Timur dan Jawa Barat. Seperti diketahui bahwa pertahanan tentara kolonial di Jawa Tengah kecil sekali, sebab menjelang akhir Februari 1942 Resimen Infanteri yang berkedudukan di Jawa Tengah dan pasukan Arteleri di Salatiga diangkut ke Jawa Barat. Yang tinggal adalah beberapa formasi *Landston* dan detasemen yang merupakan gabungan batalyon yang berada di Yogyakarta dan Surakarta serta kompi dari Legiun Mangkunegara. Akibatnya pertahanan pasukan kolonial Belanda hanya berhasil mengadakan aksi hambatan di sepanjang jalan yang dilalui pasukan Jepang. Daerah Surakarta dan Yogyakarta, beberapa hari kemudian jatuh ke tangan tentara kolonial Jepang.

Jenderal Coc kemudian memusatkan pasukannya di tepi barat Sungai Serayu dengan tujuan menghalangi gerak maju pasukan Jepang ke Daratan Tinggi Priangan. Karena Kota Cilacap pada 4 dan 5 Maret 1942 mengalami tekanan berat, maka terpaksa ditinggalkan oleh KNIL. Masuknya Jepang juga dari Desa Abal (Kebumen) dan Cilacap. Cilacap dijadikan tempat penampungan tentara Belanda untuk gerakan melarikan diri ke Australia.

Perlu diketahui bahwa suksesnya bala tentara Jepang yang dengan cepat menguasai wilayah Jawa Tengah ditentukan oleh persiapan yang mendahuluinya misalnya menempatkan mata-mata diberbagai kota, baik sebagai pedagang atau penjual pompa air seperti di Cepu dan Pekalongan. Secepatnya tentara Jepang mendarat di Jawa, dan dibentuk suatu pemerintahan untuk menggantikan pemerintahan kolonial Belanda yang telah mereka tinggalkan.

Pemerintah Bala Tentara Jepang didasarkan Undang-undang Bala Tentara *Dai Nippon* yang tercantum dalam *Osamu Seirei* No. 1.

Pasal 1 : Karena Bala Tentara *Dai Nippon* berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan keturunan dengan bangsa *Nippon*, dan juga hendak mendirikan ketenteraman yang teguh untuk hidup makmur bersama-sama rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Timur Raya bersama-sama, maka dari itu Bala Tentara *Dai Nippon* melangsungkan pemerintahan militer buat sementara waktu di daerah-

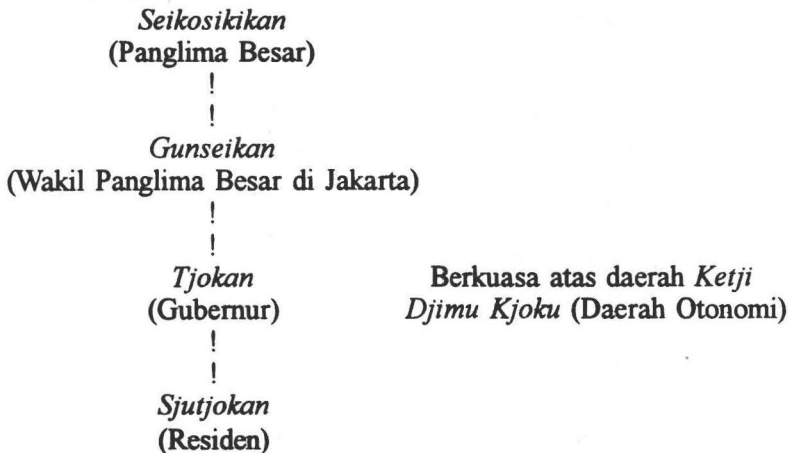
daerah yang telah didudukinya, agar supaya pada keamanan yang sentosa dan segera.

Pasal 2 : Pembesar Bala Tentara *Dai Nippon* memegang kekuasaan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan gubernur jenderal.

Pasal 3 : Semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah, buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

### Pemerintahan di Daerah dalam Masa Pendudukan

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Bala Tentara Jepang adalah pemerintahan militer. Kaum *sakura* (sipil) tidak banyak didatangkan. Sistem pemerintahan Jepang sebenarnya tidak berbeda dengan sistem pemerintahan Belanda, hanya terjadi sedikit perubahan yang cukup menarik, terutama pemerintahan di daerah. Kesatuan administratif yang beranggotakan keluarga-keluarga dibentuk dengan nama *tonari gumi* yang dipimpin oleh *tonari gumitjo*. Penyaluran distribusi, pengawasan mata-mata menjadi tanggung jawab *tonari gumitjo*, sehingga pemerintahan berjalan semakin lancar. Kesatuan beberapa kampung atau disebut kelurahan, juga disebut *ku* yang dipimpin oleh *kutjo* (lurah). Demikianlah selanjutnya, jabatan-jabatan secara vertikal diberi istilah Jepang. Secara struktural dapat digambarkan sebagai berikut.



**Keibodan**, pembantu polisi untuk menjaga keamanan di desa-desa.

**Seinendan**, pemuda-pemuda umur 18-25 tahun.

Gerakan A tiga diganti Putera (di bawah empat serangkai) diganti

**Djawa Hokokai**, untuk keperluan perang.

Putera di Semarang dipimpin oleh dr. Buntaran Suyudi, Winarno, Parada Harahap, Sudewo Notowidjojo, Mudigdo, Sugeng, dan lain-lain.

Di Indonesia, pada 5 September 1943 didirikan **Tjuo Sangiin** (DPR) dan **Tjuo Sangikai** (Dewan Daerah).

Pada 7 September 1943 atas usul Gatot Mangkupraja di bentuk Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air (Peta).

Berdasarkan maklumat **Osemu Seire** Nomor 44 Tentang "Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air". Corp latihan Perwira Peta di Bogor.

Dilatih :     - Calon *daidantjo* (komandan batalyon)  
                   - Calon *tjudantjo* (komandan kompi)  
                   - Calon *sodantjo* (komandan peleton)

Pada tanggal 18 Januari 1944 ditingkatkan menjadi Pendidikan Perwira Peta.

Di Jawa Tengah dibagi daidan-daidan sebagai berikut.

Keresidenan Banyumas	:	<i>Dai Itji Daidan</i> di Cilacap <i>Dai Ni Daidan</i> di Sumpyuh <i>Dai San Daidan</i> di Kroya <i>Dai Jon Daidan</i> di Banyumas
Keresidenan Pekalongan	:	<i>Dai Itji Daidan</i> di Pekalongan <i>Dai Ni Daidan</i> di Tegal
Keresidenan Semarang	:	<i>Dai Itji Daidan</i> di Semarang <i>Daidan Ni Daidan</i> di Welwri
Keresidenan Pati	:	<i>Dai Itji Daidan</i> di Pati <i>Dai Ni Daidan</i> di Rembang <i>Dai San Daidan</i> di Jepara
Keresidenan Kedu	:	<i>Dai Itji Daidan</i> di Gombong <i>Dai Ni Daidan</i> di Purworejo/Prembun <i>Dai San Daidan</i> di Gombong <i>Dai Jon Daidan</i> di Purworejo

- DI. Yogyakarta : *Dai Itji Daidan* di Wates  
*Dai San Daidan* di Yogyakarta  
*Dai Jon Daidan* di Wonosari
- DI. Surakarta : *Dai Itji Daidan* di Sala  
*Dai Ni Daidan* di Wonogiri

## 6.2 Gerakan Perlawanan

Pengorbanan dan kepahlawanan pemuda-pemuda Peta pada 29 Februari 1945 ternyata menggelorakan semangat keberanian dan tekad rakyat. Perlawanan tersebut merupakan ledakan rasa kebencian dan dendam rakyat terhadap kelaliman tentara pendudukan Jepang. Beberapa perlawanan di Jawa Tengah, misalnya peristiwa-peristiwa sebagai berikut.

- (1) Di Wonogiri : IPTAS (Ikatan Putera Tanah Air Sejati) sebagai organisasi ilegal di bawah pimpinan Soetarto dan Koemanto.
- (2) Di Semarang : Aksi-aksi ilegal yang berpusat di kantor *Sendenbu* Semarang (Markas Brimob, sekarang).
- (3) Di Kroya : Pemberontakan melawan Jepang di bawah *Sodantjo* Kusaeri (bawahan *Daidantjo* Soetirto), yang menggerakkan masyarakat Gumilir dan bertempur di Jembatan Slarong.

## 6.3 Organisasi Sosial Budaya

Pada masa pendudukan Jepang, semua gerakan yang bersifat politik dilarang, tetapi hasrat balatentara Jepang untuk memanfaatkan tenaga pemuda Indonesia guna memperkuat pertahanannya dalam melawan Sekutu, memberi peluang bagi kaum pergerakan untuk tampil dalam forum perjuangan. Setelah organisasi kepanduan KBI yang dipimpin oleh Dr. Murwadi dibubarkan, terbukalah kesempatan luas bagi Jepang untuk membentuk organisasi pemuda yang sesuai dengan cita-cita Jepang. Demikianlah secara berturut-turut telah dibentuk organisasi pemuda yang sesuai dengan cita-cita Jepang yaitu *Seinen Koorensyo* dan *Sinendan* bagi para pemuda dan *Gakutotai* bagi para pelajar sekolah menengah.

Disamping itu ada juga gerakan para pemuda yang bersifat ilegal, misalnya yang dipimpin Somowarsito, Suprodjo, Susilo, dan lain-lain. Ada pula yang seolah-olah memihak Jepang tetapi kemudian berdiri di atas kekuatannya sendiri. Misalnya RP. Suroso, RAA. Sosrodiprodjo, dan R. Gondomertosuprodjo. Tokoh-tokoh ini bermaksud menduduki pos-pos vital yang kelak pasti dibutuhkan dalam perjuangan, sehingga setelah proklamasi RP. Suroso dapat mengoperkan seluruh pemerintahan sipil di Keresidenan Kedu dan bahkan pada awal kemerdekaan sebagai gubernur Jawa Tengah.

Sementara itu pada masa pendudukan Jepang RP. Suroso, diangkat sebagai residen atau *syutjokan*. RAA. Sosrodiprodjo menjadi *kentjo* dan R. Gondomertosuprodjo menjabat walikota atau *syitjo*, Magelang. Peristiwa pengangkatan ini terjadi pada tahun 1943.

Keadaan Jepang yang semakin lemah (karena desakan Sekutu) mengakibatkan pengerahan tenaga pemuda ditingkatkan. Sebagai contoh, kubu-kubu pertahanan yang dikerjakan ialah kubu-kubu Proyek ini juga seperti gua perlindungan Gelapngampar di hulu Bengawan Sala untuk persiapan perang gerilya. Adapun tenaga yang mengerjakan adalah beribu-ribu rakyat di daerah Muntilan, Sawangan, Ngluwar, dan Grabag sebagai tenaga *romusha*. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia, kelaparan, kepayahan, siksaan, dan lain-lain.

Pada waktu Jepang membentuk *Heiho* dan *Peta*, delapan orang dikirim dari Magelang untuk mendapat pendidikan calon perwira Peta di Bogor. Di antaranya ialah Raden Muhammad Susman sebagai calon Komandan Batalyon dan Suryosumpeno sebagai calon komandan peleton. Keresidenan Kedu banyak mengirimkan para pemudanya, di antaranya Sarbini, Ahmad Yani, Kariadi Abdulkadir, Slamet Suharman, Bambang Sugeng, dan lain-lain.

Bilamana di pusat dibentuk organisasi pemuda atas inisiatif para tokoh bangsa Indonesia yang diberi nama Barisan Pelopor atau *Shuisintai*, maka di Jawa Tengah juga dibentuk organisasi tersebut. Pada 13 Oktober 1944 di Magelang dibentuk Barisan Pelopor dengan pimpinan Dokter Marjaban, Tartib Prawirohardjo, Sumowarsito, Atmodipurwo, dan lain-lain. Perang mengakibatkan keadaan sosial ekonomi di Indonesia menjadi semakin parah. Barang-barang yang

sebelumnya berasal dari luar negeri hilang dari pasaran. Hal inilah yang mengakibatkan lahirnya orientasi agraris. Pada dasarnya produksi pertanian diusahakan untuk mendukung kepentingan militer, sehingga bahaya kelaparan terjadi di mana-mana, termasuk di daerah Jawa Tengah. Sebaliknya, Jepang pengangkut beras dari daerah-daerah subur di Jawa Tengah dan teknis pengangkutannya selalu dilakukan seolah-olah dalam keadaan *kusukeiho* (tanda bahaya perang) untuk mengelabui rakyat.

Karena sulitnya mencari bahan makanan, maka rakyat terpaksa mencari penggantinya misalnya bonggol pisang, walur, ubi-ubian, bekicot, dan lain-lain.

Pada zaman ini dihidupkan suatu sistem kerja bakti (*kenroohoshi*) yang digerakkan oleh *gumico*. Kerja bakti ini dilakukan oleh semua rakyat dari lapisan terendah sampai tertinggi sehingga hal ini melahirkan rasa persatuan bagi rakyat. Di samping itu juga dibentuk tenaga kerja *romusha* yang kebanyakan dikirim ke luar Jawa dan banyak dari mereka tidak pulang ke daerahnya kembali. Para *romusha* ini dipekerjakan untuk membuat kubu-kubu pertahanan militer di Jawa, misalnya terowongan saluran air di Bligo, benteng di Nusakambangan, dan tempat-tempat lain yang strategis.

### Pendidikan

Penyederhanaan pendidikan juga dilakukan bermacam-macam pendidikan disederhanakan dari tingkat Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Tinggi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar. Di samping bahasa Jepang sebagai bahasa pokok bagi mata pelajaran penting dengan huruf Jepang, *katakana* dan *hiragama*. Semua buku-buku bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sehingga mempercepat perkembangan bahasa Indonesia dan Ilmu pengetahuan sampai pelosok-pelosok daerah. Bangsa Indonesia juga dididik sebagai militer untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.



## BAB VII

### MASA KEMERDEKAAN

#### *7.1 Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan*

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| (1) KNI Daerah Semarang diketuai         | Wongsonegoro SH.        |
| (2) KNI Daerah Purwokerto                | Iskak Tjokrodisurjo SH. |
| (3) KNI Daerah Yogyakarta diketuai       | Moh. Saleh.             |
| (4) KNI Daerah Surakarta diketuai        | Soemodiningrat SH.      |
| (5) KNI Daerah Magelang diketuai         | Dr. Mardjaban.          |
| (6) KNI Daerah Pekalongan/Tegal diketuai | Tjitrosatmoko.          |

Pada 18 sampai 19 Agustus 1946 Peta & Heiho dibubarkan oleh Jepang, dan kemudian dibentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) yaitu:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) BKR Semarang dipimpin   | Soetrisno Soedomo.  |
| (2) BKR Salatiga dipimpin   | Moehari.  |
| (3) BKR Purwokerto dipimpin | Soedirman.  |
| (4) BKR Yogyakarta dipimpin | Soedarsono.   |
| (5) BKR Surakarta dipimpin  | Soetarto, A. Fadjar, GPA,<br>Poerbonegoro, Soenarto,<br>Koesoemodirdjo, dan<br>GPH Djatikoesoemo. |
| (6) BKR Pati dipimpin       | Helan Iskandar, diganti<br>oleh Dr. Goenawan.   |

- (7) BKR Kedu dipimpin Soesman.  
 (8) BKR Pekalongan dipimpin KH. Iskandar Idris.

Di samping BKR terbentuk organisasi pemuda pejuang : API, AMRI, AMT, dan lain-lain.

### *7.1.1 Tumbuhnya Pemerintahan RI Daerah*

Keadaan pemerintahan pusat masih banyak berperan pada daerah-daerah. Pada 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan telah mengambil keputusan mengenai daerah-daerah Republik Indonesia, antara lain (a) Daerah terdiri atas delapan provinsi dan (b) tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Untuk wilayah Jawa tengah pada 5 September 1945 R. Pandji Soeroso (Usman Ralibi, *Documenta Historica I*, Bulan Bintang, Jakarta, 1953) diangkat sebagai gubernur dan pada 13 Oktober 1945 diganti oleh Wongsonogoro, sedangkan R. Pandji Soeroso diangkat menjadi komisaris tinggi daerah Surakarta - Yogyakarta yang berkedudukan di Solo, (*Sukirno Semarang, Japan Kobes Semarang*, 1956, hal. 99) yang sekaligus merangkap pimpinan KNI Semarang, KNI merupakan semacam badan legislatif KNIP yang dibentuk berdasarkan rapat 23 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut antara lain diputuskan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan Pusatnya di Jakarta.
- (2) KNI adalah penjelmaan kebutuhan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
- (3) Usaha KNI ialah :
  - (a) menyatakan bahwa rakyat Indonesia hidup sebagai bangsa yang merdeka.
  - (b) mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.
  - (c) membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.
  - (d) membantu pimpinan dalam menyelenggarakan cita-cita daerah untuk kesejahteraan umum.

- (4) Komite Nasional di Pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada Komite Nasional di daerah.

Di mana perlu di daerah didirikan pusat daerah yaitu untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. Berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk daerah Jawa Tengah telah dibentuk KNI Daerah. BKR bukan tentara melainkan korps kesatuan setempat untuk menjamin ketentraman umum. BKR dan KNI di daerah-daerah tidak sekedar membantu, tetapi menjadi pelopor kegiatan yang riil di daerah, dalam menegakkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kekuasaan Republik Indonesia.

### *7.1.2 Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan*

#### *7.1.2.1 Merebut Senjata Jepang*

Langkah pertama dalam mempertahankan kemerdekaan adalah mengadakan gerakan merebut senjata dari Jepang. Mula-mula bersifat perseorangan, kemudian dengan aksi-aksi yang teratur. Masa ini berlangsung dari 1945 -- 1946. Cara yang ditempuh oleh para pemimpin pada waktu itu ialah dengan mengirimkan delegasi untuk berunding. Bila Jepang tidak mau menyerahkan senjata, dilakukan intimidasi pengepungan massa rakyat dengan persenjataan sederhana. Fase ini penuh heroisme dan patriotisme terutama pada bulan-bulan September - Desember 1945. Berikut dikemukakan beberapa contoh.

- (1) Di Banyumas, setelah PETA dibubarkan pada 22 Agustus 1945, pada 1 September 1945 diadakan rapat antara bekas-bekas anggota Peta. Rapat tersebut memutuskan untuk mengirimkan delegasi yang dipimpin Soedirman, Iskandar Tjokrodisurjo, dan Soetrito untuk berunding dengan pihak Jepang. Delegasi tersebut dibarengi dengan pengepungan masa rakyat terhadap markas Jepang. Sebaliknya tentara Jepang berusaha membakar gudang senjata, sehingga membangkitkan kemarahan dan terjadi insiden. Akhirnya Jepang menyerahkan senjata-senjata tersebut dan diterima oleh Gatot Subroto.
- (2) Perebutan senjata di Pekalongan, Tegal, dan Yogyakarta.
- (3) Di Magelang perebutan senjata pada 24 September 1945 didahului peristiwa penyobekan bendera merah-putih oleh Jepang di Hotel NITAKA. Hal tersebut menyebabkan kemarahan rakyat dan

menyerang gedung *Ken Pei Tai*. Sebenarnya Jenderal Nakamura, komandan pasukan Jepang akan menyerahkan senjata secara diam-diam kepada pemuda Indonesia, tetapi akhirnya gagal karena tekanan Inggris dan telah didahului oleh gerakan-gerakan pemuda yang tidak sabar lagi.

- (4) Di Surakarta, Jepang menunjukkan kekuatannya sehingga pada 12 Oktober 1945 rakyat mengepung markas Jepang dan terjadilah tembak-menembak. Perlu dicatat bahwa peristiwa di Banyumas berbeda dari yang lain, sebab di situ tidak terjadi tembak-menembak sehingga tidak ada korban yang jatuh. Hal ini sebagai bukti berhasilnya diplomasi dan intimidasi massa.
- (5) Di Semarang, "Pertempuran Lima Hari di Semarang" terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945 - 20 Oktober 1945. Peristiwa ini diawali oleh pemuda-pemuda Perguruan Perekonomian Taman Siswa, berhasil menduduki sebuah gedung di Candibaru tempat tinggal opsir-opsir Jepang. Sementara itu Angkatan Muda mengadakan rapat AMRI distasiun Jomblang. Pada 15 Oktober 1945 serdadu Jepang dari *Kidobutai* Djatingaleh mengepung gedung di atas. Serdadu ini berasal dari *Nakamura Butai* di Magelang. Dalam peristiwa ini Wongsonegoro SH. ditangkap, pemuda-pemuda ditawan oleh *Ken Pei Tai*, sehingga rakyat marah. Tentara Jepang dibagi dua, yang pertama melalui J. Oei Tiong Ham (Jl. Gajah Mada) dan ke Asrama TKR (SMP Mugas), terus ke kota. Yang kedua menuju Gergaji terus ke CBZ (dahulu RS. Pusara sekarang RS. Karyadi) dan mengadakan pembunuhan terhadap pegawai-pegawai CBZ, terus ke gedung NIS, di sini terjadi pertempuran. Dokter Karyadi ketika memeriksa air minum (yang dikabarkan diracun) di *Waterreservoir* Candi ditembak mati oleh Jepang. Sebaliknya pemuda-pemuda menawan Jepang di Sekolah Pelayaran Jl. Pandanaran dan Penjara Bulu (yang hendak dibunuh seluruhnya). Kemudian pemuda-pemuda mundur. Di RRI Semarang, Ibnu Parna berpidato menegaskan hasil rapat di Grang (Gelora) sehingga paginya Jepang mengadakan terror terhadap rakyat Semarang. Berpangkal dari tindakan inilah kemudian meletus perlawanan para pemuda. Perlawanan tersebut dilakukan dari beberapa arah. Dari timur, menyerbu pemuda-pemuda dari

Genuk, Demak, Pati Cepu dan lain-lain. Dari tenggara & selatan, pemuda dari Purwodadi, Solo, Yogya, Magelang, Salatiga, Ambarawa dan Banyumas. Dari barat, pemuda-pemuda Kendal, Pekalongan, Purwokerto dan lain-lain. Markas dari para pemuda terletak di STM Kaarenureg (dr. Cipto). Akhirnya Wongsonegoro, SH. (gubernur Jawa Tengah) yang ditawan ditekan untuk menenangkan para pemuda dan menenteramkan suasana, sehingga berahirlah perlawanan para pemuda di kota ini. Akibat ini dari pihak pemuda jatuh korban 2.000 orang, sedangkan di pihak Jepang 850 orang tewas.

#### *7.1.2.2 Menghadapi Sekutu*

Mempertahankan Proklamasi dan Kemerdekaan tidak saja terhadap Jepang, tetapi juga terhadap Sekutu yang telah keluar sebagai pemenang dalam Perang Dunia II. Pada 6 September 1945 berbagai pemancar Radio Negara Sekutu telah menyiarkan bahwa Laksamana Lord Louis Mounbatten, panglima Tentara Sekutu untuk Komando Asia Tenggara (SEAC) yang bermarkas di Singapura, telah membantah perihal pembentukan Republik Indonesia, serta memerintahkan kepada panglima tentara Jepang di Indonesia untuk membubarkan Republik Indonesia serta menangkap pemimpinnya dan diserahkan pada Sekutu. Sekutu mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945 sesudah Pertempuran Lima Hari).

Pada 5 Desember 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI tentang pembentukan TKR di bawah Kepala Staf Umum Urip Sumohardjo yang bermarkas tinggi di Yogyakarta. Pegangan Pemerintah RI menghadapi Sekutu ialah hasil Perjanjian Postdam dari siaran SEAC di Singapura yang isinya bahwa Sekutu akan melindungi dan mengungsikan tawanan-tawanan perang dan tawanan biasa, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang, dan menjaga keamanan dan ketenteraman agar kedua maksud itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Pada 20 Oktober 1945 Sekutu mendarat di Semarang, kemudian terus ke Ambarawa dan Magelang (26 Oktober 1945). Kedatangan mereka ini tanpa gangguan dari tentara Republik Indonesia dan dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Kemudian dilakukan pertemuan

pertama antara Pemerintah RI di Semarang dengan Sekutu yang dihadiri oleh Wongsonegoro SH dengan Jenderal Bethel dan melahirkan keputusan : RI menyediakan makanan bagi Sekutu dan Sekutu tidak akan mengganggu kedaulatan kita.

### **Palagan Ambarawa**

Berdasarkan pernyataan resmi Sekutu, Rakyat Indonesia tidak menaruh curiga menyambut kedatangan tentara Sekutu. Mereka disambut secara tulus sebagai ciri khusus dari bangsa Indonesia. Namun demikian ketulusan kita diikuti dengan kewaspadaan, sebab curiga terhadap sesuatu di balik pernyataan resmi. Kewaspadaan itu ada manfaatnya, karena ternyata pernyataan resmi hanya merupakan tabir untuk maksud yang lain, sebab di samping bertugas melindungi dan mengurus tawanan perang ternyata mereka membantu Belanda untuk kembali menjadi penguasa di Indonesia. Pasukan Belanda (NICA) yang ikut membonceng tentara Sekutu tersebut membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan di Ambarawa dan Magelang. Kejadian tersebut kemudian menimbulkan serentetan peristiwa-peristiwa kepahlawanan bangsa Indonesia khususnya di Jawa Tengah, beberapa peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Secara strategis Magelang di bawah Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini yang mempunyai kekuatan lima batalyon riel. Kekuatan-kekuatan yang lain adalah BPRI, PESINDO, HISBULLAH, SABILILAH, API, Barisan Banteng, KRIS, Polisi Istimewa dan lain-lain.

Karena Sekutu mulai mengabaikan kekuasaan Pemerintah RI dan Belanda ingin berkuasa lagi, maka mulailah rakyat bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sehubungan dengan itu maka berturut-turut terjadi pengiriman pasukan-pasukan sebagai berikut.

- (1) Purwokerto mengirimkan TKR (Batalyon I dipimpin Imam Handrongi dan Batalyon II dipimpin Mayor Soegeng Tirtosewojo), keduanya dipimpin Letkol Isdiman, komandan Resimen I Dev. V Purwokerto.
- (2) Dev. III Yogya mengirimkan 2 batalyon (Batalyon X dipimpin Letkol Soeharto dan Batalyon VIII dipimpin Mayor Sardjono),

keduanya dipimpin Letkol Palal dan Letkol Oemar Slamet. Di samping itu dikirim juga TRM (Tentara Rakyat Mataram) dipimpin Soetardjo.

(3) PI (Polisi Istimewa) dipimpin Oni Sastroatmodjo

Secara kronologis dapat diutarakan sebagai berikut. Pada 2 Oktober 1945, terjadi perundingan antara Sekutu dengan RI tentang penghentian tembak-menembak. Pada 21 November 1945, Sekutu mundur dari Magelang ke Ambarawa, kemudian tentara RI mengejanya. Dengan demikian mulailah Palangan Ambarawa. Sekutu mulai mengadakan terror terhadap penduduk, mulai dari Pingit sedangkan di Ambarawa sendiri telah terjadi pertempuran antara TKR dengan Sekutu (Pimpinan Mayor Soemarto). TKR dan rakyat telah mengepung Ambarawa. Pada 26 Oktober 1945, Letkol Isdiman, perwira kepercayaan Kolonel Soedirman, gugur di Desa Kelurahan oleh serangan udara. Kolonel Soedirman mengambil alih pimpinan. Pada 5 Desember 1945, Benteng Banyubiru jatuh ke RI. Pada 9 Desember 1945, Lapangan terbang Kalibanteng jatuh pula. Akibatnya Sekutu mundur ke Semarang. Sementara itu pada 12 November 1945, diadakan Konferensi I - TKR di Yogya, dengan acara pemilihan panglima besar. Sebagai calon-calon, tercantum nama-nama : Soedirman, Sri Sultan, Gatot Subroto, Amir Syarifudin, Oerip Sumohardjo. Dalam rapat tersebut Kolonel Soedirman (Panglima Divisi V Banyumas) terpilih sebagai panglima besar. Pada 18 Desember 1945 Soedirman diangkat oleh presiden sebagai panglima besar dengan pangkat letnan jenderal, sedangkan Oerip Sumohardjo sebagai kepala staf umum dengan pangkat jenderan mayor.

Karena keadaan Jakarta dilihat dari segi keamanan sudah tidak memungkinkan lagi dipakai sebagai ibukota negara, maka pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Untuk melaksanakan *Yogya Agreement* dibentuklah panitia untuk mengembalikan bangsa Jepang dan bangsa Asing lain (POPDA) di bawah pimpinan Jenderal Mayor Soedibyo. Pengangkatan tawanan perang dimulai 29 April 1946.

### 7.1.2.3 *Peristiwa Tiga Daerah*

Motif dan pandangannya : perongrongan terhadap Pancasila. Penyimpangan-penyimpangan dari rel revolusi Indonesia, yang sebenarnya, karena penyesatan-penyesatan oleh ideologi-ideologi dan alam-alam pikiran liberalisme dan komunisme/Marxisme-Leninisme dan paham-paham lain serta oknum-oknum yang bertentangan dengan jiwa Pancasila. Situasi-situasi sesudah Proklamasi yang masih hangat dimanfaatkan oleh golongan mereka untuk mengadakan pengacauan. Adapun biang keladinya adalah Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah (GBP) yaitu suatu organisasi yang berusaha menggabungkan badan-badan perjuangan dari tiga daerah, yaitu Brebes, Tegal, Pemalang yang dipimpin oleh Soekirman, seorang tokoh komunis (sebagai ketua) dan Soewignyo (sebagai wakil ketua). Juga terdapat gerakan tanpa nama yang dipimpin oleh Sjachjani alias Kutil dari Talang yang tindakannya sangat ekstrim dan kejam.

Bulan November 1945 mereka mulai melancarkan penyerbuan terhadap timbunan padi/beras di penggilingan-penggilingan yang kemudian dirayah oleh rakyat banyak. Diteruskan perusakan-perusakan yang lain. Juga melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap keturunan-keturunan Belanda, Ambon, dan Cina. Dengan adanya peristiwa tersebut Residen Pekalongan Md. Besar datang ke Tegal untuk berunding dengan GBP tetapi sia-sia saja.

Selanjutnya M.I. Sayuti (Sayuti Melik) atas nama gubernur Jawa Tengah bersama Letkol Iskandar Idris, komandan Resimen TKR Pekalongan, meneruskan usaha tersebut, tetapi keduanya bahkan ditangkap di Slawi. GBP di bawah pengaruh komunis ingin merebut pemerintahan, dengan menangkap bupati-bupati yang tidak sepaham dengan mereka. Pada 19 Desember 1945, GBP mengadakan pertemuan dengan Wakil Residen Pekalongan RM. Soeprapto bersama para pembesar polisi dan TKR di Pemalang, untuk mengangkat Sardjio (dari Purwokerto) sebagai pengganti RM. Soeprapto. Hal ini merembes ke daerah Kendal, bupati, wedana dan camat didaulat dan ditahan di Pabrik Gula Gula Cepiring. Hal tersebut mengakibatkan kemarahan rakyat. Residen Sardjio ditangkap. Serangan dilanjutkan pada 17 Desember 1945 dipimpin oleh Letkol Soegijono dan Lettu Moechlis. Tindakan-tindakan mereka antara lain, memindahkan Sardjio cs ke



Yogyakarta, mengangkat residen baru dan bupati-bupati, Residennya Soemitro Kolopaking dan kemudian diganti R Soeprapto, dan mengadili yang bersalah melalui Pengadilan Negeri Pekalongan. (Kutil pada 12 Oktober 1946 dihukum mati).

### **Menumpas Pemberontakan Tiga Juli**

Gerakan Tiga Juli sebagai ekses perjuangan nasional berupa percobaan untuk merobohkan pemerintah yang sah yang dipegang oleh St. Sjahrir, di mana Panglima TRI Jenderal Myor Soedarsono terlibat di dalamnya. Sebagai akibat dari perundingan Sjahrir dengan Belanda 10 Februari 1946, Tan Malaka dan kawan-kawan membentuk Persatuan Perjuangan (143 organisasi) dan dalam rapatnya 15 Januari 1946 di Solo yang berhasil menyusun program sebagai berikut.

- (1) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%
- (2) Pemerintah Rakyat
- (3) Tentara Rakyat
- (4) Melucuti tentara Jepang
- (5) Mengurus tawanan bangsa Eropa
- (6) Menyita dan menyelenggarakan pertanian musuh (kebun)
- (7) Menyita dan menyelenggarakan Perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang) dan lain-lain.

Akibat gerakan Tan Malaka tersebut, Kabinet Sjahrir jatuh. Kabinet ini diangkat lagi Maret 1946, sehingga pertentangan antara Sjahrir dengan Tan Malaka makin menjadi. Jenderal Soedirman berusaha keras untuk meredakan, tetapi Jenderal Mayor Sudarsono memerintahkan Mayor/AK. Jusuf, komandan Batalyon 64 Dev.III/kepala Tentara Pejagaan Kota untuk mengadakan penyingkiran terhadap Sjahrir dengan stafnya (27 Juni 1946). Diculiklah St. Sjahrir, Mayor Jenderal Soedibyo, Soemitro SH, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, dan lain-lain.

Akibatnya lahirlah Maklumat Presiden No. 1 Tahun 1946 - 29 Juni 1946, tentang pengambilan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya oleh presiden. Sutan Sjahrir dan kawan-kawan ditahan oleh Mayor Jenderal Soedarsono di Pesanggrahan Paras Boyolali. Pada 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Soedarsono dengan tawanan-tawanan politik menghadap presiden untuk memaksakan dan menandatangani daftar

pimpinan politik dan Kementrian Negara baru yang sesuai dengan kehendak pihak Persatuan Perjuangan, tetapi rencana tersebut ditolak Presiden Soekarno, Soedarsono dan Jusuf ditangkap.

#### 7.1.2.4 Menghadapi Belanda Perang Kemerdekaan I

Pada 27 Mei 1947, Komisi Jenderal (Delegasi Belanda) mengirim nota yang bersifat ancaman yang berisi tuntutan yang terdiri atas lima pasal yakni :

- (1) Membentuk bersama suatu pemerintah peralihan (*ad interim*)
- (2) Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan devisen bersama
- (3) Republik supaya mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah pendudukan Belanda
- (4) Menyelenggarakan bersama ketertiban dan keamanan seluruh Indonesia, termasuk daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (*gendarmarie* bersama)
- (5) Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Pada 8 Juni 1947, Delegasi RI menjawab sebagai berikut.

- (1) Setuju membentuk Pemerintahan Peralihan yang mempunyai kewajiban membuat persiapan sidang Konstituante, dan mempersiapkan penyerahan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Federal Nasional. Selama masa peralihan itu kedudukan *de facto* Republik tidak akan dikurangi.
- (2) Setuju mendirikan lembaga devisen untuk seluruh Indonesia, sesudahnya terbentuk Pemerintah Peralihan tersebut.
- (3) Hendaknya disusun Badan Pembagian Makanan untuk seluruh Indonesia, sesudahnya terbentuk Pemerintahan Peralihan oleh Pemerintah peralihan tersebut.
- (4) Kewajiban mengurus ketertiban dan keamanan di daerah Republik Indonesia sendiri.
- (5) Perdagangan ekspor dan impor dijalankan menurut petunjuk dari Pemerintah Peralihan tersebut.
- (6) Soal-soal besar mengenai penyelenggaraan Persetujuan Linggarjati diurus oleh kedua delegasi. Keputusan-keputusan kedua delegasi tersebut dijalankan oleh Pemerintah Peralihan.

Komisi Jenderal Belanda mengirim *aide memorie* yang isinya menekan RI untuk menerima nota Komisi Jenderal tersebut. Pada 26

Juni 1947 Kabinet Sjahrir jatuh, lahirilah Maklumat Presiden No.6 tahun 1947 Kabinet Sjahrir jatuh, lahirilah Maklumat Presiden No. 6 tahun 1947 : “Berhubung dengan gentingnya keadaan pada waktu sekarang, maka kami, Presiden Republik Indonesia, pada 27 Juni 1947 mengambil kekuasaan sepenuhnya untuk sementara waktu”. Presiden segera membalas *aide memorie* tersebut, tetapi tidak memuaskan Belanda.

Jenderal Spoor mengeluarkan perintah perang sebagai berikut.

- (1) Minggu, 29 Juni 1947 dimulai dengan pengoperan semua kendaraan oleh militer Belanda
- (2) Minggu petang dimulai dengan konsolidasi semua pasukan yang akan ikut dalam aksi
- (3) Senin, 30 Juni 1947, pukul 03.30 dimulai dengan *afleidingsactie van uit aanvalspunten*
- (4) Senin, pukul 06.00 dimulai dengan serangan umum di seluruh front
- (5) Di daerah yang telah diduduki oleh tentara Belanda harus diadakan penangkapan besar-besaran
- (6) Semua rumah dari bangsa apa pun juga harus digeledah
- (7) Perintah ini telah berlaku jika pada hari Sabtu, 28 Juni 1947 pukul 14.00 tidak dicabut kembali.

Jenderal Soedirman mengeluarkan perintah sebagai berikut.

- (1) APRI dan Rakyat seluruhnya harus tetap tegas, tenang, awas, waspada dan siap sedia (jangan lengah)
- (2) Jika di salah satu tempat tentara Belanda telah mulai mengadakan serangan, maka dari pihak Indonesia harus segera mengadakan perlawanan sebaik-baiknya, tidak usah menunggu komando lagi dari pucuk pimpinan APRI
- (3) Gerakan umum mengenai seluruh Indonesia untuk mempertahankan negara dijalankan dengan perintah dari pucuk pimpinan APRI
- (4) Jika pertempuran besar-besaran yang sesungguhnya didahului (dijalankan) oleh tentara Belanda, maka diadakan perlawanan serentak (total) yang sebaik-baiknya
- (5) Mulai dari saat tersebut dalam ayat 4 maka sudah tidak berlaku lagi garis demarkasi, gencatan senjata, dan perjanjian lain

- (6) Pertempuran dilakukan serentak terus sampai Negara Indonesia merdeka dapat kita miliki dalam keadaan aman, adil dan makmur
- (7) Pegang teguh persatuan, lenyapkan paham golongan, Negara Indonesia dalam keadaan bahaya, Rakyat dan Bangsa Indonesia seluruhnya yang wajib diselamatkan

Pada 3 Juli 1947 dibentuk Kabinet Amir Sjarifudin. Di sini terjadi perang nota. Selanjutnya Belanda mengirim usul sebagai berikut.

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 1947 pukul 23.59 Republik memerintahkan menghentikan permusuhan (yang bersenjata atau yang tidak bersenjata, menghentikan perusahaan-perusahaan, blokade makanan dan aksi terhadap daerah di luar Republik).
- (2) Selambat-lambatnya 17 Juli 1947, dilakukan aturan-aturan untuk menghentikan semua propaganda anti Belanda.
- (3) Selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 1947 pukul 18.00 harus dimulai usaha mengundurkan tentara Republik sampai 10 km dari batas daerah-daerah yang diduduki Belanda, di mana pemeliharaan keamanan sementara dioper oleh polisi biasa sampai terbentuknya polisi bersama.
- (4) Selambat-lambatnya pada 21 Juli 1947 pengunduran tentara dari perbatasan itu harus selesai.
- (5) Sesudah itu barulah dari pihak Belanda dilakukan usaha pergantian tentara di daerah perbatasan dengan polisi sampai dibentuknya polisi Bersama.

Pidato Amir (16 Juli 1947) menyatakan "Dengan penuh rasa tanggung jawab, pemerintah menolak tuntutan Belanda itu. Kita mengetahui apa yang akan terjadi akibatnya, tetapi pemerintah Republik beranggapan bahwa kebenaran dalam hal ini adalah di pihaknya. Kita suka damai, tetapi damai dengan kebenaran. Kita mencari penyelesaian politik dengan damai, tetapi dalam usaha ini dipersukar oleh pihak Belanda dengan tuntutan-tuntutan yang tidak berpihak Republik yang bersalah.

Pada 20 Juli 1947 tentara Belanda menyerang RI dari segala penjuru, yaitu dari Semarang, Jawa Barat, dan Laut di pantai Cilacap. Dari Semarang ke selatan, Belanda dapat menduduki Ungaran melalui Gunungpati, ke barat menduduki Kaliwungu (28 Juli 1947), dan ke timur menduduki Demak (4 Agustus 1947) dengan segala perlawanan

dari rakyat dan APRI). Pada 24 Juli 1947 Belanda sampai Pemalang, Tegal, dan 31 Juli 1947 sampai Probolinggo. Adapun yang melalui pantai Cilacap mengalami kegagalan.

Perang Kemerdekaan I di Jawa Tengah secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Divisi II Sunan Gunungjati - membantu Divisi Siliwangi mempertahankan daerah Gunung Slamet dan Baturaden, tetapi Belanda (setelah dari Barat dan Cilacap gagal) menyerang dari belakang yaitu melalui Slawi, Bumijawa, Pulosari, Belik, Bobotsari, Probolinggo, Banyumas, ke Purwokerto. Divisi Gunungjati dipindah ke Banjarnegara untuk mengadakan gerilya melalui Cilacap, Purwokerto, Purbolinggo, Brebes, Tegal. Divisi III P.Diponegoro dipindah dari Yogyakarta ke Magelang. Secara kronologis adalah sebagai berikut :

- 22 Juli 1947 : Bawen, Tuntang dan Ambarawa diduduki musuh.
- 23 Juli 1947 : musuh dari Ambarawa ke Magelang dipukul mundur oleh Resimen 19 Batalyon Ahmad Yani di Ngipik.
- 2 Agustus 1947 : Belanda menduduki Weleri, Kendal dan Kali Bodri.

### **Perang Kemerdekaan II**

Serangan ke Yogyakarta 19 Desember 1948 secara mendadak pada pukul 05.15 dengan pesawat udara (Lapangan Terbang Maguwo, dengan delapan pemburu & pemohon Lockheed dan Michell). Dalam peristiwa ini yang tertahan di Maguwo adalah deputi pilot (opsir piket) Kasmiran, sehingga gugur bersama 40 anak buahnya (06.00 - 07.00). Pada pukul 08.00 Maguwo dikuasai Belanda dan pukul 16.00 menguasai Kota Yogyakarta. Belanda kemudian berhasil menahan presiden, wakil presiden, KSAU Komodor Surjadarma, dan lain-lain, sedangkan Panglima Besar Soedirman, TB Simatupang, Kol. AH. Nasution, dan lain-lain meninggalkan kota untuk mengadakan gerilya. Serangan Belanda dari darat melintasi garis demarkasi Perjanjian Renville.

Pada 19 Desember 1948 Belanda dari Gombong ke timur, dapat menduduki Karanganyar dan Prembun (19 - Desember 1948).

Kemudian Purworejo, Jln. Kereta Api Gombang - Purworejo. Kebumen terbagi atas dua bagian. Bagian utara meliputi Kecamatan Sempor, Karanganyar, Sadang dan sebagai pusat pemerintahan, sedangkan bagian selatan meliputi Kecamatan Puring, Pertahanan, Klirong, Bulus pesantren, Ambal, dan Muntilan sebagai pusat ketentaraan.

Dari Purworejo Belanda menuju Magelang (20 Desember 1948), berhasil menduduki Salam, kemudian Muntilan (21 Desember 1948) dan Salaman sehingga pasukan dari Yogyakarta dapat bertemu.

Perlawanan dari pihak Republik di mulai 20 Desember '948. Staf Brigade IX/III meninggalkan Kota Magelang menuju ke Bandongan (24 jam), kemudian ke Genita (25 Desember 1948), dipecah menjadi tiga, yaitu :

- (a) Staf X dipimpin Komandan Brigade IX/III Mayor A. Yani, menuju ke timur, langsung memimpin Batalyon Soeryosumpeno dan Daryanto.
- (b) Staf Y dipimpin Kastaf Mayor Ismullah menuju Candirotro, langsung memimpin Batalyon Panudju dan Soebintoro.
- (c) Staf Z dipimpin Kapt. Soemarto berkedudukan di daerah G. Sumbing sebagai perantara suplai dari Divisi III kepada Brigade IX.

Dari Salatiga Belanda bergerak ke Sala (21 Desember 1948). Letkol Slamet Rijadi, komandan dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati, berhasil menyatukan pasukan-pasukan yang tercerai berai akibat Pemberontakan Madiun, sehingga Brigade V dapat disusun lagi. Pukul 18.00 Komandan Brigade V/II sempat mengeluarkan perintah bumi hangus. RRI diselamatkan ke daerah Balong oleh Maladi dan kawan-kawan. Slamet Rijadi keluar dari Sala ke utara mengadakan gerilya. Para tawanan PKI/Madiun dapat lolos dan ikut ambil bagian dalam gerakan-gerakan gerilya melawan Belanda, kecuali 11 orang yaitu Amir Sjarifudin, Maruto Darusman, Soeripno, Oei Gwee Hwat, Djoko Sujono, Katam Hadi, Ronomarsono, D. Mangkoe, Sardjono, Harjono, dan Soekarno. Mereka dijatuhi hukuman mati (tembak) (pada 19 -- 20 Desember 1948, pukul 23.30 di Desa Ngalihan, Tulung-Karanganyar). Penggabungan tawanan-tawanan komunis dengan TNI adalah sebagai usaha untuk merehabilitasi dirinya.

Aksi militer Belanda tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, yaitu :

- (1) Kabinet NIT dan Negara Pasundan meletakkan jabatan
- (2) DK-PBB minta agar KTN melaporkan keadaan tersebut (20 Desember 1948). Laporan ditandatangani oleh Wakil AS M. Chochran dan Wakil Australia TW Cuuts, sedangkan anggota-anggota lainnya sedang berada di Kaliurang.
  - (a) Pihak Belanda waktu membatalkan persetujuan gencatan senjata tidak menurut apa yang sudah ditetapkan dalam artikel angka sepuluh dari persetujuan itu.
  - (b) KTN tidak mengetahui apakah pemusatan tentara Republik atau latihan perang-perangan yang diadakan oleh Tentara Republik dapat menyebabkan tentara Belanda mengadakan aksi militer dengan tergesa-gesa.
  - (c) Bunyi surat Belanda kepada M. Cochran pada 17 Desember 1948 dan pemerintahan Belanda supaya di beri jawaban dalam waktu terbatas, yang tidak mungkin dipenuhi mengandung ultimatum.
  - (d) Sifat aksi militer Belanda, seperti yang telah dijalankan oleh tentara Belanda memerlukan persiapan-persiapan lebih dahulu yang luas, sehingga sukar bagi KTN untuk menganggap bahwa persiapan-persiapan itu sudah dilakukan selama diadakan penukaran surat, seperti yang sudah disampaikan oleh KTN kepada DK pada 12 Desember 1948.
  - (e) Perundingan yang baru saja dilakukan menurut KTN tidak dapat dianggap sebagai perundingan, karena berbentuk tuntutan-tuntutan dari pihak Belanda supaya Republik menyerah sama sekali kepada Belanda.
  - (f) Pemerintah Belanda dengan aksi militernya pada 19 Desember 1948 telah melanggar Persetujuan Renville.

Pihak Republik sendiri telah siap dengan konsolidasi, kesiapsiagaan, gerilya. Dengan Maklumat No.2 NBKD 22 Desember 1948, diumumkan berlakunya Pemerintah Militer untuk seluruh Pulau Jawa. Markas yang dahulu di kota-kota dialihkan berada di gunung-gunung ; di kompleks Gunung Menoreh, Kompleks Gunung Kawi, Kompleks

Gunung Merapi, Kompleks Gunung Sumbing, Gunung Lawu, dan seterusnya. Hubungan dengan PDRI dilakukan dengan radio gerilya di Desa Balong di kaki Gunung Lawu.

Berdasarkan Instruksi Panglima Komando Jawa No.3/MBKD/48 31 Desember 1948 (Panglima Komando Jawa, yaitu AH. Nasution) maka semakin bulat perlawanan gerilya. Di Daerah Yogyakarta dan Solo dapat dibentuk daerah-daerah perlawanan, yaitu : Sektor Selatan, Sektor Tenggara, Sektor Barat, Sektor Utara, dan Sektor Timur.

Di Solo, TNI yang masih kompak dan loyal terhadap Proklamasi dan Pancasila bergerak ke luar kota dalam satu *wingate* di bawah pimpinan Letkol Slamet Rijadi. Mereka menyusun daerah-daerah perlawanan sebagai berikut.

- |         |     |                 |                                   |
|---------|-----|-----------------|-----------------------------------|
| (1) PPS | I   | dengan Komandan | Letkol. Soeadi.                   |
| (2) PPS | II  | dengan Komandan | Mayor Soenitjoso.                 |
| (3) PPS | III | dengan Komandan | termasuk daerah Semarang Selatan. |
| (4) PPS | IV  | dengan Komandan | Kapt. Ranuwidjojo.                |
| (5) PPS | V   | dengan Komandan | May. Achmadi.                     |

Karena gerilya tersebut, maka garis as Semarang - Sala diperhebat dengan *konvooi* militer Belanda tiap hari. Badan Penyelidik Pemerintah Militer Belanda (IVG) di Salatiga terkenal karena kekejamannya. Setiap orang yang dicurigai sebagai orang pergerakan dan pejuang, diperiksa dan diancam untuk dibawa ke Kedayon untuk dibunuh, dipenjarakan di Nusakambangan, dipenjarakan di Ambarawa, dan atau dilepas.

Dewan keamanan PBB dalam sidangnya di Paris 24 Desember 1948 mengambil resolusi mengenai soal Indonesia - Belanda yang berisi anjuran kepada Belanda dan RI untuk menghentikan tembak-menembak dan pembebasan tawanan politik. AS mengusulkan supaya tentara Belanda ditarik mundur kedudukannya, tetapi usul ini ditolak oleh dewan keamanan dengan lima suara setuju dan enam blangko. Tuntutan untuk segera menghentikan tembak-menembak diterima dengan suara tujuh dan empat blangko. Dengan adanya resolusi ini, maka PDRI mengumumkan syarat-syarat sebagai berikut.

- (1) Pimpinan Republik yang ditawan segera dibebaskan



- (2) Pasukan-pasukan Belanda harus ditarik kembali sampai kedudukannya pada 24 Desember 1948.
- (3) Pengakuan *de facto* dan *de jure* atas kedaulatan Republik di Jawa, Sumatera dan Madura
- (4) Pembentukan Pemerintah Indonesia yang demokratis dan merdeka, tidak dengan perantaraan Belanda
- (5) Penarikan kembali seluruh tentara Belanda selekas-lekasnya dari Indonesia.

Syarat-syarat tersebut juga menjadi dasar kesanggupan Pemerintah Republik untuk memerintahkan penghentian tembak-menembak.

Nehru mengundang Pemerintah Negara-negara Asia untuk mengadakan musyawarah di New Delhi tentang Indonesia. Musyawarah tersebut dikunjungi 21 negara, yaitu India, Persia, Afganistan, Sialan, Birma, Mesir, Siam, Australia, Siria, Saudi Arabia, Nepal, Libanon, Trans Yordania, Irak Yaman, Cina, Pakistan, New Zeland, Philipina dan Indonesia.

Di dalam negeri telah terjadi diplomasi informal antara pihak PDRI, AP, Presiden dan Wakil Presiden di satu pihak, dan BFO di pihak lain. Pada 28 Januari 1949, DK PBB menerima Resolusi yang diusulkan AS, Cina, Norwegia, dan Cuba, walaupun Belanda bersitegang mengajukan keberatannya atas usul resolusi tersebut. Resolusi ini pada dasarnya menerima sarat-sarat RI. Adapun isinya adalah sebagai berikut.

- (1) Perwujudan Pemerintah Federal Interim, yang akan diberi kuasa tentang pemerintahan dalam negeri di Indonesia selama masa peralihan (*Interim Pinot*) sebelum penyerahan kedaulatan terjadi. Itu harus merupakan hasil dari perundingan tersebut dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 15 Maret 1949.
- (2) Pemilihan wakil-wakil yang akan duduk dalam *Constituante Assembly* (Badan Pembentuk UU) hendaknya selesai pada 1 Oktober 1949.
- (3) Penyerahan kedaulatan atas Indonesia oleh Pemerintah Belanda kepada Negara Indonesia Serikat hendaknya dilaksanakan pada waktu sesingkat-singkatnya.

### **Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogya**

Jenderal Spoor menyatakan bahwa RI sudah musnah, yang masih tinggal hanyalah gerombolan yang cerai-berai, oleh karena itu Belanda melakukan gerakan pembersihan. Komandan W.K. III Letkol Soeharto ingin membalas kepada Belanda sekaligus untuk menunjukkan ke dunia bahwa RI masih nyata-nyata ada. Pak Harto mengadakan hubungan dengan Sri Sultan untuk mengatur siasat, sehingga terjadilah serangan yang dilakukan 1 Maret 1949 pukul 06.00.

### **Serangan Umum Terhadap Solo**

Sejak 25 Mei 1949 Belanda mulai mengundurkan diri dari Yogyakarta ke Solo. Kekuatannya di Solo  $\pm 7^{1/2}$  batalyon. Kurang-lebih  $3^{1/2}$  batalyon dari Yogyakarta. Daerah Sala yang diduduki Sragen, Klaten, Boyolali, dan Solo. Perintah siasat penyerangan ke Solo diatur oleh Kol. Slamet Rijadi. Serangan Umum atas Kota Solo tersebut adalah untuk mencapai kedudukan yang baik sebelum gencatan senjata. Pada 7 Agustus 1949 pukul 06.00 dengan 2.000 orang telah menyusup Kota Solo. Pukul 09.00 pertemuan mulai berkobar, mulai dari daerah Pasar Kliwon terus ke daerah Lawiyan membelok ke utara ke Gremet. Belanda membalas dengan serangan udara. Di Pasar Kembang, Belanda mengadakan penyembelihan terhadap rakyat. Di Pasar Nangka Belanda mengadakan pembakaran-pembakaran rumah penduduk dengan mengadakan pembunuhan. Serangan gelombang I ini berlangsung dari 7 Agustus sampai 9 Agustus 1949. Pada 10 Agustus diadakan *ceasa fire order*.

### **Serangan Umum Terhadap Semarang**

Di daerah Semarang oleh Letkol S. Soediarso direncanakan untuk menjalankan serangan umum merebut Kota Semarang yang terkenal dengan nama "Plan S". Plan S ini menjadi kewajiban Brigade SS (*Staattroep Semarang*). Letkol Soediarso adalah bekas tawanan peristiwa Madiun yang lolos akibat agresi Belanda II. Ia akhirnya dapat mengumpulkan kekuatan kembali dan dapat menguasai daerah utara, timur dan selatan Purwodadi. Ia kemudian melakukan penyerangan ke Kota Semarang. Kolonel Gatot Subroto dari GM DMI II meninjau kekuatan Brigade SS tersebut dan merasa puas atas keadaan di Wirosari, karena berjalan dengan lancar. Beliau kemudian mensahkan

Brigade SS menjadi Brigade Divisi II, sebagai bagian dari TNI. Pengesahan terjadi di Kuwu 9 Mei 1949. Brigade ini tampak semakin kuat, terbukti dalam pertempuran di Jambangan dekat Gundih yang menghancurkan pasukan anjing hitamnya Belanda.

Serangannya ke Semarang melalui Monggot, Karangbancir, Tegaljeruk, Karangzana, Karangayun, Karanggede, dan lain-lain. Pasukan Rayon III PPS II di bawah pimpinan Kapt. Sumarto, dari Boyolali ikut mendukung dengan melalui Kopeng, Banyubiru, dan Mlilir. Masuknya ke Semarang dipimpin oleh Lettu Soehardi yang akhirnya gugur. Pasukan-pasukan lain bergerak dari Pati Selatan, Klambu, dan lain-lain. Pada 15 Agustus 1949, enam batalyon telah mengepung Kota Semarang. Batalyon Dumono dan Batalyon Jusuf Maladhy berhasil masuk sampai Mrican dan Peterongan. Pertempuran I terjadi di Wotgalih (2 km dari Semarang sebelah Barat Daya) dipimpin Kapt. Soemarto. Tentara Pelajar Seksi Kentus berhasil juga sampai ke Mrican bersama Batalyon Darmono dengan menyebarkan pamflet-pamflet. Batalyon Basuno melakukan serangan ke Jatingaleh (16 Agustus 1949, pukul 16.00).

Belanda segera melapor ke KPBBi dan dengan perantaraan KPBBi ini Letkol Sudiarto diminta untuk menghentikan tembak-menembak. Pertempuran pun terhenti, atas perintah komandan. Hal ini mengecewakan anak buahnya.

#### 7.8.1.2.5 Pemberontakan PKI di Madiun

Pembrontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Muso dan Amir Sjarifudin. Muso seorang *demagoog* yang baru saja tiba di Indonesia membawa perubahan pada jalannya partai-partai kiri ke arah radikal kiri (*links radicalisme*) yang ekstrim. FDR terdiri atas PKI, Partai Sosialis, dan tokoh-tokoh partainya yaitu Muso, Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Ngadiman, Aidit, Wikana, Suripno, Amir Sjarifudin Lukman, Sardjono, Sudisman, Sujoto dan Rushak.

Pertikaian terbuka antara Pasukan Siliwangi dengan Divisi IV Surakarta (peristiwa Srambatan) merupakan rangkaian tali-temali dengan Madiun). Pada 18 September 1948 melalui Radio Republik Indonesia Madiun yang disebut Radio Pemuda oleh Kaum FDR, Muso memproklamasikan pengoperan kekuasaan negara secara sepihak,

berarti *coup* terhadap pemerintah Hatta yang sah di Yogyakarta dan berlaku pemerintah Front Nasional Daerah Madiun. Awal pemberontakan terjadi pada 18 September 1948 pukul 03.00 dengan melakukan perlucutan kesatuan-kesatuan Mobrig, Corps CPM, dan lain-lain. Pemerintah menunjuk Panglima Besar Soedirman untuk melaksanakan keputusan pemerintah.

Pada tanggal 19 September 1948 pukul 20.00 presiden berpidato di muka corong radio bahwa PKI Muso memberontak dan Dachlan dipecat dari tentara. Pada 20 September 1948 dikeluarkan undang-undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya. Sebelumnya, 6 September 1948 Kolonel Gotot Subroto diberi tugas melaksanakan operasi militer terhadap *coup* di Madiun. Daerah-daerah yang dapat dipengaruhi PKI adalah Surakarta ke utara sampai Pati, antara lain Purwodadi, Grobogan, Cepu, Blora, Pati, Rembang, Yuwana dan sebelah selatan yaitu Wonogiri dan Pacitan.

Brigade pemberontak Letkol Sujoto melarikan diri ke Purwodadi. Pasukan eks. May. Sudigdo di Wonogiri mundur ke Baturetno dan Purwantoro. Pada 5 Oktober 1948 Purwodadi dapat dibebaskan oleh pemerintah dan Cepu serta Blora dikuasai pemerintah pada 13 Oktober 1948. Blora dibebaskan setelah dikepung dari dua jurusan. Cepu dibebaskan oleh Batalyon Kala Hitam (Kemal Idris) dan dari Kudus oleh Batalyon Daeng. Selanjutnya Pati dan Rembang dapat dibebaskan. Dari utara pasukan diarahkan ke Purwodadi untuk menghadang pasukan Amir Sjarifudin yang melarikan diri dari Madiun. Di utara Purwodadi pemerintah dapat menawan 3000 pasukan pemberontak yang payah dan lapar.

Selanjutnya pasukan Kosasih dan Surjosumpeno berhasil menyergap tokoh-tokoh pemberontak terdiri dari eks Jenderal Mayor Djokosujono, Fangiday, Sardjono, Maruto, Darusman, dan lain-lain. Pada 30 September 1948 Madiun jatuh ke tangan pemerintah. Pada 3 Oktober 1948 Muso tertembak mati dalam tembak-menembak di Desa Kanten Ponorogo (mayatnya dibakar oleh rakyat di alun-alun). Pasukan Amir terpecah, sebagaimana bergabung dengan pengikut-pengikut Muso ke Ponorogo, sebagian ke arah Purwodadi. Di selatan Purwodadi pasukan ini dihancurkan pemerintah, tetapi Amir berhasil lolos. Eks

Jenderal Mayor Djoko Sujono tertangkap. Akhirnya Amir menyerah di rawa-rawa di Desa Klambu 4 Desember 1948 dalam keadaan menyedihkan. Ia ditangkap kemudian dibawa ke Yogyakarta dengan pengikutnya (35.000) ditahan. Berakhirlah pemberontakan PKI tersebut.

#### *7.1.2.6 Peranan Jawa Tengah dalam Penumpasan Terhadap Pemberontakan Daerah Lain*

Jawa Tengah dalam kerangka nasional tidak dapat dipisahkan dengan daerah-daerah lain, sehingga dalam segala tugas nasional daerah ini pun selalu mempunyai peranan. Peranan ini dapat dilihat dalam peristiwa-peristiwa seperti : Pemberontakan Westerling di Bandung, Pemberontakan Andi Aziz di Makasar, dan pemberontakan RMS di Ambon.

Pemberontakan APRA terjadi pada 23 Januari 1950. Westerling (bekas KNIL) menyusun bekas KNIL yang dimobilisasi dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pada 23 Januari 1950 APRA menyerbu Bandung ketika di Bandung terjadi perundingan antara Kastaf Divisi Siliwangi Letkol. Dr. Eri Soedewo dengan Komandan Divisi Belanda. Pada 26 Januari 1950 APRA menyerbu Jakarta tetapi dapat digagalkan. APRA bekerja sama dengan Sultan Hamid II. Ketika St. Hamid II ditangkap, Westerling melarikan diri ke Malaya (5 April 1950) APRA menjelma menjadi NIGO (*Nederlands Indische Gerilya Organisatie*) yang kemudian bergabung dengan DI/TII di bawah perintah Achmad Soengkowo. Batalyon Soeradji ikut membantu menumpas APRA di daerah Bandung.

Pemberontakan Andi Azis terjadi pada 13 April 1950. Pada 5 April 1950 Kapten Andi Abdul Azis (bekas ajudan Walinegara NIT) menyerang kedudukan TNI di Makasar, karena khawatir adanya dropping TNI dari Jawa (Batalyon Worang). Di Jakarta parlemen sedang berdebat antara Blok Unitaris dengan Federalis, yang berakhir dengan kemenangan Unitaris. Akibat tindakan Andi Azis, dikirim ke NIT di bawah kol. A.E. Kawilarang. Ekspedisi terdiri atas Brigade Mobil dari Divisi Jawa Timur, Divisi III Jawa Tengah, dan Divisi IV Jawa Barat serta satu Batalyon dari Jawa Tengah di bawah Mayor Andi Mattalata. Operasi dimulai 26 April 1950 di bawah komandan-komandannya yaitu Kol. Gatot Subroto (panglima Divisi III), Kol. Kawilarang (panglima

Operasi NIT) dan Letkol Soeharto (komandan Brigade Mataram ; Brigade 10 Divisi III Diponegoro).

Pemberontakan RMS meletus pada 3 April 1950. Waktu itu di Ambon terjadi rapat umum, Ir. Manusama menyatakan bahwa Maluku dapat berdiri sendiri, tidak mau dijajah bangsa lain (RI). Ia menganggap RI adalah ciptaan Jepang. Pendukungnya dr. Soumokil (bekas Jaksa Agung NIT). Ia melarikan diri ke Ambon karena terlibat peristiwa Andi Azis. Pada 25 April 1950 diproklamasikan sebagai negara merdeka. Ia tidak ada hubungannya dengan NIT dan RIS. RMS menguasai rakyat dengan teror. Dalam hal ini pemerintah mengutus Dr. J. Leimena, Ir. Putuhena, Pelaupesy dan dr. Rehatta untuk berunding dengan RMS, tetapi gagal. Karena itu kemudian dilakukan operasi di bawah Kol. Kawilarang (panglima Terr. VII Indonesia Timur). Divisi III Jawa Tengah dikirim untuk menumpas RMS tersebut. Kol. Slamet Rijadi yang memimpin operasi DI/APRA atas perintahnya diberi tugas juga sebagai pemimpin operasi di bawah Kol. Kawilarang. Sebelumnya, Batalyon 352 Inf. di bawah May. Soeradji, 27 Juni 1950 diberangkatkan operasi. Pada 14 Juli 1950 dilakukan pendaratan di Lala (P.Buru). Pada 18 Juli 1950, Letkol Slamet Rijadi tiba di Namlea, kemudian menjabat sebagai komandan Operasi Maluku Selatan dengan May. Pieters sebagai kastaf. Letkol. S. Soediarso gugur dalam pendaratan di Hitu lama (Ambon). Pada 28 September 1960 dan kemudian dikebumikan di Paru. Letkol Slamet Rijadi gugur dalam pendaratan di Tohehu Ambon.

#### 7.1.2.7 Penumpasan Gerombolan MMC

MMC merupakan gerombolan bersenjata yang bersifat separatis. Gerombolan ini beroperasi di daerah Surakarta, Yogyakarta, Kedu, Salatiga, Ambarawa. Pada masa perang kemerdekaan, tanah-tanah perkebunan partikuler di Boyolali dibagikan kepada rakyat. Tanah-tanah itu adalah tanah perkebunan Sukabumi, Malangbong, Barostampir, dan Sukarame, tetapi pelaksanaannya sulit (terkatung-katung). Hal ini disalahgunakan oleh gerombolan MMC untuk menghasut rakyat petani guna menentang pemerintah. Tindakan-tindakannya berupa peggedoran, perampokan, dan lain-lain. Akibatnya keadaan rakyat kacau, sehingga daerah Surakarta dikenakan bantuan militer (*Militaire Bijstand*)

Boyolali diamankan oleh Yon 418 di bawah Kapt. Soemarto dan daerah Klaten oleh Yon 417 di bawah May. Soeharto. Secara kronologi penumpasan itu adalah sebagai berikut. Pada 27 Januari 1951, di Karangnongko pasukan disergap. Pada 31 Januari 1951 Yon 417 mengadakan pembersihan di Desa Kemalang dan Jatinom terus ke Desa Tangkil - Surowono. Pada 10 Februari 1951, Panglima Div. Diponegoro mengeluarkan perintah operasi MMC dengan nama Merdeka Timur II, dengan tujuan (1) maksimal, menangkap dan menumpas gerombolan dan orang-orang yang menjadi objek, dan (2) minimal, mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap alat-alat kekuasaan negara serta menimbulkan ketakutan yang mendalam pada pihak pengacau. Kekuatan operasi ini terdiri atas 8 batalyon, yang meliputi daerah Semarang, Kedu, Surakarta di bawah pimpinan Komando Panglima Divisi dan Letkol. Suadi Suromihardjo sebagai kastaf (yang kemudian menjadi Ko. Operasi). Gembong MMC di daerah Surakarta Suradi Bledog tertembak mati oleh Ton II Yon 417 di Desa Brintik Kelurahan Malangjiwan pada 1 April 1951) bersama dua orang kawannya, sehingga anak buahnya semakin berantakan. Sejak 13 Juni 1951 daerah Boyolali - Klaten dikembalikan kepada Pemerintah Sipil, tetapi setelah terjadi pemberontakan Yon 426, keaktifan gerombolan MMC terasa lagi di daerah Salatiga.

Berdasarkan Perjanjian Renville, banyak tentara yang berkeberatan ditarik, tetapi mula-mula ia masih tetap bergerilya di daerah untuk melawan Belanda. Sebagian ada yang dibunuh Belanda di Kedayon (Kopeng). Organisasi-organisasi di daerah tersebut adalah Pasukan Gerilya Rakyat (PGR), Markas Pertahanan Rakyat (MPR), Pasukan Merbabu, Pasukan MKB/SS (Markas Kuda Besi Sabotage Service), Pasukan Kyai Biru, dan Persatuan Korban Rasionalisasi (PKR). PKR inilah yang paling berpengaruh, dipimpin oleh bekas heiho/TNI Bn.3 Res.23 bernama Sujud alias Kridosardjono. Namun demikian gerakan-gerakannya kemudian menuju ke ekstrim kiri, apa lagi setelah KMB daerah Salatiga - Ambarawa dijaga oleh APRIS dari KNIL dan polisi RIS bekas polisi federal musuh perjuangan nasional. Belakang hari organisasi-organisasi tersebut menjadi MMC di daerah Salatiga-Ambarawa. Pemerintah melakukan operasi di daerah ini dipimpin Letkol. Suadi Suromihardjo dengan "aksi Salatiga" nya, yaitu



operasi militer, penerangan, dan bantuan sosial. Operasi Salatiga ini berhasil dengan baik.

#### *7.1.2.8 Gerakan AUI di Kebumen*

AUI (Angkatan Umat Islam) didirikan di Kebumen 11 September 1945. Sponsornya adalah Sjari'ie dan Kyai Afandi serta Kyai Abdurachman. Organisasi ini berazaskan Agama Islam. Pada bulan Oktober 1945 AUI menyatakan sebagai partai berdiri sendiri. Organisasi ini mempunyai anggota kelaskaran yang bersenjata. Setelah terjadi perbedaan pendapat antara mereka, Kyai Moh. Sjafi'ie dan kawan-kawan mengundurkan diri, dan pimpinan diserahkan kepada Kyai Machfud sebagai pimpinan besar umum atau sebagai "Romo Pusat". Sebagai panglima kelaskaran adalah K.H. Nursodik (adiknya) dan Kyai Taifur sebagai "penekung". Selanjutnya Romo pusat membuat peraturan-peraturan sendiri yang kadang-kadang mengabaikan perintah setempat. Pada masa perang Kemerdekaan II, ia melawan Belanda, bekerja sama dengan TNI, TP, Hisbullah, dan lain-lain. Setelah penyerahan kedaulatan, AUI dengan Hisbullah pimpinan Masduki dijadikan batalyon riel dengan nama Batalyon. Lemah Lanang pimpinan KH. Nursodik sebagai dan yon. Ternyata kemudian terjadi pertentangan antara Nursodik dengan Romo Pusat (yang tidak setuju masuk APRIS). Pasukan AUI sebagian besar tidak mau menyerahkan senjatanya. Demikian juga satu kompi Hisbullah pimpinan Masduki melarikan diri ke Cilacap. Pemerintah menempuh jalan damai dengan mengirim delegasi ke Romo Pusat, tetapi delegasi ditahan di Kaliredjo. Romo menolak untuk berunding di Purworejo, bahkan ada gejala-gejala pemberontakan.

Sebab khusus peristiwa AUI terjadi pada 31 Juli 1950, berawal dari seorang anggota AUI bersenjata berkeliaran di Stasiun Kebumen ditegur CPM dan dibawa ke markas karena tidak menjawab secara baik, tetapi di dalam jeep terjadi pergulatan dan akhirnya ditembak mati. Karena itu pada 1 Agustus 1950 pukul 07.00 terjadi serangan dari AUI ke markas CPM di sebelah utara Stasiun Kebumen. Tembakan dilakukan dari Tamanwinangun. Kota Kebumen menjadi medan perang. Ultimatum Komando Bc.IX tidak diindahkan, tetapi kemudian mereka dapat dihalau ke luar kota yaitu ke Gunung Srandil, dan dapat dihancurkan. Romo Pusat meninggal di sana. Sisa-sisanya



melarikan ke Jawa Barat dan menggabungkan diri ke DI/SM Kartosuwirjo.

#### *7.1.2.9 Pemberontakan DI di Jawa Tengah*

Pada 27 Agustus 1949 Kartosuwirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Pengaruh NII di Jawa Tengah adalah di daerah Pekalongan sebelah selatan, Tegal, Brebes, dan lain-lain. Akibat Perjanjian Renville, semua pasukan/kesatuan RI harus ditarik dari daerah kantong, tetapi Amir Fatah Widjajakusuma berhasil menyelundup ke daerah pendudukan bersama tiga kompi, yaitu Ki Irfan Mustofa, Ki Dimjati, dan Ki Sjamsuri yang berasal dari Tegal, Brebes, dan Majenang. Mereka adalah bekas anggota Hisbullah Pekalongan yang tidak mau menjadi TNI.

Rombongan Fatah dan kawan-kawan berhasil masuk daerah pendudukan melalui sektor Merawu (di bawah May. Wongsoatmodjo) dengan dalih mendapat mandat dari Jenderal Sudirman untuk menyadarkan Kartosuwirjo. Di daerah pendudukan (Tegal, Brebes) mereka membentuk MI (Majelis Islam), TII (Tentara Islam Indonesia), Barisan Keamanan Negara (Kepolisian), PADI (Pahlawan Darul Islam). Jadi, mereka menyusun DI di Jawa Tengah.

Batalyon 3/III yang dipimpin May. Wongsoatmodjo pada bulan Januari 1949 melancarkan perang gerilya ke daerah Tegal dan Brebes dengan empat kompi, yaitu Kompi Bantuan dipimpin Kapt. Parwoto, Kompi I dipimpin Kapt. Sudja'i, Kompi II dipimpin Kapt. Idris, dan Kompi Bantuan dipimpin Lettu. Sardjono. Seminggu setelah agresi II, diadakan perundingan antara Fatah cs dengan May. Wongsoatmodjo dan terjadilah kerja sama yang baik untuk melancarkan perang terhadap Belanda. TNI - AD melakukan serangan yang gencar terhadap Belanda, tetapi Fatah dan kawan-kawan membalik di tengah-tengah perang untuk menyusun kekuatan DI dan TII nya.

Bulan Maret 1949, Kamran Tjakrabuana utusan DI/TII Jawa Barat berhasil masuk Brebes dan Tegal serta berunding dengan Fatah dan kawan-kawan di Desa Pangasaran Brebes. Amir Fatah diangkat sebagai komandan pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat mayjen TII. Ia pada 26 April 1949 meletakkan jabatan selaku koordinator daerah Tegal/Brebes kepada Komandan SWKS III. Ia menyatakan

tidak terikat lagi dengan SWKS III. Pada 5 Mei 1949 ia memulai gerakannya dengan melucuti senjata dari anggota-anggota SWKS III di Bantarsari dan terjadi pembunuhan massal terhadap anggota MB di bawah pimpinan Komisaris Bp. Suprpto, selagi pasukan ini menyerang Belanda di Malahayu.

Kekuatan DI kurang lebih 1.400 orang terdiri atas 800 orang dipimpin Amir Fatah dan Subechi dan 600 orang dipimpin Mugny dan Fadjar. May. Sujoto ditunjuk oleh Letkol. Moh. Bachrun sebagai komandan SWKS III menggantikan Mayor Wongsoatmodjo. Pengepungan terhadap konsentrasi DI, bulan Juni 1949, didatangkan dari SWLS IV Kesatuan Batalyon IV pimpinan May. Soerono dan satu kompi dari Batalyon Palloupassy. Operasi oleh Kapt. Parwoto dan Kapt. Idris bulan Agustus 1949 ditujukan ke Citimbal (Brebes) dan dapat membebaskan satu seksi pimpinan Letda Soetama yang ditawan DI. Kompi Idris berhasil menduduki Pangarasan.

TNI-AD Jawa Tengah membentuk Gerakan Banteng (GBN) yang secara definitif menumpas DI di Jawa Tengah. GBN adalah suatu komando operasi gabungan yang kesatuan-kesatuan tempurnya dari berbagai divisi anfitri (Divisi Siliwangi, Divisi Diponegoro, Divisi Brawidjaja) dan Kesatuan Bantuan. Komando operasi ini dibentuk untuk menindas pemberontakan DI di Keresidenan Pekalongan. Tanggung jawab operasi DI di wilayah Keresidenan Pekalongan langsung di bawah Brigade II/III pimpinan Letkol Sarbini. Operasi penumpasan DI di Jawa Tengah menggunakan operasi Guntur dan berhasil dengan baik. Pada 30 November 1945 Operasi Guntur dinyatakan selesai.

#### **Pemberontakan Batalyon 426**

Batalyon 426 dipimpin oleh May Munawar. Pemberontakan ini pada hakekatnya tidak terlepas dari pemberontakan DI di Jawa Tengah. Di dalam tubuh Batalyon 426 ada orang-orang seperti Kapten Sofyan, Kapt. Alief dan lain-lain. Yon 423 dan 426 disinyalir telah kemasukan DI. Karena itu pada 7 Desember 1957 Panglima Divisi Diponegoro ( Gatot Subroto ) memerintahkan May. Munawar dan Kapten Sofjan menhadap, tetapi Kapt. Sofjan menolak. Pada 8 Desember 1951 pukul 05.00 Komandan Bn.-424 telah memberi ultima-

tum kepada Kapt. Sofjan untuk menyerahkan diri, tetap Bn. 426 telah bertekad mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan.

Mereka meloloskan diri dari kepungan dan pada 20 Desember 1951 telah berhasil keluar dari wilayah Kudus terus menyeberangi Bengawan Solo di sebelah selatan perbatasan Keresidenan Pati dan Madiun, masuk daerah Surakarta dan Kalten. Daerah-daerah yang dilewati adalah sebelah timur yaitu Purwodadi dan daerah Ngawi, Di sini dihantam Yon 508 di bawah pimpinan May. Haji Machfud. Operasi terus dilancarkan dari daerah Karanganyar ke selatan, daerah Kab. Wonogiri ke barat dan daerah Klaten. Pada 7 Januari 1952 sampai di Jatinom dipimpin May. Kusmanto terus bergerak dari Klaten. Terjadi tembak-menembak dengan musuh sehingga May. Kusmanto tertembak dan akhirnya gugur di Rumah Sakit Tegalyoso Klaten ( 12 Desember 1951).

Komandan Operasi di Klaten kemudian diganti oleh Kapt. Sukirman dan segera mengadakan pengejaran terhadap musuh ke Ngupit - Jatinom, sehingga musuh bercerai-berai ke Dawar Boyolali. Di sini juga dikejar oleh Ki Bn. 416 dan 1 ton MB, sehingga melarikan diri ke Tulung, Malang dan Ngunut.

Perembasan dari Kedungjati telah tiba di daerah Simo. Pasukan musuh dari utara ( Kudus ) dihancurkan oleh Be P dengan bantuan Be Progola yang dipimpin oleh Lekol Soeharto sebanyak 3 batalyon. Pada 19 Desember 1951 Delanggu mendapat serangan dari musuh. Pada 22 Desember 1951 Komandan Operasi Merdeka Timur V dengan Letkol Soeharto sebagai Komandan, Mayor Soeharto sebagai wakil dan mayor. Soerono sebagai Kastaf. Pada 22 Desember 1951 pemberontak masuk daerah keresidenan Surakarta dari Walikukun, tetapi berhasil dihadang oleh Bn. 505 Div. I dan Bn. 428 Be. Progola. Dari Walikukun terus ke selatan melalui Sene, Gendel dan Jamus daerah Karanganyar. Pada 29 Desember 1951 setelah meninggalkan Matesih, mereka bertahan sementara di sekitar Duwet di antara pertahanan Ki Idan III Bn. 421 di Desa Dumeling dan Dukun. Di sini mereka melakukan serangan mendadak (08.30 – 12.00 ) sehingga Ki I dan III kocar-kacir menuju ke Jumantoro.

Operasi Be Pragola pimpinan Letkol Soeharto berada di Palur. Pemberontakan dari Jumanoro terus ke selatan melalui Jatipura, Ngutoronadi, ke barat lewat Wuryantoro, Manyaran, Watukelir, G. Mijil masuk ke Klaten, untuk bergabung dengan pos pemberontakan lain di Tulung. Operasi di daerah sebelah timur Bengawan Solo ditiadakan. Komando operasinya adalah Letkol Soeharto. Bulan Januari 1952, Be P (Bn.415, 418 & Ki 417) datang dari tugasnya dan ditempatkan di selatan pada 5 Januari 1952. Kapten Sofjan dari G. Watukelir bergerak menuju Tulung sampai di Desa Tanggalon daerah Pedan bertemu dengan Bn. 417 Be P dan terjadi tembak-menembak di tempat tersebut. May. Sunaryo komandan Bn. 417 gugur, mengakibatkan kocar-kacirnya Bn. 417, tetapi kemudian datang bantuan EBB sehingga pemberontak mundur ke utara dan mendapat serangan lagi dari Ki IV/417 di bawah pimpinan Let. Sugino yang mengakibatkan jatuh kurban yang banyak pada pihak pemberontak. Pemberontak yang dipimpin oleh Kapt. Juslam dapat bergabung dengan pemberontak lainnya. Kapt. Sofjan tewas dalam pertempuran di Manyaran. Pada 9 Januari 1952 Komandan OMT V mempersiapkan seluruh kesatuan-kesatuan untuk mengadakan operasi. Pertempuran terjadi lagi di Wunut, antara pemberontakan dengan Ki Suhardjo dari Bn. 418 selanjutnya daerah Klaten dioperasi sehingga mereka (pemberontakan) merembes ke utara dan berkumpul di daerah Simo dan Cepogo. Dua ratus orang dari mereka dipimpin oleh Kapt. Alief menuju ke daerah Gendol/Mulintan. Daerah Simo diserang oleh OTM V bekerja sama dengan AURI. Mereka dipimpin oleh Eddy Sugardo dari Wunut merembes ke selatan, terus ke Ngalihan lewat Beji dan Bone. Pada 29 Februari 1952 pemberontak dapat bersatu di daerah Watukelir Desa Jatibedug, dan 14 Maret 1952 mereka berkumpul di Ngawen.

OTM V dibantu dua batalyon lagi (Bn.401 dan 412) dan May. Soerono (kastaf) diberi tugas memimpinnya. Yang melakukan gerakan-gerakan KS (Kusmanto - Sunarjo), tetapi pada 19 Maret 1952 musuh menerobos ke Weru, Karangmojo, Alasombo, dan G. Gajah. Pada 27 Maret 1952 pemberontak menyerang dan menduduki Desa Bunder, di bawah pimpinan Kapt. Mohjidin dan Let. Eddy Sudargo. Pada 6 April 1952 pemberontak menuju ke Kaliurang selanjutnya

menggabungkan diri dengan gerombolan DI di daerah GBN. Mereka dipimpin oleh Kapt. Mohjidin, Kapt. Juslam, dan IG. Ismail. Pada 9 Mei 1952 pemberontak bergabung dengan DI pimpinan Jamil.

### **Pemilu I di Jawa Tengah**

Suasana Pemilu di Jawa Tengah dalam rangka kampanye memang boleh dikatakan panas dalam arti eksplosif. Karena partai-partai politik melakukan agitasi dan propaganda, maka tugas keamanan di Jawa Tengah cukup berat. Hasil Pemilu untuk DPR pada 29 September 1955, PNI menempati posisi kesatu, PKI di urutan kedua, NU di urutan ketiga, dan Masyumi di urutan keempat. Karena itu menjelang Pemilu untuk Konstituante, keadaan di Jawa Tengah cukup berat karena dari empat partai tersebut di atas saling berlomba. Hasil Pemilu untuk Konstituante yang berlangsung 5 Desember 1955 hasilnya sama dengan di atas.

### **T r i k o r a**

Pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta diucapkan Tri Komando Rakyat (Trihora). Tahun 1962 oleh Presiden Ir. Soekarno (Kepres No.1/1961) dibentuk Komando Mandala. Pimpinan tertinggi Komando Mandala Pembebasan Irian Barat adalah Brigadir Jenderal Suharto. Wakil Panglima I ialah Komodor (L) Sudomo. Wakil Panglima II Kol. (U) Leo Watimena. Kastaf Gabungan Kol.Inf. A. Tahir. Komodor (L) Jos Sudarso gugur dalam Peristiwa Laut Aru 15 Januari 1962, pada 21 Maret 1962 Kodam VII/Diponegoro mengirimkan dua Ki para Yon. 454. Pada 15 Mei 1962 anggota-anggota BR Diponegoro mengadakan aksi di daratan Irian Barat dalam tugas Operasi Garuda Merah dan Garuda Putih. Garuda Merah dipimpin Kapt. Kartawi terjun ke Fak Fak Garuda Putih dipimpin Lettu Idris bersasaran di Kaimana.

### **D w i k o r a**

Berdasarkan Perintah Pangdam VII/Diponegoro Nomor TR-267/11/1964 9 November 1964, pada 15 Desember 1964 satuan Brigif 5 dengan kekuatan 3.050 orang di bawah pimpinan Kol. Soedjono ditugaskan di Kalimantan Barat, dalam rangka Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

### 7.1.2.10 Pemberontakan G30S/PKI 1965

Jawa Tengah yang merupakan basis PKI lebih terasa dan nampak lebih menonjol kegiatan dan aksi-aksi mereka menjelang pemberontakan G30S/PKI. Rangkaian peristiwa dan aksi-aksi mereka antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Tindakan sepihak yang disponsori PKI dan ormas-ormasnya di daerah-daerah Klaten, Sragen, Boyolali, dan Karanganyar (Eks. Keresidenan Surakarta) dengan cara-cara aksi sepihak (*Wildeoocutie*) pada tanah-tanah pemerintah, kas/lungguh desa, tanah-tanah negeri bekas *ondeneming* dengan dalih tanah untuk orang miskin. Kecuali itu tindakan-tindakan mereka meluas terhadap tanah-tanah milik orang nasionalis dan agama.
- (2) Penghambatan sektor-sektor produksi Usaha Negara (Perusahaan Negara) dengan menghasut petani-petani untuk mempersulit penyerahan areal tanah dengan mengajukan tuntutan-tuntutan persewaan di luar ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan adanya stagnasi kemerosotan produksi.
- (3) Pembukaan Usaha "Tebu Berdikari" di samping tanaman-tanaman tebu yang sudah ada (Koperasi Tebu atau PN Gula) dengan maksud menyaingi dan secara langsung menyabotase usaha-usaha lawan dengan cara mengurangi jatah air oncoran.
- (4) Kampanye "Nasakomisasi" di perusahaan-perusahaan tebu, koperasi dan PN Gula (seperti halnya di instansi-instansi Lain) yang menjadi saingan "Tebu Berdikari" usaha orang-orang PKI dan bidang-bidang lain. Tuntutan-tuntutan *retooling* secara intensif.
- (5) Menghasut petani untuk tidak membayar pajak, menarik simpatisan sebanyak-banyaknya.
- (6) Tuntutan-tuntutan perbaikan nasib dan jaminan sosial di luar kemampuan perusahaan-perusahaan dan peraturan perburuhan yang berlaku, serta senantiasa merongrong gerak pemerintah (peristiwa Kedung Jombol, menahan polisi).
- (7) Pembelian bahan pangan secara besar-besaran sehingga menaikkan harga beras, tetapi dikamuflekan dengan tuntutan penurunan harga (Demonstrasi Gerwani Semarang).
- (8) *Vlaggen Parade* atau pawai bendera panji-panji PKI dalam rangka

HUT PKI ke-45 diikuti dengan appel besar PKI seluruh Jawa Tengah di Semarang dan tak lama kemudian sebagai *overdondering - politiek* atau politik gertak, diadakan pula rapat raksasa rakyat seluruh Jawa Tengah di Solo.

- (9) Tuntutan-tuntutan untuk mempersenjatai buruh-buruh dan tani dan pembubaran HMI oleh CGMI.
- (10) Penyebaran desas-desus (fluister kampanye) bahwa pasukan-pasukan Siliwangi diselundupkan di Jawa Tengah. Sebagian telah menduduki Cilacap, dikirim Dewan Jenderal untuk menumpas golongan komunis.
- (11) TC-TC dan membentuk yon-yon tempur dan lain-lain di Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan Karanganyar, dan tempat lainnya, bahkan di Karanganyar telah dibentuk pasukan-pasukan yang khusus ditujukan untuk kegiatan-kegiatan melawan Malaysia.
- (12) Pidato-pidato agitatif dari pimpinan-pimpinan PKI DIY yang senada dengan tokoh-tokoh PKI pusat antara lain oleh Salip wakil Komite DIY pada peringatan Dwi Dasa Warsa.

Dalam bidang kebudayaan khususnya sastra, misalnya prosa puisi diarahkan pada penanaman rasa kebencian kepada alat-alat kekuasaan Negara, dan sebaliknya memuji-muji orang-orang yang berani mengadakan perlawanan dan pembangkangan terhadap peraturan yang ada. Contoh : sajak Ismail Hamid, yang mengagungkan kurban dari peristiwa tanah di Boyolali. Dengan hal tersebut PKI telah membuat situasi menjadi masak, untuk pelaksanaan pemberontakan G30S/PKI di Jawa Tengah.

### **Di Jakarta**

Pada 1 Oktober 1965 oleh RRI Jakarta yang dikuasai G30S/PKI diumumkan oleh eks.Letkol Untung tentang Gerakan 30 September. Masyarakat pada umumnya bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pengumuman RRI tersebut ? G30S/PKI sejak pukul 03.30 telah bergerak dengan menculik jenderal-jenderal TNI. G30S/PKI hanya bertahan satu hari saja. Petang hari pukul 19.00 semua alat-alat komunikasi dan obyek-obyek vital dapat direbut kembali. Malam harinya pukul 20.00 Mayjen Soeharto, pangkostrad yang memegang pimpinan sementara ADRI mengeluarkan pengumuman bahwa G30S/PKI adalah kontra revolusioner. Mayjend Soeharto mengeluarkan Surat

Keputusan No.001/SEM/10/1965, 1 Oktober 1965, bahwa telah memecat dengan tidak hormat tiga orang pamen dan pati dari Korp AD mulai 30 September 1965 yaitu Letkol. Untung, Brigjen Supardjo, dan Kol. Sahiman (diumumkan dari RRI Jakarta pada waktu subuh 2 Oktober 1965). Selanjutnya juga dipecat Kol. A Latief, May. Agus Sigit, dan Kapt. Suradi. Pada 2 Oktober 1965 selatan Kota Jakarta sudah dikuasai kembali dan mulai gerakan ke Halim, tempat pemusatan G30S/PKI. Pada 3 Oktober 1965, Yon 454 telah kembali dan dikonsolidasikan di Senayan. Sisanya terseret kepada petualangan G30S/PKI ke Bekasi dan akhirnya menyerah (237 orang). Pada hari itu juga pasukan parako melakukan gerakan pembersihan di Lubang Buaya tempat di mana pati-pati kita yang diculik pada 1 Oktober 1965 dikubur dalam suatu sumur tua di daerah Lubang Buaya. Pada 4 Oktober 1965 diadakan penggalan dan pada 5 Oktober 1965 dengan upacara kebesaran dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai Pahlawan Revolusi. Letkol Untung ketua "Dewan Revolusi" dalam usahanya lari ke daerah Solo tertangkap di luar Kota Tegal.

### **Di Jawa Tengah**

Masyarakat umumnya belum mengetahui dengan jelas letak persoalan sebenarnya yang telah terjadi di Jakarta. Tiba-tiba kurang-lebih pukul 13.00, 1 Oktober, RRI Semarang yang dewasa itu dikuasai G30S/PKI menyiarkan bahwa Kodam VII mendukung Dewan Revolusi. Kolonel Sahirman menyatakan dirinya sebagai Komandan Gerakan 30 September Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan selanjutnya eks. Letkol Usman Sastrodibroto ditugaskan untuk mengoper pimpinan Kodam VII/Diponegoro. RRI Semarang dikuasai G30S/PKI sampai 2 Oktober 1965.

### **Perkembangannya**

Pada 1 Oktober 1965 pukul 07.30 panglima mengadakan briefing dengan para asisten serta mengundang Sad. Tunggal Dati I di Staf Kodam VII/Diponegoro (tidak hadir Ass. I eks Kol. Sahirman dan Ass. III Kol. Maryono). Eks. Letkol. Usman Sastrodibroto hadir. Hasilnya, Ass. VI Letkol. Usman diperintahkan untuk mengumumkan agar masyarakat tidak bertindak sendiri-sendiri dan perintah ini dilaksanakan. Panglima segera ke Magelang untuk mengadakan brief-



ing. Pukul 13.00 RRI Semarang dikuasai oleh Kol. Sahirman. Ia mengumumkan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai komandan Gerakan 30 September Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang isinya sebagai berikut.

- (1) Maksud, tujuan, dan langkah-langkah Gerakan 30 September
- (2) Penugasan kepada Letkol Inf. Usman Sastrodibroto untuk mengoper pimpinan Kodam VII/Diponegoro

Selesai memberi *briefing* di Magelang. Panglima akan memberi *briefing* tempat lain, tetapi Korem 73 telah dikuasai oleh oknum-oknum G30S/PKI yang telah berhasil menahan Danrem 73 Kol. Soekardi. Panglima berhasil meloloskan diri dari jebakan G30S/PKI dan kembali ke Semarang. Pukul 15.00 panglima sampai di Semarang, tetapi Kodam telah dikuasai oleh Dewan Revolusi G30S/PKI. Pukul 20.00 panglima memanggil eks. Kol. Sahirman, tetapi Sahirman menolak. Panglima memutuskan akan memperingatkan Sahirman dengan kekerasan. Pukul 23.00 panglima bersama Ass. II Letkol Soeprapto, paldam Letkol Soertijono, dan Ajudan Kapten Achmadi menuju Magelang untuk menyusun kekuatan. Pagi sebelumnya Kapten Achmadi telah berhasil meloloskan diri dari tangkapan Usman dan kawan-kawan.

Pada 3 Oktober 1965, pukul 06.55 melalui RRI Semarang Sahirman mengumumkan tentang hasil-hasil gerakannya selama itu. Di Magelang panglima berunding di kediaman Dan Rindip Kol. Jusmin Singomenggolo untuk menentukan langkah-langkah dengan komandan kesatuan-kesatuan. Pukul 04.00 panglima memutuskan untuk melakukan operasi Merah Putih. Pukul 05.30 panglima memerintahkan Dan Yon Kavaleri II Kol. Jasin Husein bergerak ke Semarang untuk mengepung Kodam VII. Untuk menghindari pertumpahan darah, gerakan berposisi di Jatingaleh. Panglima memerintahkan May. Hartono dan May. Subekti untuk memanggil eks. Kol. Sahirman dan Usman untuk menghadap panglima, tetapi tidak berhasil. Panglima memerintahkan Kol. Soeprapto dan May. Soeroto merebut RRI Semarang dari tangan G30S/PKI. Ternyata Yon K pimpinan May. Kaderi dari Sala sebanyak dua yang ditempatkan di Semarang oleh G30S/PKI telah pergi bersama eks. Kol. Sahirman, eks. Kol. Marjono,

eks. Letkol. Usman, eks. May. Karsidi, eks. May. Kiryan. Setelah markas Kodam VII dan RRI dapat dikuasai lagi panglima menyampaikan pidato melalui RRI.

### **Yogyakarta**

Pada 1 Oktober 1965, RRI Yogya telah dikuasai oleh G30S/PKI dan telah mengumumkan pengambilalihan pimpinan Korem 072 oleh May. Muljono dari Kol. Katamso. Kolonel Katamso telah diculik sebelumnya. Kas. Rem 072 Letkol. Soegijono juga telah diculik.

### **Solo**

Pada 1 Oktober 1965, pukul 14.00, terjadi briefeng sesuai dengan perintah panglima tentang situasi di Jakarta. Pukul 18.00 RRI Surakarta di bawah G30S/PKI mengumumkan dukungan terhadap Dewan Revolusi oleh Walikota Ramelan. Letkol Iskandar mengambil alih kekuasaan Ka. Brigif. 6 dari Ko. Inf. Ashari dan ditahan oleh G30S/PKI di Pemasyarakatan Surakarta bersama enam perwira lainnya, yaitu Kas. Brigif 6 - Letkol, Parwoto, Dan Dim 0735 - Letkol Ezi Soeharto, Kas Dim 0735 - May. Soeparman, Dan Yon M - May. Soedargo, dan Dan Sub Pom VII/21 - Kapt. J. Prawoto.

### **Purwokerto dan Salatiga**

Eks.Kastaf Korem 071 Letkol Soemitro telah menggeser kedudukan Dan Rem 071 dan mendukung G30S/PKI. Persiapan G30S/PKI dipimpin oleh Letkol Idris. Pada 1 Oktober 1965 : Dan Rem 073 Kol. Soekardi ditahan oleh Kapt. Soepomo di rumahnya. Yon D telah dipersiapkan sebagai pasukan G30S/PKI mendukung G30S/PKI.

### **Epiloog Pemberontakan G30S/PKI : Pengumuman G30S/PKI di Jawa Tengah**

- 3 Oktober 1965 : Eks.Letkol Soemitro menyerahkan kembali Korem 071 kepada Kol. Tjiptono Setyobudi (atas kesadaran sendiri).  
Eks.May.Trisnadi Kasi I dan eks.May.Bernadi Kasi III Korem 071 dapat digagalkan sebelum bertindak.
- 4 Oktober 1965 : dan Brigif 6 dengan perwira-perwira yang di tawan G30S/PKI dibebaskan.

- 4 Oktober 1965 : Setelah Kol. Soedjono Kodam VII/Diponegoro melakukan *show of force*, Letkol Idris menyerah tanpa syarat dan Dan Rem 073 dibebaskan.
- 4 Oktober 1965 : Kapt. Surjotomo, eks. Wa Dam Yon 451 (Yon L) utusan pribadi Pangdam VII/Diponegoro telah dapat menormalkan Yon L.
- 5 Oktober 1965 : Panglima memberi briefing di Korem 072. Sebelumnya May. Kartawi telah menghadap panglima dan bersedia menarik Yon C dari perbatasan Yogya-Magelang (Tempel), untuk mengisi kekosongan, Kol. Widodo Ass. IV Kodam VII ditunjuk sebagai pejabat Dan Rem 072 dengan menggunakan Hotel Garuda sebagai Markas.
- 5 Oktober 1965 : May. Kaderi dengan dua kompi pengawal Sahirman telah melapor di Solo.

Dengan demikian dalam waktu lima hari saja, pemulihan garis komando slogarde Kodam VII telah dapat dipulihkan. Eks. May. Sukirjan Wa Ass. 5 & May. Karsidi Ass 2 telah melapor di Semarang.

#### **Kedatangan RPKAD (Parako)**

Pada 17 Oktober 1965, pukul 04.00 pasukan RPKAD berangkat dari Jakarta di bawah pimpinan May. C.I. Santosa, bermalam di Tanjung (Brebes). Pukul 07.00 meninggalkan Tanjung ke Semarang lewat Pekalongan, di sini dilakukan *show of forces*. Pukul 14.30 (18 Oktober 1965) sampai di Semarang terus mengadakan *show of forces*. Yon 3 Parako di bawah pimpinan May. Kosasih bertugas operasi Muria ; Demak - Purwodadi dan sekitarnya, sedangkan Banyumas diserahkan kepada KKO di bawah pimpinan Kapt. Soekarno, dan Pekalongan diserahkan kepada Yon 401 Para/BR.

Pada 19 Oktober 1965, pukul 01.30 kelompok Komando Parako di bawah pimpinan Dan Men. Kol. Sarwo Edhie yang dikawal oleh pasukan Letda Sintong Pandjaitan tiba di Semarang dan langsung mengadakan briefing dengan komandan-komandan bawahannya. Pada 20 Oktober 1965, pukul 12.00 briefing Kol. Sarwo Edhie di depan Komando Parako dan perwira Kodam yang berisi pernyataan sebagai berikut.

1. Tubuh Kodam VII/Diponegoro dilibatkan dalam peristiwa G30S/PKI karena di dalamnya terdapat oknum-oknum yang terlibat
2. Peristiwa ini merupakan tantangan bagi TNI - AD
3. Tugas PARAKO ialah membantu Kodam VII/Diponegoro, untuk konsolidasi ke dalam yang bersifat politis dan menghancurkan G30S/PKI.

Pukul 21.00 datang pula 1 Ki Kavaleri di bawah Mayor Kav. Sunarjo. Pada 1 Oktober 1965, pukul 08.00 laporan kepada panglima tentang kedatangan Parako. Kemudian dilanjutkan *show of forces*. Pencarian Kol. Katamso dan Letkol Soegijono terus dilakukan oleh Kapten Surtotomo dan kemudian ditemukan di kompleks asrama Yon L Kentungan (10 Oktober 1965), tetapi pada waktu itu Yon L masih berada di situ. Pada 18 Oktober 1965 : Pasukan Yon L ditugaskan ke luar Jawa dalam rangka Dwi Kora. Kemudian dilakukan pembongkaran jenazah Kol. Katamso dan Letkol Soegijono yang dipimpin oleh May. POM. Moh. Said dan anggota-anggota POM Kes Rem 072, Zi Bang Rem 072 (20 Oktober 1965, diundur 21 Oktober 1965 atas perintah panglima. Sebagai dokter pemeriksa adalah kolonel dr. Soetarto. Jenazah diiringi oleh pasukan-pasukan termasuk RPKAD, dan dihadiri oleh panglima. Pada 22 Oktober 1965, eks. May. Muljono tertangkap di Kelurahan Karanggeneng Boyolali (yang bertanggung jawab atas pembunuhan Kol. Katamso dan Letkol Soegijono). Pada 19 Oktober 1965, di Semarang oleh RPKAD dilakukan operasi terhadap gedung-gedung sarang PKI, diikuti reaksi massa dari golongan Nas dan A. Pada 20 Oktober 1965, pembakaran oleh massa terus dilakukan. Pada 21 Oktober 1965, pukul 12.00 RPKAD menuju Magelang. Tugas di Semarang diserahkan kepada May. Subechi (Wadan Yon III).

Pada 20 Oktober 1965, panglima selaku peperlrada Jawa Tengah mengeluarkan keputusan pembekuan kegiatan PKI dan Baperki (Kep. No. Kep. PPDO 0064/10/1965). Akibatnya terjadi pemogokan-pemogokan di Stasiun Solo Balapan (SBKA), Pabrik Karung Delanggu, P.G. Gondangwinangun Klaten, dan PN Infitex, Tembakau Klaten. Jalan-jalan antara Delanggu - Gondangwinangun dirintangi dengan batang-batang pohon. Kodim Boyolaei dikepung Pemuda Rakyat yang bersenjata bambu runcing. Pada 22 Oktober 1965 pukul 00.00 RPKAD bergerak ke Yogyakarta, 1 kompi ditinggal di Yogyakarta untuk pemakaman Kol. Katamso dan Letkol Sugijono,

lainnya bergerak ke Boyolali. Sisanya ke Solo pukul 15.30 untuk melakukan *show of forces* di Gedung Balaikota yang sedang dikepung para demonstran. Sejak 22 Oktober 1965, di daerah Klaten Boyolali, Surakarta dan Wonogiri sering terjadi aksi teror. Pejabat-pejabat yang terlibat G30S/PKI antara lain Suwali Dwidjosutarto, kepala daerah Boyolali, Drs. Harun Al. Rasjid, bupati Karanganyar (melarikan diri), dan Utomo Ramelan, walikota Surakarta, menyerah.

Pada 22 Oktober 1965, pukul 16.30 RPKAD menuju Stasiun Solo Balapan. Pada 1 November 1965 Jawa Tengah dinyatakan dalam keadaan perang. Selain daerah Surakarta, daerah Jawa Tengah lainnya hanya merupakan taraf konsolidasi belaka. Pada 22 November 1965 pukul 21.00 Gembong PKI DN AIDIT tertangkap hidup-hidup di kampung Sambeng (Solo bagian utara) oleh Yon C.

### **Operasi Merapi**

Operasi ini dipimpin oleh Dan Men RPKAD Kol. Sarwo Edhie untuk menghancurkan gerombolan G30S/PKI yaitu eks.Kol. Sahirman dan kawan-kawan. Parako kemudian melatih Pemuda Pancasila untuk menghadapi massa G30S/PKI. Pada 10 Desember 1965, pukul 05.00 berhasil disergap gerombolan G30S/PKI di Cemorosewu, diantara tertembak mati adalah Eks.Letkol Usman, Eks.May. Sumadi Al Rahardjo, Eks.Kapt. Sukarno, Dariwin BTI Cabang Boyolali, Astijo IPD/Anggota DPRGR Boyolali. Operasi 10 Desember 1965 dan selanjutnya di daerah ini telah berhasil menembak mati eks. Kol. Sahirman, eks. Kol.Maryono, dan eks. May. R.W. Soekirno. Dengan demikian selesailah kegiatan penumpasan G30S/PKI untuk tahap ini, dan berikutnya pemerintah telah berfungsi lagi.

Pada 25 Desember 1965 PARAKO kembali ke pangkalannya di Jakarta. Hasil-hasil yang telah dicapai ialah (a) ratusan ribu pengikut G30S/PKI dijebloskan dalam tahanan dan (b) ratusan senjata dirampas, sedangkan kerugian materi berupa rumah/gedung sebanyak 35 dibakar dan 106 rusak ringan/berat.

#### *7.1.3 Sesudah Pengakuan Kedaualatan*

Usaha Belanda dalam memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain dengan mendirikan negara-negara boneka Politik

ini pun tidak terkecuali terhadap Pulau Jawa. Namun demikian tidaklah semudah seperti di luar Jawa, terutama Jawa Tengah, pada waktu Belanda kembali di Semarang sudah berdiri BAPRIS (Badan Perwakilan Rakyat Indonesia Semarang); sebuah badan nasional berjiwa republikein di tengah pendudukan Belanda yang melakukan pekerjaan pamongpraja.

Bapris dipimpin oleh Mr. Ichsan dan tetap berkuasa dalam pemerintahan sipil dan kehidupan masyarakat. Di Semarang waktu itu (1946-1948), didirikan SMP dan SMA yang terletak di Jalan Pemuda (Bojong) dan Sidodadi di bawah naungan Bapris, bahkan murid-muridnya tetap mengikuti ujian yang bahannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran RI di Yogyakarta. Guru-guru yang mengasuh SMP/SMA Bapris itu bekerja dengan tanpa pamrih di antaranya Bp. Wirasto, dr. Sihombing, Alfred Simanjuntak, Drs. Rawoeh, Soeparman, Ny. Widowati, Ny. Mimiek, Soetadi, Ilyas, Hendro dan lain-lain. Kaum Republikein di Semarang juga pernah menerbitkan surat kabar kecil bernama *Warta Semarang* dan salah seorang pengasuhnya ialah Gadis Rasjid. Demikian pula Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang tetap di bawah pengelolaan dokter-dokter republikein di antaranya Dokter Soekaryo dan Dokter Poernomo.

Mula-mula Belanda akan menenyapkan badan tersebut dengan mendirikan *Raad van Advies* atau Dewan Penasehat *Recomba*, tetapi tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan rakyat. Belanda kemudian mendirikan Dewan Perwakilan Jawa Tengah. Sementara yang diharapkan dapat dipergunakan untuk memproklamasikan negara bagian sebagaimana telah terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur. Badan ini didirikan bulan Februari 1949, tetapi akhirnya tidak menghasilkan suatu apa pun. Ia hanya dapat mematikan BAPRIS, karena badan ini kemudia membubarkan diri. Belanda hanya dapat menyebut Jawa Tengah sebagai *Staatkundigeeenheid Midden Java*, sehingga diikutsertakan dalam Konferensi BFO di Bandung. Sampai berdirinya RIS, badan ini juga belum dapat bekerja sama dengan Belanda.

Begitulah pada dasarnya dalam masa RIS, Jawa Tengah secara riel masih mempertahankan prinsip negara kesatuan sampai terbentuknya negara kesatuan berdasarkan UUD 1950.

### 7.1.4 Terbentuknya Pemerintahan Daerah Tingkat I

Proklamasi Kemerdekaan baru diketahui dan mulai menggerakkan semangat bagi rakyat Jawa Tengah setelah Wongsonegoro selaku *fuku shuchokan*, pada 19 Agustus 1945 pukul 13.00 mengumumkannya melalui corong radio. Adapun pidato radio Wongsonegoro itu selengkapnya sebagai berikut :

“Berdasarkan atas pengumuman-pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Djakarta maka dengan ini kami atas nama Rakyat Indonesia Daerah Semarang, mengumumkan sementara aturan-aturan pemerintahan, untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang, sebagai berikut :

1. Mulai hari ini, tanggal 19 Agustus 1945, jam 1 siang, Pemerintahan Republik Indonesia untuk daerah Semarang mulai berlaku.
2. Terhadap segala perbuatan, yang menentang Pemerintahan Republik Indonesia, akan diambil tindakan yang keras.
3. Senjata api, kecuali yang ditunjuk mereka yang berhak memakainya, harus diserahkan pada polisi;
4. Hanya bendera Indonesia Sang Merah Putih boleh dikabarkan.
5. Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras dan
6. Selanjutnya, semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai biasa.”

Semarang, 19 Agustus 1945  
Kepala Pemerintahan RI  
Daerah Semarang

Wongsonegoro

Dengan pengumuman ini, semua kekuasaan atas daerah Semarang dinyatakan telah masuk dalam kekuasaan Republik Indonesia. Ini berarti sejak saat inilah, Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang telah mulai berjalan. Namun demikian setelah Sekutu mendarat di Semarang dan setelah pertempuran lima hari di Semarang, pusat pemerintahan daerah dipindahkan ke pedalaman ialah ke Salatiga yang semata-mata bertujuan untuk mempertahankan diri dan menghindarkan diri dari segala kemungkinan yang timbul, di samping untuk menegakkan pemerintahan daerah yang stabil. Hal ini ternyata berhasil dengan baik, sedangkan di daerah pendudukan di Kota

Semarang berdirilah Bapris yang tetap berjiwa republikein dan menjadi panutan serta pemerintahan bagi masyarakat.

Bapris tidak dapat berdiri lagi sesudah Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Kekuasaan Pemerintahan di daerah-daerah di Jawa Tengah tidak seluruhnya berjalan dengan lancar, bahkan hampir setiap daerah berbeda peristiwanya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Di Surakarta, setelah Jepang menyerah *Tyoban Watanabe* mengembalikan kekuasaan sipil kepada kesunanan dan mangkunegaran, walaupun masih tetap kekuasaan militer, sehingga di sana ada tiga kekuasaan pemerintahan, yaitu kerajaan-kerajaan, militer Jepang, dan Republik Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini pada 1 November 1945 di bentuk di rektorium yang terdiri atas SP. Mangkunegoro dengan 2 anggota dari masing-masing kerajaan serta 2 anggota lagi dari KNI Pengangkatan di rektorium.

Surakarta pernah dikuasai oleh Dewan Pertahanan Daerah, kemudian disusul dengan peraturan Pemerintah No.16/SD tahun 1946 yang isinya sebagai berikut :

- (1) Jabatan komisariss tinggi dihapuskan.
- (2) Pemerintah Kesunanan dan Mangkunegara akan ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Surakarta untuk sementara dianggap sebagai kepresidenan, seperti lain-lain kepresidenan diluar Surakarta dan Yogyakarta.

Di daerah Pati, ternyata Jepang masih berkeinginan memegang pemerintah. Rakyat Pati akhirnya tidak sabar lagi. Pada 20 September 1945 menyerbu tangsi *Kempetei*. Sehingga Jepang harus menyerah. Sebagai kepala Pemerintahan ditunjuklah Milono sebagai residen dan Sarino sebagai wakilnya.

Berbeda juga keadaannya di Kedu, rakyat tidak secara cepat mengambil kekuasaan sehingga Jepang ada kesempatan untuk memindahkan segala peralatan ke luar Kota Magelang. Di sini pulalah terjadi insiden. Jepang telah merobek-robek bendera Merah Putih (24 September 1945 ) yang mengakibatkan kemarahan rakyat dan keesokan harinya oleh rakyat dikibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Tidar.



Pada 7 Oktober 1945 *Kenpei Tai* menyerah dengan menyerahkan segala persenjataannya. Berikutnya, 13 Oktober 1945, pasukan Nakamura menyerahkan senjata kepada rakyat. Tibalah saatnya rakyat Magelang menyusun pemerintahan daerah, tetapi disusul berkecamuknya pertempuran-pertempuran dengan Sekutu ( Inggris dan NICA ). Baru kemudian setelah pertempuran ini selesai, disusun segala alat pemerintahan daerah termasuk pembentukan KNI daerah. rakyat Banyumas, sebelum membangun pemerintahan daerah, didahului dengan perjuangan senjata pada 28 Agustus 1945. Baru pada 5 September 1945 Banyumas mengumumkan berlakunya pemerintahan Republik Indonesia dengan Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sebagai residen. Pada 24 September 1945 seluruh alat pemerintahah telah dikuasainya.

Pemerintahan daerah di Pekalongan sampai menjelang bulan Nopember 1945 jabatan Residen dipangku oleh Mr. M. Besar. Adapun pengganti-penggantinya adalah Soemitro Kolopaking dan Wali Alfatah ( Mei 1945 ).

## **7.2 *Penyelenggaraan Kehidupan***

Dalam periode pertama, setelah diproklamasikan Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945, masalah-masalah perekonomian dan seluruh kekuatan dicurahkan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap segala macam serangan dan muslihat musuh. Akibatnya program jangka pendek adalah mengatasi keadaan-keadaan yang langsung membahayakan keselamatan rakyat, kelaparan, kekurangan bahan makanan dan lain-lain. Program jangka panjang adalah pembangunan sosial dan ekonomi, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang akan dapat dicapai. Seharusnya sejak Pengakuan Kedaulatan oleh Belanda 29 Desember 1949, terbuka kesempatan bagi Pemerintah RI untuk menjalankan segala sesuatu yang diperlukan untuk memecahkan problema-problema jangka pendek dan panjang yang hasilnya akan menentukan nasib bangsa selanjutnya. Namun demikian kalau dipelajari program-program pusat maupun daerah, maka program-program itu tampaknya hanya mencantumkan usaha-usaha pemecahan masalah jangka pendek ( Program tahun 1957 - 1963 ).

Sebaliknya politik okonomi yang dilakukan adalah menstabilkan perekonomian yang beratnya sangat berbeda-beda ada titik berat masalah impor-ekspor dan soal devisa, soal moneter, anggaran negara

dan juga yang memusatkan perhatiannya pada soal menanam modal asing, stabilisasi harga bahan makanan dan lain-lain. Tujuan yang pokok adalah untuk menghindarkan terjadinya perkembangan pada salah satu bagian dari sektor-sektor perekonomian Indonesia ini sangatlah mudah terjadi, mengingat struktur perekonomian RI pada waktu itu berat sebelah dan sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan *kongjungtur* dunia internasional, keadaan rakyat yang masih miskin, kurang pendidikan dan pengajaran, kurangnya pemeliharaan dan kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang teknologi, sangat rendah produktivitas kerja, sangat sedikit menggunakan peralatan modern dalam usaha-usaha produksinya.

Hasil penelitian Biro Perancang Negara ( 1951 - 1955) disebutkan bahwa sejak 1951 sampai 1955 tiap tahun hanya ada tambahan investasi sejumlah 5% dari pendapatan nasional, sedangkan tambahan nasional sejumlah 2 sampai 3%. Jika mengingat bahwa penduduk berkembang dengan kecepatan antara 1,7 sampai 2.3% tiap tahun, maka jelas bahwa usaha untuk meningkatkan tingkat hidup yang telah mempertahankan tingkat hidup yang telah tercapai itu merupakan soal yang tidak mudah.

Faktor-faktor keterlambatan kehidupan sosial dan ekonomi disebabkan oleh faktor-faktor luar, ditambah pula dengan faktor-faktor dalam dua hambatan yang pokok, yaitu :

- (1) gerakan-gerakan anti pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Ikut sertanya daerah membantu pemerintah menyelesaikan gerakan-gerakan anti pemerintah di Jawa tengah.

Di dalam usaha menghadapi kemacetan dalam bidang ekonomi sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat, pemerintah mencoba mengurus Rencana Pembangunan Lima Tahun. Harapan yang sewajarnya kepada rakyat Indonesia bagi mencapai suatu generasi, suatu kenaikan dalam tingkat hidupnya dengan cepat ke suatu kenaikan yang normal sesuai dengan negara yang sudah maju.

Pada akhirnya politik pembangunan ekonomi di atas tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebab utama adalah tidak tersedianya jaminan mobilitas pelaksanaan rencana tersebut. Keuangan tidak tersedia, kewajiban untuk melaksanakan tidak ada di samping banyak

penyelewengan yang terjadi. Walaupun demikian, kelihatan bahwa usaha pemerintah dengan segala kelemahannya, terdapat juga kemajuan yang bersifat fundamental. Mulai tahun 1959 melalui kabinet kerjanya, pemerintah membuat rumusan pembangunan yang lebih sederhana, yakni :

- (1) Tujuan jangka pendek, sandang pangan, keamanan, melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan ke kanan dan ke kiri di dalam pergolakan dunia menuju kepada satu sumbu baru.
- (2) Tujuan jangka panjang, masyarakat adil dan makmur, menenyapkan imperialisme di mana-mana dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi.

Sebenarnya keadaan penghidupan di Jawa tengah pada masa itu cukup aman, tetapi karena terjadi pergolakan politik di daerah luar Jawa, menyebabkan sebagian besar program tidak terjangkau , di samping ada kemampuan untuk mengembangkan petani wilayah dalam bidang pembangunan. Peristiwa bersenjata yang penting dan melibatkan Jawa Tengah adalah peristiwa Trikora dan Dwikora. Kehidupan masyarakat Jawa Tengah ikut pula terbawa oleh arus politik yang tidak dipahami oleh masyarakat awam, mencapai puncaknya pada Pembentukan G30S/PKI. Selesaiannya penumpasan Pembentukan G30S/PKI, Jawa Tengah bersama-sama daerah lain dan pemerintah, menata kembali kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi dan politik. Penataan kembali ini diringkas dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I yang di masa itu memasuki PELITA II. Di Jawa Tengah dikenal dengan istilah "Modernisasi Desa".

### **7.3 Kehidupan Pendidikan dan Seni Budaya**

#### **7.3.1 Kehidupan Pendidikan**

Pendidikan dan pengajaran timbul di masa *Ethische Politiek*. Mula-mula dicobakan oleh kaum missi Agama kemudian ada perintah dari pengusaha bahwa rakyat agar diberi pendidikan membaca, menulis dan berhitung, walaupun pada tingkat tersebut dilakukan seperlunya dan hanya mendidik orang-orang yang membantu dalam usaha mereka. Baru pada tahun 1818, dengan dikeluarkannya : *Reglement op het beleid van de regering van Nederlandsch Indie*, yang di dalamnya

menyebut tentang pemeliharaan pendidikan, walaupun dalam praktek tidak pernah dilakukan.

Pada tahun 1836 R.R. diubah tanpa lagi menyebutkan masalah pengajaran. Baru pada perubahan tahun 1854 terdapat pasal 125 yang menyebutkan bahwa, " Pengakaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian gubernur jendral ". Pasal ini kemudian ditambah penjelasan dalam pasal 126, yang kira-kira berbunyi, " Pemberian pengajaran bebas kepada anak-anak Eropa " dan " Sedapat-dapatnya yang memenuhi keperluan penduduk bangsa Eropa " ( pasal 127 ).

Untuk anak-anak bumiputra, R.R. pasal 128 berbunyi kurang lebih bahwa, untuk itu ada beberapa bupati mendirikan " sekolah-sekolah kabupaten " yang diadakan hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Dengan peraturan pemerintah kolonial Belanda, " *Reglement Yoor het inlandsch onderwijs* " ( Pengaturan Pengajaran untuk Bumiputra ), didirikan Sekolah Guru di Surakarta yang kemudian dipindah ke Magelang, dan pada 1866 pindah ke Bandung. Secara berangsur-angsur kemudian didirikan sekolah-sekolah bumiputra yang terdiri atas tiga, sedangkan gurunya dari *week school*, dibantu oleh tenaga lulusan sekolah Bumiputra, dengan mendapat pendidikan tambahan. Tujuan dari pendidikan ini adalah " Pendidikan tenaga pegawai Negeri dan pembantu perusahaan milik Pemerintah Kolonial Belanda. "

Dengan kesadaran bahwa pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya harus bersifat memulihkan tumbuhnya benih - benih kebudayaan, tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti R.A. Kartini, Dokter Wahidin dan lain-lain, dalam cita-cita pergerakannya, tercermin tujuan pendidikan bangsa, walaupun masih belum melepaskan ciri-ciri/ jiwa tujuan pendidikan kolonial. Baru pada tahun 1920 timbul cita-cita yang cukup radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan, " Cita-cita kemerdekaan nusa dan bangsa dan kebebasan berbudaya bangsa " melalui Taman Siswa. Kemudian ternyata Taman Siswa ini mendapatkan tempat di hati rakyat.

Setelah zaman kemerdekaan, pendidikan dan pengajaran merupakan hak tiap warga negara dari pemerintah menyelenggarakan sistem pengajaran nasional dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan

Jawa tengah memperoleh kesempatan dalam sistem pembaharuan ini, yakni Sekolah Teknik Menengah Pembangunan, Sekolah Perintis Pembangunan, Sekolah menengah Pembangunan, Pembaharuan-pembaharuan di SD dan Pendidikan bagi masyarakat desa, di samping penambahan lokal dan material ( alat-alat) sekolah dari pemerintah. Suatu gambaran tentang pendidikan di Jawa tengah adalah sebagai berikut ( data 1973 ). Jumlah penduduk Jawa Tengah 22.454.237 jiwa dengan kira-kira 30% pendudukan yang non-produktif ( 7.552.816 jiwa). Anak-anak umur sekolah 5 - 29 tahun berjumlah 9.800.842 orang, dengan jumlah sekolah seperti tergambar dalam tabel berikut.

Jenis Sekolah	Negeri	Swasta
SD	11.225	1.398
SMP	145	672
SMA	46	89
SMEP	37	101
SEMA	30	101
ST	147	40
STM	20	88
SKKP	21	40
SKKA	5	18
SPG	26	50
SPSA	2	-
SFMA	-	7
TK	2	4.412

### Perguruan Tinggi

Universita Negeri	2
Universitas Swasta	3
Institut Negeri	1
Akademi Negeri	4
Akademi Swasta	3

### 7.3.2 Perkembangan Seni Budaya

Seni lukis Indonesia modern menemukan bentuknya pada akhir abad ke 20, dengan Raden Saleh ( 1864 - 1880 ) sebagai pelopornya, sedangkan seni sastra baru pada tahun 1920, dengan kehidupan serta tradisi sastra baru. Kalau kesusastraan telah mengalami kegiatan sejak 1933, yaitu suatu kegiatan yang ditandai oleh kesadaran tugas sastra dalam rencana pembentukan manusia Indonesia sebagai suatu bangsa dan pendukung budaya corak tersendiri, maka seni lukis baru menunjukkan kegiatannya pada tahun 1937 dengan terbentuknya Persatuan Ahli Gambar (PERSAGI). Secara umum bibit-bibit perkembangan seni dan budaya setelah kemerdekaan ( menjelang 1945 - 1950 ) telah tumbuh di jaman Jepang. Kendatipun pada zaman Jepang ini kehidupan para cendekiawan/intelektual banyak mengalami tekanan dan penindasan yang tiada tara, tetapi ada sedikit perkembangan sastra - budaya sebagai alat propaganda.

Pada masa itu masalah para seniman - budayawan merupakan masalah politik sebagai gejala lahir. Tidak jarang kita saksikan seniman menyebarkan diri ke gelanggang politik atau medan perang dan sebaliknya politikus memikul tugas berpikir bahkan turut mencipta dalam lapangan seni dan budaya (Drs. Subagio Sastrowardojo - *Seni dan budaya setelah kemerdekaan* ).

Kegiatan-kegiatan seni budaya antara 1945 — 1950 untuk daerah Jawa Tengah terpusat di Kota Surakarta. Di kota ini terhimpun seniman-seniman dalam perkumpulan “ Seniman-seniman Indonesia Muda “ dengan menampilkan penerbitan-penerbitan yang menampung kegiatan seni dan budaya. nama majalah sama dengan nam perkumpulannya. Pada tahun 1948 di kota Magelang terjadi Konggres Kebudayaan, yang merupakan awal dari konggres kebudayaan yang diadakan dalam waktu yang teratur di kemudian hari.

Tidak terlepas dari pergolakan-pergolakan politik, sejak tahun 1930 seniman dan perdagangan telah dimasuki paham-paham politik. ( cacatan tahun 1950 berdiri LEKRA yang berhaluan politik komunis, tahun 1959 berdiri LKN milik PNI. Lembaga Kebudayaan Islam dan lain-lain ). Kesenian dan kebudayaan tradisional juga tidak terlepas dari perkembangan seni dan budaya secara nasional, sebab tradisi lama

yang telah lama tertanam dalam kehidupan dan tata cara tradisional masih sangat lamban berkebang, walaupun demikian tampak gejala perubahan generasi yang semakin maju dan berkembang. Perhimpunan-perhimpunan dan kebuyaan tradisional yang pernah dan sampai sekarang menyumbangkan peranannya adalah sebagai berikut.

Di Solo terdapat perhimpunan WO Sriwedari dan Cipto Kawedar, sedangkan di Semarang terdapat perkumpulan Ngesti Pendowo, Sriwanito, Sriwijaya. Pusat pendidikan, penyelidikan, penelitian, pemeliharaan, dan perkembangan seni termasuk seni tradisional ( gamelan & pedalangan ) didirikan di Kota Surakarta pada tahun 1950. Tidak kurang pentingnya juga peranan radio baik selama masa perjuangan maupun masa pembangunan dalam memupuk, membina dan mengembangkan seni budaya. Mulai dari NIROM di Solo (SRV/ *Solosche Radio Vereeniging* ) sampai sekarang dengan RRI Surakarta, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga radio-radio yang dibina oleh pemerintah daerah.

### 7.3.3 *Perkembangan Pendidikan dan Seni Budaya setelah 1965*

Hasil pendidikan yang dicapai dalam Repelita I / Modernisasi Desa Tahap I untuk pendidikan formal dan pendidikan non-formal adalah sebagai berikut :

- (1) Penambahan Sekolah Dasar, termasuk dana SD Inpres 10/1973.
- (2) Pengadaan tenaga guru-guru pada tahun 1973 ( 56.776 guru SD pada tahun 1969 menjadi 71.635 guru tahun 1973 termasuk guru Inpres)
- (3) Kenaikan jumlah klas (63.770 pada tahun 1969 menjadi 71.831 kelas pada tahun 1973 )
- (4) Dharma siswa : 1973 / 1974 tercatat sebagai berikut :
 

Tingkat SLTA	: 42 orang mendapat dharma siswa
(kejuruan	: 138 orang mendapat bea siswa)
Tingkat SLTA	:
Umum	: 12 orang mendapat dharma siswa
Tingkat PT	: 18 orang mendapat bea siswa & khusus ; untuk Fakultas Teknik, Pertanian dan peternakan
- (5) Penataran dan penyediaan buku ( tercapai 1145 dengan guru yang ditatar dan pengadaan penelitian buku / alat peraga sebesar Rp. 76.994.000,- ).

### Pendidikan Non formal

- (1) Program *Do School*, dengan dibinanya Pusat Pendidikan Modernisasi Desa di tiap kabupaten /Kotamadya untuk membentuk tenaga pembangunan desa, meningkatkan mutu para pamong tani desa.
- (2) *Up grading* Guru SD dan Pengadaan buku-buku Modernisasi Desa.
- (3) *Mixed Farming* ( untuk mendidik generasi muda, terutama bagi mereka yang gagal sekolah, untuk menjadi pengusaha tani). *Mixed Farming* berada di Desa Sidomulyo, Ungaran.

Dalam Repelita I/Modernisasi Desa Tahap I diarahkan pada pembangunan serta pembinaan manusia-manusia budaya yang Pancasila serta memberikan arah pertumbuhan kebudayaan dalam peranan pembangunan dan juga mengembangkan kebudayaan/kesenian Nasional Jawa Tengah. Hasil dicapai sebagai berikut :

- (1) Penataran Guru-guru kesenian dan sutradara/pelatih teater tradisional.
- (2) Sarana pengembangan kesenian daerah.
- (3) Ikut serta dalam festival Ramayana Nasional dan Internasional
- (4) Pameran Seni Krida SD se-Jawa Tengah

### 7.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan Perkembangan Agama Islam Islam

Sejak masa pergerakan Nasional golongan Islam telah banyak peranannya . Mereka melakukan politik “ non koperasi terhadap kekuasaan penjajahan Belanda, sebab menurut kaum Islam ( Ulama Islam ), mereka ini kafir.

Gerakan -gerakan perjuangan di Jawa Tengah juga ikut dalam melakukan perang kemerdekaan. Kaum santri menggantikan kitab-kitab pelajaran Agama dengan senjata seperti badan kelaskaran yang berada di Kebumen dan bermarkas di Pesantren Cilacap, Probolinggo, Banjarnegara, Wonosobo, Purworejo. Sejak tahun 1949 terjadi apa yang dinamakan “ Perang Membangun “ yakni gerakan pembaharuan di kalangan kaum santri, dengan membangun diri pribadi kaum santri sendiri, seperti melengkapi dengan kekurangan mereka sebagai warga negara RI. yang merdeka, menuntut ilmu pengetahuan umum. aksara latin, bahasa asing dan seterusnya.



Guna meningkatkan fasilitas dalam rangka modernisasi Islam, banyak langkah yang diadakan, yaitu :

- (1) Bidang perguruan sejak tahun 1950 di dalam rehabilitasi pondok - pondok pesantren, seperti Pondok Pesantren Muslim Jamsaren di Surakarta. pendidikan untuk guru agama seperti PGA, GPAA dan seterusnya.
- (2) Pendidikan Tinggi Islam  
Di Surakarta tahun 1950 didirikan Perguruan Tinggi Islam dengan pimpinan Prof. K.R.H.M. Andar - K.H Usman Ghazali, Mr. Tirtadiningrat ( Fakultas Agama & Ekonomi ).  
Di kota yang sama berdiri pula Universitas Cokroaminoto dan tahun 1959 Universitas Nahdhatul Islam, tahun 1960 mulai dibuka Institut Agama Islam Negeri.
- (3) Di samping itu terdapat juga IKIP Muhammadiyah yang berdiri dalam 1960 di Surakarta.
- (4) Tempat-tempat ibadah, tidak saja didirikan di tempat-tempat tertentu, tetapi juga disemua instansi ada mushola atau langgar untuk beribadah. Bangunan masjid banyak dibangun dari yang paling sederhana samapi yang megah.

kemajuan yang terlihat dari bangunan tempat ibadah ini ada faktor kebersihan dan kegunaan.

Dari bidang penyuluhan agama, sangat dirasa kemajuannya, lebih-lebih setelah pemberontakan G30S/PKI, untuk meningkatkan kesadaran beragama, di Jawa tengah berdiri Lembaga P3 A dan tingkat desa — propinsi ( Walaupun bukan semata-mata untuk agama Islam, didasarkan atas surat No. 202/Dg/El/I/67 - 15 November 1967 ).

### **Katolik**

Pasang-surutnya perkembangan agama Katholik di Indonesia tidak terlepas dari situasi politik/ pemerintah yang berlaku sejak zaman VOC sampai 17 agustus 1945. Kontak dengan pemerintahan Kolonial Belanda dan kemudian pemerintah Jepang menyebabkan perkembangan dan pengembalaan umatnya menjadi tersendat. Mulai tahun 1845 wilayah Indonesia merupakan suatu wilayah administrasi kegerejaan yang dinamakan *Vicariatus Apostolicus* Jakarta ( Batavia) dan pada tahun 1946 dibagi menjadi 16 bagian .

Pada waktu pendudukan tentara Jepang di mana para pastur, bruder, suster menjadi tawanan Jepang ( September 1943 ), wilayah kehidupan Semarang di bawah pimpinan Mgr. A Sugijopranoto S.J., Uskup Indonesia pertama untuk Semarang (diangkat 1940), masih tetap berjalan dengan bantuan tenaga beberapa pastur Indonesia, seorang pastur bangsa Jerman dan seorang pastur keturunan Indo, sehingga pendidikan gereja masih tetap berlangsung meskipun dalam keadaan darurat didirikan pula masih dapat berlangsung pendidikan bagi anak-anak yatim-piatu di bawah pimpinan suster-suster Indonesia ( Panti rapin, Boro, Ganjaran dan Semarang ).

Pada masa perang kemerdekaan tidak sedikit korban dan peranan yang diberikan oleh kaum Katolik. Dalam bidang pendidikan, telah dimulai 1911 dengan berdirinya tempat pendidikan para pastur dan sebelum perang pendidikan umum hanya terbatas pada MULO (SMP) yang berpusat di beberapa kota. Tahun 1948 mulai dengan tingkat SLTA (SMA, SPG (SGA) yang sampai sekarang berkembang dengan baik.

### Protestan

Perkembangan Agama Protestan dimulai dari masa VOC kemudian zaman badan-badan Zending dan pada akhir masa kemerdekaan. Pada masa VOC di Indonesia, perkembangan agama Protestan tidak berkembang pesat, mengingat politik VOC yang memandang bahwa usaha-usaha pendidikan Protestan banyak mengeluarkan biaya dan tidak membawa keuntungan. Hal ini terjadi karena penguasaan Gereja berada di tangan pengusaha VOC. Secara historis gereja Protestan lahir Pada 14 Januari 1620 atas Prakarsa Ds. S.J. Hulsbas. Badan Zending berkembang mulai abad di Jawa Tengah, aktifitas zending dapat dilihat daerah-daerah. Pada Tahun 1860 dilakukan oleh *Nederlandsche Gereformeerde Zending Vereeniging* (NGZV). Tahun 1869 zending Salatiga, di daerah Jawa Tengah Utara, dan tahun 1851 zending *doopszind* di daerah sekitar G. Muria. Dari pekerjaan badan zending ini kemudian terbentuk gereja-gereja wilayah di mana zending-zending bekerja. Pada umumnya gereja yang terbentuk itu terbentuk beberapa gereja yang mempunyai corak masing-masing dan tidak berhubungan satu sama lain .

Gereja-gereja zending ini berdiri sendiri dan menentukan corak masing-masing wilayahnya. Gereja Jawa Tengah berdiri sendiri sejak tahun 1931. Pada tahun 1945 berdiri Gereja Kristen Indonesia yang umatnya kebanyakan suku bangsa Cina. Pada masa kemerdekaan, baru dipikirkan suatu gerakan *ekumenika*, yakni gerakan menuju kekesatuan. Badan ini pada tahun 1946 disebut Dewan Permusyawaratan Gereja-gereja di Jawa.

Bulan Juli 1949 terjadi penggabungan antara gereja-gereja Jawa Tengah Selatan dan Tengah Utara dengan sebutan “ Gereja Krisen Jawa Tengah “ yang pada tahun 1950 dalam rapat Sinode diganti namanya menjadi Gereja Kristen Jawa. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran Dewan Gereja berpendirian harus merupakan sebuah yayasan dari bangsa sendiri diucapkan oleh J. Wilcelen, pekerja zending di Purworejo (1880—1891). Mulai 1953 DGI memutuskan untuk mendirikan badan Pengajaran Pendidikan Theologis setingkat dengan Universitas usaha ini terlaksana pada bulan September 1952.

### **Hindu Bali**

Agama ini berkembang di Jawa Tengah hanya karena terdapat penduduknya yang beragama Hindu Bali.

### **Budhisme**

Demikian pula dengan agama ini, penganutnya lebih besar jika dibanding dengan Hindu Bali. Sejak zaman kemerdekaan, perkembangannya hanya terdapat pada tempat-tempat tertentu dengan pusat ibadah di Candi Mendut dan Borobudur. Di Jawa Tengah terdapat Vihara-vihara dan Cetya Yalum di Watu Gong, Semarang, Surakarta dan lain-lain. Setelah peristiwa G30S/PKI penganut paham ini semakin berkurang, tetapi upacara *Waicak* diperingati secara nasional setiap tahun bulan Purnama (Mei) berpusat di Borobudur dan Mendut. Tokoh Buddhisme Jawa Tengah, antara lain Punika Mangunkarsa.

### **Kepercayaan Lain**

Dianut oleh golongan Cina yang masih terikat pada tradisi mereka dengan menggandakan ibadah-ibadah di klenteng-klenteng. Beberapa klenteng yang mempunyai nilai sejarah dan riwayat yang menarik

adalah Gedong Batu, Gang Lombok ( Semarang), di Jepara, Rembang Lasem.

### **Usaha Perkembangan Setelah 1965**

Selama Repelita II ( Modernisasi Desa Tahap I ) Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah telah berhasil membina perkembangan ajaran sebagai berikut

- (1) Perbaikan/Pembangunan tempat-tempat ibadah mesjid, Gereja, Hindu Buddha.
- (2) Peningkatan Pendidikan Agama.
- (3) Peningkatan pengetahuan agama ( kesadaran beragama, kesadaran bertoleransi beragama ).
- (4) Penyelenggaraan umum haji.

Dalam Repelita II/Modernisasi Desa Tahap II diarahkan kepada :

- (1) Kerukunan hidup antar umat beragama.
- (2) Keseimbangan antara pembangunan yang bersifat lahiriyah dan bathiniyah akan lebih didekati.
- (3) Fasilitas-fasilitas beribadah akan bertambah.
- (4) Kehidupan beragama yang mendukung suksesnya pembangunan akan terbina.

### **Kehidupan Intelektual**

Kehidupan intelektual di Jawa Tengah pada dasarnya akan sama dengan yang terjadi secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Pemanfaatan tenaga-tenaga terpelajar terutama dari kalangan perguruan tinggi baru terasa setelah tahun 1965. Sebelum tahun 1965, gerak lingkup mereka sangat terbatas, kalau tidak boleh dikatakan tidak ada dalam bidang pembangunan. Pusat kegiatan mereka sangat terbatas pada tembok-tembok perguruan tinggi atau lembaga keserjanaan yang ada.

Dalam Repelita II dimulai pemanfaatan ilmiah ini, di mana perguruan tinggi diikutsertakan di dalam memikirkan/merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Pada 17 November 1971 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga kegiatan-kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah lebih terkoordinasi.

Dalam rangka pengembangan kegiatan penelitian telah diadakan kerja sama antara Pemerintah daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan perguruan tinggi seperti Universitas Gajah Mada, IKIP Semarang, IAIN Sunan Kalijaga, IAIN Walisongo, Masalah yang masih dihadapi adalah belum tersedianya dana yang cukup serta tenaga-tenaga ahli penelitian yang cukup memadai. Di samping itu juga masih kurang adanya koordinasi, pengarahan dan pemanfaatan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin Mr, *Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Penerbitan Jambatan, Jakarta, 1960.
- Abdullah Taufik, *Islam di Indonesia* , Obor , Jakarta, 1974.
- Ali. R. Moh, *Pengantar Sedjarah Indonesia Untuk Tenaga Sosial* Penerbitan Ganaco NV. 1953.
- Abdulgani Ruslan, *Asia Tenggara Dalam Sinar Apinya Hari Pahlawan Indonesia*, Pradjnyaparamita, Jakarta, 1964.
- ....., *100 Hari di Surabaya*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1974.
- Adam Malik, *Riwayat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, Widjaja, Jakarta 1950.
- Auw Jeng Peng Koen. et.al, *Perang Pasifik 1941 - 1945*, Keng Po. Jakarta, 1947.
- Bebler ales, Dr, *Pantulan Zaman Bahari Indonesia*. Jembatan. Jakarta 1963.
- Bemmelen Van RW. Dr. Ir. *The Geology of Indonesia*. terj. D.w. Puspokusumo dan Drs. Al. Sukohardi " Geologi Indonesia I. "
- ....., *Geologische Kaart van Java*, toolichting bij de blanden 73 ( Semarang) en 74 ( oengaran), Dientst van den Mijn bouw in Nederlandsch Indie, 1941.

- Boerema J. Dr., *Typen van Regenval in Nederlandsch Indie*. Verhandelen Ken Mager an Metoor Obs Batavia No. 18, dikutip oleh Dr. Ir. RW. van Bemmelen dalam Geologisch Kaart van Java, toelichting bij de blanten 73 ( Semarang ) en 74 ( Oengaran ) 1941.
- Burger d.H. Prof. Dr., Prajudi Atmosudirdjo Prof. Dr. Mr, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1962.
- Bernhard-Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, Praeger, London, 1971.
- Budiman Amen, *Lahirnya Kotapraja Semarang*, Harian Suara merdeka Th. XXIII, No. 196, 1 Oktober 1976.
- Berg Van den H.J. et. al. *Dari Panggung Peristiwa sejarah Dunia*, J.B. Wolters, Jakarta, Gronigen, 1955.
- Brigmans J., *Geschiedenis Van het Onderwijs in Nederlandsch Indie* J.B. Wolters, Batavia, 1938.
- Cagparis J.G. de Prof. Dr., *Perkembangan Pengetahuan Sejarah Indonesia Lama*, Tarate, Bandung, 1961 terj. Said Raksa kusumah Twinting Jaren Studie van de oudere geschiendenis van Indonesia, Majalah Orientasi No. 46 Januari 1954.
- Casparis, J.G. de Prof. Dr., *Erlangga*, PTPG Malang, 1956
- ....., *Prasasti Indonesia I* ( Inscripties Uit den, Cailendra tijd ) Jawatan Purbakala RI, Jakarta 1960.
- ....., *Sedikit Tetang golongan-golongan di dalam masyarakat Jawa Kuno*, Malajah Amarta, No. 2 Dinas Purbakala, Jakarta, 1954.
- Carcy PBR, *The Javanese History Of Diponegoro*, The Buku Kedhing Kebo, Bijdragen tot de Taal land en volkenkunde, deel 130 - 2 c aflevering's Gravenhage - Mertinus Nij hoff, 1974.
- Darsiti Suratman Ny, *Politik Pendidikan pada akhir abad 19*, Seminar Sejarah Nasional, II, Jakarta 1970.
- Drijarkara N.Prof. Dr. S.J., *Gereja Katholik dalam Indonesia Merdeka*, selama Dua Windu.
- Fischer H. Th. Dr., *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia Seni Pustaka Seyana*, No. 16 Terj. Azas Maktuf, Pembangunan Jakarta 1960.

- Furnival J.S. *Nederlands Indie, a Study of Plural Economy*, Cambrige University Press, 1939.
- Graaf H.J. Dr. *Geschiedenis Van Indonesia*, W. Van Hoeves' Gravenhage Bandung, 1949.
- Gonggrijp G., *Schets ener Economische geschiedenis van Nederlandsch Indie*, 1949.
- Harustiati Subandrio, *Kartini Wanita Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1955.
- Hoesein Jayadiningrat P.A. *Islam di Indonesia*, Kenneth W.s Merjan (Ed) Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Hatta Muhammad Dr. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tinta Mas, Jakarta, 1969.
- ....., *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka Indonesia Adil Dan Makmur*, Angkara, Bandung 1966.
- Kusmijato R. Pang. Drs. *Nusantarakala* FSUI Jakarta.
- Krom N.J. Prof. Dr., *Zaman Hindu*, terj. Arief Effendi II P.T. Pembangunan, Jakarta 1956.
- Kempres A.J. Bernet Dr., *Candi Kalasan dan sari*, Terj. R. Soekoeni, Balai Buku Indonesia, Jakarta 1954.
- Koesnoen R.A. Mr. *Melihat-lihat Candi Prambanan dan Candi-candi sekitarnya*, sumur Bandung, 1961.
- Kertanegara Prof. Mr. *Jalan menuju ke Masyarakat Adil Makmur* (1961).
- Leur Van J. c. *Indonesia Trade and Siciety*, W. Van Heeve, Ltd. the Hague Bandung, 1955.
- Moesa Machfeeld, *Perkembangan Agama Islam Selama Dwi Windu Kemerdekaan RI*.
- Mintaredja HM. Syafaat, Mr, *Islam dan Politik Islam dan Negara, di Indonesia*.
- Margono Djojohadikusumo, *Kenang-kenangan Dari Tiga Zaman*, PT. Indira, Jakarta. 1969.
- Noerssen F.H. van, *Some Aspects of the Hindu Javarese Kraton*, Majalah Relung Pustaka, edisi Agustus 1970, yayasan pahaman Radya Pustaka, Sala.



- Niel Robert Van, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite*, W. Van. Hoeve Ltd. Bandung, 1960.
- Notosoesanto Nugroho, *Pembrontakan Tentara Peta Blitar melawan Jepang*, Pustaka Endang Jakarta, 1952.
- ....., *Naskah Proklamasi yang otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, Departemen Pertahanan keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Nasution AH, *Sejarah Perjuangan Nasional di bidang Bersenjata*. Mega Book Store, Jakarta, 1966.
- ....., *Tentara Nasional Indonesia*, jilid I, Seruling Massa, Djakarta 1966.
- Pinoto R. Drs. *Sejarah Indonesia Lama*, IKIP Malang, 1959.
- Poerbatjaraka Prof. Dr., *Riwayat Indonesia I*, Yayasan Pembangunan Jakarta, 1952.
- ....., *Kepustakaan Jawi*, Jabatan Jakarta, 1954.
- Pussem AD, *Sejarah TNI-AD 1945-1965*, Bandung, 1965
- Pringgodigdo AK, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat NV. Jakarta 1950
- Poerbawijoga J.P., *Perkembangan Gereja-gereja di Indonesia*.
- Prierson NG, *Koloniale Politiek*, Amsterdam PN van Kempers en Zoon 1877.
- ....., *Tantangan di Djawa Pada Waktu Pendudukan Djepang dari Maret sampai Desember 1942*, UGM Jogjakarta, 1952.
- Raliby Osman, *Sejarah Hari Pahlawan*, Bulan Bintang, Djakarta, 1953.
- Rencana Pembangunan Daerah/Modernisasi Desa, Tahap II, 1974/1975 - 1970/1975.
- Resi Satwa, Babad Banyumas, (Gubahan).
- Sartono Kartodirdjo Prof. Dr., *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad XIX-XX*, No. 1 Desember 1967, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM Yogyakarta.
- Setyawati Suleman, *Sejarah Indonesia (IB/C)*, BPG Bandung.
- Sihombing ODP, *Pemuda Indonesia dengan Indonesia menentang Fasisme Jepang*, Sinar Djaja, Jakarta.

- Sudiro, *Pengalaman saya sekitar 17 Agustus 1945*, Yayasan Idayu, Jakarta 1972.
- Sukirno, *Semarang*, Djapen Kobes - Semarang, 1956.
- Sendam VII/ Diponegoro, *Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*, Yayasan Pen. Diponegoro, Semarang, 1968.
- ....., *Palangan Ambarawa dan Hari Infanteri*, Yayasan Pend. Pemb. Diponegoro, Semarang, 1967
- Sosrokusumo RA., *Desentralisasi dan Hak Otonomi I*, Perpustakaan Nasional, Adji Surabaya 1951.
- ....., *The Indonesia Town, Studies in Urban Sociology*, W Van Hoeve Ltd. The Hague, 1958.
- Soebantardjo, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (1961)*
- Sadino Sostrowardjojo Drs, *Seni Budaya setelah kemerdekaan*.
- Slamet Muljono Prof. Dr, *Nasionalisme tetap Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, II 1966.
- ....., *Sriwijaya, Arnolders*, Endeh.
- ....., *Menuju Puncak Kemegahan ( Sejarah Kerajaan Majapahit)* Pn. Balai Pustaka Jakarta, 1951.
- Saputro, *Tegal Dari Masa ke Masa*, Bagian Bahasa Jawatan Kebudayaan, Kementrian P dan K Jakarta, 1959.
- Schrieke, B. *Indonesia Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung 1960.
- Soekarno Dr, *Sekitar Yogyakarta 1755- 1822*, Penerbit Mahabarata Amsterdam, 1952.
- ....., *Dua Raden Saleh*, N.v. Poesaka Aceh.
- Sejarah Jurusan, FKIS-IKIP Semarang, *Laporan Hasil Survey peninggalan Sejarah dan Kebudayaan Dalam Rangka Pengemabngan Kepariwisataaan*, Jawa tengah. 1971.
- Sub Direktorat Kepariwisataaan Kabupaten Daerah Tingkat II, *Banjarnegara*, Dieng Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.
- Soejono R.P. *Aspek-aspek Archeologi Indonesia*, No. 5 1975. Proyek Pelita pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional, Dept. P & K Jakarta, 1976.

- Sutrisno, *Sejarah Daerah Pemalang Kuno* ( Thesis ), IKIP Semarang 1972.
- Soebarjdjo, May. *Mencari Jejak Tokoh Pembrontakan Peta Blitar*, Majalah Berkala Widya Yudha, Nomor 12 th. III, 1971.
- Soekmono R., *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Trikarya, Jakarta, 1958.
- Vleke Bernard HM, *Nusantara A History of Indonesia*, Les Edition Mantea Sa Brusel, 1961.
- Wiryono Sutjipto Prof. Dr. *Bungan Rampai Sejarah Budaya Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1964.
- ....., *Sejarah Bangunan Kuno Dieng*, Kalimoso Jakarta, 1957.
- Wilopo, *zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya*, Yayasan Idayu, Jakarta 1976.
- Wongsonegoro, *Menjelang Saat-saat Proklamasi 17 Agustus di Semarang*, Penelitian Sejarah, No. 7, Tahun IV September 1963.
- Widyapranoto Drs. SH. *Benih Yang Tumbuh*, Suatu Survey mengenai Gereja-gereja Kristen Indonesia Jawa tengah, BPK, Gunung Mulia Jakarta, 1973.
- Weitjens, J. Dr. S.J. *Sejarah Gereja Katholik di Wilayah ke Uskupan Agung Semarang*, dalam bagian Dokumentasi Penerbangan Kantor Waligereja Indonesia, Sejarah Gereja, 36 Cornoldus Ende Flores 1974.





002275.3

G3.1